



HIMPUNAN
PIDATO MENTERI PERTANIAN
PADA
RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI
TAHUN 2000-2004

n Deptan



DEPARTEMEN PERTANIAN
JAKARTA, OKTOBER 2004



**HIMPUNAN
PIDATO MENTERI PERTANIAN
PADA
RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI
TAHUN 2000-2004**



**DEPARTEMEN PERTANIAN
JAKARTA, OKTOBER 2004**

DAFTAR ISI

- 1. PIDATO MENTERI PERTANIAN PADA RAKER
DENGAN KOMISI III DPR-RI TAHUN 2000-2004**
- 2. KESIMPULAN RAKER MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI TAHUN 2000-2004**



**1. PIDATO MENTERI PERTANIAN PADA RAKER
DENGAN KOMISI III DPR-RI TAHUN 2000-2004**





**BAHAN RAPAT KERJA
MENTERI PERTANIAN DAN KEHUTANAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI**

Tentang

**KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
SERTA RAPBN TAHUN 2001 BIDANG PERTANIAN**

**DEPARTEMEN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Jln. Harsono RM No. 3, Pasar Minggu**

Oktober 2000





**MENTERI PERTANIAN DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

**Saudara Ketua,
Wakil-Wakil Ketua,
Dan Para Anggota Komisi III DPR-RI**

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Pertama tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pada kesempatan ini saya datang bersama dengan para pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian yang lama, dan belum dalam lingkup Departemen Pertanian dan Kehutanan yang baru. Meskipun para anggota Dewan Komisi III DPR-RI barangkali sudah mengenal, tidak ada salahnya saya perkenalkan kembali para pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian yang hadir saat ini.

Pada kesempatan ini saya bermaksud menyampaikan rencana kerja Pemerintah khususnya dalam sektor Pertanian yang tertuang dalam Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian serta RAPBN TA 2001 bidang Pertanian. Saya berharap Rapat Kerja dengan anggota Dewan ini dapat kita pergunakan untuk berdiskusi secara komprehensif, konstruktif, dan transparan dalam upaya mengevaluasi, memperdalam, dan mempertajam Kebijakan dan Program, serta RAPBN TA 2001 ini, sehingga pelaksanaan pembangunan pertanian TA 2001 dapat berjalan dan berhasil seperti yang kita harapkan dan sesuai dengan amanat GBHN tahun 1999-2003.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita dan memberikan petunjukNya, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas negara dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.



Djakarta, 30 Oktober 2000

Bungaran Saragih, M.Ec.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur seperti yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian akan selalu mengacu kepada GBHN dan Program Pembangunan Nasional (Propenas). Pembangunan pertanian pada periode tahun 2000-2004 merupakan rangkaian yang berkesinambungan dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan berbagai penyempurnaan dan penajaman yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Era kabinet tahun 2000-2004 juga bersamaan waktu dengan perubahan lingkungan strategis, yaitu lingkungan internasional/global dan awal dari era reformasi segala bidang di dalam negeri. Dinamika lingkungan strategis internasional mencakup globalisasi dibidang ekonomi dalam bentuk kesepakatan perdagangan dan investasi, dan globalisasi dalam aspek non ekonomi seperti dibidang kelestarian lingkungan, HAM, gender dan lainnya. Pada lingkungan domestik, terjadi reformasi kegiatan pembangunan yang mengarah kepada tuntutan demokrasi, transparansi, manajemen pembangunan menuju good governance dan otonomi daerah, serta kesepakatan antara pemerintah dengan IMF dalam LOI. Perubahan perubahan tersebut telah mempengaruhi arah pembangunan nasional termasuk pembangunan nasional. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian akan selalu diselaraskan dengan tuntutan yang terjadi dari dinamika lingkungan strategis tersebut.

Pada bagian lain pembangunan pertanian kedepan juga dihadapkan kepada perannya dalam percepatan pemulihan ekonomi seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja dan perannya dalam memperbaiki indicator makro. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan pertanian diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Upaya ini penting karena keberhasilan pembangunan pertanian tidak dapat dilepaskan dari dukungan secara sinergis sector diluar pertanian.

Sesuai dengan dinamika tersebut di atas, perencanaan pembangunan pertanian akan sangat diwarnai oleh pembangunan ekonomi wilayah dalam kerangka otonomi sesuai dengan kondisi dan penguasaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sosial budaya, peluang dan tahapan pembangunan yang sudah dicapai. Uraian berikut akan membahas kinerja, prospek dan tantangan, kebijakan umum dan program pembangunan 2000-2004.





TANGGAPAN / JAWABAN PEMERINTAH

Terhadap

**HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE DAERAH
DALAM MASA RESES PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2000- 2001**

DEPARTEMEN PERTANIAN

Jln. Harsono RM No. 3, Pasar Minggu

14 Pebruari 2001



KATA PENGANTAR

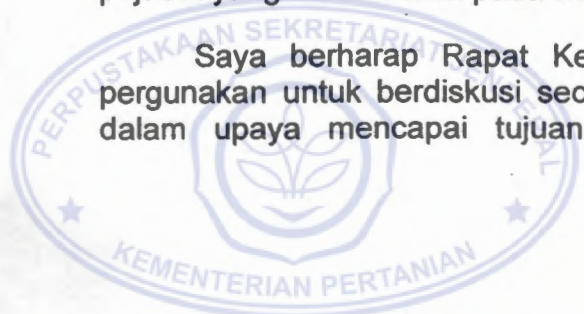
Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua,
Dan Para Anggota Komisi III DPR-RI yang saya hormati,
Hadirin yang saya muliakan,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Pertama tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pada kesempatan ini saya datang bersama dengan para pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian memenuhi undangan Anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat untuk membahas dan mencari solusi atas temuan Komisi III DPR-RI dalam kunjungan ke Propinsi Jambi dan Kalimantan Timur dalam Reses Masa Persidangan Tahun 2000-2001.

Perkenankan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang besar dan terus menerus terhadap pembangunan sektor pertanian. Kami merasa mendapat dukungan yang kuat dan masukan yang berharga dari Komisi III DPR-RI dalam melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian.

Sebelum membahas temuan anggota Komisi III DPR RI yang terhormat tentang pembangunan agribisnis di Jambi dan Kalimantan Timur pada hari ini, akan disampaikan beberapa hal. *Pertama*, pokok pemikiran tentang perlunya menjadikan Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional, yang secara lengkap disampaikan dalam buku tersendiri. Pemikiran ini sengaja disampaikan di depan forum karena kami mengharapkan dukungan kuat dari anggota Komisi III DPR RI yang terhormat. *Kedua*, pokok kebijakan dan program pembangunan agribisnis yang diperlukan baik yang ada dalam wewenang instansi di luar maupun di dalam Departemen Pertanian. *Ketiga*, kami ingin menyampaikan struktur organisasi Departemen Pertanian dan para pejabat yang baru dilantik pada tanggal 12 Pebruari yang lalu.

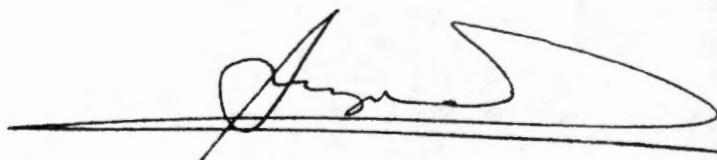
Saya berharap Rapat Kerja dengan anggota Dewan ini dapat kita pergunakan untuk berdiskusi secara komprehensif, konstruktif dan transparan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan agribisnis khususnya, dan



pembangunan nasional pada umumnya sesuai dengan amanat GBHN tahun 1999-2003.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita dan memberikan petunjukNya, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas negara dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Jakarta, 14 Februari 2001



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.



I. RINGKASAN: PEMBANGUNAN SISTEM AGRIBISNIS SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI NASIONAL

Pembangunan sistem agribisnis perlu ditempatkan bukan hanya sebagai pendekatan baru pembangunan pertanian, tetapi lebih dari itu pembangunan sistem agribisnis perlu dijadikan sebagai penggerak utama (*grand strategy*) pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan (*agribusiness-led development*). Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis sebagai berikut

Pertama, membangun perekonomian yang berdaya saing berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara agraris dan maritim merupakan amanat konstitusi sebagaimana dimuat dalam GBHN 1999-2004.

Kedua; data menunjukkan bahwa sistem agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), kesempatan kerja dan berusaha serta dalam ekspor. Pada tahun 1995, kontribusi sistem agribisnis dalam PDB mencapai sekitar 48 persen, dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 77 persen dan dalam total ekspor menyumbang 50 persen atau hampir 80 persen dari nilai ekspor non migas.

Ketiga, sistem agribisnis merupakan sektor utama perekonomian daerah baik dalam pembentukan PDRB, kesempatan kerja dan berusaha maupun dalam ekspor daerah. Selain itu, sumberdaya ekonomi daerah yang paling siap didayagunakan dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah saat ini adalah sumberdaya agribisnis.

Keempat; dengan membangun sistem agribisnis maka secara in-heren (*built-in*) akan membangun sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman bahan pangan, budaya dan kelembagaan lokal. Pembangunan sistem ketahanan pangan (*food security*) yang kokoh perlu menjadi salah satu prioritas ke depan, karena sejarah membuktikan bahwa ketahanan pangan sangat berkaitan erat dengan ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi bahkan ketahanan nasional (*national security*) secara keseluruhan.

Kelima, pembangunan sistem agribisnis berperan penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan sistem agribisnis yang berlangsung di setiap daerah, akan mampu menarik penyebaran penduduk dan segala aktivitasnya sehingga dapat mencegah tekanan penduduk yang berlebihan pada daerah tertentu. Selain itu dalam pembangunan sistem agribisnis tercakup pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan sistem agribisnis itu sendiri.



Dengan perkataan lain, dengan menhematkan pembangunan sistem agribisnis sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional (*agribusiness-led development*) maka persoalan ekonomi Indonesia saat ini seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan devisa, pemerataan, percepatan pembangunan ekonomi daerah, membangun ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup, akan dapat dipecahkan sekaligus dan berkelanjutan.

Dalam rangka membangun perekonomian Indonesia melalui pembangunan sistem agribisnis ke depan dihadapkan pada dua tantangan besar yang perlu terakomodasikan dalam pembangunan sistem agribisnis. Tantangan yang dimaksud adalah : **Pertama**, liberalisasi perdagangan internasional yang membuka persaingan yang makin ketat, memerlukan peningkatan kemampuan bersaing; **Kedua**, pelaksanaan otonomi daerah yang di dalamnya menyangkut pengurangan peranan langsung pemerintah dan desentralisasi pembangunan, dan lain-lain menjadi hal yang sangat penting diakomodasikan dalam pembangunan sistem agribisnis.

Berdasarkan tantangan tersebut dan memperhatikan kondisi saat ini, visi pembangunan sistem agribisnis sebagai penggerak utama pembangunan nasional adalah: **"Terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi"**.

Dengan visi tersebut, ke depan kita akan membangun suatu sistem atau struktur agribisnis yang mencakup industri hulu pertanian, pertanian itu sendiri, industri hilir pertanian serta jasa-jasa pendukung; yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Selain itu, juga dikembangkan usaha-usaha agribisnis yang mencakup usaha rumah tangga, usaha kelompok, usaha kecil, usaha menengah, koperasi dan korporasi yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

Berdaya saing dicirikan antara lain berorientasi pasar, meningkatkan pangsa pasar khususnya di pasar internasional dan mengandalkan produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal (*capital-driven*), pemanfaatan inovasi teknologi (*innovation-driven*) serta kreativitas sumberdaya manusia (*skill-driven*) dan bukan lagi mengandalkan kelimpahan sumberdaya alam dan tenaga kerja tak terdidik (*factor driven*).

Berkerakyatan, dicirikan antara lain dengan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasai rakyat banyak, menjadikan organisasi ekonomi dan jaringan organisasi ekonomi rakyat banyak menjadi pelaku utama pembangunan agribisnis, sehingga nilai tambah yang tercipta dinikmati secara nyata oleh rakyat banyak.



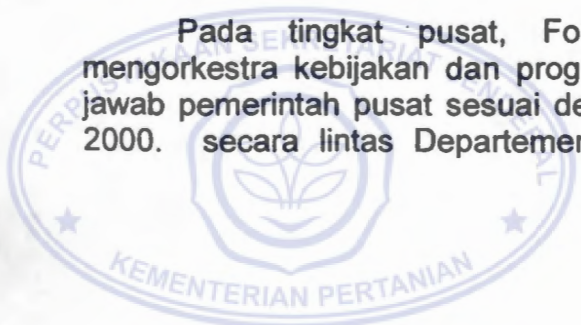
Berkelanjutan dicirikan antara lain memiliki kemampuan merespons perubahan pasar yang cepat dan efisien, berorientasi kepentingan jangka panjang, inovasi teknologi yang terus menerus, menggunakan teknologi ramah lingkungan dan mengupayakan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Terdentralisasi dicirikan antara lain berbasis pada pendayagunaan keragaman sumberdaya lokal, berkembangnya kreativitas pelaku ekonomi lokal, memungkinkan pemerintah daerah sebagai pengelola utama pembangunan agribisnis dan meningkatkannya bagian nilai tambah yang dinikmati rakyat lokal.

Untuk mewujudkan sistem dan usaha agribisnis yang demikian diperlukan serangkaian kebijaksanaan pembangunan sebagai berikut. **Pertama**, kebijakan makro ekonomi (moneter, fiskal) yang bersahabat dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis; **Kedua**, kebijakan pengembangan industri (*industry policy*) yang memberi prioritas pada pengembangan kluster industri (*industry cluster*) agribisnis. **Ketiga**, kebijakan perdagangan internasional (*trade policy*) yang netral baik secara sektoral domestik maupun antar negara dalam kerangka mewujudkan suatu *free trade* yang *fair trade*. **Keempat**, pengembangan infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik, telepon, pengairan) daerah. **Kelima**, pengembangan kelembagaan (*institutional policy*) baik lembaga keuangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan sumberdaya manusia dan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan dan organisasi ekonomi petani; **Keenam**, pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan serta **Ketujuh**, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis daerah; **Kedelapan**, ketahanan pangan; dan **Kesembilan** kebijaksanaan khusus komoditi spesifik.

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis melibatkan banyak Departemen dan Lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Selain Departemen Pertanian, Kantor Menko Perekonomian, Depkeu, BI, Departemen Kehutanan, Departemen Perikanan dan Kelautan juga melibatkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, BULOG, Meneg Koperasi dan PPK, Departemen Prasarana Wilayah dan Pemukiman, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, BPPT, LIPI, Swasta dan lain-lain. Karena itu, untuk memberhasilkan pembangunan sistem dan usaha agribisnis diperlukan **Forum Kordinasi Pangan dan Agribisnis Nasional (FKPAN)** di pusat dan **Forum Kordinasi Pangan dan Agribisnis Daerah (FKPAD)** di daerah untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program secara lintas sektoral dan antar pusat-daerah secara harmonis.

Pada tingkat pusat, Forum Kordinasi tersebut berfungsi untuk mengorkestra kebijakan dan program yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sesuai dengan UU 22 Tahun 1999 dan PP 25 Tahun 2000. secara lintas Departemen dan lintas Daerah propinsi. Pada tingkat



propinsi, Forum Kordinasi tersebut berfungsi untuk mengorkestra program pembangunan sistem dan usaha agribisnis secara lintas kabupaten/kodya, sedangkan pada level kabupaten/kodya berfungsi mengorkestra program dan mensinkronisasi secara spasial dan timing antara seluruh *stake holders* pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Forum kordinasi pangan dan agribisnis tersebut di tingkat pusat dapat memanfaatkan Sidang Kabinet atau Sidang Kordinasi Perekonomian dengan menjadikan kordinasi pembangunan sistem dan usaha agribisnis sebagai agenda reguler. Sedangkan pada level propinsi dan kabupaten/kodya dapat memanfaatkan Rapat Kordinasi Pembangunan (RAKORBANG) yang diperluas.

Apa yang akan dicapai dengan visi baru ini? **Pertama**, dengan pilihan strategi besar membangun sistem dan usaha agribisnis dengan konsep yang benar, perekonomian nasional dapat pulih dengan lebih cepat, dan dalam jangka panjang, ekonomi bertumbuh dengan laju setidaknya seperti sebelum krisis ekonomi, karena agribisnis adalah bisnis terbesar di negara kita—karena itu membangun agribisnis sebenarnya adalah membangun perekonomian bangsa. **Kedua**, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diiringi pemerataan, dengan keseimbangan sektoral yang harmonis. Ketimpangan pendapatan antar sektor dan antar daerah dapat diatasi, dan kenaikan pendapatan terjadi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) termasuk petani. Dengan pemerataan, masalah-masalah sosial sekaligus dapat dipecahkan. **Ketiga**, di masa mendatang akan terjadi penciptaan tenaga kerja (*meaningful employment*) di luar sektor pertanian (*on-farm*), terutama di sub-sistem agroindustri dan pemasaran, menyerap tenaga kerja yang dilepas dari sektor pertanian, sehingga produktivitas sektor pertanian meningkat. **Keempat**, ekspor akan meningkat dan lebih beragam, dengan komposisi secara bertahap mengarah ke produk-produk olahan yang bernilai tambah tinggi. Hal ini sekaligus akan menciptakan permintaan (*derived demand*) akan bahan baku dari pertanian, yang pada gilirannya meningkatkan produksi pertanian. **Kelima**, dengan membangun agribisnis yang berbasis pada keragaman sumberdaya hayati di setiap daerah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi dan keseimbangan gizi yang mempertimbangkan budaya dan kelembagaan lokal, secara *built-in* juga terbangun ketahanan pangan yang kokoh. Dan **keenam**, mengingat saat ini agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi setiap daerah, maka melalui percepatan modernisasi agribisnis di setiap daerah akan secara langsung memodernisasi perekonomian daerah dan dapat memecahkan sebagian besar persoalan ekonomi di daerah —hal yang relevan dengan semangat desentralisasi sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kita sangat mengharapkan visi baru ini menjadi visi nasional sehingga di masa mendatang pembangunan nasional akan digerakkan oleh agribisnis (*agribusiness led development*).





**BAHAN RAPAT KERJA
MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI**

TENTANG

- 1. RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN
(REPERTA) TAHUN 2002***
- 2. PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN
TAHUN 2002***

JAKARTA, 6 JUNI 2001



KATA PENGANTAR

Yang terhormat; Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Komisi III DPR-RI

Selamat Pagi, Salam sejahtera bagi kita semua,

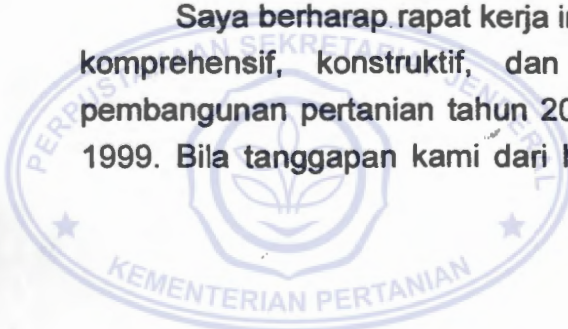
Pertama tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rakhmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini untuk kesekian kalinya kami jajaran Departemen Pertanian dapat bertemu dengan Komisi III-DRP-RI yang terhormat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saya menilai rapat kerja ini sangat penting guna mempertajam, memperdalam, dan mengevaluasi untuk memantapkan pelaksanaan pembangunan pertanian. Rapat kerja ini juga penting dalam rangka menjalin kerjasama dan saling pengertian yang selama ini telah terbina dengan sangat baik.

Pada kesempatan rapat kerja ini saya ingin menyampaikan penjelasan mengenai:

1. Arah, strategi, kebijakan, dan program pembangunan pertanian tahun 2002,
2. Perkiraan Revisi APBN Tahun 2001 dan Program Pembangunan Tahun 2001
3. Tanggapan/penjelasan Pemerintah terhadap hasil temuan yang terhormat Anggota Komisi III DPR-RI ke daerah propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Banten selama reses masa persidangan III tahun sidang 2000 - 2001.

Saya berharap rapat kerja ini dapat kita pergunakan untuk berdiskusi yang komprehensif, konstruktif, dan transparan agar program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2002 dapat dilaksanakan sesuai dengan GBHN 1999. Bila tanggapan kami dari hasil temuan di kedua daerah tersebut masih

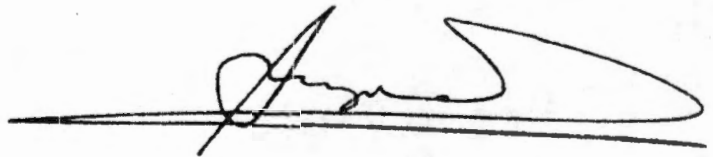


memerlukan penjelasan akan kami tambahkan pada acara diskusi lebih lanjut.

Kami mohon dukungan dari para pimpinan dan Anggota Komisi III DPR-RI atas rancangan pendahuluan RAPBN tahun 2002 yang akan saya sampaikan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita dan memberikan petunjuk-Nya, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas negara dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Jakarta, 6 Juni 2001
Menteri Pertanian,



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec



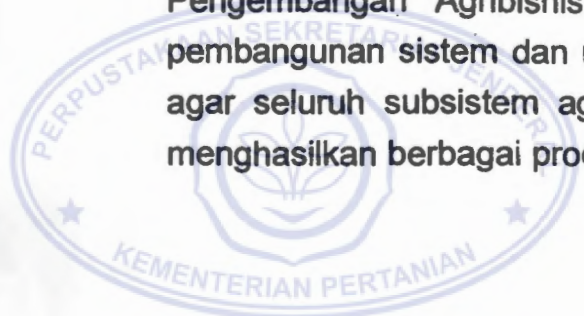
RINGKASAN

01. Sektor pertanian telah berperan besar dalam pembangunan nasional baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa melalui ekspor dan penciptaan ketahanan pangan nasional, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan yang sinergis dengan sektor lain.
02. Departemen Pertanian sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi dalam pembangunan pertanian telah menetapkan *Grand Strategy* Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional, yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program pembangunan pertanian. *Grand Strategy* ini telah dipaparkan kepada Anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Kerja yang lalu dan mendapat respon yang positif. Poko-pokok pemikiran dalam *Grand Strategy* tersebut dapat dirangkum dalam empat hal penting, yaitu:
 - 1) Pembangunan Pertanian harus menjadi inti pembangunan nasional, karena alasan: (a) amanat konstitusi yang dicantumkan dalam GBHN 1999-2004, (b) potensi dan kekayaan nasional sebagai negara pertanian dan maritim perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, (c) keterlibatan sebagian besar masyarakat dalam bidang ini, dan (d) dampak pembangunan pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya yang terkait sangat besar terhadap porsi pendapatan nasional, pertumbuhan, pemerataan dan pengentasan kemiskinan.
 - 2) Pembangunan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis, yaitu keseluruhan (totalitas) kinerja keseluruhan subsistem usaha yang saling terkait, saling tergantung dan saling berpengaruh dengan pertanian mulai sektor hulu, usahatani, dan hilir serta jasa penunjang. Semua subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan, serasi, dan seimbang.

- 3) Kegiatan pembangunan agribisnis dipengaruhi oleh kebijakan yang berada di luar kewenangan Departemen Pertanian sehingga diperlukan upaya koordinasi yang sangat baik antar instansi terkait.
- 4) Pengembangan agribisnis harus dalam upaya meningkatkan daya saing, membangun ekonomi kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi dalam kerangka penguatan ekonomi daerah.

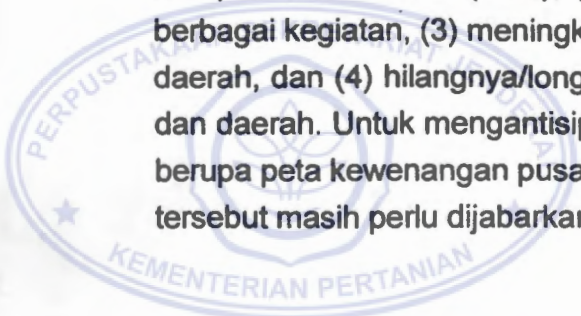
03. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, sesuai dengan agenda Rapat Kerja hari ini, Departemen Pertanian akan menyampaikan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) TA 2002 yang kami susun sebagai penjabaran dari *Grand Strategy* yang telah kami sampaikan pada Rapat Kerja sebelumnya. Uraian lebih rinci dari Repeta ini akan berbentuk kegiatan operasional yang akan disusun oleh masing-masing Eselon I, disesuaikan dengan rencana yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota. Departemen Pertanian, sesuai dengan tingkat kewenangannya terbatas pada aspek pengaturan, penetapan standar dan norma serta yang terkait dengan program nasional. Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertanian jangka panjang yaitu sektor agribisnis sebagai andalan pembangunan nasional.

04. Pada periode sampai dengan TA 2004, program besar pembangunan pertanian dikelompokkan menjadi dua, yaitu Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program Pengembangan Agribisnis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis, yang mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan

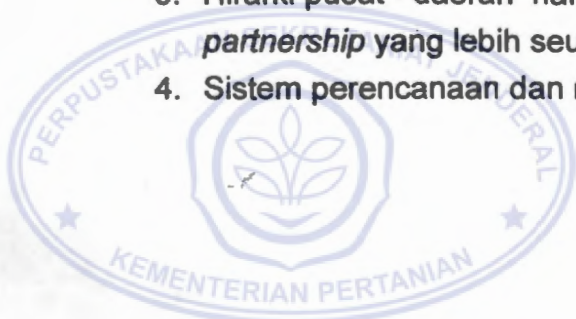


daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

05. Sedangkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik ditingkat nasional maupun di tingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
06. Dengan diterapkannya OTDA secara otomatis manajemen pembangunan pertanian harus ikut berubah. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan yang terjadi antara lain: 1) hilangnya unit organisasi Pusat yang ada di daerah seperti Kanwil dan unit-unit pelaksana teknis (UPT), 2) hilangnya peranan pemerintah pusat dalam berbagai kegiatan, 3) meningkatnya peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah, dan 4) hilangnya/longgarnya hubungan vertikal (hirarki) antara pusat dan daerah. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah disusun pemilahan tugas berupa peta kewenangan pusat dan daerah. Namun konsep peta kewenangan tersebut masih perlu dijabarkan dalam bentuk yang operasional.
07. Sebelum kami menyampaikan penjelasan program dalam Repeta 2002, izinkan kami memberikan *highlight* tentang pembangunan pertanian pada TA 2000 dan 2001. Dengan diterapkannya OTDA secara otomatis manajemen pembangunan pertanian harus ikut berubah. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan yang terjadi antara lain: 1) hilangnya unit organisasi Pusat yang ada di daerah seperti Kanwil dan unit-unit pelaksana teknis (UPT), (2) hilangnya peranan pemerintah pusat dalam berbagai kegiatan, (3) meningkatnya peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah, dan (4) hilangnya/longgarnya hubungan vertikal (hirarki) antara pusat dan daerah. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah disusun pemilahan tugas berupa peta kewenangan pusat dan daerah. Namun konsep peta kewenangan tersebut masih perlu dijabarkan dalam bentuk yang operasional.



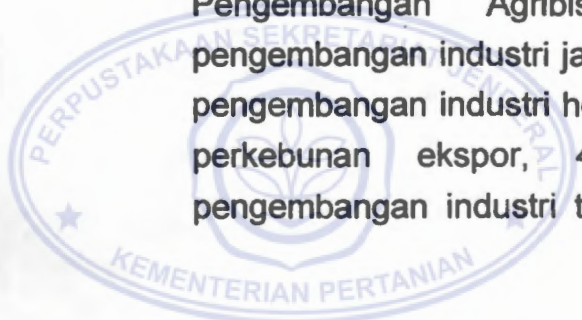
08. Masalah yang umum dihadapi pada pelaksanaan program TA 2001 dalam rangka desentralisasi adalah baik daerah maupun pusat belum siap melaksanakan program karena berbagai kendala antara lain ketidaksiapan operasionalisasi peraturan, SDM, perencanaan, anggaran, jaringan kerja dan komunikasi. Pada era desentralisasi, pusat dan daerah harus mengembangkan hubungan kemitraan (*partnership*) dalam setiap kegiatan sehingga terjadi hubungan yang saling mengisi, dan keduanya diharapkan untuk lebih proaktif.
09. Hal penting yang segera dibutuhkan adalah penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) dan perencanaan, yang selama ini lebih merupakan domain pusat. Sejauh ini, sistem monev belum berfungsi dengan baik dan hasilnya belum terkompilasi dengan baik. Program atau proyek yang dilaksanakan di daerah secara rutin menyiapkan dan menyampaikan laporan tertulis baik kegiatan fisik, keuangan maupun manfaat proyek. Dalam era OTDA, sistem perencanaan dan monev yang ada perlu disempurnakan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu, sistem perencanaan dan monev yang sekarang ada perlu direvisi dan disempurnakan agar dapat mengakomodir keragaman kondisi dan keinginan masing-masing daerah. Dalam sistem monev tersebut, pembagian tugas dan wewenang harus jelas untuk menghindari kegiatan yang tumpang tindih.
10. Dari analisis permasalahan diatas terlihat bahwa manajemen pembangunan pertanian perlu dirumuskan agar lebih efektif sesuai dengan tujuan diterapkannya otonomi daerah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan segera adalah :
1. Peta kewenangan yang sudah ada perlu disusun agar dapat operasional sesuai kondisi daerah
 2. Dalam masa transisi OTDA, daerah yang belum siap perlu mendapat prioritas perhatian
 3. Hirarki pusat - daerah harus dirubah menjadi hubungan mitra kerja atau *partnership* yang lebih sesuai dengan iklim desentralisasi.
 4. Sistem perencanaan dan monev perlu segera disempurnakan



11. Khususnya dalam hal anggaran pembangunan pertanian, pada dua tahun terakhir ini dapat diidentifikasi tiga masalah pokok yakni: 1) keterlambatan anggaran, 2) defisit anggaran, dan 3) ketidak pastian anggaran. Keterlambatan anggaran menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Seringkali, walaupun terjadi keterlambatan anggaran, waktu pelaksanaan tidak dapat diundur. Untuk kegiatan yang tergantung musim (hujan dan kemarau) keterlambatan dana ini dapat berdampak gagalnya pelaksanaan fisik. Kevakuman anggaran dalam 4-5 bulan pertama pada TA 2000 dan 2001 telah berdampak pada penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yang pada gilirannya akan berdampak pada keseluruhan kinerja pembangunan. Disamping itu, ketidak pastian anggaran (revisi APBN) menyebabkan adanya kekhawatiran dalam membuat kontrak kerja dengan pihak luar (konsultan, kontraktor atau LSM).
12. Kepercayaan dunia Internasional sangat penting artinya bagi pembangunan pertanian. Pada tahun ini, proporsi dana bantuan BLN dalam pembangunan pertanian mencapai 30% dari total anggaran 1,5 triliun. Adanya penurunan tingkat kepercayaan negara donor terhadap kinerja pemerintah Indonesia dapat menyebabkan kelangkaan dana pembangunan. Dengan demikian perlu upaya upaya yang serius mengembalikan tingkat kepercayaan lembaga donor demi kelangsungan pembangunan pertanian dimasa depan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1) memperbaiki manajemen proyek-proyek BLN, 2) meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana pembangunan, dan 3) transparansi dalam pengelolaan.
13. Seperti diketahui, pada TA 2000, atas prakarsa Anggota Dewan yang terhormat, telah dilaksanakan proyek Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) dengan menggunakan dana dari Mata Anggaran 16 Departemen Keuangan. Walaupun ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaan di lapang, model PKP merupakan suatu terobosan yang mendapat nilai positif dari aparat maupun petani. Terobosan terpenting

dalam PKP adalah: 1) bantuan (kredit) langsung dimasukkan kedalam rekening kelompok tani, tanpa birokrasi yang panjang dan rumit, 2) bantuan (kredit) yang diberikan dikelola secara mandiri oleh petani dengan perencanaan kerja yang diatur oleh menejer dalam kelompok. Proyek ini pada tahap awal dilaksanakan di 13 Propinsi, mencakup 167 Kabupten, 1.331 Kecamatan, 4.566 desa, melibatkan 10,998 Kelompok Tani dan menjangkau lebih dari 1,1 juta petani, dan mempekerjakan sekitar 4,534 menejer.

14. Agar program PKP dapat lebih berhasil maka: 1) perlu pembenahan kelompok tani secara mendasar, 2) perlu merubah sikap mental petani, bahwa PKP bukan dana hibah, 3) mendidik petani yang potensial menjadi menejer usahatani yang profesional, dan 4) menetapkan dan menjalankan sangsi hukum bagi petani yang tidak mengembalikan kredit.
15. Manajemen pembangunan pertanian pada TA 2001 telah diupayakan untuk menyesuaikan dengan peta kewenangan pusat dan daerah serta perencanaan yang bottom-up. Upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena masih adanya kesulitan komunikasi dan kesiapan baik di tingkat daerah maupun pusat. Pada TA 2002 perencanaan kegiatan dan anggaran akan lebih ditingkatkan dalam upaya mendorong dan memfasilitasi pembangunan daerah. Koordinasi antar unit di pusat dan antara pusat dengan daerah diwujudkan dalam pengembangan jaringan kerja, sosialisasi program, forum komunikasi, penyediaan informasi, kegiatan asistensi dan lain-lain.
16. Dalam pelaksanaan Program TA 2002, disusun sejumlah Sub-Program agar kegiatan di lapangan menjadi lebih fokus. Program Pengembangan Agribisnis diurai menjadi sub-program: 1) pengembangan industri jagung, kedelai, kacang tanah dan ubikayu, 2) pengembangan industri hortikultura, 3) pengembangan industri komoditi perkebunan ekspor, 4) pengembangan industri unggas, 5) pengembangan industri ternak sapi, kerbau, domba dan kambing, 6)

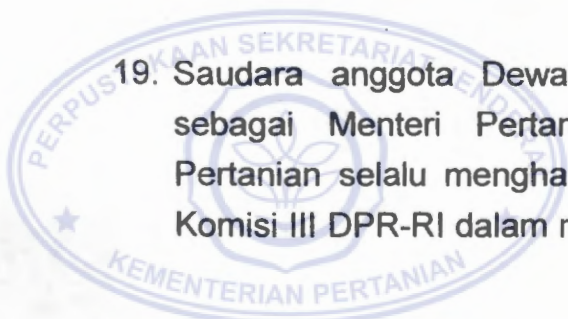


proteksi sumberdaya hayati, dan 7) pengembangan kelembagaan agribisnis

17. Program Peningkatan Ketahanan Pangan diurai menjadi sub-program: 1) peningkatan produksi padi dan sumber pangan lokal, 2) perbaikan panen dan pasca panen, 3) stabilisasi produksi dan penanggulangan kerawanan pangan, 4) rasionalisasi usahatani padi, 5) pengembangan teknologi budidaya pangan strategis, 6) koordinasi kebijakan dalam penciptaan ketahanan pangan.

18. Selanjutnya, sesuai dengan revisi anggaran yang telah diinformasikan oleh Departemen Keuangan dan Bappenas, Departemen Pertanian mengusulkan agar anggaran Departemen Pertanian tidak dikurangi. Walaupun demikian, apabila anggaran sektor pertanian tetap akan direvisi, maka *Pertama*, akan ditempuh penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan proyek yang bukan prioritas tinggi. Departemen Pertanian telah memperkirakan sebesar 26,91 % (Rp. 156,02 milyar), proyek-proyek di lingkup Pusat dapat dijadwalkan. *Kedua*, apabila kebijakan penjadwalan ini juga tidak memungkinkan, Departemen Pertanian setuju untuk mendukung pengurangan defisit anggaran Pemerintah dengan melakukan revisi APBN melalui pemotongan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang skala prioritasnya lebih rendah, terutama pada pos-pos pengeluaran rapat-rapat, seminar, kajian/studi non prioritas tinggi, pembangunan kantor non pelayanan masyarakat dan kegiatan-kegiatan sejenis. Kedua opsi tersebut sudah dibicarakan dan disepakati secara interen di Departemen Pertanian.

19. Saudara anggota Dewan yang terhormat, seperti biasanya, kami sebagai Menteri Pertanian beserta seluruh jajaran Departemen Pertanian selalu mengharapkan kerjasama dan dukungan penuh dari Komisi III DPR-RI dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya



dalam pembangunan pertanian. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Anggota Dewan yang terhormat untuk Rapat Kerja hari ini. Kami selalu mengharapkan masukan yang konstruktif bagi keberhasilan pembangunan pertanian di negara kita yang tercinta ini. Terima kasih.





**BAHAN RAPAT KERJA
MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR – RI**

TENTANG

***Rencana APBN Tahun 2002
Bidang Pertanian***

JAKARTA, 2 Juli 2001





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Yang Terhormat, Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua
dan Anggota Komisi III DPR-RI
Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanNya kita dapat hadir pada Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat Wal'afiat. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh anggota Dewan Komisi III yang terhormat, mengingat pertemuan yang seharusnya berlangsung tanggal 26 Juni 2001 terpaksa diundur hari ini disebabkan tugas saya mendampingi Presiden ke Australia dan Selandia Baru.

Pada kesempatan Rapat Kerja hari ini perkenalkanlah saya menyampaikan **Program Pembangunan Pertanian TA. 2002 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**, sebelum nanti mendengarkan masukan Anggota Dewan sebagai lanjutan Rapat Kerja yang lalu.

Dengan tidak meragukan lagi dukungan Anggota Dewan terhadap upaya pemecahan masalah-masalah pembangunan pertanian, kembali pada Rapat Kerja hari ini saya berharap untuk memperoleh masukan Anggota Dewan, sehingga saya bersama jajaran Departemen Pertanian dapat bekerja lebih baik lagi untuk melaksanakan program yang diamanatkan Rakyat.

Semoga apa yang dihasilkan pada Rapat Kerja hari ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan seluruh rakyat. Terima Kasih.

Jakarta, 2 Juli 2001

Menteri Pertanian

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih M.Ec



RINGKASAN

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,

01. Sesuai dengan agenda Rapat Kerja hari ini perkenankan saya akan menyampaikan Rencana Pembangunan Pertanian TA. 2002 dan Penyesuaian APBN TA. 2001 sebagai kelanjutan Rapat Kerja tanggal 6 Juni 2001 yang lalu. Disadari bahwa program dan proyek pembangunan pertanian TA. 2001 diharapkan pada transisi perubahan manajemen pembangunan dengan adanya demokratisasi, desentralisasi dan penerapan good governance. Pada TA. 2002 akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan paradigma pembangunan. Masukan dari para Anggota Dewan sangat saya harapkan guna lebih memantapkan program, sehingga mampu menjawab permasalahan secara nyata yang dihadapi para petani kita

02. Dalam pembangunan Pertanian Departemen Pertanian telah menetapkan *Grand Strategy* Pembangunan Pertanian yaitu Sistem Agribisnis sebagai Penggerak Ekonomi Nasional, yang kemudian dijabarkan dalam program-program pembangunan pertanian TA. 2001-2004. Kebijakan ini telah saya paparkan pada Rapat Kerja tanggal 6 Juni 2001 yang lalu. Pada prinsipnya pembangunan pertanian dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis yang mencakup totalitas sub sistem usaha yang saling terkait, mulai dari sub sistem hulu, usahatani, hilir dan jasa penunjang.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya muliyakan,

03. Program Pembangunan Pertanian TA. 2002 sesuai dengan Propenas tahun 2001-2004 meliputi :

- 1). Program Pengembangan Agribisnis dan
- 2). Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Program Pengembangan Agribisnis dimaksudkan untuk membangun sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis sehingga seluruh sub sistem agribisnis dapat secara produktif dan efisien menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Program Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat.

04. Agar pelaksanaan program pembangunan pertanian lebih efektif, terfokus dan memecahkan isu-isu pokok yang menjadi tuntutan masyarakat maka pada TA. 2002 program tersebut dijabarkan menjadi sub-sub program :

- 1). Program Pengembangan Agribisnis diuraikan menjadi sub program sebagai berikut :
 - a). Pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan
 - b). Pengembangan agribisnis berbasis tanaman hortikultura
 - c). Pengembangan agribisnis berbasis perkebunan
 - d). Pengembangan agribisnis berbasis peternakan
 - e). Proteksi Sumberdaya Hayati
 - f). Pengembangan SDM dan Kelembagaan Agribisnis
 - g). Pengembangan Teknologi Strategis dan Wilayah
 - h). Pengembangan Sistem Informasi dan Jaringan Kerja Agribisnis
 - i). Pengembangan Usaha Agribisnis berwawasan lingkungan

- 2). Program Peningkatan Ketahanan Pangan, mencakup 3 sub program, yaitu :
 - a). Peningkatan Ketersediaan Pangan
 - b). Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan
 - c). Stabilisasi Produksi dan Penanggulangan Kerawanan Pangan dan Gizi

- 3) Selain kedua Program Utama tersebut juga diselenggarakan Program Penunjang yang meliputi :
 - a). Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum serta Pelestarian Lingkungan Hidup
 - b). Keunggulan Inovasi serta Tehnologi
 - c). Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik.

05. Searah semangat desentralisasi maka manajemen pembangunan pertanian harus pula disesuaikan, yakni semakin berkurangnya kewenangan Pemerintah Pusat dan meningkatnya peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Kebijakan Departemen Pertanian guna mengantisipasi desentralisasi ini adalah memberdayakan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di bidang pembangunan pertanian serta mengembangkan hubungan kemitraan Pusat – Daerah. Langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain :

- a). Sosialisasi *Grand Strategy* dan program pembangunan pertanian.
- b). Sosialisasi dan asistensi OTDA di bidang Pertanian.
- c). Asistensi perencanaan program pembangunan pertanian dengan metode partisipatif.

06. Dalam rangka penerapan kewenangan dekonsentrasi, selaras dengan kewenangan desentralisasi maka sistem perencanaan dan monitoring evaluasi disempurnakan. Program dan proyek pembangunan diletakkan pada upaya memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisir. Berbeda dengan TA 2001 maka proyek-proyek pembangunan pertanian TA 2002 akan dialokasikan langsung di tingkat Kabupaten/kota. Di tingkat Propinsi hanya akan dialokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan, koordinasi antar Kabupaten/Propinsi, pengembangan sistem informasi, pelayanan dan kerjasama regional, serta asistensi pembangunan pertanian di Kabupaten/Kota. Walaupun demikian struktur keproyekan harus

menjamin adanya laporan, informasi, monitoring, dan kontrol yang efektif dari Kabupaten, ke Propinsi dan Ke Pusat.

07. Untuk meningkatkan daya guna bantuan pemerintah melalui proyek-proyek pembangunan, maka model pemberdayaan petani melalui pola bantuan langsung akan menjadi model utama komponen proyek TA 2002. Pola yang dikembangkan atas prakarsa anggota Dewan Komisi III ternyata mendapat respon yang antusias dari kelompok tani dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Aspek positif yang secara nyata dapat saya amati adalah meningkatnya hubungan Departemen Pertanian dengan Pemda Kabupaten/Kota/Bupati; menurunnya tingkat kebocoran anggaran sebagai akibat pola bantuan model langsung pada kelompok tani, berkembangnya usaha kelompok, serta berkurangnya beban tugas-tugas aparat pertanian dalam keproyekan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

08. Walaupun kondisi ekonomi kita masih belum terlepas dari situasi krisis, namun upaya meningkatkan kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian tidak harus surut akibat keterbatasan anggaran Pemerintah. Sektor pertanian justru telah menunjukkan sumbangan pertumbuhan ekonomi di saat krisis sekarang ini. Pembangunan sektor pertanian terkait langsung dengan pembangunan pedesaan, pemerataan, pengembangan ekonomi skala rumah tangga, skala kecil, skala menengah, serta pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu kegiatan ekonomi sektor pertanian perlu terus kita dorong. Dukungan anggota Dewan yang terhormat pada sektor ini telah menunjukkan komitmen tersebut. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

09. Berdasarkan program-program yang telah dirancang dan telah saya laporkan pada anggota Dewan pada Rapat Kerja Tanggal 6 Juni yang lalu, maka

Departemen Pertanian mengusulkan Rancangan APBN TA 2002 sebagai berikut:

- 1). Anggaran Pembangunan Pertanian sebesar Rp. 2,2 Trilyun atau naik sebesar 120 % dibandingkan pagu anggaran TA 2001. Kenaikan kebutuhan anggaran ini sebagai konsekuensi komitmen Pemerintah menempatkan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi nasional, juga cakupan wilayah pengembangan yang lebih luas.
- 2). Anggaran Rutin departemen Pertanian sebesar Rp. 381,641 milyar atau meningkat sebesar 43,5 % dibandingkan pagu pada TA 2001. Kenaikan ini terbesar akibat kenaikan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan jasa listrik dan telepon yang tahun lalu selalu minus, serta penyediaan sarana kerja akibat perubahan organisasi Departemen Pertanian.
- 3). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp.13,829 milyar. Upaya-upaya meningkatkan penerimaan ini terus akan kami tingkatkan, namun kita perlu berhati-hati agar tidak membebankan dan mengganggu kegairahan petani dan pelaku usaha agribisnis dalam mengembangkan usahanya.

Saudara Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

10. Berkenaan dengan Rencana Penyesuaian APBN TA 2001 maka kami telah menyampaikan usulan Departemen Pertanian sebagai tindak lanjut Rapat Kerja pada tanggal 6 Juni 2001 yang lalu. Kebijakan penyesuaian APBN diharapkan tidak berdampak pada kegiatan pembangunan pertanian dari sektor pendukungnya. Untuk itu kami mengajukan 3 (Tiga) alternatif sebagai berikut :



- 1). Pertama, diusulkan anggaran sektor pertanian tidak dikurangi karena dalam situasi krisis sektor ini justru diharapkan mampu tetap tumbuh memperkuat perekonomian.
- 2). Kedua, diusulkan dilakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan proyek Pusat yang skala prioritasnya lebih rendah pada triwulan ke IV dengan nilai yang dijadwalkan sebesar Rp. 156,023 Milyar (26,9 % dari pagu proyek-proyek Pusat). Untuk proyek-proyek Daerah diusulkan tidak dilakukan penjadwalan.
- 3). Ketiga, apabila akan dilakukan penyesuaian melalui pengurangan anggaran diusulkan pada kegiatan proyek-proyek Pusat yang skala prioritasnya relatif rendah dengan nilai yang dikurangi sebesar Rp. 82,693 Milyar (12,02 % dari pagu proyek-proyek di Pusat). Proyek-proyek di Daerah diusulkan untuk tetap tidak dikurangi.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Komisi III yang terhormat,

Pada tanggal 4 Juli 2001 yang akan datang akan diselenggarakan rapat Kerja dengan Menko Ekuin dan Menteri terkait dalam rangka membahas strategi pembangunan ekonomi yang menyentuh langsung terhadap perekonomian rakyat, khususnya petani. Atas dukungan Anggota Dewan Komisi III dan dapat terselenggara pertemuan tersebut, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan. Komitmen Saudara-saudara Anggota Dewan menuntut kami bekerja lebih keras dan lebih baik lagi.

Kami selalu mengharapkan masukan yang konstruktif sehingga kebijakan dan program yang akan kami laksanakan ke depan mampu menjawab tuntutan masyarakat dan berhasil mencapai sasaran yang diamanatkan.

Atas perhatian anggota Dewan yang terhormat disampaikan terima kasih.





**BAHAN RAPAT KERJA
MENTERI PERTANIAN DENGAN KOMISI III DPR-RI**



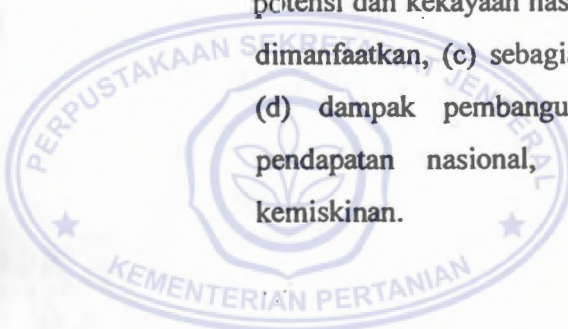
JAKARTA, 4 JULI 2001

BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN DENGAN KOMISI III DPR-RI

Tanggal 4 Juli 2001

LATAR BELAKANG

01. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama Departemen Pertanian mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan yang terhormat. Hal ini dikarenakan setelah mendengar seluruh paparan yang disampaikan kami merasa sangat berbahagia, ternyata apa yang dipikirkan oleh DPR sebagai wakil rakyat dalam upaya membangun pertanian sangat sejalan dengan kebijakan dan program Departemen Pertanian.
02. Sektor pertanian telah berperan besar dalam pembangunan nasional baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa melalui ekspor dan penciptaan ketahanan pangan nasional, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan yang sinergis dengan sektor lain.
03. Departemen Pertanian sebagai penanggung jawab dan simpul koordinasi dalam pembangunan pertanian telah menetapkan *grand strategy* Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional. Pokok-pokok pemikiran dalam *grand strategy* tersebut dirangkum dalam empat hal penting, yaitu :
 1. Pembangunan pertanian harus menjadi inti pembangunan nasional, karena (a) amanat konstitusi yang dicantumkan dalam GBHN 1999-2004, (b) potensi dan kekayaan nasional sebagai negara pertanian dan maritim perlu dimanfaatkan, (c) sebagian besar masyarakat terlibat kegiatan pertanian, (d) dampak pembangunan pertanian sangat besar terhadap porsi pendapatan nasional, pertumbuhan, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.

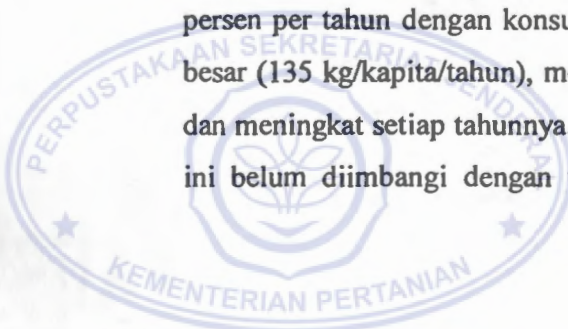


2. Pembangunan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang mencakup lima subsistem, yaitu sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usahatani, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran , dan sub sistem jasa penunjang.
 3. Pembangunan agribisnis harus terkait dengan kebijakan yang berada di luar kewenangan Departemen Pertanian, sehingga diperlukan upaya koordinasi yang sangat baik antar instansi terkait.
 4. Pembangunan agribisnis harus diusahakan untuk meningkatkan daya saing, membangun ekonomi kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi dalam kerangka penguatan ekonomi daerah.
04. Pada periode sampai dengan TA 2004, program besar pembangunan pertanian dikelompokkan menjadi dua, yaitu Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
05. Program Pengembangan Agribisnis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis, yang mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.
06. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.



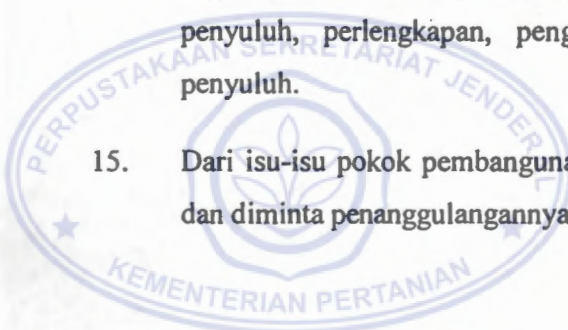
ISU-ISU POKOK PEMBANGUNAN PERTANIAN

07. Dengan diratifikasinya beberapa kesepakatan internasional (GATT/WTO) dan regional (APEC, AFTA, MEE, NAFTA) serta blok-blok lainnya, maka pasar di dalam negeri terintegrasi kuat dengan pasar regional/internasional dan memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi serta menghapus segala proteksi dan subsidi. Kondisi tersebut memaksa produk pertanian beserta olahan dari Indonesia harus mampu bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan dari negara lain.
08. Sejalan dengan penerapan otonomi daerah maka wewenang pembangunan berada di daerah otonom kabupaten/kota. Dengan demikian dalam pembangunan agribisnis kedepan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan pembangunan agribisnis dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah yang sebelumnya berperan sebagai perencana dan pelaksana harus berubah menjadi sebagai fasilitator, stimulator, dan promotor pembangunan agribisnis dan harus memampukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan agribisnis.
09. Pembangunan agribisnis dihadapkan pada terjadinya penurunan sumberdaya pertanian terutama sumberdaya lahan dan air, baik kuantitas maupun kualitasnya. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan begitu cepat, yaitu rata-rata 102.780 hektar pertahun. Sejalan dengan proses alih fungsi lahan juga terjadi fragmentasi lahan yang serius, terutama terjadi di Jawa yang mempunyai implikasi serius dalam produksi komoditas pangan terutama beras. Dalam kurun waktu 10 tahun (1983-1993) rata-rata penguasaan lahan menyempit dari 0,58 Ha menjadi 0,41 Ha di Jawa, dan dari 1,58 Ha menjadi 0,83 Ha di luar Jawa.
10. Jumlah penduduk yang besar (sekitar 207 juta) dan terus tumbuh sekitar 1,6 persen per tahun dengan konsumsi pangan terkonsentrasi pada beras yang cukup besar (135 kg/kapita/tahun), menyebabkan kebutuhan beras nasional sangat besar dan meningkat setiap tahunnya. Di lain pihak permintaan beras yang cukup tinggi ini belum diimbangi dengan upaya peningkatan produksi yang memadai serta



belum berkembangnya diversifikasi pangan di masyarakat. Kondisi demikian merupakan ancaman terhadap ketahanan pangan nasional.

11. Krisis ekonomi berkepanjangan yang dimulai pada tahun 1997 yang berlanjut pada krisis multi dimensi telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang cukup memprihatinkan. Krisis juga telah berdampak pada peningkatan jumlah orang miskin di Indonesia yang mencapai 49,5 juta jiwa pada tahun 1998.
12. Sebagian besar sumberdaya manusia yang mendukung sektor pertanian masih rendah kualitasnya. Sebagian besar petani mempunyai tingkat pendidikan formal yang rendah, yaitu tidak menyelesaikan pendidikan dasar sehingga kemampuannya dalam menyerap informasi dan mengadopsi teknologi relatif terbatas. Berdasarkan tingkat pendidikan, 48,4 persen tenaga kerja di sektor pertanian tidak pernah sekolah atau tidak tamat sekolah dasar, 40,5 persen menamatkan sekolah dasar, dan hanya 11,1 persen menamatkan sekolah menengah ke atas.
13. Kelembagaan petani pada umumnya lemah, tidak mampu berperan dalam meningkatkan posisi tawar petani. Kelompok usaha, koperasi, asosiasi, maupun bentuk organisasi lain seperti HKTI dan KTNA belum mempunyai kekuatan untuk melindungi petani.
14. Perkembangan sistem pelayanan bagi petani dan usaha agribisnis seperti pelayanan penyediaan modal usaha (kredit) dan penyuluhan pertanian cenderung stagnan. Masyarakat pedesaan tidak dapat mengakses modal yang disediakan lembaga keuangan formal, tetapi di lain pihak penyedia jasa keuangan informal dengan bunga cukup tinggi tetap tumbuh subur. Sedangkan dari pelayanan penyuluhan mengalami degradasi yang sangat besar, baik dari segi jumlah penyuluh, perlengkapan, pengetahuan, materi penyuluhan, dan manajemen penyuluh.
15. Dari isu-isu pokok pembangunan pertanian tersebut sebagian telah diidentifikasi dan diminta penanggulangannya oleh DPR.

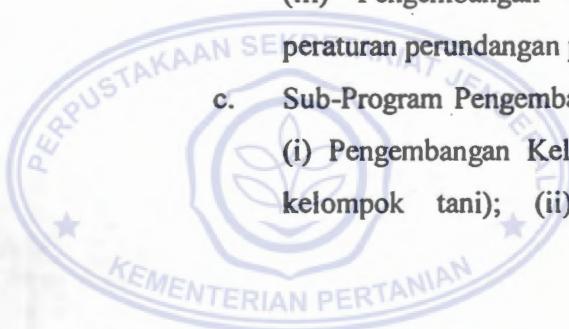


PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

16. Berdasarkan isu-isu pokok yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka program utama yang akan dijalankan Departemen Pertanian terdiri dari dua program utama, yaitu *Program Pengembangan Agribisnis* dan *Program Peningkatan Ketahanan Pangan*.
17. Program Pengembangan Agribisnis diurai menjadi Sub-Program : (1) Pengembangan Industri Palawija, (2) Pengembangan Industri Hortikultura, (3) Pengembangan Industri Perkebunan, (4) Pengembangan Industri Unggas, (5) Pengembangan Industri Ternak Ruminansia, (6) Proteksi Sumberdaya Hayati, (7) Pengembangan Kelembagaan Agribisnis, (8) Pengembangan Teknologi Strategis, (9) Pengembangan Usaha Agribisnis Berwawasan Lingkungan, (10) Sistem Informasi dan Jaringan Kerja Agribisnis.

Fokus kegiatan pada masing-masing Sub-Program adalah sebagai berikut :

- a. Sub-Program Pengembangan Industri Palawija (Kedele, Kacang Tanah, dan Ubi Kayu); Hortikultura (Sayuran, Buah, Tanaman Hias, dan Obat); Perkebunan (Tanaman Tahunan dan Tanaman Setahun); Industri Unggas (Ayam Buras dan Itik); serta Ruminansia (Sapi, Domba, Kambing, dan Kerbau) kegiatannya adalah (i) Pengembangan sarana; (ii) Pengembangan industri benih/bibit; (iii) Penerapan teknologi budidaya spesifik lokasi; (iv) Pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil; dan (v) Pengembangan kelembagaan pemasaran.
- b. Sub-Program Proteksi Sumberdaya Hayati kegiatannya adalah : (i) Pengembangan Sarana; (ii) Pembangunan fasilitas laboratorium penguji; (iii) Pengembangan Sumberdaya Manusia; dan (iv) Pengembangan peraturan perundangan pendukung.
- c. Sub-Program Pengembangan Kelembagaan Agribisnis kegiatannya adalah : (i) Pengembangan Kelembagaan Usaha (pemasaran, kemitraan, koperasi, kelompok tani); (ii) Pengembangan organisasi petani; dan (iii)

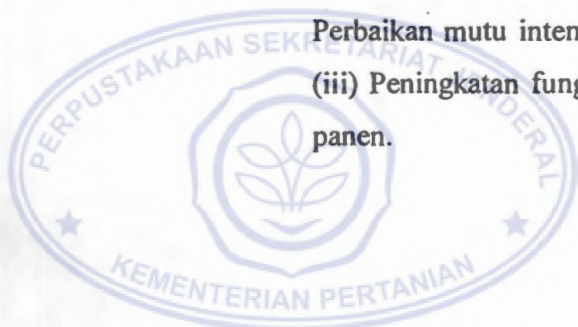


Pengembangan pelayanan (teknologi, finansial, informasi pasar, penyuluhan, pengembangan sumberdaya manusia).

- d. Sub-Program Pengembangan Teknologi strategis kegiatannya adalah : (i) Pengembangan bio-teknologi (rekayasa genetik); (ii) Identifikasi dini serangan penyakit; (iii) Pengembangan teknologi budidaya spesifik lokasi; (iv) Pengembangan dan diversifikasi produk; dan (v) Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan .
 - e. Sub-Program Pengembangan Agribisnis Berwawasan Lingkungan (Eco-Agribusiness) kegiatannya adalah : (i) Pengembangan pola-pola usahatani terpadu tanaman pangan, hortikultura, ternak dan perkebunan; (ii) Pemanfaatan limbah bagi kegiatan agribisnis; (iii) Manajemen mutu lingkungan dan teknologi bersih; (iv) Penerapan audit dan standar mutu lingkungan.
 - f. Sub-Program Pengembangan Sistem Informasi dan Jaringan Kerja Agribisnis kegiatannya adalah : (i) Pengembangan sistem informasi agribisnis; (ii) Pengembangan jaringan kerja; (iii) Peningkatan kualitas data dan informasi; dan (iv) Membangun kordinasi dan sinkronisasi agribisnis.
18. Program Peningkatan Ketahanan Pangan diurai menjadi sub-Program : (1) Peningkatan Ketersediaan Pangan, (2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Pangan, dan (3) Stabilitas Produksi dan Penanggulangan Kerawanan Pangan dan Gizi.

Fokus kegiatan pada masing-masing sub-Program adalah sebagai berikut :

- a. Sub-Program Peningkatan Ketersediaan Pangan kegiatannya adalah : (i) Peningkatan areal panen melalui optimasi pemanfaatan lahan dan air; (ii) Perbaikan mutu intensifikasi melalui penerapan teknologi spesifik lokasi; (iii) Peningkatan fungsi penyuluhan; dan (iv) Perbaikan panen dan pasca panen.



- b. Sub-Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Pangan kegiatannya adalah : (i) Peningkatan diversifikasi pangan; (ii) Peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring ketahanan pangan; dan (iii) Memperkuat kelembagaan pangan masyarakat.
- c. Sub-Program Stabilisasi Produksi dan Penanggulangan Rawan Pangan dan Gizi kegiatannya adalah : (i) Pengembangan sistem deteksi dini dan peringatan dini terhadap bencana hama penyakit, kekeringan, banjir, bencana alam, dan daerah perbatasan; (ii) Pencegahan dan pemberantasan hama terpadu; dan (iii) Perbaikan sistem irigasi, cadangan air, dll.



KESIMPULAN

19. Sasaran pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat tani. Dalam pencapaian sasaran tersebut kebijakan dan strategi pembangunan pertanian dilakukan melalui pengembangan sistem dan usaha-usaha agribisnis berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi.

20. Dalam rangka membangun sistem dan usaha agribisnis dibutuhkan dukungan-dukungan kebijakan dari luar Departemen Pertanian, baik berupa kebijakan makro, kebijakan sektor industri, perdagangan, infrastruktur publik, kelembagaan keuangan, kelembagaan koperasi dan pengusaha kecil, lingkungan hidup, dll. Hal ini semua tentu saja ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya petani sesuai dengan yang diusulkan DPR.

21. Perencanaan pembangunan pertanian dilakukan secara *bottom-up* dengan didasarkan pada *Master Plan* pembangunan pertanian dari setiap daerah pada masing-masing tingkatan (kabupaten/kota, propinsi, dan nasional). Dalam rangka pencapaian keserasian pembangunan pertanian antar pelaku pembangunan dan *stakeholders*, antar daerah, dan antar waktu, perlu dibentuk Forum Sinkronisasi kegiatan pembangunan sistem agribisnis dan usaha agribisnis tingkat nasional dan daerah.



**Lampiran. Rancangan Kebutuhan Anggaran menurut Program/Sub
Program Pembangunan Pertanian TA 2002**

No	Program	Anggaran (Rp. Milyar)
A.	Program Pengembangan Agribisnis	1.345
	1. Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan 2. Pengembangan Agribisnis Hortikultura 3. Pengembangan Agribisnis Perkebunan 4. Pengembangan Agribisnis Peternakan 5. Proteksi Sumberdaya Hayati 6. Pengembangan Kelembagaan Agribisnis 7. Pengembangan Teknologi Strategis dan Wilayah 8. Pengembangan Usaha Agribisnis Berwawasan Lingkungan (ecoagribusiness) 9. Sistem Informasi dan Jaringan Kerja Agribisnis	230 210 210 230 35 190 190 18 32
B.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	820
	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan 2. Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan 3. Stabilitas Produksi dan Penanggulangan Kerawanan Pangan dan Gizi	310 250 260
C.	Program Penunjang	35
	1. Program Penataan Kelembagaan, Penegakan Hukum dan Pelestarian Lingkungan Hidup 2. Program Keunggulan Inovasi Teknologi 3. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik	10 15 10
	Jumlah	2.200



**POKOK-POKOK PENJELASAN
RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR RI**



**DEPARTEMEN PERTANIAN
Jakarta, 19 September 2001**

POKOK-POKOK PENJELASAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN DENGAN KOMISI III DPR-RI

1. Pertanyaan :

Kebijakan dan Strategi untuk:

- a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan;
- c. Kebijakan untuk mencukupi kebutuhan pangan karbohidrat, protein, dan vitamin;
- d. Kebijakan untuk meningkatkan ekspor berbagai komoditi pertanian.

Penjelasan:

1.a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

- Mendorong pengembangan agribisnis komoditas yang mempunyai nilai ekonomi (high value crops) berdasarkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitifnya.
- Menumbuhkan sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang memenuhi serta mampu berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
- Mengoptimalkan penggunaan teknologi tepat guna pada setiap subsistem agribisnis komoditas unggulan tersebut sehingga dapat bersaing dipasar dalam negeri maupun tujuan ekspor.

1.b. Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan;

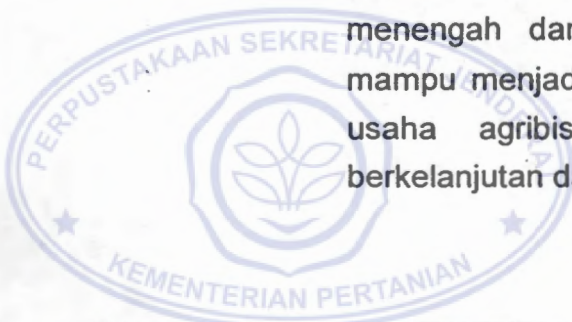
Pembangunan pertanian/agribisnis pada hakekatnya adalah upaya pendayagunaan sumberdaya pertanian (alam, modal, tenaga kerja dan lainnya) dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat, terutama masyarakat pertanian. Tujuan pembangunan pertanian dirumuskan sebagai berikut:

- Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani
- Mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal di setiap daerah,
- Meningkatkan daya saing produk pertanian dan ekspor hasil pertanian
- Mengembangkan aktivitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan sistem agribisnis dan perusahaan-perusahaan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisir.
- Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil melalui pengembangan sistem agribisnis.

Strategi dasar dalam pembangunan agribisnis adalah sebagai berikut:

1. Promosi pendalaman dan perluasan struktur sistem agribisnis (melalui pengembangan *cluster industry*) dalam rangka transformasi sistem agribisnis dari *factor-driven* kepada *capital-driven* kemudian kepada *innovation-driven* berdasarkan keunggulan komparatif setiap daerah dan permintaan pasar.
2. Memfasilitasi perkembangan sistem dan usaha agribisnis melalui pembangunan dan aksesibilitas prasarana dan sarana yang diperlukan.
3. Pemberdayaan usaha rumah tangga (petani), usaha kecil-menengah dan koperasi beserta jaringan usahanya agar mampu menjadi pelaku utama modernisasi sistem dan usaha usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.



4. Pengembangan ekonomi, kerjasama internasional, kelembagaan dan perundang-undangan untuk menciptakan iklim dan kepastian berusaha yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya kreativitas rakyat dalam pembangunan sistem agribisnis dan perusahaan agribisnis.
5. Reposisi peran penelitian dan pengembangan dalam menghasilkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas semua sub-sistem agribisnis.
6. Reposisi peran sistem pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dalam merekayasa sistem pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan yang berwawasan agribisnis.
7. Pemahaman ulang (*reeducation*) tentang konsep agribisnis terhadap aparat pemerintah dan masyarakat umum, dan pemberdayaan kemampuan aparat pemerintah dan kemampuan *team work* agar mampu menjadi fasilitator, mediator, dan promotor pembangunan sistem agribisnis dan perusahaan agribisnis.
8. Penguatan koordinasi baik dalam lingkup Departemen Pertanian maupun luar Departemen Pertanian untuk menciptakan suatu harmoni pembangunan. Keharmonisan dengan Departemen lain dibutuhkan, karena sebagian komponen pembangunan agribisnis (khususnya di hulu dan di hilir) berada di bawah wewenang Departemen lain.
9. Menjadikan kabupaten sesuai dengan keunggulannya sebagai unit perencanaan dan awal perencanaan pembangunan pertanian secara nasional.

Kebijakan pembangunan pertanian dalam pelaksanaan strategi pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan pertanian adalah :

1. Penciptaan iklim ekonomi yang kondusif bagi pembangunan sistem dan usaha agribisnis, mencakup instrumen kebijakan

makro ekonomi (moneter, fiskal), kebijakan pengembangan industri, kebijakan perdagangan/ pemasaran dan kerjasama luar negeri, Kebijakan dibidang pengembangan infrastruktur.

2. Kebijakan pengembangan kelembagaan, mencakup kelembagaan keuangan, pengembangan fungsi penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM dan organisasi ekonomi petani.
3. Kebijakan dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan
4. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Agribisnis Daerah
5. Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan
6. Pengembangan *Network*

1.c. Kebijakan untuk mencukupi kebutuhan pangan karbohidrat, protein dan vitamin.

Ketersediaan pangan untuk konsumsi pangan dan gizi cukup serta seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegentia manusia, karena tingkat kecukupan gizi seseorang sangat mempengaruhi keseimbangan perkembangan jasmani dan rohani yang bersangkutan. Badan Bimas Ketahanan Pangan tidak terkait secara langsung dengan upaya peningkatan produksi, tetapi lebih kepada perumusan kebijakan ketersediaan pangan secara makro dan mikro dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan-ketentuan dalam UU No.7/1996 tentang Pangan dan arahan dalam GBHN 1999-2004 serta ketentuan-ketentuan dalam perundangan yang berlaku. Pola konsumsi pangan dan gizi rumah tangga dippengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Berbagai masalah yang dihadapi dalam pengembangan konsumsi pangan antara lain adalah :

- a. Sampai saat ini konsumsi beras perkapita masih sangat tinggi, yaitu 130 Kg/tahun dengan trend penurunan yang sangat lambat.

Dengan penduduk yang besar dan terus bertambah, sementara persaingan pemanfaatan sumberdaya semakin ketat, maka dominasi beras dalam konsumsi pangan ini akan memberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan.

- b. Upaya diversifikasi pangan yang telah dilaksanakan selama ini tak membuahkan hasil yang diinginkan. Peran beras dalam pola konsumsi pangan masyarakat masih sangat dominan. Hal ini disebabkan: (i) program peningkatan penyediaan pangan difokuskan pada beras, (ii) industri pangan tidak menunjang pengembangan pangan karbohidrat non – beras, (iii) pengetahuan masyarakat akan pola konsumsi pangan dan gizi yang baik relatif terbatas.
- c. Pada sebagian daerah dan etnis, nilai-nilai budaya kebiasaan makan tidak mendukung terciptanya pola konsumsi pangan dan gizi seimbang serta pemerataan konsumsi pangan yang bergizi bagi anggota rumah tangga.
- d. Secara umum, kesadaran masyarakat, baik konsumen ataupun produsen, akan pelayanan pangan yang sehat dan aman (safety) masih rendah, walaupun sudah mulai tumbuh. Hal ini dapat menimbulkan munculnya berbagai kasus keracunan pangan dan gangguan kesehatan baik yang sifatnya mendadak atau yang muncul kemudian.
- e. Bagi penduduk miskin yang jumlahnya besar (27,4 persen tahun 1999) masalah utama dalam konsumsi pangan adalah ketidakmampuannya untuk mencukupi pangan dalam jumlah yang memadai, sehingga masalah yang terkait dalam gizi dan kerawanan pangan tidak menjadi perhatian utama. Faktor penyebab utama adalah rendahnya atau tidak adanya daya beli dan akses terhadap pangan.

Fokus pembangunan pangan yang bertumpu pada beras telah menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi kepada komoditas tersebut. Hal ini berakibat pada rendahnya ketahanan pangan masyarakat manakala kemampuan penyediaan beras terganggu karena iklim, gejolak harga, maupun sebab-sebab lainnya.

Pendekatan seperti ini tidak lagi sesuai karena disamping menambah kerentanan, juga membatasi fokus pengembangan pada penyediaan pangan sumber karbohidrat dari satu jenis pangan, sehingga penyediaan pangan sumber karbohidrat non-beras, protei dan zat gizi tertinggal jauh. Oleh sebab itu pendekatan ini perlu diubah kepada pendekatan diversifikasi produksi maupun konsumsi pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya dan budaya pangan daerah. Pendekatan ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya pangannya untuk menopang kebutuhan pangan dan gizi masyarakatnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat menuju kecukupan karbohidrat, protein, dan zat gizi mikro, terdapat beberapa peluang, antara lain :

- a. Berbagai bahan pangan lokal dan makanan tradisional yang dimiliki oleh wilayah dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan sesuai pilihannya.
- b. Partisipasi industri pengolahan pangan makin berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap proses penganekaragaman ketersediaan pangan, yang selanjutnya memfasilitasi proses diversifikasi dalam konsumsinya.
- c. Sebagai dampak positif dari proses pendidikan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan bertambah tinggi. Hal ini menjadi pendorong perbaikan pola konsumsi masyarakat dengan jumlah tepat dan gizi seimbang.
- d. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada masyarakat daerah untuk menggali potensi pangan yang dimiliki wilayah secara lebih spesifik dan mengembangkan bahan pangan sesuai pilihannya, dalam rangka mengatasi masalah pangan di wilayah yang bersangkutan

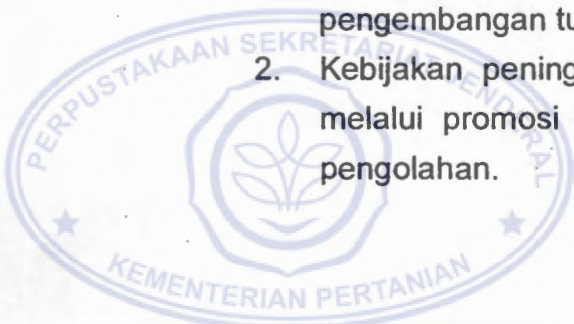


Pengembangan konsumsi pangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat menuju keseimbangan gizi, melalui penganekaragaman pangan yang berbasis sumber daya lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap beras. Program ini dirinci lebih lanjut dalam tiga sub program dan kegiatan utama sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlunya konsumsi pangan dan gizi berimbang, melalui kegiatan (i) penyuluhan konsumsi pangan dan gizi berimbang dan (ii) pendidikan pangan dan gizi mulai anak SD.
- b. Peningkatan penyediaan keragaman pangan dalam rangka diversifikasi konsumsi pangan lokal dan olahan yang sesuai dengan cita rasa; Pemanfaatan lahan pekarangan untuk penyediaan sumber pangan protein dan zat gizi mikro; dan peningkatan akses kelompok masyarakat tertentu atas pangan/komponen gizi tertentu.
- c. Peningkatan perlindungan konsumen atas mutu dan keamanan pangan, melalui, kebijakan (i) pengaturan standar mutu dan keamanan pangan serta (ii) penguatan system pengendalian mutu dan keamanan pangan dalam hal ini kelembagaan, sumberdaya manusia, dan aturan sanksi dan kesungguhan penerapannya.

Untuk memanfaatkan peluang yang ada dan dengan memperhatikan masalah yang melingkupinya, beberapa kebijakan dasar yang akan ditetapkan adalah:

1. Kebijakan peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan mekanisme pengendalian pasokan melalui pengembangan tunda jual dan lumbung pangan moderen.
2. Kebijakan peningkatan keragaman ketersediaan pangan lokal melalui promosi pangan, kerjasama pengembangan teknologi pengolahan.



3. Kebijakan pengembangan ketersediaan pangan yang aman dan halal melalui pengembangan standar mutu dan keamanan pangan dsb.
4. Kebijakan desentralisasi dan memajukan peran serta masyarakat/swasta dalam peningkatan ketahanan pangan.
5. Kebijakan pemberian fokus pada daerah-daerah tertentu seperti daerah perbatasan, daerah rawan pangan, daerah bencana alam dan daerah kerusuhan sosial.

1.d. Kebijakan untuk meningkatkan ekspor berbagai komoditi pertanian.

Kebijakan dibidang ekspor hasil pertanian senantiasa dikaitkan dengan pengembangan agribisnis dan agroindustri nasional serta ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi Indonesia, terutama untuk tumbuh kembangnya sistem dan usaha-usaha agribisnis dan agroindustri nasional. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan ekspor berbagai produk pertanian antara lain :

- a. Pengembangan kebijakan dan fasilitasi percepatan sistem dan prosedur ekspor hasil pertanian melalui pembentukan Tim Terpadu Antar Departemen/Instansi terkait;
- b. Pengembangan penyiasatan pasar (market intelligence) melalui analisis peluang dan hambatan ekspor serta pengendalian impor produk pertanian;
- c. Pengembangan kerjasama internasional bidang pemasaran hasil pertanian, seperti kerjasama Tri Patrit Indonesia-Malaysia-Thailand untuk pemasaran karet dan asosiasi-asosiasi sesama produsen;
- d. Penumbuhan dan Pengembangan Terminal-terminal Agribisnis (TA) di berbagai kota strategis dan Sub-sub Terminal Agribisnis (STA) di sentra-sentra agribisnis sebagai sarana pemasaran hasil pertanian secara terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan "Trading House" di negara tujuan ekspor;
- e. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu secara terpadu antara petani sebagai pemasok dengan agroindustri dan eksportir melalui

bimbingan Rencana Kerja Jaminan Mutu (RKJM) di tingkat petani, serta pengembangan "Mutual Recognition Agreement (MPA)" dan harmonisasi standard dengan negara mitra dagang;

- f. Pembinaan sertifikasi dan lembaga pelayanan sertifikasi yang professional;
- g. Pengembangan promosi hasil pertanian pada berbagai for a dan event baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- h. Pemanfaatan Atase Perdagangan di luar negeri dan rencana penambahan Atase Pertanian di beberapa negara penting seperti Cina, Korea, India dan Thailand.

2. **Pertanyaan :**

Kebijakan untuk menggerakkan swasta, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan pertanian.

Penjelasan:

Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya mempercepat pembangunan pertanian adalah :

- a. memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas- luasnya. Bantuan fasilitas dari pemerintah diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan , informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha.
- b. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara serat antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.



Disadari bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dari dominasi dan intervensi pemerintah yang sangat kuat menjadi peran aktif masyarakat. Mengingat pelaku ketahanan pangan ini adalah berjuta-juta petani kecil, maka kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan menjadi sangat penting.

Pembangunan pertanian dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Hal ini mencakup seluruh pihak yang terkait, baik produsen, pedagang, konsumen, aparat pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Beberapa kebijakan pokok yang akan ditempuh antara lain :

a. Kebijakan pengembangan ketersediaan pangan

- Pengembangan model kelembagaan cadangan pangan;
- Pemberdayaan aparat dalam pengembangan ketersediaan pangan.

b. Kebijakan pengembangan distribusi pangan

- Pengembangan sistem tunda jual komoditas pangan strategis;
- Pemberdayaan aparat dalam analisis harga dan distribusi pangan strategis

c. Kebijakan pengembangan konsumsi pangan

- Pengembangan kemitraan industri pengolahan pangan;
- Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman pangan;
- Kampanye gerakan penganekaragaman pangan, makanan tertentu, ACMI.

d. Kebijakan pemberdayaan ketahanan Pangan masyarakat

- Pemberdayaan petani dalam pelaksanaan usaha tani;
- Pemberdayaan petani dalam penyediaan sarana produksi, modal dan teknologi

- Penumbuhan motivasi dan partisipasi dalam peningkatan efisiensi usaha;
 - Pemberian penghargaan ketahanan pangan;
 - Pemasyarakatan lumbung pangan menuju ketahanan pangan.
- e. Kebijakan Pengembangan Kewaspadaan Pangan
- Pengembangan pola perlindungan konsumen atas mutu dan kerawanan pangan
 - Pemberdayaan aparat daerah dalam kewaspadaan pangan ;
 - Pemberdayaan masyarakat dalam kewaspadaan pangan.

Kebijakan untuk menggerakkan swasta, masyarakat, dan pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan pertanian dilakukan melalui upaya keterlibatan penuh masyarakat, swasta, dan Pemda sejak awal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pertanian terutama dalam pengembangan kawasan-kawasan agribisnis komoditas unggulan. Kegiatan-kegiatan pembangunan dengan pola bantuan langsung kepada kelompok tani (Bloc Grant), pendampingan oleh LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) dan pengembangan agribisnis melalui LM3 (Lembaga yang Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat) seperti pesantren, pura, gereja, dll merupakan bentuk implementasi program pemerintah yang memberi ruang partisipasi penuh bagi masyarakat dalam membangun agribisnis. Pemerintah (Pusat) berfungsi menyampaikan kebijakan, fokus, dan prioritas nasional melalui sosialisasi, diseminasi, dan pengembangan standard dan norma.

3. **Pertanyaan:**

Di negara manapun bantuan dan pelayanan pemerintah terhadap petani cukup besar, kebijakan subsidi dan kebijakan insentif serta kebijakan fiskal apa yang dapat membantu masyarakat tani ?

Penjelasan:

Dua instrumen penting kebijakan fiskal dapat dilakukan pemerintah adalah alokasi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan perlakuan pajak. Kebijakan penerapan pajak dalam rangka perolehan dana pembangunan harus dilakukan secara bijak agar mampu merangsang dunia usaha yang bergerak dalam sektor agribisnis. Demikian pula pembelanjaan anggaran pembangunan (investasi pemerintah) harus memberikan bobot yang lebih besar terhadap pembangunan sektor riil yang terkait langsung dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

Selain investasi pemerintah masih ada investasi lain yang dapat berpengaruh terhadap sistem dan usaha agribisnis. Investasi yang dimaksud mencakup investasi swasta domestik (PMDN) dan investasi swasta asing (PMA). Investasi PMA dan PMDN memang tidak dapat sepenuhnya diatur oleh pemerintah karena tergantung pengusaha itu sendiri. Namun pemerintah dapat mempengaruhi keputusan investasi swasta melalui pengalokasian investasipemerintah pada agribisnis dan bentuk-bentuk promosi yang lain.

Upaya pemenuhan pangan yang cukup bagi masyarakat melalui peningkatan produksi domestik dan penyediaan pangan murah di masa lalu, khususnya beras, ditempuh melalui kebijakan subsidi pada sisi produksi maupun kebijakan stabilitas harga pada sisi konsumsi. Kebijakan ini disamping memerlukan biaya intervensi yang sangat besar telah pula menyebabkan berkembangnya sistem usaha padi yang tidak efisien. Hal ini disamping pemborosan juga menyebabkan rendahnya daya saing petani dalam perekonomian yang semakin terbuka saat ini. Oleh karena itu pendekatan ini perlu diubah kearah pengembangan usahatani pangan yang efisien dan berdaya saing, yang memungkinkan para pelaku usahatani memperoleh peningkatan pendapatan. Dengan demikian usahatani yang terintegrasi dengan usaha hulu dan hilir atau agribisnis

menjadi lebih tepat untuk diterapkan pada ekonomi terbuka saat ini. Pemantapan ketahanan pangan juga mengikuti perubahan lingkungan strategis tersebut, yaitu: berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi. **Berdaya saing** yang dimaksudkan disini adalah bahan pangan harus dihasilkan secara efisien, hingga mampu meningkatkan pendapatan petani-nelayan atau produsen bahan pangan tetapi di lain pihak harga bahan pangan yang dihasilkan tersebut juga terjangkau oleh konsumen. **Berkerakyatan** yang dimaksudkan adalah unit keluarga atau rumah tangga harus menjadi sasaran utama pengembangan ketahanan pangan. **Berkerakyatan** yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya pangan yang semakin besar dari waktu ke waktu dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomis, sosial maupun kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan **desentralistis** yang dimaksudkan adalah perlunya perencanaan dan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan dilakukan pada tingkat lokal dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Kebijakan dalam rangka mengatasi sifat komoditas pertanian yang mudah rusak, bersifat musiman, serta harga yang fluktuatif adalah mengembangkan sistem pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran secara terpadu dalam rangka meningkatkan perolehan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi. Pengembangannya didasarkan atas sumberdaya dan budaya lokal, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan orientasi pasar. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain:

- a. Pengembangan usaha-usaha pengolahan hasil pertanian skala rumah tangga, skala kecil, dan koperasi melalui pengembangan akses terhadap modal, teknologi, informasi pasar, serta bimbingan kewirausahaan;
- b. Pengembangan lumbung pangan dan "cold storage" di pedesaan yang terkait dengan manajemen pemasaran, pengolahan, dan usaha jasa lainnya;

- c. Memfasilitasi kemitraan usaha antara petani sebagai penghasil bahan baku dengan perusahaan-perusahaan retailer dan industri pengolahan;
- d. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

4. **Pertanyaan :**

Komoditi pertanian adalah komoditi yang mudah rusak, produksinya fluktuatif dan pada saat panen raya harga jatuh, ditambah adanya impor pada saat panen raya serta kebijakan dan program apa yang akan dijalankan Pemerintah?

Penjelasan:

Saat ini masih banyak dijumpai adanya berbagai kelemahan dan distorsi dalam perdagangan/ pemasaran di dalam negeri, untuk itu diperlukan berbagai kebijakan yang dapat mengefektifkan fungsi-fungsi perdagangan/pemasaran untuk memperlancar arus barang dan jasa . Mekanisme transparansi pembentukan harga (*price discovery*) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Bentuk-bentuk pasar seperti bursa komoditi dan pasar lelang merupakan bentuk pasar yang perlu dikembangkan. Sudah tentu peningkatan kemampuan nilai tukar petani harus menjadi prioritas perhatian dalam kebijakan perdagangan ini.

Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan masyarakat belum mampu berperan baik sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan. Pada saat panen raya, pasokan pangan hasil pertanian berlimpah ke pasar, sehingga menekan harga dan kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada musim panen rendah, harga-harga bahan pangan meningkat dengan tajam karena kekurangan pasokan, sehingga

memberatkan konsumen. Demikian pula kelembagaan pemasaran belum mampu mewujudkan sistem yang adil diantara para pelakunya.

Beberapa kebijakan yang akan ditempuh dalam kaitannya dengan Ketahanan pangan antara lain :

a. Pengembangan sistem tunda jual komoditas pangan

Salah satu upaya untuk mengurangi fluktuasi harga dan pasokan komoditas pangan ke pasar adalah dengan cara menyimpan sebagian dari hasil panen untuk dijual setelah harga membaik, dapat dikatakan penundaan penjualan. Untuk dapat memberdayakan petani agar dapat melakukan penundaan penjualan melalui kerjasama petani dalam suatu kelompok/ koperasi serta melibatkan peran serta masyarakat dan desa dalam membangun sistem ketahanan pangan lokal melalui penundaan penjualan komoditas pangan dimusim panen raya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat swasta dalam pengembangan kelembagaan distribusi dan stabilisasi harga pangan serta mengembangkan mekanisme tunda jual oleh petani pada saat panen raya. Kegiatan yang akan dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, potensi petani dalam penjuallan hasil panrn, melakukan apresiasi dan sosialisasi serta membantu mengembangkan kemampuan dan kemandirian kelompok tani / koperasi tani dalam menerapkan sistem tunda jual. Hasil yang diharapkan adalah teridentifikasinya masalah pemasaran dan terwujudnya model sistem tunda jual serta tersosialisasinya model tunda jual.

b. Pembatasan impor pangan pada saat panen raya

c. Pelaksanaan impor yang ditujukan untuk daerah- daerah tertentu yang kekurangan pangan.

d. Pemberlakuan tarif impor.

5. **Pertanyaan:**

Salah satu beban pemerintah adalah adanya hutang "Loan" pemerintah dari berbagai kelembagaan keuangan internasional seperti Bank Dunia, ADB, JIBIC dimana epektifitas dan manfaatnya untuk masyarakat banyak disangsikan. Upaya-upaya apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurangi pinjaman tersebut?.

Penjelasan:

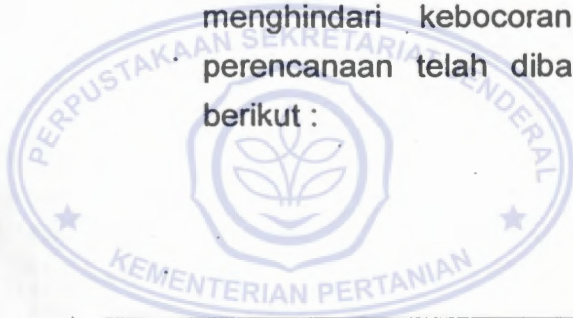
Pelaksanaan program pembangunan pertanian TA. 2002 direncanakan sebagian besar bertumpu pada dukungan anggaran murni rupiah. Proyek-proyek berbantuan luar negeri yang dilaksanakan adalah menyelesaikan kegiatan dan proyek bantuan yang sudah "Committed". Terhadap beberapa kegiatan proyek yang diperkirakan kurang efektif telah dan akan dilakukan reformulai sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Untuk jangka panjang, proposal proyek bersumber pada pinjaman luar negeri sangat dibatasi, tetapi diarahkan pada bantuan luar negeri yang berbentuk "grant" (bantuan)

6. **Pertanyaan :**

Masalah pencegahan kebocoran harus dimulai tahap perencanaan yang diikuti dengan pengorganisasian, pengalokasian kegiatan yang tidak ada manfaat langsung bagi petani sebaiknya dibatasi.

Penjelasan :

Untuk mengantisipasi pengalokasian kegiatan yang tidak tepat dan menghindari kebocoran dalam pelaksanaan, maka pada tahap perencanaan telah dibangun mekanisme dan pola bantuan sebagai berikut :



- a. Membangun perencanaan dari “bawah “ (botton up planning) melalui serangkaian rapat tingkat Propinsi dan Regional .
- b. Mengembangkan metode perencanaan partisipatif, sehingga memberikan peluang lebih besar keterlibatan masyarakat petani dan agribisnis .
- c. Mengembangkan model pemberdayaan petani melalui pola bantuan langsung kepada kelompok tani.
- d. Melibatkan masyarakat, LSM, “stake holder” pembangunan pertanian aktif dalam pengawasan pelaksanaan proyek, diantaranya membuka pos pelayanan , pengaduan masyarakat.

7. **Pertanyaan:**

Disinyalir kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap petani sangat menurun dratis , kebijakan dan upaya –upaya apa yang dilakukan untuk mengefektifkan mereka kembali?

Penjelasan:

Kegiatan pembinaan dan bimbingan terhadap petani dalam bentuk kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat lapangan mengindikasikan adanya penurunan kinerja yang cukup signifikan. Hal ini terjadi sebagai dampak dari diberlakukannya Undang Undang Nomor. 22 dan nomor 25 tahun 1999. Beberapa hal yang mengakibatkan hal ini terjadi adalah : DAU yang dialokasikan untuk daerah tidak cukup untuk membiaya tunjangan penyuluh , serta tidak tersedianya lagi dana operasional kelembagaan penyuluh didaerah; sudah banyak umur dari penyuluh tersebut menjelang masa pensiun; belum jelasnya mekanisme pengawasan dan pengendalian fungsi dan tugas penyuluh.

Upaya upaya yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Penyediaan dana yang memadai untuk keperluan tunjangan penyuluh dan biaya operasional bagi kelembagaan penyuluhan
- b. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian
- c. Pengembangan Penyuluh Swakarsa yang berasal dari masyarakat
- d. Peningkatan Profesionalisme Penyuluh Pertanian

8. Pertanyaan:

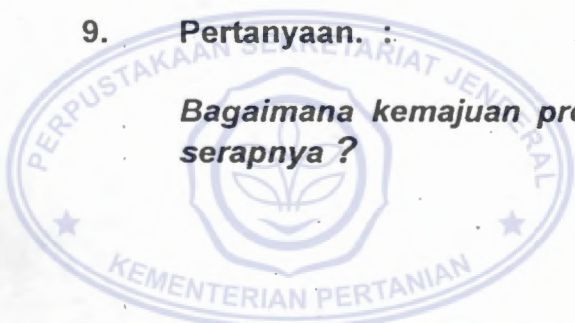
Penjelasan:

- a. Perkiraan peran sektor pertanian/agribisnis dalam penyerapan tenaga kerja : 77,34 %
- b. Kontribusi sektor pertanian/agribisnis terhadap GDB : 47,58%
- c. Kontribusi sektor pertanian/agribisnis dalam ekspor Indonesia : 49,22 %
- d. Peranan pertanian/agribisnis dalam impor : 16,76%

Sebagai informasi, berdasarkan statistik, peranan ekspor non migas termasuk dalam hal ini komoditas perkebunan produksinya meningkat terus dari 31,6% tahun 1985 menjadi 79,9% pada tahun 1999. Bila dilihat dari nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 1995 sebesar US \$ 4,5 milyar kemudian naik pada tahun 1997 menjadi US \$ 5,2 milyar . Sedangkan pada tahun 1999 nilai ekspor menurun menjadi US \$ 4,14 milyar. Demikian pula nilai PDB primer menurut harga yang berlaku mencapai sebesar Rp 37,6 triliun , nilai produk olahan sebesar Rp. 39,3 dengan nilai tambah bruo/NTB sebesar Rp. 166,9 triliun, sedangkan tenaga kerja yang terserap sebesar 17,2 juta tenaga kerja.

9. Pertanyaan. :

Bagaimana kemajuan program dan proyek tahun 2001 serta daya serapnya ?



Penjelasan :

Pada tahun anggaran 2001 Departemen Pertanian mendapat alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.1.357,52 milyar terdiri dari dana APBN Murni sebesar Rp.955,37 milyar dan BLN sebesar Rp.402,19 milyar dilaksanakan oleh 5 program yaitu: 2 program utama dan 3 program penunjang di jabarkan dalam 217 proyek dan 924 bagian proyek pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Perkembangan realisasi pelaksanaan kumulatif dan APBN Murni dan BLN program/proyek pembangunan pertanian TA.2001 sampai dengan 21 Juli 2001 mencapai 15,76 persen dan penyerapan dana Rp.193,78 milyar atau 14,27 persen. Keadaan ini berada dibawah target fisik dan penyerapan dana dimana sebesar 25,07 persen untuk fisik dan penyerapan dana sebesar Rp.334,65 milyar atau 24,65 persen.

Perkembangan kumulatif dana APBN Murni untuk realisasi pelaksanaan fisik mencapai 18,06 persen dan penyerapan dana sebesar Rp.154,89 milyar atau 16,21 persen. Realisasi ini masih dibawah target fisik sebesar 26,62 persen dan penyerapan dana sebesar Rp.245,38 milyar atau 25,68 persen. Untuk pelaksanaan dana BLN untuk realisasi pelaksanaan fisik sebesar 10,29 persen dan keuangan sebesar Rp.38,89 milyar. Realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan masih dibawah target pelaksanaan sebesar 21,39 persen dan Rp.89,27 milyar atau 22,20 persen.

Dibandingkan pelaksanaan program dan proyek tahun 2000, maka pelaksanaan tahun 2001 mengalami kelambatan daya serap sampai dengan bulan Agustus 2001 baru mencapai kurang lebih 40 persen . Kondisi ini secara umum disebabkan oleh :

- a. Keterlambatan proses penyelesaian DIP di Daerah, karena seluruh proyek di daerah dibahas di tingkat Daerah.
- b. Perubahan organisasi pemerintah daerah dan dihapuskannya organisasi Kanwil, serta proses UP3D, UPT-UPT Pusat ke Daerah mempengaruhi kinerja program/proyek.



BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN

DENGAN

KOMISI III DPR-RI

TENTANG

- 1. PENJELASAN RANCANGAN SATUAN-3 APBN TAHUN 2002
BIDANG PERTANIAN**
- 2. JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP HASIL KUNJUNGAN
KERJA KOMISI III DPR-RI PADA RESES MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2001-2002 DI PROPINSI BENGKULU DAN
JAWA TIMUR TANGGAL 16 S/D 18 NOVEMBER 2001**



**DAPARTEMEN PERTANIAN
Jakarta, 27 November 2001**



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

***Yang terhormat, Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota
Komisi III DPR-RI***

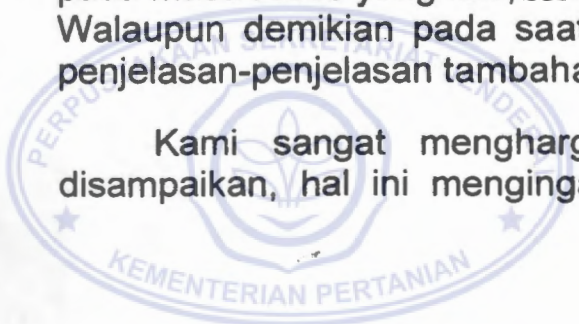
Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan Nya, untuk kesekian kali kami jajaran Departemen Pertanian dapat bertemu dengan para anggota Komisi III DPR-RI yang terhormat, dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.

Sesuai dengan yang diagendakan, saya akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2002 yang telah dituangkan dalam Draft Satuan 3 – RAPBN 2002 Bidang Pertanian. Rancangan ini disusun berdasarkan Draft Satuan 3 – RAPBN 2002 yang telah saya sampaikan pada Rapat Kerja bulan September yang lalu, dan telah disempurnakan berdasarkan masukan dari Anggota Komisi III DPR – RI, Rapat Nasional dan Regional serta pada rapat-rapat pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan hasil temuan Anggota Dewan di Daerah-Daerah pada masa reses yang lalu, terlampir kami sampaikan tanggapannya. Walaupun demikian pada saat diskusi nanti akan kami sampaikan penjelasan-penjelasan tambahan.

Kami sangat menghargai atas berbagai pemikiran yang disampaikan, hal ini mengingatkan saya bahwa banyak hal yang

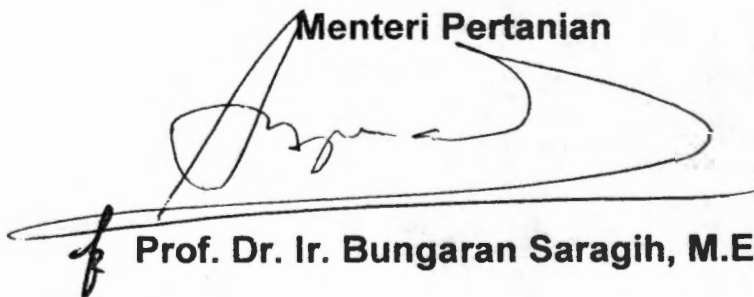


masih memerlukan langkah-langkah konkrit guna mengatasi permasalahan-permasalahan petani.

Semoga apa yang dapat dihasilkan pada Rapat Kerja hari ini dapat memberikan dorongan dan semangat bagi upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Terima kasih.

Jakarta, November 2001

Menteri Pertanian



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec



RINGKASAN

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati.

01. Sebelum saya menyampaikan secara garis besar Rancangan Anggaran Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2002, perkenankanlah saya informasikan bahwa pada tanggal 14 November 2001 telah dilantik Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dan Kepala Badan Karantina Pertanian yang baru. Saudara Dr. Memed Gunawan sebagai Sekretaris Jenderal, menggantikan Saudara Ir. Nelson Hutabarat, MBA yang telah memasuki masa purna bakti. Menggantikan Saudara Memed Gunawan sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Saudara Dr. Kaman Nainggolan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian. Selanjutnya sebagai Kepala Badan Karantina Pertanian adalah Saudari Dr. Delima Hasri Azahari, sebelumnya sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri. Dengan telah ditetapkannya pejabat-pejabat baru tersebut, saya berharap kinerja Departemen Pertanian akan mampu meningkat lebih baik lagi. Namun itu semua tidak akan sepenuhnya dapat dicapai tanpa dukungan Bapak serta Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Atas dukungan Anggota Dewan sehingga keseluruhan proses dapat berjalan lancar, kami sampaikan penghargaan yang tinggi. Di masa mendatang saya terus mengharapkan dukungan tersebut secara lebih luas lagi.



Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya mulyakan.

02. Konsisten dengan Grand Strategy Pembangunan Pertanian, yaitu Sistem dan Usaha Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional, yang berdasarkan PROPENAS 2001 – 2004 dituangkan dalam Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, maka kegiatan-kegiatan pembangunan akan difokuskan guna memecahkan isu-isu pokok yang menjadi tuntutan rakyat, khususnya masyarakat petani.

03. Sektor pertanian/agribisnis telah berperan besar dalam pembentukan PDB, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa melalui ekspor dan penciptaan ketahanan pangan nasional. Akibat kesenjangan antara laju pertumbuhan PDB pertanian yang lebih rendah dari laju penyerapan tenaga kerja pertanian menyebabkan produktifitas pertanian terus menurun. Peningkatan produktifitas dan kesejahteraan dapat dilakukan melalui peningkatan PDB pertanian atau penurunan beban tenaga kerja. Pada kondisi sektor lain belum tumbuh dan belum mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, sektor pertanian masih tetap diharapkan berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam kaitan itu, maka satu-satunya upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan nilai tambah (PDB) pertanian secara signifikan di atas pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

04. Sektor pertanian/agribisnis mempunyai beban dalam menjamin tercapainya ketahanan pangan nasional dan peningkatan perannya

dalam perolehan devisa melalui peningkatan ekspor dan atau mengurangi impor. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis. Operasionalisasi dari strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam dua program utama yaitu : Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

05. Melalui Program Pengembangan Agribisnis maka isu-isu pokok yang dihadapi masyarakat petani akan diantisipasi dengan upaya-upaya : a) meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan nilai tambah dari usaha dan peningkatan kualitas produk-produk pertanian; b) memperluas peluang usaha dan kesempatan kerja di pedesaan dengan mengembangkan bentuk-bentuk usaha yang menguntungkan pertanian; c) mengembangkan komoditas-komoditas unggulan menunjang peningkatan ekspor; d) memberdayakan petani dan mengentaskan kemiskinan melalui bantuan permodalan dengan pola Bantuan Langsung Masyarakat dan e) memperkuat pelayanan di bidang permodalan, sarana produksi, teknologi, penanggulangan hama dan penyakit tanaman dan hewan serta pemasaran hasil pertanian.

06. Dalam operasionalisasinya, program ini ditujukan untuk mengembangkan usaha agribisnis sub sistem hulu, *on farm*, pengolahan, pemasaran hasil dan sub sistem penunjangnya, yang dibangun dari masyarakat petani melalui pola pemberdayaan dengan mengembangkan peluang-peluang usaha tidak hanya pada sub sistem *on farm*. Pada kawasan pengembangan diarahkan terbentuk kelembagaan agribisnis yang terdiri dari kelompok-kelompok usaha

petani yang bersinergis sebagai satu kesatuan sistem agribisnis yang berkelanjutan.

07. Sasaran yang akan dicapai melalui program Pengembangan Agribisnis adalah : a) meningkatkan pendapatan petani melalui nilai tambah dari usaha-usaha kelompok dalam menghasilkan produk-produk komersial; b) memperluas peluang usaha dan kesempatan kerja bagi petani; c) meningkatkan ekspor komoditi pertanian, terutama tanaman pangan komersial, hortikultura, perkebunan dan menurunkan impor produk peternakan; d) penyediaan pangan dan pakan ternak; e)antisipasi eksplosi hama – penyakit dan penanggulangan bencana alam.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat.

08. Pada program Peningkatan Ketahanan Pangan, isu-isu pokok yang akan diantisipasi adalah : a) penyediaan kecukupan pangan masyarakat dan antisipasi impor; b) peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui penganekaragaman ketersediaan dan konsumsi pangan; c) masalah jatuhnya harga pangan di saat panen raya; d) kesulitan petani memperoleh sarana produksi dan akses pada sumber permodalan, e) rusaknya jaringan irigasi di tingkat usaha tani; f) masalah nilai tambah dan pendapatan petani relatif rendah; g) adanya daerah/lokasi rawan pangan dan gizi; h) terganggunya jaringan distribusi pangan; i) adanya eksplosi hama penyakit tanaman dan hewan yang tidak mampu ditangani petani; j) masalah lemahnya kelembagaan penyuluhan di lapangan.

09. Dalam operasionalisasinya, program ini adalah ditujukan untuk : a) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; b) meningkatkan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan, ketersediaan dan konsumsi pangan serta produk-produk olahannya; c) mengembangkan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menguntungkan petani; d) mengembangkan budaya dan produksi pangan lokal; e) mengembangkan kelembagaan pangan yang dibangun dari masyarakat sebagai kelembagaan usaha yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

10. Sasaran yang akan dicapai melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah : a) mempertahankan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat, yang dicerminkan dengan ketersediaan energi untuk konsumsi minimal 2.500 Kkal/Kapita/ Hari dan konsumsi protein 55 Gram/Kapita/Hari dengan 27 % diantaranya berasal dari produk hewani; b) tercapainya produksi padi sebesar 53.000 ribu ton; c) berkembangnya kawasan sentra produksi padi sebagai kawasan agribisnis berbasis padi dan komoditas penunjangnya yang mampu menjamin peningkatan pendapatan petani di 30 propinsi; d) penanggulangan daerah rawan pangan dan rawan gizi di 148 kabupaten; e) penanggulangan daerah endemis hama penyakit tanaman pangan dan hewan di 30 propinsi; dan f) antisipasi gangguan iklim dan penanggulangan dampak bencana alam.

11. Sesuai dengan arah kebijaksanaan Otonomi Daerah maka sebagian besar anggaran proyek akan dialokasikan di Daerah, yakni tersebar di 30 Propinsi dan 949 lokasi. Proyek/Bagian Proyek akan diletakkan

pada institusi Dinas dan UPT Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Departemen Pertanian sudah sejak awal proyek pembangunan telah membangun jaringan kerja dengan Dinas-Dinas Daerah, sehingga dengan struktur yang sekarang kita sudah mempunyai pengalaman lebih dibanding dengan Departemen Lain.

12. Dalam implementasinya, kegiatan pemberdayaan petani diarahkan melalui Pola Bantuan Langsung dalam rangka pemberdayaan kelompok-kelompok usaha di bidang agribisnis pangan agar mampu tumbuh-berkembang sebagai kelembagaan yang terintegrasi dalam sistem ketahanan pangan masyarakat. Pola Bantuan Langsung ini, dalam pelaksanaan mendatang akan kita sempurnakan, mengingat pada proyek yang lalu masih dijumpai adanya berbagai kelemahan di lapangan. Namun demikian, selain konsep ini mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat pula aspek positif lain, yaitu : a) menurunkan tingkat kebocoran anggaran oleh aparat, akibat praktek KKN dalam pelaksanaan tender dan mekanisme kontrak; b) mengurangi beban dan menghindari terjebak dalam tugas-tugas keproyekan sehingga fungsi pembinaan dan tugas-tugas pembangunan lebih optimal; dan c) temuan penyimpangan oleh BPK/BPKP/pengawasan fungsional akan berkurang, bahkan diupayakan mampu ditiadakan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya mulyakan.

13. Berdasarkan program-program yang telah dirancang dan telah didiskusikan dan dimantapkan dengan Pemerintah Daerah pada

berbagai pertemuan Regional dan Nasional, maka kami telah menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2002 sebagai berikut :

1) Sesuai dengan Nota Keuangan yang diajukan Pemerintah c.q. Departemen Keuangan dan BAPPENAS, alokasi anggaran pembangunan melalui Departemen Pertanian adalah sebesar Rp. 1.060,50 trilyun, pinjaman luar negeri sebesar Rp. 787,4 milyar.

2) Berdasarkan Surat Bappenas dan Ditjen Anggaran tanggal 15 Nopember 2001 sebagai tindak lanjut hasil pembahasan RAPBN 2002 dengan DPR, disampaikan bahwa alokasi anggaran Pembangunan bagi Departemen Pertanian menjadi 1.300 milyar dengan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.846,7 milyar. Dengan demikian dibandingkan dengan pagu September 2001 terdapat tambahan alokasi murni sebesar Rp.240 milyar dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.59,3 milyar. Tambahan alokasi anggaran akan digunakan sesuai program prioritas yang belum dialokasikan sebelumnya, sehingga rincian alokasi anggaran menurut program menjadi :

a) Program Pengembangan Agribisnis sebesar Rp.825 milyar (tambahan anggaran sebesar Rp.139 milyar) dengan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.742,76 milyar

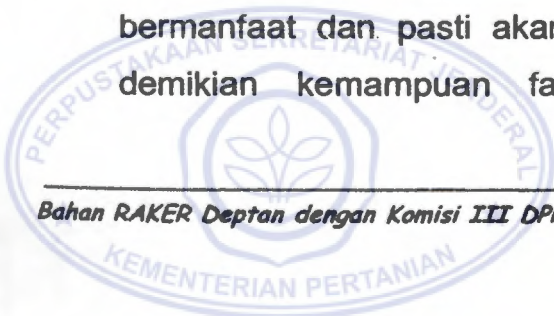
b) Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp.475 milyar (tambahan sebesar Rp.101 milyar) dengan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.103.93 milyar.

c) Anggaran Rutin Departemen Pertanian TA. 2002 dialokasikan sebesar Rp.358,5 milyar, yang dialokasikan pada Satuan Kerja Pusat sebesar Rp.260,1 milyar dan pada Satuan Kerja Daerah sebesar Rp.98,4 milyar.

14. Menyadari bahwa usulan Anggaran Departemen Pertanian yang telah dibahas pada Rapat Kerja bulan September yang lalu sebesar Rp. 2,2 trilyun dengan pinjaman luar negeri sebesar Rp. 787 milyar tidak sepenuhnya dapat terpenuhi, maka tambahan alokasi anggaran tersebut dirancang digunakan untuk program-program penting lainnya yang belum terakomodir dengan plafon anggaran tersebut di atas, yaitu:

- 1) Konsolidasi Penyuluhan Pertanian, yang pada tahun anggaran lalu didukung dengan dana INPRES namun sekarang tidak tersedia lagi.
- 2) Pemulihan usaha agribisnis eks. pengungsi dan pengembangan pertanian/ agribisnis di daerah rawan konflik.
- 3) Penguatan Kelembagaan Karantina Pertanian, laboratorium penelitian dan sarana institusi pelayanan.
- 4) Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah/Per Undang-Undang serta kajian-kajian kebijakan pembangunan pertanian.
- 5) Peningkatan cakupan program/proyek pada wilayah-wilayah potensial yang belum terjangkau dengan pagu alokasi anggaran tersebut diatas.

Terhadap tambahan alokasi anggaran yang saya yakin merupakan perjuangan Anggota Dewan yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan, karena tambahan ini sangat bermanfaat dan pasti akan diapresiasi oleh para petani. Dengan demikian kemampuan fasilitasi pemerintah dalam membantu



permasalahan-permasalahan pembangunan pertanian dapat meningkat lebih besar lagi.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat.

15. Terhadap hasil temuan Anggota Dewan pada masa reses yang lalu secara umum telah kami sampaikan tanggapannya secara tertulis, namun saya yakin masih diperlukan klarifikasi lebih lanjut. Untuk itu saya minta izin Saudara Ketua agar para Pejabat Eselon I secara singkat dapat menjelaskan secara lebih teknis.

Secara umum masukan dan sumbangan pemikiran dari hasil temuan tersebut sangat kami hargai dan menjadi salah satu acuan dalam implementasi program-program pada tahun 2002 – 2004 mendatang.

Untuk melengkapi penjelasan saya tentang Rancangan Program dan Satuan 3 – RAPBN 2002 Bidang Pertanian, mohon perkenan Saudara Ketua untuk dapat memberikan waktu kepada Saudara Sekretaris Jenderal.

Demikian, atas perhatian Anggota Dewan yang terhormat disampaikan terima kasih.





MENTERI PERTANIAN

**TANGGAPAN/JAWABAN
MENTERI PERTANIAN
ATAS TEMUAN KOMISI III DPR-RI
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2001-2002**

JAKARTA, 28 JANUARI 2002



**PENGANTAR JAWABAN MENTERI PERTANIAN
TEMUAN KOMISI III DPR RI DALAM RANGKA
KUNJUNGAN KERJA KE PROPINSI
JAWA BARAT DAN NUSA TENGGARA BARAT
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2001 – 2002**

- *Sdr. Pimpinan dan Anggota Komisi III yang terhormat,*
- *Sdr. Pejabat Eselon I dan staf Departemen Pertanian serta hadirin sekalian yang saya hormati.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Atas nama pimpinan Departemen Pertanian, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya, atas terselenggaranya rapat kerja hari ini. Saya berharap pada rapat kerja hari ini kita akan dapat saling bertukar pikiran, sehingga upaya kita untuk meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan pertanian dapat terus ditingkatkan.

Sdr. Pimpinan Komisi III DPR RI dan anggota Dewan yang terhormat, Perkenankanlah saya menyampaikan tanggapan secara umum atas temuan-temuan Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerja ke Propinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, sedangkan tanggapan yang lebih teknis akan disampaikan oleh para Eselon I.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa arah pembangunan pertanian kita kedepan adalah pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan, dan terdesentralisasi. Visi itu konsisten dengan GBHN 1999-2004 yang antara lain mengamanatkan bahwa kita perlu membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif; serta Proenas 2001-2004 yang antara lain memuat agenda mempercepat pemulihan

ekonomi dan meningkatkan pembangunan daerah. Pada berbagai rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang lalu, komisi III DPR RI telah memberikan dorongan yang sangat besar terhadap visi pembangunan agribisnis tersebut. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi III DPR-RI atas dorongan tersebut. Berbagai sub sistem yang membentuk agribisnis tersebut harus dikembangkan secara harmonis, serasi, dan simultan. Namun demikian, dalam perjalanannya masih banyak dijumpai berbagai permasalahan baik itu di sub sistem hulu, sub sistem budidaya (on farm), sub sistem hilir, sub sistem penunjang demikian juga dalam pengembangan usaha – usaha agribisnis. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi temuan-temuan yang dikemukakan oleh anggota Dewan yang terhormat, sehingga dari temuan-temuan itu kita semakin memahami bahwa persepsi kita dalam memandang persoalan-persoalan pembangunan sistem dan usaha agribisnis sudah sama. Dengan pemahaman yang sama itu pula, mudah-mudahan kedepan kita dapat memperbaiki upaya – upaya dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis ini.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat

Dalam pada itu Desember tahun 2001 lalu, Departemen Pertanian juga telah melakukan evaluasi kinerja secara internal. Dari hasil evaluasi tsb. harus diakui masih terdapat berbagai kelemahan dalam mengintegrasikan program pembangunan agribisnis tsb., walaupun kita sudah berupaya keras dengan menggunakan resources yang ada. Hal ini merupakan suatu proses yang menghendaki budaya kerja baru sesuai dengan perkembangan jaman. Saya berharap Anggota Dewan yang terhormat bersabar menunggu laporan final kinerja Departemen Pertanian sambil menunggu data final dari BPS pertengahan tahun 2002 ini.



Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dengan visi pembangunan sistem dan usaha agribisnis tersebut kita telah mengimplemetasikan dua program yaitu : Program Pengembangan Agribisnis dan Program Ketahanan Pangan. Hal itu didasarkan pada pemikiran perubahan paradigma, dimana pada masa lalu fokus perhatian kita adalah membangun sub sistem produksi (on farm). Ini ternyata tidak cukup untuk mengangkat kesejahteraan petani, sehingga kita introduksir Program Pengembangan Agribisnis tanpa melupakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Temuan – temuan anggota Dewan dilapangan secara garis besar mencakup aspek – aspek pengembangan sistem agribisnis mulai dari sub sistem hulu, on farm, hilir hingga sub sistem penunjang.

Di bidang ketahanan pangan, bersama instansi terkait kita telah merumuskan kebijakan perberasan nasional yang diwujudkan dalam Inpress No. 9 Tahun 2001 tanggal 31Desember 2001 tentang 'Penetapan Kebijakan Perberasan'. Dengan adanya Inpress tsb., kita harapkan penanganan masalah perberasan dapat dilakukan secara lebih terpadu dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan petani dan masyarakat konsumen secara bersama-sama.

Khusus untuk mengatasi gejolak kenaikan harga beras pada awal Januari lalu, Deptan bersama instansi terkait telah berusaha untuk mengatasi masalah tsb. dengan hasil yang positif. Pengamatan langsung di Pasar Induk Cipinang pada tanggal 26 Januari lalu menunjukkan bahwa harga sudah kembali ke tingkat wajar dibandingkan dengan pada saat pengamatan di pasar yang sama pada tanggal 6 Januari 2002 lalu. Dalam waktu dekat ini kita harus bersiap-siap untuk mencegah jatuhnya harga gabah petani pada saat panen raya mendatang.

Persoalan – persoalan agribisnis di sub sistem hulu seperti kredit, pupuk, benih/bibit, dan sarana pendukungnya kita sadari sampai sekarang belum

terpecahkan secara tuntas, walaupun kita sudah berupaya untuk mewujudkan program – program untuk menguatkan agribisnis hulu tersebut. Beberapa prioritas yang telah dilakukan yang menyangkut sarana pertanian adalah: Konsep penjabaran PP NO. 8 Tahun 2001 tentang pengawasan pupuk dan budidaya tanaman, deregulasi pestisida, cara pendaftaran pestisida, peraturan pemerintah No. 77 tahun 2001 tentang irigasi, peraturan pemerintah No. 81 tahun 2001 tentang alat mesin budi daya tanaman, model percontohan asuransi kerugian usaha tani dan jiwa, serta model percontohan tunda jual pola pegadaian. Kita harapkan dengan kebijakan-kebijakan tersebut sub sistem hulu agribisnis akan semakin kuat.

Dibidang Sub-Sistem Budidaya (On-Farm) telah dilakukan: percepatan tanam, fasilitasi pembentukan kemitraan petani dengan pengusaha, penerapan teknologi Orchard manajemen di sentra produksi buah-buahan, pembentukan kelembagaan forum pengembangan kawasan agribisnis sayuran, pembentukan 12 asosiasi petani perkebunan, pengembangan perkebunan melalui kerjasama dengan Swasta, mempertahankan Indonesia bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta mencegah masuknya penyakit menular lainnya.

Dibidang Sub-Sistem Hilir (Pengolahan dan Pemasaran), telah dilakukan: Pembentukan Unit Pelayanan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian, serta pengembangan beberapa Sub Terminal Agribisnis. Para pengusaha juga terus menerus kita dorong untuk bermitra dengan petani dengan menyertakan pihak perbankan. Upaya-upaya ini dilengkapi pula dengan penyusunan standar-standar mutu untuk memfasilitasi perdagangan pertanian kita dengan persaingan yang semakin lama semakin ketat.

Dibidang Sub-Sistem Penunjang (Penelitian dan Pengembangan), telah dihasilkan: Varietas unggul baru padi sawah, gogo, pasang surut dan hibrida

produktivitas tinggi dan tahan penyakit, varietas unggul kentang, varietas unggul cabai, varietas unggul krisan dan anyelir, kelapa dalam berumur pendek produktivitas tinggi dan tahan penyakit, serta dikembangkannya model pengelolaan tanaman terpadu untuk meningkatkan produktivitas padi. Di bidang penelitian, dengan bantuan anggota Dewan telah dapat diselesaikan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dilengkapi dengan PPnya. Adanya UUPVT ini kita harapkan menjadi insentif bagi para peneliti kita.

Dibidang pengembangan SDM mencakup peningkatan status 4 Akademi Penyuluhan Pertanian menjadi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Konsep reorganisasi sistem penyuluhan yang disesuaikan dengan otonomi yang dibahas dalam Raker terakhir antara Komisi III dengan Deptan juga sudah diselesaikan dan akan diimplementasikan tahun ini. Secara terus menerus upaya untuk penguatan organisasi petani telah pula dilakukan baik melalui HKTI maupun KTNA. Selain itu sebagai tindak lanjut Penas X di Tasikmalaya Oktober 2001 lalu, telah ditandatangani MOU antara kelompok tani, BRI, PUSRI, Sang Hyang Sri, dan sejumlah perusahaan pestisida nasional dan telah memasuki fase implementasi melalui kemitraan diantara mereka yang dilaksanakan di berbagai daerah. Selain itu untuk memperkuat permodalan petani telah dibuat program GEMAS(Gerakan Menabung Nasional) yang akan dicanangkan oleh Ibu Presiden dalam waktu dekat.

Penyempurnaan organisasi lingkup Deptan dan kelengkapan personalia termasuk pembentukan Badan Karantina Pertanian telah diselesaikan tahun 2001 lalu.

Penangan Kebijakan Ketahanan Pangan yang pada awalnya dikordinasikan oleh Dewan Bimas Ketahanan Pangan yang dibentuk 27 Maret 2001 dan diketuai oleh Wakil Presiden, disempurnakan menjadi Dewan Ketahanan Pangan pada tanggal 31 Desember 2001 yang diketuai langsung oleh Presiden dengan Ketua Harian Menteri Pertanian. Untuk memantapkan kordinasi ketahanan pangan di daerah,

telah terbentuk 20 Dewan Bimas Ketahanan Pangan di tingkat Propinsi, dan 92 unit di tingkat Kabupaten/Kota.

Selain itu juga telah dibentuk Badan Bimas Ketahanan Pangan di berbagai daerah sebanyak 15 unit di tingkat propinsi dan 110 Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di tingkat Kabupaten.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Era keterbukaan saat ini menuntut kita semakin proaktif dalam melakukan komunikasi, pendekatan, sekaligus promosi agribisnis kita dalam konteks global. Forum-forum multilateral seperti Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO di Doha kita ikuti untuk menyampaikan posisi Indonesia dalam liberalisasi perdagangan global di bidang pertanian yang lebih terbuka tetapi juga fair. Di forum Cairns Group kita juga proaktif untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan negara berkembang dalam konteks membuka akses pasar produk-produk pertanian negara-negara berkembang. Demikian juga di forum AMAF+3 tahun lalu di Medan dimana Indonesia sebagai tuan rumah telah disampaikan posisi Indonesia dalam skenario AFTA yang disertai dengan kerjasama-kerjasama bilateral antara lain dengan China.

Kerjasama bilateral juga kita intensifkan, antara lain dengan China dalam bidang hybrid rice, Jepang baik melalui JICA maupun JBIC; dengan Mesir untuk memasarkan CPO kita; dengan Belanda untuk kerjasama penelitian bidang hortikultura; dengan Jerman dalam pengembangan bio-diesel; dan dengan Australia melaui forum Working Group on Agriculture and Food Cooperation (WG AFC) yang bertujuan mendorong kerjasama swasta antar kedua negara.

Kerjasama dengan Badan-badan internasional yang sejak lama telah terbina terus kita tingkatkan. Melalui FAO Indonesia telah banyak membantu negara lain utamanya Afrika dalam membangun pertaniannya. Bahkan Prof. Dr. Sjarifuddin Baharsyah, mantan Menteri Pertanian kita telah banyak menyumbangkan pikiran-pikiran beliau dalam kapasitasnya sebagai Chairman of the Independent Council.

Indonesia juga menjadi anggota FAO Council 2003-2005 dan telah disetujui beberapa bantuan hibah dari FAO. Demikian juga dengan IFAD, Menteri Pertanian diminta sebagai ketua sidang Governing Council tahun 2001 dan 2002 ini. Kegiatan-kegiatan internasional akan secara proaktif kita ikuti disesuaikan dengan dana yang ada untuk lebih mengekspose kepentingan Indonesia di forum-forum dan badan-badan Internasional.

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut sangat terbatas sehingga harus didukung oleh sumberdaya swasta maupun masyarakat, agar dapat mendorong pengembangan sistem dan usaha agribisnis lebih besar lagi. Peran pemerintah adalah mendorong dan memfasilitasi, sedangkan pemain utama adalah masyarakat khususnya petani dan dunia usaha.

Perubahan lingkungan yang sangat cepat dan adanya UU No. 22 tahun 1999 secara tegas telah mengatur pembagian peran antara pemerintah dan daerah. Masa 2-3 tahun ini adalah masa transisi dari implementasi UU No. 22 tersebut dan untuk masa sekarang dan yang akan datang pemerintah Pusat harus memberikan asistensi ke daerah-daerah agar mereka mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi di daerah masing-masing.

Itulah sebabnya pada bulan Januari tahun 2002 ini Departemen Pertanian telah merumuskan langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaan rencana program tahun anggaran 2002 secara terpadu. Pada bulan ini juga dengan program terpadu tersebut kita secara proaktif akan melakukan asistensi ke daerah agar masalah-masalah agribisnis yang menjadi tanggung jawab daerah seperti yang dipaparkan oleh Anggota Dewan secara bertahap dapat diminimumkan.





DEPARTEMEN PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN
KOMISI III DPR - RI
TENTANG
PEMBICARAAN PENDAHULUAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN 2003 DAN
PEMBAHASAN REPETA TAHUN 2003**

JAKARTA, 27 FEBRUARI 2002



Pengantar
PEMBICARAAN PENDAHULUAN
RANCANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN RAPBN
PERTANIAN TAHUN 2003

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI.

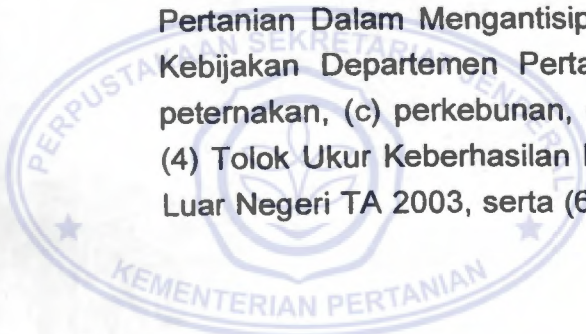
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas RachmatNYA, sehingga memungkinkan terselenggaranya rapat kerja pada hari ini.

Sebelum saya menyampaikan materi rapat kerja hari ini, perkenankan saya kembali mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang besar serta masukan-masukan baik saran maupun kritik yang telah disampaikan oleh anggota komisi III DPR-RI kepada saya selaku Menteri Pertanian maupun institusi Departemen Pertanian. Dukungan dan masukan-masukan tersebut telah memberikan dorongan yang kuat bagi kami untuk melaksanakan tugas tugas pembangunan pertanian.

Pada kesempatan rapat kerja hari ini, saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok acuan tentang Pembicaraan Pendahuluan REPETA dan RAPBN Tahun 2003. Rancangan kegiatan tahun 2003 disusun berdasarkan pada : (1) evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian yang lalu, (2) tantangan pembangunan pertanian ke depan, (3) hasil-hasil rapat kerja dengan Komisi III- DPR-RI, dan (4) GBHN 1999-2004 dan Propenas 2001-2004.

Penyampaian bahan rapat kerja hari ini juga dilengkapi penjelasan tentang : (1) Kebijakan Jangka Pendek Pembangunan Pertanian; (2) Upaya Departemen Pertanian Dalam Mengantisipasi Panen Raya Februari-April 2002, (3) Konsep Kebijakan Departemen Pertanian untuk pembangunan (a) lahan kering, (b) peternakan, (c) perkebunan, dan (d) Sumberdaya Manusia dan Penyuluh/PPL; (4) Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan Pertanian; (5) Komponen Pinjaman Luar Negeri TA 2003, serta (6) Kebutuhan Subsidi Sektor Pertanian tahun 2003;



sesuai dengan permintaan Saudara Ketua Komisi III tanggal 20 Februari 2002 yang lalu. Secara terpisah akan disampaikan juga penjelasan terhadap masukan HKTl kepada Komisi III DPR-RI. Demikian juga perkembangan dan penanganan masalah banjir akan disampaikan secara khusus. Dengan seijin Saudara Ketua, penjelasan mengenai hal-hal tersebut akan disampaikan oleh pejabat Eselon I.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

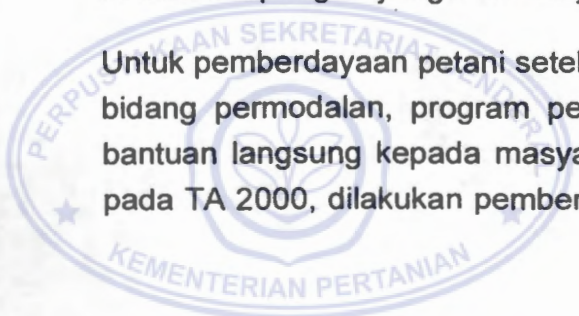
Di dalam pembicaraan pendahuluan REPETA Tahun 2003 dan RAPBN Tahun 2003 ini, saya akan memulai dari penjelasan tentang pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan pada tahun 2000-2001 lalu dan tahun 2002 ini sebagai basis untuk perencanaan selanjutnya. Kemudian akan disampaikan tantangan-tantangan yang kita hadapi tahun 2003. Selanjutnya akan disampaikan Rancangan Pembangunan Pertanian serta Rancangan Anggaran Pembangunan Tahun 2003.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun 2000-2004 dilaksanakan melalui *Program Pengembangan Agribisnis* dan *Program Peningkatan Ketahanan Pangan*. Program Pengembangan Agribisnis ditujukan dalam rangka fasilitasi berkembangnya usaha agribisnis sub-sistem hulu, *on farm*, pengolahan, pemasaran hasil dan sub-sistem penunjang yang dibangun oleh masyarakat petani, serta mengembangkan peluang usaha pada semua sub-sistem.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan ditujukan dalam rangka fasilitasi bagi peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui (1) peningkatan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan serta produk-produk olahan, (2) pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menguntungkan petani, (3) pengembangan budaya dan produksi pangan lokal, dan (4) pengembangan kelembagaan pangan yang dibangun oleh masyarakat sebagai kelembagaan usaha yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Untuk pemberdayaan petani setelah periode krisis sejak tahun 1997, terutama di bidang permodalan, program pembangunan pertanian dilakukan melalui pola bantuan langsung kepada masyarakat (BLM). Sejalan dengan upaya tersebut, pada TA 2000, dilakukan pemberian modal usaha kepada kelompok tani pelaku



agribisnis. Jumlah kelompok sasaran tahun 2000 adalah 13.126 kelompok yang terdiri dari 13.043 kelompok tanaman pangan dan 83 kelompok peternakan di 163 kabupaten di 13 propinsi. Besarnya dana yang dialokasikan dalam pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebesar Rp. 600 milyar yang berasal dari dana khusus, yaitu dari sektor 16. Sedangkan dana APBN sebesar Rp. 375 milyar dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan Usaha Pertanian (PUP) dan Pengembangan Sumberdaya Sarana dan Prasarana Pertanian (PSSP). Pada tahun 2000 kita menyaksikan peningkatan produksi tanaman pangan antara lain padi 51,9 juta ton GKG dari 50,9 juta ton GKG pada tahun 1999 dan jagung 9,7 juta ton dari 9,2 juta ton pada tahun 1999. Demikian pula halnya dengan komoditas perkebunan dan peternakan secara umum mengalami peningkatan. Secara umum masalah yang dihadapi adalah lemahnya kelembagaan di tingkat petani, lemahnya akses petani terhadap sumber permodalan, pasar dan input produksi.

Dalam tahun 2001, dana yang disalurkan dengan pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebesar Rp. 300 milyar atau 30% dari total anggaran Rp. 985 milyar. Jumlah kelompok sasaran mencakup 2.688 kelompok di 201 kabupaten di 26 propinsi. Bidang usaha yang dikembangkan mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Meskipun secara umum proses perencanaan diwarnai oleh kentalnya sentralisme, dalam tahun 2001 mulai dilakukan sosialisasi pembangunan sistem dan usaha agribisnis dengan pola perencanaan dari bawah. Dari evaluasi yang kita lakukan, melalui pola ini masyarakat tampaknya sudah mulai memahami pentingnya pembangunan agribisnis dalam membantu perekonomian mereka.

Dalam tahun 2001, luas panen dan produktifitas padi menunjukkan gejala penurunan. Faktor utama penyebab turunnya luas panen adalah kecenderungan pengalihan usahatani padi ke komoditas lain seperti jeruk, sayuran, tembakau dan tambak udang yang diperkirakan berlanjut sebagai respon petani terhadap insentif pasar. Kecenderungan pengalihan usahatani padi ke komoditas lain merupakan hal yang wajar sebagai respon terhadap perubahan insentif ekonomi sesuai mekanisme pasar.

Dari hasil kajian yang kami lakukan, diketahui bahwa penurunan produktivitas padi disebabkan oleh (a) terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga pupuk; (b) penurunan ketersediaan dan kualitas benih; (c) keterbatasan sumber

pembiayaan; (d) penurunan insentif usahatani padi; (e) peningkatan intensitas serangan OPT (organisme pengganggu tanaman) dan banjir atau kekeringan; (f) penurunan efisiensi pemanfaatan air karena berkurangnya biaya pemeliharaan jaringan irigasi; dan (g) penurunan kinerja penyuluhan pertanian.

Tahun 2002 merupakan awal implementasi proses perencanaan sesuai dengan UU No 22/1999, yang hasilnya akan kita lihat tahun depan. Untuk tahun 2002 pola pemberdayaan masyarakat dikonsolidasikan dalam bentuk pengembangan kawasan agribisnis komoditi komersial unggulan di 246 kabupaten di 30 propinsi; dan kawasan peningkatan produksi pangan (padi) di 174 kabupaten di 30 propinsi. Anggaran dialokasikan langsung ke kabupaten/kota yang mengembangkan kawasan agribisnis. Diperhitungkan alokasi bantuan pemberdayaan petani pada TA 2002 sebesar RP 600 milyar atau 43% dari total anggaran APBN sebesar Rp. 1,4 triliun. Dengan cara ini kita harapkan akan berkembang pusat-pusat pengembangan agribisnis sebagai andalan pertumbuhan di daerah sebagaimana dikemukakan didalam *Grand Strategy* Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis. Selain itu, proses perencanaan dari bawah merupakan proses pemberdayaan aparat di daerah didalam menemukenali permasalahan spesifik di masing-masing daerah.

Selain pola bantuan langsung tersebut di atas, Departemen Pertanian telah lama mengembangkan pola pemberdayaan dalam rangka pengembangan usaha, penguatan kelembagaan dan pengembangan kredit mikro bagi petani kecil, melalui (1) Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), (2) Pengembangan Kredit Usaha Mandiri (KUM) yaitu model penerapan *Grameen Bank*; dan (3) Participatory Integrated Development in Rainfed Area (PIDRA). Pelaksanaan kegiatan tersebut telah menumbuhkan usaha kecil di pedesaan dengan tingkat pengembalian kredit lebih dari 98%. Pola P4K, KUM dan PIDRA dilakukan tanpa pemberian subsidi kepada petani. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tanpa subsidi, selama kredit itu tersedia dan mudah diakses, petani secara berkelompok ternyata mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam pengembalian kreditnya. Pelaksanaan pola P4K dan PIDRA tersebut di Indonesia mendapatkan pujian dari IFAD dan ADB.



Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Sepanjang awal tahun 2002 ini sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami musim hujan, sebagian diantaranya dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Dari laporan yang kami terima sampai tanggal 17 Pebruari 2002 dari berbagai daerah yang dilanda banjir, diperoleh gambaran bahwa luas dan lama genangan banjir cukup besar dan sekitar 22% dari luas areal tanaman padi yang terkena banjir mengalami puso. Atas seijin Saudara Ketua, Saudara Dirjen Bina Sarana Pertanian akan melaporkannya di dalam Rapat Kerja ini.

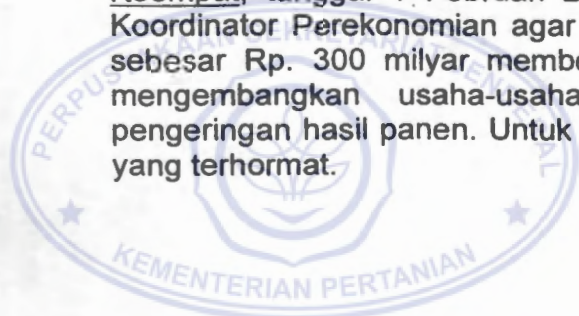
Untuk menanggulangi dampak banjir yang telah terjadi serta mengantisipasi panen raya dalam musim hujan, Departemen Pertanian telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, memberikan bantuan kepada para korban bencana alam banjir. Secara bertahap telah disalurkan ke propinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan akan dilanjutkan ke propinsi/kabupaten lain yang mendesak.

Kedua, menyerukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi para petani dengan peralatan pengering (*dryer*). Upaya fasilitasi tersebut dilakukan dengan memobilisir peralatan pengering bantuan proyek yang ada, terutama yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Di samping itu, dilakukan upaya untuk menggerakkan aparat pertanian dalam menumbuhkembangkan usaha pelayanan jasa yang bergerak di bidang penanganan pasca panen (pengeringan) dan pengolahan hasil. Upaya ini diantaranya dengan memanfaatkan alokasi APBN TA. 2002 yang telah didistribusikan ke daerah.

Ketiga, mengupayakan agar insentif harga dapat diterima petani. Untuk itu tanggal 31 Januari 2001 saya telah mengirim surat kepada 12 Gubernur propinsi penghasil utama beras agar mereka dapat berkordinasi dengan Bupati/Walikota untuk memantau pengadaan gabah/beras oleh Dolog/Sub Dolog; serta mengalokasikan dana APBD guna pembelian gabah dari petani.

Keempat, tanggal 1 Pebruari 2002 saya telah mengusulkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian agar dialokasikan dana pengembalian subsidi BBM sebesar Rp. 300 milyar membeli gabah petani atau dapat digunakan untuk mengembangkan usaha-usaha pelayanan jasa yang bergerak dalam pengeringan hasil panen. Untuk itu saya mohon dukungan dari Anggota Dewan yang terhormat.



Kelima, Departemen Pertanian bersama dengan instansi terkait juga akan melakukan pemantauan-pemantauan langsung ke daerah-daerah penghasil padi untuk mencegah jatuhnya harga pada saat panen raya bulan Februari-April 2002.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian saat ini dan mendatang dirasakan semakin berat. Beberapa permasalahan kronis pembangunan yang terkait erat dengan pembangunan pertanian seperti kemiskinan, kecukupan pangan dan pengangguran, masih akan mewarnai program dan kegiatan pembangunan pertanian dalam dekade mendatang.

Kemiskinan mempunyai dimensi yang sangat luas, salah satunya adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi suatu kehidupan yang layak. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan merupakan langkah strategis yang erat kaitannya dengan pemerataan, mengurangi keterbelakangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan produktifitas nasional. Dengan demikian, disamping perannya dalam pertumbuhan perekonomian nasional, pembangunan pertanian mempunyai peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan terutama di pedesaan. Masalah kemiskinan ini akan mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi pada tahun 2003 mendatang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Oleh karena peranan sub sektor pangan yang sangat besar pada sistem perekonomian nasional, kemandirian pangan akan tetap menjadi fokus perhatian kita pada tahun 2003 mendatang. Upaya yang kita lakukan dalam mengatasi masalah pangan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menekankan bahwa kemandirian pangan diartikan secara sempit sebagai swasembada pangan. Pendekatan yang kita lakukan adalah melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis, dimana sistem ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada aspek produksi saja tetapi juga mencakup sub-sistem hulu dan hilir yang dikombinasikan dengan upaya diversifikasi konsumsi ke pangan non-beras.

Melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis juga kita menciptakan peluang berusaha khususnya di kegiatan *off-farm* untuk mendapatkan nilai tambah yang

lebih tinggi. Hal ini terutama akan sangat membantu para petani dengan luas kepemilikan lahan yang kecil.

Secara garis besar, upaya mempertahankan laju produksi pertanian terkendala oleh beberapa hal. Pertama, rendahnya produktifitas serta stagnasi inovasi dan adopsi teknologi. Kedua, tingginya biaya produksi yang menjadi beban bagi petani, dan Ketiga, perluasan areal pertanian sangat lambat, sementara konversi lahan pertanian cenderung meningkat.

Untuk mengatasi masalah rendahnya produktivitas, tahun 2003 Departemen Pertanian akan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program penelitian yang diperlukan dalam rangka penciptaan teknologi (benih/bibit, dsb) diiringi dengan peningkatan kualitas SDM termasuk penyuluh pertanian.

Untuk menurunkan biaya produksi, bea masuk input-input pertanian diusulkan untuk dihapus agar tidak memberatkan petani. Sejalan dengan itu diperlukan langkah langkah perlindungan bagi petani, seperti penerapan tarif impor yang cukup bagi produk-produk pangan kita. Sehubungan dengan usulan tersebut, kami sangat memerlukan dukungan dari Saudara Ketua dan Anggota Dewan Yang Terhormat, khususnya yang ada di Komisi III ini. Upaya-upaya dalam penguatan organisasi petani juga akan terus dilakukan sebagai salah satu cara menurunkan biaya produksi serta fasilitasi peningkatan peranserta swasta melalui kemitraan.

Untuk kedepan, perlu adanya suatu insentif yang memungkinkan swadaya masyarakat dalam upaya perluasan areal pertanian. Peran pemerintah yang penting dalam hal ini adalah, antara lain, pada fasilitasi pembuatan dan perbaikan sistem jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan pengembangan pompanisasi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pembangunan pertanian tahun 2003 merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2002 dengan tekanan perhatian kepada permasalahan dan tantangan yang terus berkembang. Pembangunan pertanian tahun 2003 yang perencanaannya disusun dalam tahun 2002, akan dilakukan penyempurnaan dalam penyusunan kegiatan fasilitasi pembangunan pertanian sejalan dengan semakin mantapnya

struktur pemerintah daerah dan kemampuan aparat daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan fasilitasi dari masyarakat agribisnis.

Berdasarkan Propenas 2000-2004, laju pertumbuhan sektor pertanian tahun 2001 dan tahun 2002 masing masing ditargetkan sebesar 2.5%. Dengan asumsi kondisi perekonomian dan iklim investasi semakin membaik, semakin mantapnya struktur pemerintahan daerah dan kondisi iklim yang lebih bersahabat, tahun 2003 sektor pertanian ditargetkan dapat tumbuh dengan laju 2.7%. Sumber pertumbuhan sektor pertanian tersebut terutama di sub sektor tanaman pangan, khususnya padi dan palawija, perkebunan, peternakan, dan hortikultura.

Kegiatan Program Pengembangan Agribisnis di tahun 2003 akan diarahkan kepada (1) pemantapan pengembangan kawasan agribisnis komoditi komersial non-beras (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan/KIMBUN, dan peternakan), (2) peningkatan kapasitas produksi pangan melalui ekstensifikasi lahan pertanian dan peningkatan intensitas tanam untuk meningkatkan produktivitas, dan (3) pengembangan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.

Dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis komoditas pangan non beras, hortikultura, perkebunan dan peternakan, beberapa kegiatan pokok mencakup: (1) pengembangan sistem perbenihan/perbibitan, (2) perluasan areal, (3) peningkatan intensitas tanam, (4) peningkatan populasi ternak, (5) pengembangan usaha pengolahan, (6) pengembangan pemasaran, dan (7) pengembangan kelembagaan usaha dan layanan agribisnis. Keseluruhan kegiatan tersebut harus ditunjang oleh sistem penelitian dan penyuluhan yang kokoh.

Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Tahun 2003 akan diarahkan kepada: (1) peningkatan produktifitas tanaman pangan, (2) perbaikan penanganan pasca panen, (3) pengamanan harga dasar pembelian gabah, (4) pengentasan kemiskinan dan (5) antisipasi dini dan penanggulangan dampak bencana alam.

Dalam jangka pendek pada tahun 2003, Program Peningkatan Ketahanan Pangan akan tetap difokuskan kepada peningkatan produksi padi, jagung, dan

kedele melalui peningkatan produktivitas di sentra-sentra produksi utama, baik dengan penggunaan benih unggul, hibrida, pola intensifikasi padi-ternak (IPT), pengelolaan tanaman terpadu (PTT) maupun dengan penggunaan pupuk berimbang dan perbaikan sarana produksi lainnya.

Untuk mengoptimalkan program pengembangan agribisnis dan program peningkatan ketahanan pangan, perlu didukung oleh ketersediaan pupuk berimbang. Dalam kaitan itu perlu dikembangkan produksi pupuk berimbang.

Selain itu, untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam pengentasan kemiskinan, porsi anggaran untuk kegiatan-kegiatan P4K, KUM, PIDRA, dan penumbuhan lembaga-lembaga keuangan mikro pedesaan akan lebih ditingkatkan. Melalui upaya ini kita harapkan produksi pangan akan meningkat sejalan dengan penurunan kemiskinan di sektor pertanian.

Pada tahun 2003 pola Bantuan Langsung Masyarakat akan disesuaikan dengan penekanan kepada pengadaan input produksi terutama benih padi dan pupuk berimbang untuk mengantisipasi penurunan produksi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

Pembiayaan pembangunan oleh pemerintah pada dasarnya adalah investasi dalam rangka fasilitasi tumbuhnya investasi masyarakat dengan jumlah yang lebih besar. Investasi pemerintah diselenggarakan dengan fasilitasi pembangunan melalui proyek-proyek pembangunan. Dalam tahun 2003, laju pertumbuhan sektor pertanian ditargetkan sebesar 2,7%. Dengan harapan investasi pemerintah dapat membangkitkan investasi swasta lebih besar dari tahun sebelumnya dan bertambahnya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam tahun 2003 dibutuhkan investasi pemerintah sebesar Rp. 3,05 triliun. Dana tersebut diusulkan dari anggaran rupiah murni sebesar Rp. 2,21 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,84 triliun. Dibandingkan dengan anggaran TA. 2002, kebutuhan anggaran rupiah murni ini meningkat 58%.

Sesuai dengan penetapan prioritas program yang akan dilaksanakan pada TA. 2003, secara rinci kenaikan anggaran ini adalah sebagai konsekuensi dari (1)

kelanjutan dan pematapan program TA. 2002 yang mencakup 996 lokasi/ kawasan Kabupaten/Kota, (2) *crash program* antisipasi penurunan produksi dan produktifitas pangan, khususnya padi sebagai kelanjutan kegiatan TA 2002, (3) rehabilitasi dampak banjir dan *El Nino*, (4) perluasan areal tanaman pangan, (5) pengembangan padi terpadu, (6) masalah-masalah khusus, termasuk penguatan organisasi petani dan penanggulangan kemiskinan, serta (7) asistensi ke daerah-daerah dalam rangka otonomi daerah.

Alokasi anggaran menurut program adalah sebagai berikut:

- (1). *Program Pengembangan Agribisnis* sebesar Rp. 1.83 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp.1.09 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.0,74 triliun.
- (2). *Program Peningkatan Ketahanan Pangan* sebesar Rp. 1.22 triliun yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 1.12 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,10 triliun.

Secara umum Pinjaman Luar Negeri merupakan kelanjutan program Pinjaman Luar Negeri TA. 2002. Untuk mendukung program penelitian dan pengembangan dialokasikan anggaran Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.170 milyar.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasional rutin Departemen Pertanian pada TA. 2003 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 488,64 milyar, mencakup 166 Satuan Unit Kerja Pusat dan UPT Pusat. Dibandingkan dengan Satuan-3 Anggaran Rutin TA. 2002 mengalami peningkatan sebesar 16,8%. Kenaikan anggaran tersebut diperuntukkan bagi Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai terutama biaya langganan daya listrik yang dalam setiap tahun selalu minus.



Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

Demikianlah penjelasan saya secara umum, sedangkan yang bersifat teknis, atas persetujuan pimpinan Komisi, akan disampaikan oleh para Eselon I. Semoga dalam rapat kerja ini kami mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari Anggota Dewan guna menyempurnakan program-program kita ke depan. Terima kasih.

Menteri Pertanian RI


Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





DEPARTEMEN PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN
KOMISI III DPR-RI
TENTANG
PEMBAHASAN REPETA TAHUN 2003 DAN
PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN TAHUN 2003**



JAKARTA, 29 MEI 2002

**PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN PADA PEMBAHASAN
REPETA TAHUN 2003 DAN
PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN TAHUN 2003
29 Mei 2002**

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas RachmatNYA, sehingga memungkinkan terselenggaranya rapat kerja pada hari ini.

Atas nama pimpinan Departemen Pertanian, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya, atas terselenggaranya rapat kerja hari ini. Saya berharap pada rapat kerja hari ini kita akan dapat saling bertukar pikiran, sehingga upaya kita untuk meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan pertanian dapat terus ditingkatkan.

Saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang besar terhadap pembangunan pertanian yang telah disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR–RI kepada Departemen Pertanian. Dukungan dan masukan-masukan tersebut telah banyak disampaikan pada waktu kunjungan kerja ke berbagai daerah secara bersama-sama antara Departemen Pertanian dengan Komisi III DPR yang terhormat. Perhatian yang demikian besar itu telah memberikan tambahan semangat yang lebih kuat bagi kami untuk melaksanakan tugas tugas pembangunan pertanian.

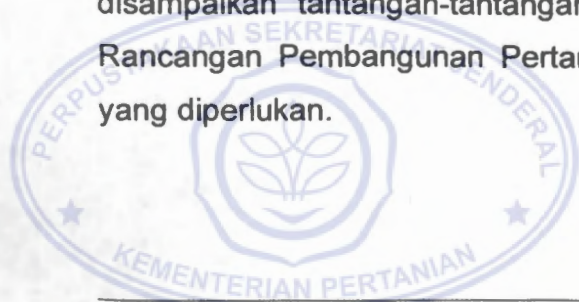
Pada kesempatan rapat kerja hari ini, saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pokok pokok acuan tentang Pembahasan REPETA dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2003. Rancangan kegiatan tahun 2003 disusun berdasarkan pada: (1) evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian yang lalu, (2) tantangan pembangunan pertanian ke depan, (3) hasil-

hasil rapat kerja dengan Komisi III- DPR, dan (4) GBHN 1999-2004 dan Proenas 2001-2004.

Penyampaian bahan rapat kerja hari ini juga dilengkapi penjelasan tentang : (1) Kebijakan Jangka Pendek Pembangunan Pertanian; (2) Upaya Departemen Pertanian Dalam Mengantisipasi Panen Raya Februari-Maret 2002, (3) Konsep Kebijakan Departemen Pertanian untuk pembangunan (a) lahan kering, (b) peternakan, (c) pengembangan agribisnis bagi petani kecil, (d) perkebunan, dan (d) Sumberdaya Manusia dan Penyuluh/PPL; (4) Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan Pertanian; (5) Komponen Pinjaman Luar Negeri TA 2003, (6) Kebutuhan Subsidi Sektor Pertanian tahun 2003, (7) Tindak lanjut Raker dengan Komisi III DPR tanggal 27 Februari 2002 dan (8) Tindak lanjut Temuan BPK-RI Semester II TA 2001, sesuai dengan permintaan topik bahasan yang disampaikan Saudara Ketua Komisi III tanggal 21 Mei 2002 yang lalu. Dengan seijin Saudara Ketua, penjelasan mengenai hal-hal tersebut akan disampaikan oleh pejabat Eselon I terkait.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Di dalam pembicaraan pendahuluan REPETA Tahun 2003 dan RAPBN Tahun 2003 ini, saya akan memulai dari penjelasan isu-isu pokok yang berkembang tahun 2002 ini sebagai basis untuk perencanaan selanjutnya. Adapun latar belakang kegiatan pembangunan pertanian Tahun 2000-2004 yang dilaksanakan melalui *Program Pengembangan Agribisnis* dan *Program Peningkatan Ketahanan Pangan* telah kami laporkan pada Raker tanggal 27 Februari 2002 lalu dan tidak kami ulangi lagi untuk menghemat waktu. Kemudian akan disampaikan tantangan-tantangan yang kita hadapi tahun 2003, dilanjutkan Rancangan Pembangunan Pertanian tahun 2003 serta Rancangan Anggaran yang diperlukan.



Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Salah satu isu pokok dalam pembangunan pertanian yang berkembang saat ini adalah masalah harga gabah pada masa panen raya yang dihadapi setiap tahun, yaitu periode bulan Februari-April. Pada tahun 2002 ini bahwasannya, apa yang menjadi kekhawatiran publik tentang harga gabah akan anjlok ternyata tidak terjadi. Hasil kunjungan kerja Departemen Pertanian bersama-sama dengan beberapa anggota Komisi III DPR menunjukkan harga gabah relatif stabil. Kenyataan ini sangat melegakan bagi kita semua walaupun diakui masih ada daerah yang masih di bawah harga dasar pembelian pemerintah. Kita berharap kecenderungan ini akan berlanjut ke depan sehingga dapat meningkatkan gairah petani untuk memproduksi. Karena masih ada sisa waktu untuk proses produksi untuk tahun 2002 ini disertai dengan upaya peningkatan perluasan areal tanam, angka ramalan I yang dikeluarkan BPS sebesar 48.654 ribu ton diharapkan dapat terlampaui.

Melalui surat saya tanggal 31 Januari 2002 kepada 12 Gubernur propinsi penghasil utama beras telah digerakkan agar mereka meningkatkan koordinasinya dengan Bupati/Walikota untuk memantau pengadaan gabah/beras oleh Dolog/Sub Dolog; serta mengalokasikan dana APBD guna pembelian gabah dari petani. Dorongan ini ternyata direspons secara positif di beberapa daerah seperti di Jawa Timur. Kami akan terus mengupayakan agar pemerintah daerah lebih berperan dalam pengadaan gabah ini sehingga tidak terjadi gejolak harga gabah di lapangan.

Hal lain yang juga menggembirakan adalah bahwa PDB Nasional Triwulan I tahun 2002 menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) tumbuh 2,15 persen dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2001. Apabila dibandingkan di Triwulan yang sama (Triwulan I) tahun 2001 dan 2002, PDB Triwulan I 2002 sebesar 2,47 persen. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pertanian sebesar 16,51 persen, sedangkan pertumbuhan sektor lainnya kurang dari 2 persen. Peningkatan perekonomian didorong oleh peningkatan di subsektor

tanaman bahan makanan, subsektor peternakan dan subsektor perkebunan. Namun demikian kita harus tetap cermat dalam mengambil makna laju pertumbuhan ini mengingat faktor musim dan siklus alami dari produk pertanian yang dihasilkan tidaklah sama untuk setiap komoditas pertanian. Untuk itu kami akan terus meningkatkan monitoring dan menyiapkan tindak lanjutnya agar arah dan besaran kontribusi pertanian terhadap perekonomian nasional dapat diketahui dengan pasti, sesuai dengan karakter dan pola hubungannya dengan dimensi waktu.

Isyu lain yang mencuat ke permukaan adalah masalah kelangkaan pupuk urea dan naiknya harga pupuk. Beberapa waktu lalu di Jawa ditemui adanya kelangkaan pupuk urea di lini III dan IV. Departemen Pertanian telah mengambil langkah-langkah kordinatif dengan instansi terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk memperlancar distribusi di daeran sentra-sentra produksi, antara telah direalokasikan antara lain dari Sumsel dan Kaltim ke Jawa yang kekurangan pupuk. Mengingat masalah ini terkait dengan instansi lain, maka sangat diharapkan dukungan dari Komisi III DPR-RI agar masalah kelangkaan pupuk tidak terjadi di masa mendatang. Hal ini juga menunjukkan bahwa diperlukan harmoni antar semua *stakeholders* agribisnis di semua sub-sistem untuk mengatasi permasalahan-permasalahan disektor pertanian seperti telah dikemukakan dalam *Grand Strategy* "Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis"

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Sebagai tindak lanjut Raker dengan Komisi III DPR-RI tanggal 27 Februari 2002 lalu khususnya dalam penanggulangan dampak banjir yang telah terjadi awal tahun ini, Departemen Pertanian telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, memberikan bantuan kepada para korban bencana alam banjir. Secara bertahap telah disalurkan ke propinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan akan dilanjutkan ke propinsi/kabupaten lain yang mendesak.

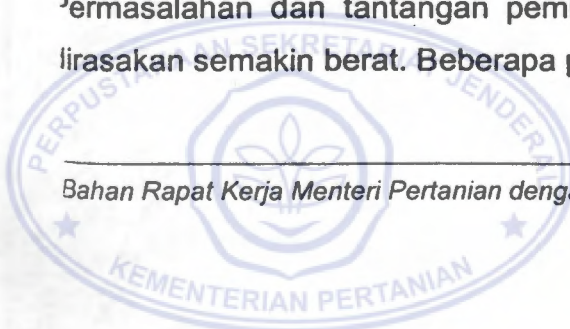
Kedua, menyerukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi para petani dengan peralatan pengering (*dryer*). Upaya fasilitasi tersebut dilakukan dengan memobilisir peralatan pengering bantuan proyek yang ada, terutama yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu dilakukan upaya menggerakkan aparat pertanian dalam menumbuh kembangkan usaha pelayanan jasa yang bergerak di bidang penanganan pasca panen (pengeringan) dan pengolahan hasil. Upaya ini diantaranya dengan memanfaatkan alokasi APBN TA. 2002 yang telah didistribusikan ke daerah.

Dalam tahun 2001 menurut BPS luas panen dan produktivitas padi menunjukkan gejala penurunan. Untuk merespon kecenderungan tersebut, dalam TA. 2002 ini Departemen Pertanian melakukan *pilot project* peningkatan produktivitas padi di 14 propinsi dan 32 Kabupaten yang ditangani secara terpadu oleh Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan, Ditjen Bina Produksi Peternakan, dan Badan Litbang Pertanian. Kita harapkan dampaknya akan positif setelah 1 atau 2 musim tanam tahun ini, untuk kemudian diperluas lagi dalam skala nasional.

Selain masalah produktivitas, masalah perluasan areal melalui pemanfaatan areal tidak produktif seperti lahan tidur dan lain-lain, juga akan mendapat perhatian kita semua. Jumlah lahan tidur di berbagai daerah masih luas, mencapai di atas 1 juta hektar. Pemanfaatan lahan tidur ini akan diagendakan dalam kegiatan TA. 2003 mendatang

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian saat ini dan mendatang dirasakan semakin berat. Beberapa permasalahan kronis pembangunan yang



terkait erat dengan pembangunan pertanian seperti kemiskinan, kecukupan pangan dan pengangguran, masih akan mewarnai program dan kegiatan pembangunan pertanian dalam dekade mendatang. Selain itu pemberlakuan AFTA tahun 2003, dan tendensi keterbukaan perekonomian global memberikan signal kepada kita akan pentingnya masalah pengawasan lalu lintas perdagangan termasuk persyaratan-persyaratan yang diperlukan oleh konsumen domestik kita. Dalam pada itu instrumen-instrumen pengawasan kita seperti laboratorium-laboratorium karantina berstandar internasional masih jauh dari memadai. Ini harus segera kita bangun agar Indonesia tidak menjadi tempat penampungan produk-produk yang tidak layak konsumsi. Laboratorium-laboratorium rujukan pengawasan mutu benih/bibit juga akan mendapatkan perhatian yang sama. Penguatan sarana penelitian dan penyuluhan akan ditingkatkan untuk memacu produktivitas komoditi-komoditi lokal agar dapat lebih bersaing lagi di pasar global. Produktivitas adalah sumber daya utama Indonesia di masa mendatang.

Kemiskinan mempunyai dimensi yang sangat luas, salah satunya adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi suatu kehidupan yang layak. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan merupakan langkah strategis yang erat kaitannya dengan pemerataan, mengurangi keterbelakangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan produktifitas nasional. Dengan demikian, disamping perannya dalam pertumbuhan perekonomian nasional, pembangunan pertanian mempunyai peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan terutama di pedesaan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Oleh karena peranan sub sektor pangan yang sangat besar pada sistem perekonomian nasional, kemandirian pangan akan tetap menjadi fokus perhatian kita pada tahun 2003 mendatang. Upaya yang kita lakukan dalam mengatasi

masalah pangan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menekankan bahwa kemandirian pangan diartikan secara sempit sebagai swasembada pangan. Pendekatan yang kita lakukan adalah melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis, dimana sistem ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada aspek produksi saja tetapi juga mencakup sub-sistem hulu dan hilir yang dikombinasikan dengan upaya diversifikasi konsumsi ke pangan non-beras.

Melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis juga kita menciptakan peluang berusaha khususnya di kegiatan *off-farm* untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Hal ini terutama akan sangat membantu para petani dengan luas kepemilikan lahan yang kecil.

Secara garis besar, upaya mempertahankan laju produksi pertanian terkendala oleh beberapa hal. Pertama, rendahnya produktifitas serta stagnasi inovasi dan adopsi teknologi. Kedua, tingginya biaya produksi yang menjadi beban bagi petani, dan Ketiga, perluasan areal pertanian sangat lambat, sementara konversi lahan pertanian cenderung meningkat.

Untuk mengatasi masalah rendahnya produktivitas, tahun 2003 Departemen Pertanian akan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program penelitian yang diperlukan dalam rangka penciptaan teknologi (benih/bibit, dsb) diiringi dengan peningkatan kualitas SDM termasuk penyuluh pertanian.

Untuk menurunkan biaya produksi, bea masuk input-input pertanian diusulkan untuk dihapus agar tidak memberatkan petani. Sejalan dengan itu diperlukan langkah langkah perlindungan bagi petani, seperti penerapan tarif impor yang cukup bagi produk-produk pangan kita. Sehubungan dengan usulan tersebut, kami sangat memerlukan dukungan dari Saudara Ketua dan Anggota Dewan Yang Terhormat, khususnya yang ada di Komisi III ini. Upaya-upaya dalam penguatan organisasi petani juga akan terus dilakukan sebagai salah satu cara menurunkan biaya produksi serta fasilitasi peningkatan peranserta swasta

melalui kemitraan. Pemanfaatan lahan tidur akan menjadi agenda kegiatan kita pada tahun 2003.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pembangunan pertanian tahun 2003 merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2002 dengan tekanan perhatian kepada permasalahan dan tantangan yang terus berkembang. Pembangunan pertanian tahun 2003 yang perencanaannya disusun dalam tahun 2002, akan dilakukan penyempurnaan dalam penyusunan kegiatan fasilitasi pembangunan pertanian sejalan dengan semakin mantapnya struktur pemerintah daerah dan kemampuan aparat daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan fasilitasi dari masyarakat agribisnis.

Berdasarkan Propenas 2000-2004, laju pertumbuhan sektor pertanian tahun 2001 dan tahun 2002 masing masing ditargetkan sebesar 2.5%. Dengan asumsi kondisi perekonomian dan iklim investasi semakin membaik, semakin mantapnya struktur pemerintahan daerah dan kondisi iklim yang lebih bersahabat, maka pada tahun 2003 sektor pertanian ditargetkan dapat tumbuh dengan laju 2.7%. Sumber pertumbuhan sektor pertanian tersebut terutama di sub sektor tanaman pangan, khususnya padi dan palawija, perkebunan, peternakan, dan hortikultura.

Berdasarkan isu-isu pokok tersebut diatas maka dirumuskan program-program pembangunan pertanian yang dituangkan dalam REPETA 2003. Repeta 2003 bidang pertanian yang telah dilaporkan dalam Sidang Kabinet 2 Mei 2002 yang lalu, dengan kebijakan operasional difokuskan pada:

1. Program Pengembangan Agribisnis, antara lain melalui:
 - a. Peningkatan kordinasi Pusat, Propinsi dan Kabupaten,
 - b. Peningkatan akses: input, teknologi, informasi, dan pasar,
 - c. Peningkatan produksi dan usaha
 - d. Penumbuhan usaha agroindustri terutama di pedesaan
 - e. Pengembangan sistem dan kelembagaan.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, antara lain:
 - a. Peningkatan kordinasi Pusat, Propinsi dan Kabupaten: pada aspek-aspek produksi, distribusi dan pola konsumsi,
 - b. Peningkatan produksi pangan: padi, jagung dan kedele.
 - c. Peningkatan Usaha Bisnis Pangan yang menguntungkan petani,
 - d. Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan
 - e. Peningkatan kemandirian pangan melalui pengembangan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat: Lumbung Pangan Desa dll;
 - f. Konsolidasi penyuluhan pertanian.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan akan tetap difokuskan kepada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedele melalui peningkatan produktivitas di sentra-sentra produksi utama, baik dengan penggunaan benih unggul, hibrida, pola intensifikasi padi-ternak (IPT), pengelolaan tanaman terpadu (PTT) maupun dengan penggunaan pupuk berimbang dan perbaikan sarana produksi lainnya.

Pada tahun 2003 pola Bantuan Langsung Masyarakat akan disesuaikan dengan penekanan kepada pengadaan input produksi (terutama benih padi dan pupuk berimbang), dan pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif seperti lahan tidur. untuk mengantisipasi penurunan produksi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

Sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Komisi III DPRRI tanggal 27 Februari 2002 lalu, dalam tahun 2003 dibutuhkan investasi pemerintah sebesar Rp. 3,05 triliun. Peran pemerintah difokuskan pada upaya fasilitasi pembangunan dan diperkirakan investasinya berkisar 10 persen dari keseluruhan investasi masyarakat dan dunia usaha. Dana yang diusulkan tersebut terdiri dari anggaran rupiah murni sebesar Rp.2.21 triliun dan Pinjaman

Luar Negeri sebesar Rp. 0,84 triliun. Dibandingkan dengan anggaran TA. 2002, kebutuhan anggaran rupiah murni ini meningkat 58%.

Sesuai dengan penetapan prioritas program yang akan dilaksanakan pada TA. 2003, secara rinci kenaikan anggaran ini adalah sebagai konsekuensi dari (1) kelanjutan dan pemantapan program TA. 2002 yang mencakup 996 lokasi/kawasan Kabupaten/Kota, (2) *crash program* antisipasi penurunan produksi dan produktifitas pangan, khususnya padi sebagai kelanjutan kegiatan TA 2002, (3) rehabilitasi dampak banjir dan *El Nino*, (4) perluasan areal tanaman pangan, (5) pengembangan padi terpadu, (6) masalah-masalah khusus, termasuk penguatan organisasi petani, pengembangan teknologi, penanggulangan kemiskinan, pengembangan laboratorium-laboratorium karantina dan pengawasan benih/bibit, serta (7) asistensi ke daerah-daerah dalam rangka otonomi daerah dan penyuluhan pertanian.

Alokasi anggaran menurut program adalah sebagai berikut:

- (1). *Program Pengembangan Agribisnis* sebesar Rp. 1.83 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp.1.09 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.0,64 triliun.
- (2). *Program Peningkatan Ketahanan Pangan* sebesar Rp. 1.22 triliun yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 1.12 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,20 triliun.

Secara umum Pinjaman Luar Negeri merupakan kelanjutan program Pinjaman Luar Negeri TA. 2002. Untuk mendukung program penelitian dan pengembangan dialokasikan anggaran Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.250 milyar. Alokasi anggaran penelitian ini meningkat lebih dari 40 persen, mengingat inovasi dan adopsi teknologi merupakan prasyarat peningkatan daya saing dan produktivitas komoditi pertanian mendatang.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasional rutin Departemen Pertanian pada TA. 2003 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 488,64 milyar, mencakup 166 Satuan Unit Kerja Pusat dan UPT Pusat. Dibandingkan dengan Satuan-3 Anggaran Rutin TA. 2002 mengalami peningkatan sebesar 16,8%. Kenaikan anggaran tersebut diperuntukkan bagi Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai terutama biaya langganan daya listrik yang dalam setiap tahun selalu minus.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

Demikianlah penjelasan saya secara umum, sedangkan uraian yang bersifat operasional, atas persetujuan pimpinan Komisi III, akan disampaikan oleh para Eselon I. Semoga dalam rapat kerja ini kami mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari Anggota Dewan guna menyempurnakan program-program kita ke depan. Terima kasih.

Menteri Pertanian RI


Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





DEPARTEMEN PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI**

TENTANG

**TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS
HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN GORONTALO
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2001-2002**



JAKARTA, 25 JUNI 2002

**PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN
PADA
RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI, 25 JUNI 2002**

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNYA, sehingga pada hari ini untuk kesekian kalinya kami jajaran Departemen Pertanian dapat bertemu dengan Komisi III DPR-RI yang terhormat dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sebelum saya menyampaikan materi rapat kerja hari ini, perkenankan saya kembali mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan dan komitmen yang besar dari anggota Komisi III DPR-RI terhadap pembangunan pertanian. Masukan baik saran maupun kritik yang disampaikan oleh anggota Komisi III DPR-RI kepada Departemen Pertanian merupakan dorongan yang kuat bagi kami untuk melaksanakan tugas tugas pembangunan pertanian.

Pada kesempatan rapat kerja hari ini, bahasan yang disampaikan terutama berkaitan dengan hasil-hasil kunjungan kerja dengan Komisi III DPR-RI di provinsi Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur, pada masa reses persidangan III tahun 2001-2002. Dalam pengantar penjelasan atas hasil temuan tersebut akan saya sampaikan beberapa pandangan terhadap perkembangan pembangunan pertanian terakhir, sedangkan penjelasan lebih rinci tentang temuan dari hasil kunjungan anggota Komisi III, atas ijin dan persetujuan Ketua Komisi akan disampaikan oleh saudara pejabat Eselon I terkait.



Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Melalui berbagai kunjungan anggota DPR-RI dapat disaksikan peran pertanian sebagai sumber pendapatan, lapangan kerja serta sebagai penggerak ekonomi daerah. Anggota DPR juga telah melihat beberapa keberhasilan dan masalah yang terjadi dalam pembangunan pertanian di propinsi Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo. Pembangunan pertanian masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan infrastruktur, akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal, pasar dan rendahnya kualitas SDM.

Dari hasil kunjungan tersebut anggota DPR juga telah menyampaikan saran-sarannya. Temuan dan saran dari hasil kunjungan anggota DPR-RI merupakan masukan berharga baik bagi pemerintah daerah yang bersangkutan terutama bagi dinas teknis terkait maupun bagi pemerintah pusat dalam rangka penyempurnaan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan pertanian antara pusat dan daerah.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Dengan dukungan terus menerus dari Komisi III, pembangunan pertanian telah memperlihatkan hasil-hasil yang menjanjikan. Ini terlihat dari kinerja pembangunan pertanian di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Sebagaimana telah dilaporkan pada Raker tanggal 29 Mei 2002 lalu, PDB Nasional Triwulan I tahun 2002 tumbuh 2,15 persen dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pertanian sebesar 16,51 persen, sedangkan pertumbuhan sektor lainnya kurang dari 2 persen. Peningkatan perekonomian didorong oleh peningkatan di subsektor tanaman bahan makanan sebesar 48,58 persen, subsektor peternakan 8,23 persen, dan subsektor kehutanan 5,95 persen.

Pertumbuhan pertanian tersebut secara riil telah diumumkan secara resmi oleh BPS minggu lalu. Produksi padi nasional menurut angka ramalan II (ARAM II) BPS tahun 2002 adalah sebesar 50,84 juta ton, atau naik 0,75% dari produksi tahun 2001 sebesar 50,46 juta ton. Untuk kedelai, ARAM II sebesar 930.078 ton,

atau naik sebesar 12,47% dari produksi tahun 2001 sebesar 826.932 ton. Sedangkan untuk jagung, ARAM II adalah 9,55 juta ton atau naik 2,17% dari produksi tahun 2001 sebesar 9,35 juta ton.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan melalui beberapa program terpadu, antara lain percepatan tanam terutama sebagai bagian dari penanggulangan banjir, kegiatan dalam rangka perluasan luas panen dan peningkatan produktivitas serta didukung oleh kondisi iklim yang relatif normal. Kita patut bersyukur ancaman kekeringan panjang sebagai akibat El-nino yang semula diramalkan tidak terjadi. Dengan dukungan iklim dan upaya khusus yang telah direncanakan kita optimis produksi tanaman pangan masih dapat ditingkatkan lagi tahun 2002 ini, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Seperti kita ketahui bersama, sepanjang awal tahun 2002 ini sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami musim hujan, sebagian diantaranya dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi yang mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Langkah-langkah cepat penanggulangan yang telah dilakukan telah berhasil meminimalkan dampak banjir tersebut.

Sepanjang tahun 2002 juga kita menyaksikan tidak terjadinya gejolak harga ditingkat petani. Sebagian besar (sekitar 89%) petani dapat menikmati harga dasar yang ditetapkan pemerintah dan hanya sekitar 11% petani menerima harga di bawah harga dasar. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain: (a) memfasilitasi para petani dengan peralatan pengering (*dryer*) melalui mobilisasi peralatan pengering bantuan proyek yang lalu, (b) menggerakkan aparat pertanian dalam menumbuhkembangkan usaha pelayanan jasa yang bergerak di bidang penanganan pasca panen (pengeringan) dan pengolahan hasil, dan (c) kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam pemantauan pengadaan gabah, dan (d) himbuan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana APBD guna pembelian gabah petani, disamping adanya Inpres No.9 tahun 2001 tentang harga dasar pembelian pemerintah oleh

Bulog telah berhasil dengan baik. Langkah langkah yang dilakukan tersebut telah memberikan insentif bagi petani padi dan pada gilirannya lebih menggairahkan petani untuk berusaha.

Langkah langkah yang dilakukan tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun 2002 dan 2003. Perlunya dana talangan untuk pembelian gabah pada saat panen raya yang kami usulkan merupakan salah satu bentuk konkrit fasilitasi yang direncanakan. Dana talangan dimaksud akan lebih efektif jika dialokasikan ke daerah-daerah sentra produksi, dan lebih bagus lagi jika menggunakan dana alokasi khusus (DAK). Untuk itu kami meminta dukungan dari Komisi III DPR-RI untuk merealisasikan pemikiran ini.

Dalam tahun 2003, perhatian dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan petani pangan masih tetap menjadi fokus utama program pertanian kita. Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui perpaduan peningkatan produktivitas dan perluasan areal. Beberapa rencana telah dirancang dalam upaya peningkatan produktivitas melalui peningkatan mutu intensifikasi serta pengembangan padi hibrida. Kegiatan perluasan areal dirancang melalui pemanfaatan lahan tidur/terlantar yang jumlahnya sangat besar.

Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan petani telah pula diprogramkan pengembangan pola usahatani terpadu berbasis pangan, melalui usahatani terpadu pangan-ternak, pangan-ikan (mina padi), pangan-kebun dan pangan-hutan (agro-forestri).

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Di sub sektor hortikultura, pada tahun 2001 telah dilakukan fasilitasi dan pematangan kelembagaan agribisnis hortikultura di 30 Propinsi, yang meliputi : kelembagaan industri perbenihan, perlindungan tanaman, peningkatan mutu produk untuk meningkatkan daya saing di pasar dalam dan luar negeri yang diiringi dengan penerapan teknologi maju, pengembangan komoditi unggulan di

kawasan sentra untuk mencapai skala ekonomi. Pada tahun 2002 dikembangkan sentra komoditas unggulan hortikultura (nasional dan daerah) di 154 lokasi (Kabupaten/Kota) di 30 Propinsi, yang mencakup 17 jenis komoditas unggulan buah-buahan, 6 komoditas sayuran, 3 komoditas tanaman obat dan 2 komoditas tanaman hias.

Dalam tahun 2003 program pengembangan kawasan sentra komoditas hortikultura di 154 sentra (Kabupaten/Kota) akan terus dimantapkan serta direncanakan penumbuhan 150 kawasan sentra baru (Kabupaten/Kota) yang tersebar di 30 Propinsi. Program prioritas lainnya dalam mendukung pengembangan dan penumbuhan kawasan sentra adalah melindungi tanaman jeruk dari serangan CVPD dan diplodia, *fusarium* pada pisang dan lalat buah pada mangga. Dengan pengembangan 154 kawasan sentra pada tahun 2002 dan ditambah 150 kawasan sentra baru pada tahun 2003 yang diikuti dengan penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar (*good farming practices*), diharapkan akan dihasilkan produk-produk hortikultura yang bermutu tinggi, sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun pasar ekspor.

Di sub sektor perkebunan, fokus kegiatan bidang pengembangan produksi tahun 2001 meliputi kegiatan peningkatan produktivitas; pengembangan kelembagaan dan kemitraan dengan kegiatan pokok fasilitasi penumbuhan dan pengembangan ekonomi perkebunan, penumbuhan *Cooperative Commodity Development Center* (CCDC), penumbuhan dan pengembangan kemitraan usaha perkebunan; pengolahan dan pemasaran dengan kegiatan pokok penerapan unit pengolahan hasil, penyediaan informasi pasar; serta fasilitasi pengembangan tanaman, sarana dan prasarana.

Hasil yang dicapai pada tahun 2001 antara lain: (1) meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan rata-rata di atas 50 persen, bahkan karet, kakao, kelapa dan kelapa sawit mencapai di atas 65 persen; (2) terbentuknya 11 asosiasi petani pekebun, serta terbinanya 200 unit koperasi perkebunan dan CCDC di 3 propinsi; meningkatnya pendapatan petani; (3) meningkatnya pembangunan

kebun seluas 627.901 ha, produksi berbagai komoditas perkebunan 418.600 ton dan penyerapan tenaga kerja 353.564 orang.

Pada tahun 2002, fokus kegiatan diarahkan sebagai stimulan pembangunan perkebunan melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis perkebunan dengan pendekatan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), melalui kegiatan: (1) Peningkatan produktivitas; (2) Pemantapan dan penataan kelembagaan; dan (3) Pemberdayaan petani.

Pengembangan pembangunan perkebunan pada tahun 2003 diarahkan pada kegiatan untuk: (1) melanjutkan kegiatan tahun-tahun sebelumnya; (2) meningkatkan fungsi inovasi balai-balai penelitian perkebunan dikaitkan dengan peningkatan produktivitas; (3) membangun simpul-simpul pasar yang perlu dikuatkan sebagai pusat inovasi bisnis berbasis KIMBUN.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Dalam dua tahun terakhir (2000-2002) pembangunan peternakan secara umum mulai menunjukkan gejala pemulihan kembali (*recovery*). Gambaran ini dapat terlihat dari peningkatan produksi hasil ternak yang meliputi daging meningkat 4,7%, telur 7,7% dan susu 2,7%. Demikian juga konsumsi masyarakat telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi perkapita masyarakat untuk daging meningkat 5,2 %, telur 9,9 % dan susu 2,1%. Namun demikian peningkatan produksi hasil ternak (daging, telur dan susu) ternyata berdampak pada penurunan populasi ternak, khususnya ternak-ternak rakyat. Penurunan populasi ini diakibatkan laju pemotongan ternak di RPH-RPH seluruh Indonesia, sehingga pemotongan ternak setiap harinya untuk sapi potong saja mencapai sekitar 1,8 juta ekor, padahal pada tahun sebelumnya baru mencapai 1,5-1,6 juta ekor. Apabila tidak dilakukan upaya-upaya yang serius untuk menangani penurunan ternak sapi potong ini, maka akan menyebabkan terjadinya pengurasan populasi

ternak-ternak rakyat terutama di wilayah sumber-sumber bibit ternak sapi potong, di wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat.

Upaya-upaya khusus yang bersifat terobosan akan dilakukan, yaitu melalui program peningkatan populasi ternak secara cepat untuk menambah populasi ternak yang ada melalui pengadaan bibit-bibit ternak impor. Upaya tersebut meliputi: (a) Pengadaan bibit ternak impor sebesar 20.000 ekor; dalam hal ini pemerintah akan mendorong swasta untuk pengadaan tersebut (b) Pengembangan ternak sumber daging alternatif selain sapi seperti kerbau, kelinci dan lainnya sesuai dengan potensi spesifik daerah; (c) Secara paralel akan dilakukan pengendalian dan penyelamatan pemotongan hewan betina produktif, pengembangan inseminasi buatan (IB) secara besar-besaran; (d) Perbaikan mutu bibit ternak lokal dan pengamanan ternak melalui pengendalian dan pemberantasan penyakit reproduktif (*Brucellosis* dan penyakit hewan menular lainnya)

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Terhormat,

Pembangunan pertanian diarahkan kepada peningkatan sebesar besarnya partisipasi masyarakat, dan pemerintah/aparat berperan dalam memfasilitas dan merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat tersebut. Dalam kurun waktu dua tahun telah dibangun kesamaan persepsi aparat pemerintah berkaitan dengan perubahan paradigma pembangunan pertanian. Penerapan pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diinisiasi oleh komisi III DPR dan telah dijadikan model pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian, saat ini dinilai merupakan model yang paling baik. Dalam implementasinya beberapa daerah bahkan telah mulai menerapkan bunga terhadap BLM tersebut antara lain Kalbar, Sumbar, dan Lampung. Hal ini sangat menggembirakan karena menunjukkan kemampuan petani dalam mengembalikan pinjaman, asalkan modal tersebut tersedia dan mudah

diperoleh. Penerapan model ini dalam tahun 2003 akan lebih disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Tantangan pembangunan pertanian saat ini dan kedepan semakin kompleks. Upaya menumbuhkan usaha agribisnis masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan baik yang berkaitan dengan sinergi kebijakan dan pelaksanaan di dalam negeri maupun berkaitan dengan dinamika pasar internasional.

Upaya mensinergiskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan agribisnis saat ini yang mandatnya tersebar di berbagai instansi akan terus dilakukan. Dengan dukungan komisi III yang terhormat, usaha-usaha ini telah mulai menunjukkan hasil. Namun demikian tanpa mengurangi penghargaan atas upaya yang telah dilakukan tersebut, kami menilai sinergisme yang terjadi belum optimal. Untuk itu melalui forum ini, kami masih meminta dukungan yang kontinyu dari Komisi III.

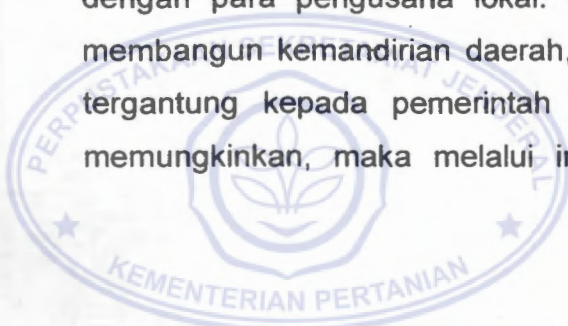
Dari uraian sebelumnya dapat dikemukakan bahwa kegiatan usaha agribisnis lebih bergairah setelah terpuruk akibat krisis. Momentum ini harus kita bangkitkan dan pupuk terus agar agribisnis kita mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Kegiatan produksi suatu komoditi tidak hanya semata dinilai dari daya saing dalam jangka pendek, tetapi juga harus dinilai dalam perspektif yang lebih luas dan jangka panjang. Kegiatan produksi merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja masyarakat yang pada gilirannya akan menstimulir kemampuan daya beli dan pembangunan daerah. Namun demikian dalam membangun sistem dan usaha agribisnis kegiatan produksi saja tidak cukup untuk mensejahterakan petani.

Kebijakan perdagangan juga akan berdampak langsung terhadap pendapatan petani kita. Kebijakan perdagangan yang kita miliki saat ini ditandai oleh kecilnya perlindungan terhadap komoditas pertanian kita, terutama komoditas pangan.

Bea masuk impor beras saat ini adalah Rp 430/kg, gula 25%, kedele dan jagung 0%. Untuk komoditas lainnya juga sangat kecil sejak ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI ke I) dengan IMF tanggal 13 Januari 1998 lalu. Dengan demikian Indonesia merupakan negara yang sangat memegang komitmen tinggi dalam mematuhi perjanjian (*good boy*) dengan badan-badan internasional, termasuk dengan WTO. Dalam pada itu, beberapa negara menerapkan bea masuk yang cukup tinggi untuk melindungi petani. Thailand, misalnya, menerapkan bea masuk beras sebesar 60%, dikombinasi dengan kuota; Jepang 351 Yen/ kg, dan Filipina 50%. Belum lagi adanya beberapa negara yang melakukan praktek *dumping* dan subsidi yang tinggi yang menyebabkan petani kita semakin sulit untuk bersaing. Oleh karena itu kita akan segera mengusulkan penyesuaian bea masuk komoditas pertanian yang lebih adil dengan tetap mengacu pada ketentuan WTO.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dalam merespons hasil-hasil kunjungan kerja anggota Komisi III ke Gorontalo dan NTT saya ingin menyegarkan pikiran kita akan adanya Undang-undang No.22 Tahun 1999. Walaupun sejak diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan PP 25 tahun 2000, dimana permasalahan pertanian daerah merupakan tanggung jawab masing-masing daerah, Departemen Pertanian tetap memberikan perhatian yang besar dalam mendorong pembangunan pertanian di daerah. Hal ini diimplementasikan melalui alokasi anggaran dekonsentrasi sebesar 85% di daerah tahun 2002. Untuk itu melalui forum ini saya mohon pengertian kita bersama untuk merangsang kreativitas daerah dalam membangun daerahnya masing-masing dengan dukungan APBD dan kemitraan dengan para pengusaha lokal. Dengan cara ini secara bertahap kita akan membangun kemandirian daerah, sehingga pada saatnya mereka tidak terlalu tergantung kepada pemerintah pusat. Sepanjang alokasi anggaran APBN memungkinkan, maka melalui instrumen dekonsentrasi kita akan fokus ke



daerah-daerah yang mengalami masalah-masalah strategis yang dapat berdampak pada skala nasional.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi permasalahan spesifik di **Gorontalo**, antara lain (1) keterbatasan modal petani untuk membeli benih bermutu tinggi, (2) terbatasnya sarana peternakan terutama peralatan inseminasi buatan, sarana jalan di areal perkebunan dan (3) masalah peremajaan kelapa, serta (4) langkanya tenaga penyuluh, merupakan masukan yang sangat berharga bagi kita untuk dipecahkan secara bersama dengan instansi terkait.

Permasalahan-permasalahan spesifik yang menonjol di **Nusa Tenggara Timur** yaitu antara lain berupa (1) minimnya sarana seperti irigasi, alat dan mesin (alsin) dan permodalan, (2) rendahnya produktifitas dan (3) rendahnya mutu sumber daya manusia. Secara lebih khusus di sub sektor perkebunan ditemui adanya serangan hama tanaman kelapa di Ende dan Alor dan masalah petugas honorer yang belum diangkat sebagai PNS. Untuk sub sektor peternakan ditemui masalah penurunan populasi ternak dan kurangnya sapi betina produktif serta lemahnya penyuluhan. Masalah lain adalah sarana karantina yang kurang memadai di Waingapu.

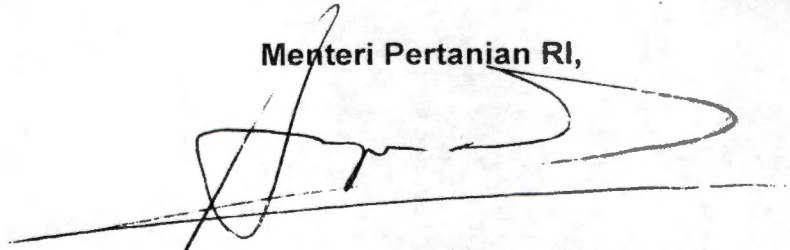
Saya ingin menegaskan bahwa bantuan dari Departemen Pertanian akan selalu dialokasikan untuk membantu memberdayakan daerah agar secara bertahap mereka dapat mandiri mengatasi permasalahan-permasalahan lokal. Berbagai permasalahan yang disampaikan oleh anggota Komisi III DPR-RI tersebut mencakup berbagai subsistem dan usaha agribisnis dari mulai hulu sampai hilir termasuk subsistem penunjang seperti penyuluhan dan teknologi. Masalah-masalah tersebut akan selalu menjadi agenda kerja pemerintah, baik yang menyangkut kordinasi lintas sektoral, pusat-daerah, maupun intern Departemen Pertanian.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Demikian penjelasan saya secara umum, sedangkan uraian yang bersifat operasional, atas persetujuan pimpinan Komisi III, akan disampaikan oleh para eselon I terkait. Kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang berharga dari anggota dewan guna peningkatan kinerja pembangunan pertanian kita kedepan.

Terima kasih.

Menteri Pertanian RI,



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





DEPARTEMEN PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENKO PEREKONOMIAN,
MENTERI PERTANIAN, DAN MENTERI
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI**

TENTANG

**KEBIJAKAN TERHADAP KELUAR MASUKNYA
KOMODITAS STRATEGIS HASIL PERTANIAN**



JAKARTA, 17 JULI 2002

PENGANTAR

MENTERI PERTANIAN PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI, MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN, MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBIJAKAN TERHADAP KELUAR DAN MASUKNYA KOMODITI STRATEGIS HASIL PERTANIAN TANGGAL 17 JULI 2002

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI

Saudara Menteri Kordinator Bidang Perekonomian, beserta jajarannya

Saudara Menteri Perdagangan dan Perindustrian, beserta jajarannya

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNYA, sehingga pada hari ini kami jajaran Departemen Pertanian dapat bertemu dengan yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi III DPR-RI, sekaligus juga dengan yang terhormat Saudara Menteri Kordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Perdagangan dan Perindustrian beserta staf dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saya menyadari bahwa dalam menjalankan tugas tugas pembangunan, kita tidak dapat berjalan sendiri sendiri. Demikian pula dalam menjalankan tugas tugas pembangunan pertanian, Departemen Pertanian tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dan kordinasi dengan Departemen dan instansi lainnya. Upaya mensinergiskan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan agribisnis saat ini, yang mandatnya tersebar di berbagai instansi, akan terus dilakukan.

Oleh karena itu, saya memandangi pertemuan hari ini, yang diinisiasi oleh Komisi III, sangat penting dan strategis untuk lebih meningkatkan kordinasi, baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk membangkitkan

perekonomian serta mengatasi kemiskinan di Indonesia. Dalam menunjang pembangunan pertanian, saya sependapat dengan Komisi III akan pentingnya kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada masyarakat tani sekaligus mendukung usulan Komisi III DPR untuk mencabut berbagai kebijakan yang dapat menyengsarakan petani. Mengawali sambutan ini, saya akan menyinggung hal-hal yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan yang lebih spesifik sesuai dengan permintaan anggota Dewan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya Hormati,

Secara umum di berbagai negara berkembang terdapat kecenderungan bahwa sektor pertanian selalu dituntut menyediakan produksi dengan harga murah dan stabil untuk mengamankan variabel makro (inflasi, pertumbuhan ekonomi, *trade balance* dan sebagainya). Sektor pertanian juga dituntut mendukung sektor industri dengan menyediakan bahan baku dan menyediakan pangan murah bagi para pekerja kota.

Kebijakan makro dan perdagangan yang kita rancang belum memihak petani tetapi lebih memihak konsumen. Kesulitan dalam akses kredit oleh petani dan pengusaha agribisnis skala kecil, serta kecilnya alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur publik pendukung pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani menyebabkan tingginya biaya produksi dan biaya transaksi. Dicabutnya subsidi pupuk 2 Desember 1998 lalu--diiringi dengan diturunkannya bea masuk impor terutama pangan (maksimum 5 % saat itu) telah menurunkan gairah berproduksi dan membanjirnya impor karena minimnya perlindungan petani. Dipihak lain kita berlakukan pajak ekspor bagi komoditas ekspor seperti CPO.

Menurut kajian yang ada, kebijakan perdagangan kita memproteksi sektor industri 10 kali lebih besar dari sektor pertanian. Jadi kebijaksanaan perdagangan berbias kepada manufaktur, mendiskriminasi sektor berbasis sumberdaya lokal. Dengan demikian kesejahteraan petani yang direfleksikan oleh nilai tukar petani lebih banyak ditentukan oleh kebijakan luar sektor pertanian. *Regime* perdagangan

yang kita rancang lebih merangsang impor ketimbang ekspor dan umumnya tidak kondusif terhadap kesejahteraan petani. Saya mengusulkan agar dirancang suatu mekanisme untuk mengendalikan impor (*safeguard mechanism*) terutama komoditas pangan guna menolong petani.

Saudara Pimpinan, Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya perkenankan saya menjelaskan secara ringkas kebijakan yang ditempuh oleh Departemen Pertanian. Setelah itu saya akan menjelaskan beberapa permasalahan kebijakan mengenai keluar masuknya komoditas pertanian dengan mengacu pada pokok pokok acuan yang disampaikan oleh Komisi III melalui suratnya tertanggal 4 Juli 2002.

Untuk kesekian kalinya, saya sampaikan bahwa pembangunan pertanian Tahun 2000-2004 dilaksanakan melalui *Program Pengembangan Agribisnis* dan *Program Peningkatan Ketahanan Pangan*. Program Pengembangan Agribisnis ditujukan dalam rangka fasilitasi berkembangnya usaha agribisnis sub-sistem hulu, *on farm*, pengolahan, pemasaran hasil dan sub-sistem penunjang yang dibangun oleh masyarakat petani, serta mengembangkan peluang usaha pada semua sub-sistem. Sedangkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan ditujukan dalam rangka fasilitasi bagi peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui (1) peningkatan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan serta produk-produk olahan, (2) pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menguntungkan petani, (3) pengembangan budaya dan produksi pangan lokal, dan (4) pengembangan kelembagaan pangan yang dibangun oleh masyarakat sebagai kelembagaan usaha yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pembangunan pertanian tahun 2003 merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2002 dengan tekanan perhatian kepada permasalahan dan tantangan yang terus berkembang. Penyempurnaan dalam penyusunan kegiatan fasilitasi pembangunan pertanian masih terus dilakukan sejalan dengan perubahan

struktur pemerintahan dan kemampuan aparat daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan fasilitasi dari masyarakat agribisnisnya.

Program Pengembangan Agribisnis di tahun 2003 akan diarahkan kepada (1) peningkatan koordinasi kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah, (2) peningkatan akses dan optimalisasi sumberdaya lahan dan air, (3) Peningkatan akses pelaku agribisnis terhadap permodalan, (4) peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana agribisnis, (5) penyediaan dan perbaikan akses petani terhadap teknologi dan pasar, (6) penumbuhan usaha agribisnis dan (7) penguatan kelembagaan karantina dalam mengawasi lalu lintas perdagangan komoditas pertanian.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan tahun 2003 diarahkan kepada (1) peningkatan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan di tingkat pusat maupun daerah, (2) peningkatan akses dan optimalisasi sumberdaya lahan dan air bagi produksi bahan pangan, (3) peningkatan produktivitas komoditas pangan, (4) penyempurnaan sistem deteksi dini kerawanan pangan, (5) penumbuhan kemandirian masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan, dan (6) penyusunan peraturan pemerintah tentang pangan.

Dalam jangka pendek, Program Peningkatan Ketahanan Pangan tetap difokuskan kepada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedele melalui peningkatan produktivitas di sentra-sentra produksi, baik dengan penggunaan benih unggul, hibrida, pola intensifikasi padi-ternak (IPT), pengelolaan tanaman terpadu (PTT) maupun dengan penggunaan pupuk berimbang dan perbaikan sarana produksi lainnya. Untuk mengoptimalkan program pengembangan agribisnis dan program peningkatan ketahanan pangan, akan didukung oleh ketersediaan pupuk berimbang.

Pengalaman kita dalam memanfaatkan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) selama ini dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam membantu petani mengatasi

masalah keterbatasan permodalan. Menyadari pentingnya KKP tersebut, kami sangat mengharapkan agar cakupannya diperluas tidak hanya pada komoditas padi, tetapi juga untuk komoditas pertanian lainnya seperti perkebunan, peternakan dan hortikultura.

Kebutuhan anggaran pemerintah untuk sektor pertanian tahun 2003 adalah sebesar Rp. 3,05 triliun. Dana tersebut diusulkan dari anggaran rupiah murni sebesar Rp.2.21 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,84 triliun yang akan digunakan untuk: (1) kelanjutan dan pemantapan program tahun 2002 yang mencakup 996 lokasi/ kawasan Kabupaten/Kota, (2) pelaksanaan *crash program*antisipasi penurunan produksi dan produktifitas pangan, khususnya, (3) rehabilitasi dampak banjir dan kekeringan, (4) perluasan areal tanaman pangan, (5) pengembangan padi terpadu, (6) penanganan masalah-masalah khusus, dan (7) kegiatan asistensi ke daerah-daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Kedepan, anggaran pembangunan sektor pertanian masih perlu terus ditingkatkan untuk dapat menjawab tantangan pembangunan pertanian yang semakin kompleks. Dalam hal pengalokasian anggaran pembangun pertanian dan pedesaan, Departemen Pertanian tidak mempermasalahkan di instansi manapun anggaran itu ditempatkan, yang penting digunakan untuk menunjang pembangunan agribisnis.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya Hormati,

Seperti saya singgung dimuka, kebijakan perdagangan komoditas pertanian jelas akan berdampak langsung terhadap pendapatan petani kita. Kebijakan bea masuk komoditas pertanian yang kita miliki saat ini masih mencerminkan kecilnya perlindungan terhadap petani kita, terutama petani komoditas pangan. Bea masuk impor beras saat ini adalah Rp 430/kg, gula putih Rp. 700/kg; raw sugar Rp. 550/kg, kedele dan jagung 0%. Perlu saya tegaskan disini bahwa kita tetap mendukung upaya terwujudnya perdagangan bebas dalam kerangka WTO, tetapi

perlu diingat bahwa perdagangan bebas yang kita inginkan adalah perdagangan bebas yang adil dan dapat mensejahterakan petaninya, bukan yang menyengsarakan. Untuk itu, kita sangat memerlukan kebijakan perdagangan yang berpihak kepada kepentingan petani, khususnya petani yang berskala usaha kecil. Seperti yang saya paparkan dalam rapat dengan Komisi III bulan lalu, beberapa negara menerapkan bea masuk yang cukup tinggi untuk melindungi petaninya. Thailand, misalnya, menerapkan bea masuk beras sebesar 60%, dikombinasi dengan kuota; Jepang 341 Yen/ kg dengan sistem tarif kuota, dan Filipina 50%. Belum lagi adanya beberapa negara yang melakukan praktek *dumping* dan subsidi yang tinggi yang menyebabkan petani kita semakin sulit untuk bersaing. Menyadari permasalahan ini, saya sependapat dengan Komisi III bahwa bea masuk (*import tariff*) untuk komoditas pertanian, khususnya beras, jagung, gula dan terigu, perlu segera disesuaikan agar tidak memiskinkan petani. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rapat hari ini, saya mengusulkan penyesuaian bea masuk komoditas pertanian yang lebih adil dengan tetap mengacu pada ketentuan WTO.

Menanggapi saran Komisi III untuk menghentikan impor komoditas tertentu pada saat panen raya, pemerintah perlu mempelajari lebih lanjut dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Dalam situasi dimana impor telah membahayakan ekonomi domestik, langkah itu dimungkinkan melalui *safeguard* atau *special and differential measure* (S & D) dalam aturan WTO. Selain itu pemerintah telah mengambil langkah-langkah antisipasi jatuhnya harga komoditas pada saat panen raya. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) yang dilengkapi dengan Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 05/DJPLN/KP/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Jenis Barang Impor Tertentu Yang Wajib Menggunakan NPIK. Berdasarkan keputusan keputusan tersebut, jenis barang yang termasuk bidang pertanian adalah jagung, beras, kacang kedelai dan gula. Kita berharap kiranya pelaku usaha (importir)

dapat menyusun rencana impor yang disesuaikan dengan musim panen masing-masing komoditas tersebut. Kita berharap agar kebijaksanaan yang baik ini benar-benar diimplementasikan di lapangan.

Kebijakan lain adalah menyangkut menyangkut harga dasar pembelian pemerintah untuk padi sebesar Rp. 1519,./kg GKG (sampai di gudang Bulog), atau setara beras Rp. 2470/kg. (INPRES NO. 9, tahun 2002).

Departemen Pertanian mengusulkan adanya semacam dana talangan yang dapat digunakan untuk pembelian gabah petani khususnya pada saat panen raya. Disamping itu, juga mengusulkan adanya dana yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menanggulangi bencana alam di daerah-daerah sentra produksi pertanian. Untuk itu, sekali lagi saya mohon dukungan dari Komisi III dan Menko Perekonomian.

Mengenai permasalahan cengkeh kami sependapat dengan Komisi III tentang perlunya tindakan secara terpadu dari berbagai instansi terkait untuk mengantisipasi dampak penurunan harga cengkeh di tingkat petani. Tindakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas, peningkatan konsumsi, perbaikan harga, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani cengkeh. Kami juga sependapat dengan Komisi III tentang perlunya pengaturan tata niaga dan pembatasan impor cengkeh yang tidak merugikan petani. Sesuai dengan ketentuan WTO, untuk komoditas cengkeh masih dapat dikenakan instrumen kebijakan kuota impor, bea masuk, penerapan harga patokan impor, dan importir terdaftar.

Dalam upaya penanggulangan kelangkaan pupuk, Departemen Pertanian sependapat dengan Komisi III dalam pemberhentian sementara ekspor pupuk produksi dalam negeri sambil menunggu peluang yang ada pada saat pasokan pupuk di dalam negeri benar-benar dapat tercukupi. Kebijakan perluasan pabrik merupakan langkah penyelesaian yang tepat. Hal ini dilakukan melalui pembangunan pabrik pupuk urea Pupuk Iskandar Muda 2 (PIM-2) dan Kujang-I B

dengan kapasitas masing-masing 570.000 ton per tahun, serta peremajaan pabrik pupuk yang sudah tua. Langkah tersebut ditempuh dalam rangka pengamanan suplai pupuk di lapangan, khususnya urea, sehingga diharapkan kasus kelangkaan pupuk di lapangan dapat segera teratasi dan tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang.

Selain langkah perluasan pabrik pupuk dan peremajaan pabrik yang sudah tua, serangkaian kebijakan lain di bidang pupuk yang perlu ditempuh antara lain (1) penetapan harga gas bumi yang kompetitif untuk industri pupuk, (2) penyempurnaan sistem distribusi pupuk (tunggal dan majemuk), (3) merumuskan kebijakan industri pupuk majemuk, dan (4) kemungkinan penerapan pajak ekspor pupuk urea.

Dukungan infrastruktur, khususnya irigasi dan jalan desa (*farm road*) sangat diperlukan dalam pengembangan agribisnis di pedesaan. Untuk irigasi, misalnya, perlu upaya perbaikan dan pembangunan sarana irigasi sebagai upaya antisipasi kekeringan yang datang setiap tahun. Perbaikan dan pembangunan jalan desa (*farm road*) agar biaya transportasi hasil produk pertanian yang harus dibayar oleh petani dapat diturunkan. Perbaikan dan penyediaan infrastruktur tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada daya saing harga produk pertanian kita, baik di pasar domestik maupun internasional.

Dalam penyediaan input produksi yang diperlukan petani, diperlukan kebijakan pemerintah yang menunjang pengembangan pupuk majemuk serta pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Bea masuk bagi input produksi yang diperlukan oleh petani kita perlu diturunkan sedemikian rupa agar harganya lebih terjangkau. Bea masuk untuk alat-alat pertanian yang ada sekarang berkisar antara 15-20%.

Kebijakan industri di daerah perlu diarahkan pada upaya mendukung pengembangan agribisnis dengan membangun industri pengolahan di sentra sentra produksi yang telah dikembangkan oleh Departemen Pertanian atau

instansi pertanian di daerah. Selain itu, perlu diupayakan penghapusan peraturan daerah (misalnya retribusi dan peraturan daerah yang menghambat kelancaran perdagangan komoditas pertanian antar propinsi) yang dapat menyebabkan peningkatan biaya pada petani dan pada gilirannya menurunkan daya saing produk-produk pertanian kita.

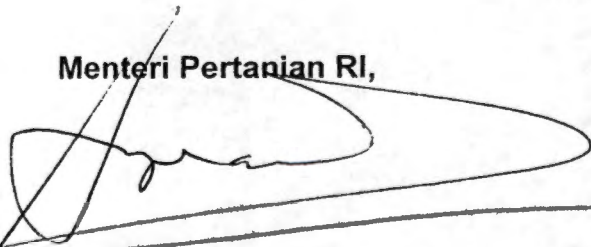
Upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menggalang investor luar negeri agar dapat bermitra dengan pengusaha agribisnis kita untuk menggarap dan mengolah produk produk pertanian kita, misalnya dalam pengolahan minyak sawit, kakao, minyak astiri dan lain lain. Bagaimana kita mengupayakan terobosan pasar komoditas pertanian di luar negeri, dan bagaimana mengatasi masalah masalah penolakan produk pertanian kita di luar negeri, misalnya kakao, lada dan lainnya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Demikian penjelasan saya secara umum, sedangkan uraian yang lebih detail apabila diperlukan, dengan senang hati akan kami sampaikan dalam diskusi nanti.

Terima kasih.

Menteri Pertanian RI,



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





MENTERI PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI
TENTANG
SATUAN-3 RAPBN TAHUN 2003 DAN TANGGAPAN
ATAS HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DAN
BANGKA BELITUNG**



JAKARTA, 12 SEPTEMBER 2002

**PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI, TENTANG
SATUAN 3 RAPBN TAHUN 2003 DAN TEMUAN KOMISI III DPR-RI SELAMA
KUNJUNGAN KERJA KE KALIMANTAN TENGAH DAN BANGKA BELITUNG
12 SEPTEMBER 2002**

***Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNYA, sehingga pada hari ini kami jajaran Departemen Pertanian dapat bertemu kembali dengan yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi III DPR-RI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Tujuan rapat kerja hari ini, sesuai permintaan Komisi III, adalah untuk membahas Satuan 3 RAPBN Tahun Anggaran 2003 sekaligus juga membahas temuan temuan para anggota Komisi III selama kunjungannya ke Kalimantan Tengah dan Bangka Belitung. Mengawali sambutan ini, saya akan mengemukakan hal-hal yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan yang lebih spesifik sesuai dengan permintaan anggota Dewan.

Saya menyadari bahwa dalam menjalankan tugas tugas pembangunan pertanian Departemen Pertanian tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dan kordinasi dengan Departemen dan instansi lainnya. Upaya mensinergiskan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan agribisnis saat ini, yang mandatnya tersebar di berbagai instansi, akan terus dilakukan. Saya juga menyadari bahwa selama ini Departemen Pertanian telah banyak mendapatkan dukungan dan perhatian yang serius dari Komisi III dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Sehubungan dengan hal itu,

perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi III.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya Hormati,

Untuk kesekian kalinya, saya sampaikan bahwa pembangunan pertanian Tahun 2000-2004 dilaksanakan melalui *Program Pengembangan Agribisnis* dan *Program Peningkatan Ketahanan Pangan*. Program Pengembangan Agribisnis ditujukan dalam rangka fasilitasi berkembangnya usaha agribisnis sub-sistem hulu, *on farm*, pengolahan, pemasaran hasil dan sub-sistem penunjang yang dibangun oleh masyarakat petani, serta mengembangkan peluang usaha pada semua sub-sistem. Sedangkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan ditujukan dalam rangka fasilitasi bagi peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui (1) peningkatan keanekaragaman produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan serta produk-produk olahan, (2) pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif dan menguntungkan petani, (3) pengembangan budaya dan produksi pangan lokal, dan (4) pengembangan kelembagaan pangan yang dibangun oleh masyarakat sebagai kelembagaan usaha yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pembangunan pertanian tahun 2003 merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2002 dengan tekanan perhatian kepada permasalahan dan tantangan yang terus berkembang. Penyempurnaan dalam penyusunan kegiatan fasilitasi pembangunan pertanian masih terus dilakukan sejalan dengan perubahan struktur pemerintahan dan kemampuan aparat daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan fasilitasi dari masyarakat agribisnisnya.

Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan PDB nasional triwulan II tahun 2002 naik 0,52% dibandingkan dengan triwulan I tahun 2002, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2001 triwulan yang sama, naiknya 3,51%. Pertumbuhan itu menurut BPS didorong oleh

pertumbuhan sektor pertanian yang pada triwulan II 2002 naik sebesar 1,62% dibanding triwulan I 2002 atau 2,34% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2001.

PDB sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) pada triwulan II tahun 2002 mengalami kenaikan sebesar 22,4% dibandingkan triwulan II tahun 2001. Kenaikan ini terutama didorong oleh adanya kenaikan pada sub sektor tanaman bahan makanan yang mengalami kenaikan sebesar 35,1% pada periode yang sama. Sedangkan kenaikan PDB dari sub sektor pertanian lainnya adalah masing-masing 12,4% untuk sub sektor peternakan dan 1,3% untuk perkebunan. Hal itu tentu sangat menggembirakan kita semua, sehingga semakin menguatkan keyakinan kita untuk membangun sistem dan usaha agribisnis melalui program-program yang telah kita sepakati bersama.

Program Pengembangan Agribisnis di tahun 2003 diarahkan kepada (1) peningkatan koordinasi kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah, (2) peningkatan akses dan optimalisasi sumberdaya lahan dan air, (3) peningkatan akses pelaku agribisnis terhadap permodalan, (4) peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana agribisnis, (5) penyediaan dan perbaikan akses petani terhadap teknologi dan pasar, (6) penumbuhan iklim usaha agribisnis dan (7) penguatan kelembagaan karantina dalam mengawasi lalu lintas perdagangan komoditas pertanian.

Adapun Program Peningkatan Ketahanan Pangan tahun 2003 diarahkan kepada (1) peningkatan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan dalam penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan di tingkat pusat maupun daerah, (2) peningkatan akses dan optimalisasi sumberdaya lahan dan air bagi produksi bahan pangan, (3) peningkatan produktivitas komoditas pangan, (4) penyempurnaan sistem deteksi dini kerawanan pangan, (5) penumbuhan kemandirian masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan, dan (6) penyusunan peraturan pemerintah tentang pangan.

Dalam jangka pendek, Program Peningkatan Ketahanan Pangan tetap difokuskan kepada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedele melalui peningkatan produktivitas di sentra-sentra produksi, baik dengan penggunaan benih unggul, hibrida, pola intensifikasi padi-ternak (IPT), pengelolaan tanaman terpadu (PTT) maupun dengan penggunaan pupuk berimbang dan perbaikan sarana produksi lainnya. Untuk mengoptimalkan program pengembangan agribisnis dan program peningkatan ketahanan pangan, akan didukung oleh ketersediaan pupuk berimbang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya Hormati,

Kebijakan perdagangan komoditas pertanian jelas akan berdampak langsung terhadap pendapatan petani kita. Kebijakan bea masuk komoditas pertanian yang kita miliki saat ini masih mencerminkan kecilnya perlindungan terhadap petani kita, terutama petani komoditas pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Departemen melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan No. 267/TP.310/AVIII/2002, tgl 30 Agustus telah mengusulkan perubahan harga dasar pembelian komoditas pertanian (khususnya gabah) oleh pemerintah dan bea masuk impor beberapa komoditas pertanian. Harga pembelian oleh pemerintah diusulkan naik 15% untuk gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) atau setara beras dari Rp 2470/kg menjadi Rp.2840/kg. Bea masuk spesifik beras diusulkan naik dari Rp.430/kg menjadi Rp.735/kg. Kebijakan tersebut dimaksud sebagai insentif bagi petani karena dapat memberikan keuntungan yang layak dari usaha tani padinya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tentunya harus dimbangi dengan upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas pada tingkat *of-farm* yang dapat meningkatkan produksi padi nasional sekaligus memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Mulai bulan Agustus 2002, bea masuk gula putih telah disesuaikan menjadi Rp. 700/kg dan *raw sugar* Rp. 550/kg. Adapun bea masuk untuk komoditas pertanian

lainnya Departemen Pertanian masih terus mengkaji agar tidak merugikan petani kita. Perlu saya tegaskan disini bahwa kita tetap mendukung upaya terwujudnya perdagangan bebas dalam kerangka WTO, tetapi perlu diingat bahwa perdagangan bebas yang kita inginkan adalah perdagangan bebas yang adil dan dapat mensejahterakan petaninya. Untuk itu, kita sangat memerlukan kebijakan perdagangan yang berpihak kepada kepentingan petani, khususnya petani yang berskala usaha kecil.

Pengalaman kita dalam memanfaatkan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) selama ini dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam membantu petani mengatasi masalah keterbatasan permodalan. KKP yang telah dialokasikan adalah sebesar Rp.2.08 triliun, dengan realisasi Rp.681,5 milyar sampai dengan ahir Agustus 2002. Mengingat KKP akan berakhir Desember 2003, perlu dukungan Anggota Dewan agar penyaluran KKP dapat diperpanjang. Kajian menyeluruh tentang KKP ini akan kami sampaikan bulan depan. Namun demikian, dari temuan sementara menunjukkan bahwa KKP ini sangat membantu petani dalam hal permodalan. Menyadari pentingnya akan KKP tersebut, kedepan cakupannya diperluas tidak hanya pada komoditas padi, tetapi juga untuk komoditas pertanian lainnya seperti perkebunan, peternakan dan hortikultura.

Demikian juga pada saat ini Pemerintah sedang menyusun "SKIM KREDIT AGRIBISNIS (SKA) yang cakupannya tidak saja pada usaha on farm tetapi juga mencakup mulai dari hulu sampai ke hilir seperti : pengadaan alat dan mesin, pengolahan hasil dan sejenisnya. Mengingat usahatani agribisnis ini dilakukan oleh petani dari pengusaha kecil maka diharapkan dukungan Anggota Dewan yang terhormat terhadap Skim Kredit Agribisnis ini, yaitu melalui penyediaan subsidi bunga sebesar 6% untuk on farm dan 4% di luar on farm. Besarnya subsidi ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan subsidi bunga KKP, yaitu sebesar 10% untuk KKP Tanaman Pangan dan 6% untuk KKP TRI dan Ternak.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya Hormati,

Dalam upaya penanggulangan kelangkaan pupuk kebijakan perluasan pabrik merupakan langkah penyelesaian yang tepat. Hal ini dilakukan melalui pembangunan pabrik pupuk urea PIM-2 dan Kujang-I B dengan kapasitas masing-masing 570.000 ton per tahun, serta peremajaan pabrik pupuk yang sudah tua. Langkah tersebut ditempuh dalam rangka pengamanan suplai pupuk di lapangan, khususnya urea, sehingga diharapkan kasus kelangkaan pupuk di lapangan dapat segera teratasi dan tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang.

Untuk tahun 2003 Pemerintah akan mengusulkan pemberian subsidi agar harga pupuk di tingkat usahatani dapat terjangkau oleh petani. Besarnya subsidi pupuk yang diusulkan pemerintah berkisar Rp. 1,2 – 1,5 triliun. Dengan adanya subsidi pupuk ini diharapkan harga urea turun dari Rp. 1400/kg menjadi Rp. 1150/kg; SP36 dari Rp. 1800-2000/kg menjadi Rp. 1500/kg; dan NPK dari Rp. 2000-2500/kg menjadi Rp. 1750/kg di tingkat petani.

Dukungan infrastruktur, khususnya irigasi dan jalan desa (*farm road*) sangat diperlukan dalam pengembangan agribisnis di pedesaan. Untuk irigasi, misalnya, perlu upaya perbaikan dan pembangunan sarana irigasi sebagai upaya antisipasi kekeringan yang datang setiap tahun. Perbaikan dan pembangunan jalan desa (*farm road*) agar biaya transportasi hasil produk pertanian yang harus dibayar oleh petani dapat diturunkan. Perbaikan dan penyediaan infrastruktur tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada daya saing harga produk pertanian kita, baik di pasar domestik maupun internasional.

Tahun 2003, Departemen Kimpraswil memperoleh alokasi anggaran sebesar 4,1 triliun yang dapat digunakan untuk (a) pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan lainnya, (b) penyediaan air baku (c) pelestarian dan konservasi (d) pengendalian banjir dan pantai dan (e) pengembangan agropolitan. Dari total anggaran tersebut, alokasi yang langsung diarahkan untuk mendukung peningkatan

produksi padi berjumlah sekitar Rp. 1,5 triliun. Pemanfaatan dana ini akan kami koordinasikan dengan Menteri Kimpraswil untuk perbaikan saluran irigasi di sentra-sentra produksi di Pulau Jawa dan perbaikan tata air mikro di lahan-lahan pasang surut seperti di Propinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat

Dalam penyediaan input produksi yang diperlukan petani, diperlukan kebijakan pemerintah yang menunjang pengembangan pupuk majemuk serta pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Bea masuk bagi input produksi yang diperlukan oleh petani kita perlu diturunkan sedemikian rupa agar harganya lebih terjangkau. Bea masuk untuk alat-alat pertanian yang ada sekarang berkisar antara 15-20%.

Kebijakan industri di daerah perlu diarahkan pada upaya mendukung pengembangan agribisnis dengan membangun industri pengolahan di sentra sentra produksi yang telah dikembangkan oleh Departemen Pertanian atau instansi pertanian di daerah. Selain itu, perlu diupayakan penghapusan peraturan daerah (misalnya retribusi dan peraturan daerah yang berdampak pada kelancaran perdagangan komoditas pertanian antar propinsi) yang dapat menyebabkan peningkatan biaya pada petani yang pada gilirannya dapat menurunkan daya saing produk-produk pertanian kita.

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menggalang investor luar negeri agar dapat bermitra dengan pengusaha agribisnis kita untuk menggarap dan mengolah produk produk pertanian kita, misalnya dalam pengolahan minyak sawit, kakao, minyak astiri dan lain lain. Bagaimana kita mengupayakan terobosan pasar komoditas pertanian di luar negeri, dan bagaimana mengatasi masalah masalah penolakan produk pertanian kita di luar negeri, misalnya kakao, lada dan lainnya.



Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Dalam hal kebutuhan anggaran, pada awalnya Departemen Pertanian, seperti yang diusulkan dalam rapat kerja dengan Komisi III tanggal 29 Mei 2002 yang lalu, mengajukan anggaran sektor pertanian tahun 2003 adalah sebesar Rp. 3,05 triliun. Dana tersebut diusulkan dari anggaran rupiah murni sebesar Rp.2.21 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,84 triliun.

Namun dengan adanya keterbatasan penerimaan dan anggaran pemerintah, total anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp. 2,62 triliun yang terdiri dari Rp. 2,0 triliun Rupiah Murni dan Rp. 0,62 triliun Pinjaman Luar Negeri. Dibandingkan dengan total anggaran TA 2002, anggaran TA 2003 mengalami kenaikan sebesar Rp. 0.37 triliun atau naik sebesar 16.50%.

Kenaikan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan, antara lain:

- 1) sebagai dana talangan untuk mendukung ketahanan pangan sebesar Rp. 155 milyar,
- 2) perluasan areal menunjang ketahanan pangan Rp.139,80 milyar,
- 3) pengembangan tebu rakyat Rp.54,00 milyar
- 4) peningkatan produktifitas khususnya pangan dan
- 5) perluasan cakupan kegiatan di kabupaten dan lokasi baru yang belum pernah menerima fasilitas pemerintah dari 996 lokasi di 296 kabupaten/kota tahun 2002 menjadi 1144 lokasi di hampir seluruh kabupaten/kota (368) tahun 2003.

Perlu dicatat pula bahwa, alokasi anggaran pembangunan pertanian di Indonesia Bagian Timur ditingkatkan. Proporsi alokasi anggaran pembangunan pertanian di Indonesia Bagian Timur dan Barat yang pada tahun 2002 38%:62% berubah menjadi kurang lebih 56%:44%. Demikian pula halnya daerah tertinggal lainnya di Bagian Barat akan ditingkatkan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasional rutin Departemen Pertanian pada TA. 2003 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 484,271 milyar, mencakup 208 Satuan Unit Kerja Pusat dan UPT Pusat. Dibandingkan dengan Satuan-3 Anggaran Rutin TA. 2002 mengalami peningkatan sebesar 15,79%. Kenaikan anggaran tersebut diperuntukkan bagi Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai terutama biaya pemeliharaan gedung dan kantor, serta langganan daya dan jasa yang setiap tahun selalu minus.

Dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sub Sektor Pertanian T.A. 2003 akan dilakukan peningkatan upaya-upaya inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan intensifikasi pemungutannya, Target PNBP TA. 2003 dari sumber-sumber penerimaan yang ada adalah sebesar Rp. 46.211.976.000,-

Dibandingkan dengan target PNBP TA. 2002, maka target PNBP TA. 2003 ini mengalami peningkatan sebesar 134,36 persen. Dari target PNBP tersebut direncanakan akan dimanfaatkan kembali sebagai penerimaan fungsional sebesar Rp.2.712.811.000,-. dan untuk membiayai operasional kegiatan Belanja Pegawai dan Non Pegawai pada tahun berjalan.

Kita menyadari bahwa alokasi anggaran tahun 2003 masih kurang memadai. Oleh karena itu, Departemen Pertanian melalui suratnya No.568/KU.310/BVII/2002 tanggal 25 Juli 2002 telah mengajukan tambahan anggaran ke Bappenas dan Departemen Keuangan sebesar Rp.754 milyar untuk lebih memantapkan dan memperluas cakupan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya.

Kedepan, anggaran pembangunan sektor pertanian masih perlu terus ditingkatkan untuk dapat menjawab tantangan pembangunan pertanian yang semakin kompleks. Dalam hal pengalokasian anggaran pembangun pertanian


dan pedesaan, Departemen Pertanian tidak mempermasalahkan di instansi manapun anggaran itu ditempatkan, yang penting digunakan untuk menunjang pembangunan agribisnis.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Demikian penjelasan saya secara umum, sedangkan temuan-temuan Anggota Dewan dalam kunjungan kerjanya ke Kalteng dan Bangka Belitung, atas persetujuan Sdr Ketua akan ditanggapi oleh para Eselon I. Demikian pula uraian yang lebih detail apabila diperlukan, dengan senang hati akan disampaikan dalam diskusi nanti.

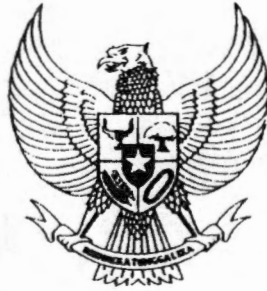
Terima kasih.

Menteri Pertanian RI,



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





DEPARTEMEN PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN
KOMISI III DPR-RI**

TENTANG

**HASIL KUNJUNGAN KERJA
KOMISI III DPR – RI KE PROPINSI PAPUA
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER S/D 5 OKTOBER 2002
DAN DKI JAKARTA
PADA TANGGAL 15 S/D 18 OKTOBER 2002
DLM RESES MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2002 - 2003**



JAKARTA, 11 NOPEMBER 2002

**PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI, TENTANG
TEMUAN KOMISI III DPR-RI SELAMA KUNJUNGAN KERJA KE
PROPINSI PAPUA TANGGAL 30 SEPTEMBER S/D 5 OKTOBER 2002 DAN
KE DKI JAKARTA TANGGAL 15 S/D 18 OKTOBER 2002**

Jakarta, 11 Nopember 2002

***Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNYA, sehingga pada hari ini kami jajaran Departemen Pertanian dapat bertemu kembali dengan yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi III DPR-RI dalam keadaan sehat wal'afiat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Saudara-saudara yang beragama Islam. Dalam keadaan berpuasa, saya yakin kita semakin bersemangat dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita.

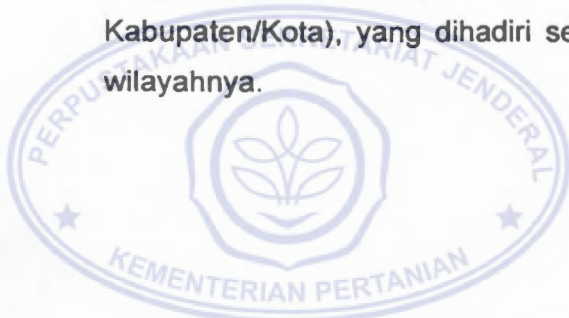
Saya menyadari bahwa dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan pertanian Departemen Pertanian tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dan koordinasi dengan Departemen dan instansi lainnya. Upaya mensinergikan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan agribisnis saat ini, yang mandatnya tersebar di berbagai instansi, akan terus dilakukan. Saya juga menyadari bahwa selama ini Departemen Pertanian telah banyak mendapatkan dukungan dan perhatian yang serius dari Komisi III dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi III yang telah berupaya memberikan dorongan dalam melaksanakan pembangunan pertanian.

Sesuai permintaan Komisi III, tujuan dari rapat kerja ini adalah untuk membahas temuan para anggota Komisi III selama kunjungannya ke Propinsi Papua tanggal 30 September s/d 5 Oktober 2002 dan ke DKI Jakarta tanggal 15 s/d 18 Oktober 2002. Mengawali tanggapan Departemen Pertanian terhadap temuan-temuan tersebut, saya akan mengemukakan hal-hal yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan yang lebih spesifik sesuai dengan permintaan anggota Dewan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Pembangunan pertanian tahun 2003 merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2002 dengan program utama (1) Program Pengembangan Agribisnis dan (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program Pengembangan Agribisnis pada intinya adalah untuk memperbesar nilai tambah yang diterima oleh para pelaku agribisnis; sedangkan Program Ketahanan Pangan pada intinya adalah peningkatan akses, distribusi dan pengadaan pangan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa rencana kegiatan pembangunan pertanian tahun 2003 merupakan rangkuman dari usulan rencana pembangunan pertanian setiap propinsi, yang dihimpun dan disepakati melalui serangkaian Rapat Koordinasi Regional Perencanaan. Usulan pembangunan tingkat propinsi merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian Tingkat Propinsi (Rakorbangtan-Propinsi) yang dihadiri oleh wakil-wakil seluruh kabupaten kota dan pelaku agribisnis. Sedangkan usulan rencana pembangunan pertanian tiap kabupaten/kota dirumuskan melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian Kabupaten/Kota (Rakorbangtan Kabupaten/Kota), yang dihadiri seluruh *stakeholders* pembangunan pertanian di wilayahnya.



Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Operasionalisasi kegiatan pembangunan pertanian dilakukan melalui pengembangan kawasan-kawasan baik untuk pengembangan agribisnis maupun untuk meningkatkan ketahanan pangan. Penentuan jenis kawasan komoditas telah memperhitungkan berbagai aspek, antara lain agroklimat dan pasar di masing-masing daerah dengan mengacu pada kebijakan pengembangan nasional.

Di propinsi Papua, Program Peningkatan Ketahanan Pangan dilakukan di seluruh kabupaten/kota melalui pengembangan pangan lokal spesifik dan penyuluhan pertanian. Peningkatan produksi padi melalui program peningkatan mutu intensifikasi dilakukan di kabupaten Merauke dan Jayapura. Dalam upaya peningkatan kapasitas produksi juga telah dilakukan perluasan areal. Pengembangan kawasan agribisnis komoditas tanaman pangan mencakup komoditas jagung, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Kawasan agribisnis tanaman hortikultura mencakup salak, rambutan, mangga, matoa, durian dan sayuran. Komoditas perkebunan yaitu kakao, kopi, kelapa dan pala dan komoditas peternakan meliputi ayam buras, sapi potong, dan babi.

Berbeda dengan propinsi lain pada umumnya, sebagai propinsi konsumen, kegiatan pembangunan pertanian di DKI diprioritaskan kepada aspek pengolahan dan pemasaran serta kegiatan karantina. Pengembangan usaha pertanian dilakukan sesuai dengan pertanian kota. Untuk itu fasilitasi dilakukan bagi pengembangan kawasan agribisnis Anggrek dan Tanaman Hias Kota. Di sub sektor peternakan usaha yang difasilitasi untuk dikembangkan adalah itik.

Dalam jangka pendek, Program Peningkatan Ketahanan Pangan difokuskan pada komoditas padi, jagung, dan kedelai melalui peningkatan produktivitas di sentra-sentra produksi, baik dengan penggunaan benih unggul, hibrida, pola intensifikasi

padi-ternak (IPT), pengelolaan tanaman terpadu (PTT) maupun dengan penggunaan pupuk berimbang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Rancangan APBN di luar anggaran rutin Sektor Pertanian TA. 2003 dialokasikan sebesar Rp. 2,61 triliun. Rancangan anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 2,00 triliun dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp.0,61 triliun. Apabila dibandingkan dengan alokasi Anggaran Pembangunan Pertanian TA. 2002, maka rancangan alokasi anggaran TA. 2003 secara total meningkat sebesar 16,08%, dengan peningkatan Rupiah Murni sebesar 42,86% dan penurunan PHLN sebesar 28,19%. Menurunnya rencana PHLN TA. 2003 tersebut karena telah berakhirnya dan tidak diperpanjangnya sejumlah proyek Pinjaman Luar Negeri pada tahun 2002 serta belum efektifnya pelaksanaan sejumlah proyek PHLN baru.

Rancangan alokasi anggaran pembangunan Program Pengembangan Agribisnis diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan pertanian nasional, yaitu peningkatan nilai tambah produk pertanian, peningkatan perolehan devisa serta pemenuhan kebutuhan produk pertanian dalam negeri. Sedangkan rancangan alokasi anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan diarahkan untuk mendukung peningkatan penyediaan pangan bagi masyarakat serta pengembangan sistem ketahanan pangan masyarakat di wilayah.

Adanya kenaikan anggaran pembangunan pertanian TA. 2003 akan dimanfaatkan untuk: a) mendukung upaya-upaya peningkatan produktifitas pertanian, terutama pangan, b) memacu peningkatan perluasan areal tanam padi untuk mengimbangi laju konversi lahan pertanian, c) mengembangkan penelitian untuk mendukung peningkatan daya saing dan produktifitas, d) meningkatkan kegiatan penyuluhan pertanian, e) penanggulangan kemiskinan serta f) mengembangkan kelembagaan permodalan di pedesaan.

Pada TA. 2003 diupayakan adanya keseimbangan alokasi anggaran antar wilayah, yaitu Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia. Alokasi anggaran untuk Kawasan Timur Indonesia terutama diarahkan untuk memfasilitasi upaya peningkatan produksi pangan, diantaranya melalui perluasan areal tanam dan optimalisasi pemanfaatan lahan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Alokasi anggaran Propinsi Papua TA.2003 adalah sebesar Rp. 61,68 milyar. Rancangan anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 55,57 milyar dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebesar 6,11 milyar. Apabila dibandingkan total alokasi Anggaran Pembangunan Pertanian TA. 2002 sebesar 35,20 milyar, yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 31,52 milyar dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 3,68 milyar, maka rancangan alokasi anggaran TA. 2003 secara total meningkat sebesar 75,22%, dengan peningkatan Rupiah Murni sebesar 76,31% dan PHLN sebesar 65,92 %.

Anggaran pembangunan Program Pengembangan Agribisnis di Papua diarahkan untuk mendukung penumbuhan kawasan pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

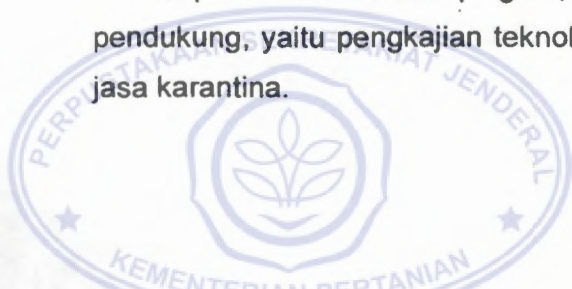
Disamping itu, anggaran dimanfaatkan pula untuk memfasilitasi sub sistem pendukung yaitu pengkajian teknologi pertanian spesifik wilayah, pengembangan kelembagaan agribisnis dan SDM pertanian, pelayanan jasa karantina serta pengembangan pengolahan hasil dan pemasaran. Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan secara operasional dimanfaatkan untuk fasilitasi dan pembinaan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat terutama di daerah rawan pangan di 14 kabupaten. Kegiatannya mencakup a) pengembangan lumbung pangan, b) pemanfaatan pekarangan, c) pengembangan pangan local, dan d) pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, alokasi anggaran dimanfaatkan pula untuk pengembangan mutu intensifikasi padi di 2 Kabupaten

yaitu Merauke dan Jayapura yang didukung oleh upaya proteksi tanaman dan pengembangan perbenihan, pengendalian penyakit hewan, pengembangan areal pangan di lahan perkebunan dan pemberdayaan penyuluhan di 6 kabupaten. Disamping itu pada TA. 2003 Propinsi Papua mendapat tambahan alokasi anggaran untuk upaya perluasan areal tanaman pangan yang sangat potensial dan sampai saat ini belum dimanfaatkan. Dengan perluasan areal ini diharapkan luas baku lahan di Papua akan meningkat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Alokasi Propinsi DKI Jakarta TA.2003 adalah sebesar Rp. 9,76 milyar. Rancangan anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 9,04 milyar dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebesar Rp.0,73 milyar. Apabila dibandingkan total alokasi Anggaran Pembangunan Pertanian TA. 2002 sebesar Rp. 10,53 milyar, yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 9,23 milyar dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 1,30 milyar, maka alokasi anggaran TA. 2003 secara total menurun sebesar 7,29%, dengan penurunan Rupiah Murni sebesar 2,12% dan PHLN sebesar 44,00 %.

Alokasi anggaran pembangunan Program Pengembangan Agribisnis di DKI Jakarta diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan agribisnis di wilayah yang berbasis: (1) tanaman pangan, yang mencakup pengembangan pengolahan hasil dan pemasaran serta pengembangan prasarana, (2) hortikultura yang mencakup anggrek, tanaman hias, dan belimbing, dan (3) peternakan yang mencakup pengembangan pengolahan hasil dan pemasaran serta prasarana dan sarana peternakan. Disamping itu, anggaran dimanfaatkan pula untuk sub sistem pendukung, yaitu pengkajian teknologi pertanian spesifik wilayah dan pelayanan jasa karantina.



Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan secara operasional akan dimanfaatkan untuk fasilitasi dan pembinaan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat. Kegiatannya mencakup: a) pengendalian penyakit hewan, b) pengembangan mutu intensifikasi, c) proteksi dan pengembangan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya hormati,

Apabila kita cermati kembali lebih dalam mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, operasionalisasinya adalah kewenangan pemerintah pusat hanya terbatas pada aspek pengaturan, penetapan standar, pedoman umum dan norma. Oleh karenanya pembangunan pertanian sepenuhnya dilaksanakan di kabupaten/kota dan keberhasilan dan kegagalannya menjadi tanggung jawab para bupati/walikota. Untuk mendukung keberhasilan tersebut inisiatif maupun kreatifitas daerah dalam mengimplementasikan program-program pembangunan sangat dibutuhkan. Untuk lebih mensinergikan hubungan kerja pemerintah pusat dan daerah pada kesempatan ini saya menghimbau kepada para Anggota Dewan untuk juga melakukan koordinasi dengan anggota Dewan yang berada di daerah (DPRD) sehingga lebih mengharmoniskan hubungan kerja yang selama ini kita bangun bersama.

Saya sangat berterima kasih kepada Anggota Dewan yang telah mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Hasil kunjungan ke propinsi Papua dan DKI dan temuan berbagai persoalan dari hulu ke hilir seperti terbatasnya bibit unggul, permodalan, transportasi, pupuk, alsintan, irigasi, kualitas SDM petani, pembebasan lahan/tanah yang sulit dan mahal, dan harga komoditas yang tidak kondusif, merupakan permasalahan yang tetap akan menjadi perhatian pemerintah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Departemen Pertanian tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan sektor pertanian di daerah tanpa

dukungan dari instansi dan pihak lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kedepan, koordinasi berbagai instansi di daerah dan pusat perlu terus ditingkatkan.

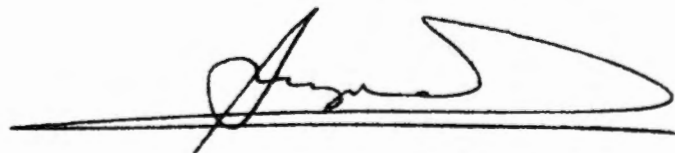
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya hormati,

Seperti dijadwalkan, rapat kerja pada hari ini antara lain akan diikuti oleh kunjungan ke lapangan untuk melihat kesiapan kita menghadapi hari raya keagamaan menjelang ahir tahun 2002. Saya sangat menghargai gagasan ini, karena kunjungan lapangan akan memberikan gambaran langsung apa yang dihadapi masyarakat.

Demikian penjelasan saya secara umum, sedangkan tanggapan atas pertanyaan serta temuan-temuan Anggota Dewan selama kunjungan kerjanya ke Papua dan DKI Jakarta, saya sampaikan secara tertulis. Demikian pula uraian yang lebih detail apabila diperlukan, dengan senang hati akan disampaikan kemudian.

Terima kasih.

Menteri Pertanian RI,



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





DEPARTEMEN PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN
KOMISI III DPR-RI**

TENTANG

**HASIL KUNJUNGAN KERJA
KE PROPINSI SUMATERA SELATAN DAN
KALIMANTAN BARAT,
TANGGAL 5 S/D 8 JANUARI 2003
PADA RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG
2002-2003**



JAKARTA, 27 FEBRUARI 2003



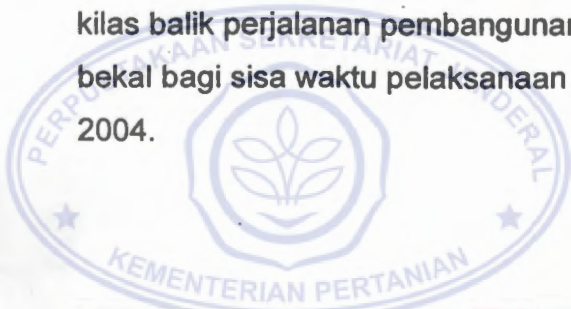
**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI,
TENTANG
TEMUAN KOMISI III DPR-RI SELAMA KUNJUNGAN KERJA
MASA PERSIDANGAN KE II 2002-2003 KE SUMATERA SELATAN DAN
KALIMANTAN BARAT TANGGAL 5 S/D 8 JANUARI 2003**

Jakarta, 27 Pebruari 2003

***Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNYA, sehingga pada hari ini kami jajaran Departemen Pertanian dapat bertemu kembali dengan yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi III DPR-RI dalam keadaan sehat wal'afiat. Pertemuan ini merupakan pertemuan kita pertama dalam tahun 2003. Oleh karena itu selain membahas temuan para anggota Komisi III selama kunjungannya ke Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat tanggal 5 s/d 8 Januari 2003 yang lalu, sesuai permintaan Komisi III, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk sedikit kilas balik perjalanan pembangunan pertanian dalam periode 2000-2002, sebagai bekal bagi sisa waktu pelaksanaan program pembangunan menjelang akhir tahun 2004.



Mengawali tanggapan Departemen Pertanian terhadap temuan-temuan tersebut, saya akan mengemukakan hal-hal yang bersifat umum mengenai program pembangunan pertanian 2000-2004, apa yang telah kita capai selama ini dan langkah apa yang akan kita lakukan kedepan, setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan hal-hal yang lebih spesifik oleh jajaran Eselon I sesuai dengan permintaan anggota Dewan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Dalam *Grand Strategy* Pembangunan Pertanian telah ditetapkan bahwa pembangunan pertanian dilaksanakan melalui pembangunan agribisnis yang terdiri dari subsistem hulu, *onfarm*, hilir, dan penunjang. Sesuai dengan Proenas dan Rencana Strategis Departemen Pertanian, pada periode 2000-2004 disusun dua program, yaitu *Program Pengembangan Agribisnis* dan *Program Peningkatan Ketahanan Pangan*. Program Pengembangan Agribisnis bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis sub sistem hulu, *on-farm*, pengolahan, pemasaran hasil dan sub sistem penunjangnya, yang dibangun oleh masyarakat petani dengan mengembangkan peluang-peluang usaha pada semua sub sistem. Sinergis dengan tujuan tersebut, Program Ketahanan Pangan ditujukan pada pencapaian kecukupan dan ketersediaan pangan baik secara kuantitas, nilai gizi, keamanan, distribusi, keterjangkauan dan daya beli masyarakat.

Operasionalisasi pelaksanaan Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan ketahanan Pangan dilakukan melalui pengembangan Kawasan/ Pusat pertumbuhan Agribisnis dan Ketahanan Pangan, yang intinya adalah pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan di suatu kawasan produksi, baik dalam skala wilayah maupun nasional, sesuai dengan karakteristik fisik, ekonomi maupun sosial wilayah tersebut.

Sesuai dengan perubahan peran pemerintah menjadi regulator, fasilitator dan stimulator, dan otonomi daerah serta paradigma baru khususnya transparansi dan

akuntabilitas, pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian mengalami perubahan mendasar. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, perencanaan disusun secara *bottom-up* dengan koordinasi propinsi dan pusat, pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat dalam koordinasi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan hal itu, dan juga dengan dukungan Komisi III DPR RI yang terhormat, sebagian besar dana pemerintah digunakan untuk memfasilitasi usaha masyarakat, yaitu dengan memberikan modal usaha kepada kelompok tani pelaku agribisnis, membangun fasilitas publik dan membangun kelembagaan pedesaan dan masyarakat petani.

Sebagai gambaran, jumlah kelompok penerima pinjaman tahun 2000 adalah 13.126 kelompok yang terdiri dari 13.043 kelompok tanaman pangan dan 83 kelompok peternakan di 163 kabupaten di 13 propinsi. Besarnya dana yang dialokasikan untuk pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ini adalah Rp. 600 milyar atau 57 persen dari total anggaran Rp 1,053 triliun.

Mulai TA 2001, dengan dana APBN pola BLM ini menjadi model utama pembangunan pertanian di pedesaan. Jumlah kelompok sasaran mencakup 2.688 kelompok sasaran di 201 kabupaten di 26 propinsi. Bidang usaha yang dikembangkan mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Dana yang disalurkan adalah sebesar Rp. 300 milyar atau 21 persen dari total anggaran sebesar Rp 1,456 triliun.

Dalam TA 2002 pola BLM dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kawasan agribisnis di 246 kabupaten di 30 propinsi dan kawasan Peningkatan Produksi Padi di 195 kabupaten (29 propinsi). Dari total anggaran pembangunan Departemen Pertanian tahun 2002 sebesar Rp 2,35 triliun, 80 persen dialokasikan ke daerah, dan dari 80 persen alokasi tersebut sekitar 60 persen disalurkan ke masyarakat melalui pola BLM. Di luar dana yang disalurkan melalui BLM merupakan dana pembinaan masyarakat di pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

Melewati tahun 2002, kita bersyukur bahwa walaupun ada dampak banjir pada awal 2002 dan kekhawatiran ancaman kemarau panjang (*El-Nino*), keragaan sektor pertanian tahun 2002 cukup menggembirakan. Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian (pertanian, kehutanan, dan perikanan) tumbuh sebesar 3,77% dibandingkan dengan tahun 2001. Pertumbuhan ini diatas PDB nasional yang hanya sebesar 3,66%, jauh diatas rata-rata sebelum krisis 1994-1996 (2,64%), atau sedikit diatas PDB nasional. Indikator ini menunjukkan bahwa sektor Pertanian telah pulih dari krisis lebih cepat dibanding sektor ekonomi lainnya.

Sesuai dengan laporan BPS (angka tetap), produksi komoditas tanaman pangan tahun 2002 lebih baik dibanding tahun 2001. Produksi padi, meningkat 1,82% dibanding tahun 2001 yaitu dari 50,09 juta ton menjadi 51,38 juta ton GKG, walaupun belum mencapai sasaran yang dicanangkan yakni 52 juta ton. Produktivitas meningkat 1,03 % dari 43,88 kw/ha tahun 2001 menjadi 44,33 kw/ha tahun 2002. Dibanding tahun 2001, produksi tanaman pangan semua komoditas meningkat kecuali kedelai tumbuh minus 21.06%. Jagung naik 1,92% dari 9,35 juta ton tahun 2001 menjadi 9,53 juta ton tahun 2002; ubi kayu naik 9,29%, dan ubi jalar naik 8,6%. Penurunan produksi kedelai disebabkan karena luas panen turun 19,54 dari 680 ribu hektar tahun 2001 menjadi 550 ribu hektar tahun 2002.

Produksi buah-buahan berdasarkan angka sementara meningkat sebesar 10,6%, dari 9,4 juta tahun 2001 menjadi 10,4 juta ton tahun 2002. Adapun data statistik untuk komoditas hortikultura lainnya masih proses perhitungan.

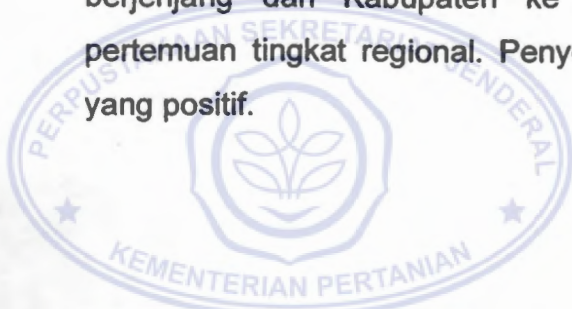
Pada periode yang sama (2001-2002) produksi komoditas perkebunan juga umumnya naik: gula naik 11,8%, kopi 0,14%, kakao 1,20%, lada 0,40%, kelapa sawit 0,48%, cengkeh 0,92%. Produksi komoditas perkebunan yang turun adalah teh dan tembakau masing masing turun 1,61% dan 0,88%. Penurunan produksi tembakau terbesar terjadi di Nanggro Aceh Darusalam (NAD) sebesar 7,80% dan

Sumatera Utara sebesar 2,21%. Di NAD terjadi konflik separatis, sedangkan di Sumatera Utara terdapat kasus penjarahan lahan-lahan perkebunan tembakau.

Populasi ternak meningkat cukup baik selama tahun 2002 (angka sementara). Populasi ternak babi naik 15,7% dan ayam ras pedaging 15,2%, ayam ras petelur 8,2%, kambing 5,8%, kerbau 5,45%, dan itik 5,07%. Ternak lainnya seperti sapi perah, sapi potong, domba dan ayam buras tumbuh antara 2-4%. Produksi daging, telur, dan susu masing-masing mengalami kenaikan, yakni daging 1,44%, telur 6,89%, dan susu 8,56%.

Kesejahteraan petani secara umum juga membaik. Nilai tukar petani (NTP) tahun 2002 umumnya lebih baik dibanding tahun 2001. NTP di seluruh Jawa naik kecuali di Jawa Timur minus 3,76%, Jawa Barat NTP naik 13,58%, Jawa Tengah naik 9,03%, DI Yogyakarta naik 2,54%. Di luar Jawa, peningkatan NTP tertinggi adalah Bali, naik 10,31%, diikuti oleh Sumatera Utara naik 5,91%, Sulawesi Selatan naik 5,32%. NTP di luar Jawa yang turun tertinggi adalah Sumatera Selatan minus 7,08, Sulawesi Utara minus 6,82, dan NTB minus 4,82. NTP di propinsi lainnya naik berkisar 1,1 – 2,89%.

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah, Departemen Pertanian dengan Dinas Propinsi dan Kabupaten telah melakukan penyesuaian organisasi sejak tahun 2000. Penyesuaian terutama dibuat dalam hal pembagian peta kewenangan antara pusat, propinsi, dan kabupaten. Perbaikan juga dilakukan pada sistem pengawasan, monitoring, evaluasi dan perencanaan yang lebih menekankan pada pendekatan partisipatif dan perencanaan dari bawah. Rancangan kegiatan pembangunan pertanian disusun dari daerah secara berjenjang dari Kabupaten ke Propinsi dan dibahas dalam serangkaian pertemuan tingkat regional. Penyesuaian ini saya nilai telah memberikan hasil yang positif.



Pada tahun 2003, secara umum prospek sektor pertanian cukup menjanjikan. Ancaman banjir di awal tahun 2003, saya yakin tidak terlalu mengancam produksi pangan (beras) nasional kita. Dari 42.300 hektar sawah yang terkena banjir, sekitar 7.225 hektar yang mengalami kerusakan (puso). Namun demikian kita tetap mengantisipasi kemungkinan bencana alam serupa (baik banjir maupun kekeringan) yang dapat mengancam produksi pertanian tahun 2003. Oleh karena itu antisipasi penanganan dampak bencana banjir dan bencana alam lainnya serta serangan hama/penyakit yang mengancam dalam skala nasional, dirancang secara khusus dan didukung dengan anggaran yang memadai. Selain itu, penyesuaian waktu tanam berkaitan dengan terlambatnya musin hujan tahun ini, 20% areal yang tidak dapat ditanam sampai Desember 2002 ditargetkan dapat dicapai akhir Februari 2003 ini. Dengan demikian pada akhir tahun mudah-mudahan hal ini tidak mempengaruhi keragaan produksi awal tahun yakni sebesar 53 juta ton.

Di tengah tengah persaingan perdagangan bebas yang semakin keras, peluang pasar global produk pertanian kita masih tetap terbuka walaupun kita masih kesulitan memanfaatkannya. Pertumbuhan pasar global komoditas pertanian akan semakin didominasi oleh komoditi *non-tradisional* seperti buah-buahan dan sayuran, ikan olahan, dan makanan olahan. Dimasa depan, kita harus lebih aktif lagi dalam mempromosikan produk pertanian kita di pasar internasional. Kerjasama internasional di bidang pertanian baik secara bilateral maupun multilateral juga perlu terus ditingkatkan. Kebetulan saya saat ini terpilih sebagai Ketua Dewan Gubernur IFAD (*Governing Council of IFAD*) untuk masa sidang 2002-2004. Saya akan memanfaatkan peluang ini untuk terus melakukan peningkatan kerjasama internasional yang dapat menguntungkan sektor pertanian kita. Dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan bahwa kita banyak menghadapi persaingan perdagangan yang tidak adil di pasar internasional. Oleh karena itu kita meminta agar WTO harus menghasilkan keputusan-keputusan yang adil, dan dengan demikian wakil-wakil kita dalam organisasi internasional tersebut harus yang benar-benar kompeten dan

memahami betul dampak yang mungkin timbul akibat kesepakatan tersebut. Saya sendiri memanfaatkan kesempatan bertemu dengan Sri Paus dalam hal memperjuangkan perdagangan global yang lebih bebas dan adil, dan beliau memberikan dukungan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan sektor pertanian, Departemen Pertanian pada tahun 2003 menempuh langkah langkah berikut:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang dibarengi dengan perbaikan sistem perbenihan/perbibitan dan perbaikan sistem tata air mikro.
2. Revitalisasi penyuluhan antara lain melalui pendampingan dan pematapan keterkaitan penelitian dan penyuluhan (*research-extension linkage*) dilapangan.
3. Pengembangan kelembagaan petani agar dapat sejajar dengan kelembagaan di sektor hilirnya, hulunya dan jasa penunjangnya.
4. Pengembangan Agroindustri pedesaan. Mulai tahun 2003 telah dirancang proyek khusus untuk menangani sub-sistem pengolahan dan pemasaran serta fasilitasi industri sub-sistem hulu untuk mendorong agroindustri pedesaan.
5. Peningkatan anggaran pembangunan. Anggaran Departemen pertanian meningkat 13% dari Rp 1,4 triliun tahun 2002 menjadi Rp 2,3 triliun rupiah murni tahun 2003. Sekitar 80% dari total dana tersebut diserahkan ke daerah, dan daerah wajib mengalokasikan minimal 60% untuk bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk kegiatan usahatani produktif.
6. Penanganan dan antisipasi bencana alam dengan anggaran khusus.
7. Peningkatan efisiensi dan lalulintas perdagangan produk pertanian di dalam negeri.

8. Kebijakan harga gabah, gula dan subsidi pupuk. Kebijakan harga gabah melalui mekanisme "*procurement price*", dana talangan dan tarif, sedangkan gula melalui subsidi berupa paket peningkatan produktivitas dengan bibit unggul dan tarif. Untuk pupuk mulai tahun 2003 diberikan subsidi harga, dengan dana Rp. 1,315 triliun. Kesemuanya ini diharapkan akan lebih memantapkan ketahanan pangan kita dan melepas ketergantungan terhadap impor.
9. Pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan. Lembaga keuangan dikembangkan lebih luas melalui pengembangan model *grameen bank* yang dinilai berhasil seperti P4K, KUM dan KUAT. Lembaga keuangan mikro yang sudah tumbuh seperti BRI Unit Desa dan BPR akan dimanfaatkan sebagai sumber permodalan untuk petani agar mereka memanfaatkan dana komersial.
10. Upaya-upaya mencari pasar alternatif selain pasar tradisional (AS, Eropa, Jepang, dan Singapura) yang saat ini merupakan pangsa ekspor tradisional terbesar Indonesia. Pemerintah akan memainkan peran sebagai fasilitator.

Pembangunan pertanian tahun 2003 merupakan kelanjutan dari kegiatan pembangunan tahun sebelumnya dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pola BLM. Dari hasil kajian pelaksanaan pola BLM selama tahun 2000 dan 2001, yang dilakukan oleh empat perguruan tinggi yaitu Universitas Brawijaya Malang, Universitas Hasanudin, Universitas Palangkaraya dan Universitas Andalas, serta hasil evaluasi sementara pelaksanaan BLM tahun 2002 yang dilakukan oleh Departemen Pertanian dapat disimpulkan bahwa Pola BLM dinilai bermanfaat bagi pemberdayaan petani kita. Pola penguatan modal melalui instrumen bantuan langsung masyarakat (BLM) ternyata dapat merangsang pemberdayaan ekonomi masyarakat agribisnis. Pola BLM masih merupakan alternatif terbaik yang ada saat ini untuk memberdayakan masyarakat dalam membangun sektor pertanian. Kelemahan-kelemahan Pola BLM selama ini telah diidentifikasi dan akan terus

diperbaiki pada tahun 2003 ini. Laporan selengkapnya mengenai evaluasi pola BLM telah disampaikan pada Saudara Pimpinan Komisi III.

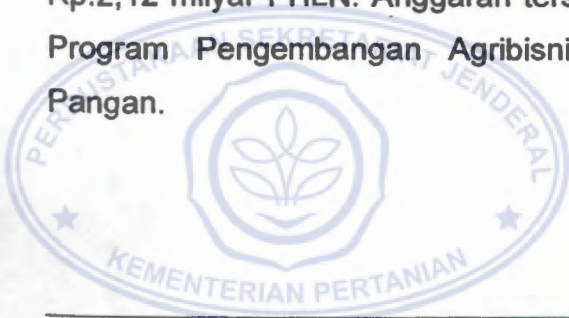
Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Rancangan alokasi anggaran pembangunan Program Pengembangan Agribisnis diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan pertanian nasional, yaitu peningkatan nilai tambah produk pertanian, peningkatan perolehan devisa serta pemenuhan kebutuhan produk pertanian dalam negeri. Sedangkan rancangan alokasi anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan diarahkan untuk mendukung peningkatan penyediaan pangan bagi masyarakat serta pengembangan sistem ketahanan pangan masyarakat di wilayah.

Adanya kenaikan anggaran pembangunan pertanian TA. 2003 akan dimanfaatkan untuk: a) mendukung upaya-upaya peningkatan produktifitas pertanian, b) memacu peningkatan perluasan areal tanam padi terutama di luar Jawa untuk mengimbangi laju konversi lahan pertanian, c) mengembangkan penelitian untuk mendukung peningkatan daya saing dan produktifitas, d) meningkatkan kegiatan penyuluhan pertanian, e) penanggulangan kemiskinan serta f) mengembangkan kelembagaan permodalan di pedesaan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Terkait dengan kunjungan Dewan ke propinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, kami informasikan bahwa, untuk TA 2003, Departemen Pertanian telah mengalokasikan anggaran untuk Sumatera Selatan sebesar Rp. 67,73 milyar (rupiah murni) dan 4,84 milyar (pinjaman dan hibah luar negeri/PHLN). Sedangkan untuk Kalimantan Barat sebesar Rp.54,6 milyar (rupiah murni) dan Rp.2,12 milyar PHLN. Anggaran tersebut digunakan untuk melanjutkan kegiatan Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.



Saya sangat berterima kasih kepada Anggota Dewan yang telah mengamati berbagai kemajuan, serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh propinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Hasil temuan berbagai persoalan dari hulu ke hilir di Sumatera Selatan seperti terbatasnya tenaga okulator tanaman buah-buahan, mahalnnya harga bibit unggul sayuran, terbatasnya akses petani terhadap modal, pasar dan teknologi, rendahnya kualitas produk pertanian (termasuk perkebunan), lemahnya kelembagaan petani dan kurangnya fasilitas laboratorium Balai Karantina Tumbuhan Palembang; serta temuan permasalahan di Kalimantan Barat seperti masalah pengolahan dan pemasaran lidah buaya (*Aloe vera*) dan kelapa sawit, serta rendahnya penggunaan benih padi unggul merupakan permasalahan yang akan menjadi perhatian pemerintah. Namun saya menyadari bahwa, Departemen Pertanian tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan sektor pertanian di daerah tanpa dukungan dari instansi dan pihak lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut koordinasi berbagai instansi di daerah dan pusat perlu terus ditingkatkan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

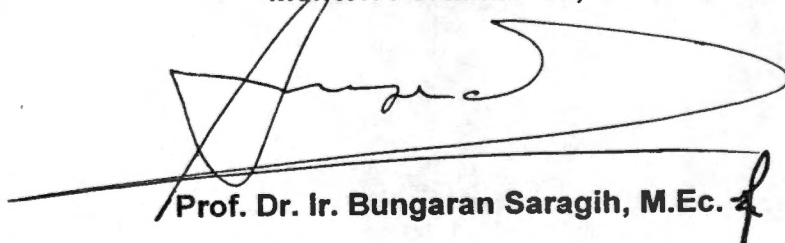
Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan pemerintah pusat dalam pembangunan pertanian hanya terbatas pada aspek pengaturan, penetapan standar, pedoman umum dan norma. Pembangunan pertanian sepenuhnya dilaksanakan di kabupaten/kota dan oleh karena itu keberhasilan dan kegagalannya sangat ditentukan oleh keseriusan para pimpinan Daerah. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, inisiatif maupun kreatifitas daerah dalam mengimplementasikan program-program pembangunan sangat dibutuhkan. Untuk lebih mensinergikan hubungan kerja pemerintah pusat dan daerah pada kesempatan ini, sekali lagi, saya menghimbau kepada para Anggota Dewan untuk juga melakukan koordinasi dengan anggota Dewan yang berada di daerah (DPRD) sehingga lebih mengharmoniskan hubungan kerja yang selama ini kita bangun bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya hormati,

Demikian penjelasan saya secara umum, sedangkan tanggapan atas pertanyaan serta temuan-temuan Anggota Dewan selama kunjungan kerjanya ke Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, saya sampaikan secara tertulis. Demikian pula uraian yang lebih detail apabila diperlukan, dengan senang hati akan disampaikan oleh pejabat Eselon I yang bersangkutan.

Terima kasih.

Menteri Pertanian RI,



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





DEPARTEMEN PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI**

TENTANG

REPETA TAHUN 2004

PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN TAHUN 2004

**TANGGAPAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
SEMESTER II TAHUN 2002**

**TANGGAPAN ATAS TEMUAN HASIL KUNJUNGAN
KOMISI III DPR-RI KE PROPINSI MALUKU DAN
SULAWESI TENGAH**



JAKARTA, 26 MEI 2003



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR RI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2002/2003
JAKARTA, 26 MEI 2003**

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Mengawali sambutan saya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam rapat kerja untuk membahas berbagai aspek pembangunan pertanian.

Sesuai dengan permintaan Komisi III DPR- RI rapat akan membahas: (1) REPETA Tahun 2004, (2) pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2004, (3) tanggapan atas hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II TA.2002, (4) temuan hasil kunjungan kerja Komisi III DPR-RI ke Propinsi Maluku dan Sulawesi Tengah.

Saya akan menyampaikan pemaparan yang bersifat umum serta hal-hal yang menyangkut REPETA Tahun 2004 dan RAPBN TA.2004. Adapun tanggapan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas persetujuan Ketua Komisi III akan disampaikan oleh Inspektur Jenderal Departemen Pertanian, sedangkan tanggapan terhadap hasil kunjungan Komisi III DPR-RI disampaikan oleh Eselon I lingkup Deptan. Bahan-bahan selengkapnya disampaikan secara tertulis.



Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Visi yang telah ditetapkan dalam *Grand Strategy* Pembangunan Pertanian adalah *terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi*. Membangun sistem dan usaha agribisnis memerlukan sinergi kebijaksanaan di berbagai instansi dengan mandat yang berbeda-beda. Departemen Pertanian mempunyai mandat utama dalam kegiatan-kegiatan *on-farm*, dan sangat membutuhkan dukungan kebijaksanaan *off-farm* yang justru merupakan kendala utama dalam pengembangan agribisnis nasional. Upaya menyelaraskan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan agribisnis bersama instansi terkait lainnya akan terus dilakukan. Dengan dukungan Komisi III yang terhormat, usaha-usaha ini telah menunjukkan hasil, walaupun belum optimal. Untuk itu melalui forum ini, saya masih meminta dukungan yang kontinyu dari Komisi III.

Pembangunan pertanian tahun 2004 merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kegiatan tahun sebelumnya dengan penekanan pada permasalahan dan tantangan yang berkembang. Disamping masalah yang belum terselesaikan, telah pula muncul berbagai masalah sebagai akibat dinamika pembangunan lingkungan domestik dan global termasuk masalah bencana alam. Untuk merumuskan program pembangunan kedepan, ada baiknya kita lakukan evaluasi terhadap kinerja kegiatan pembangunan pertanian pada periode – periode sebelumnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2002 sektor pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) mampu tumbuh sebesar 1,74% dibandingkan dengan tahun 2001. Sub-sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan tumbuh sebesar 0,53%, sedangkan sub-sektor peternakan dan sub-sektor perkebunan masing-masing sebesar 3,17% dan 3,07% per tahun. Kegiatan pembangunan pertanian tahun 2002 diwarnai oleh banjir dan kekeringan di beberapa tempat yang menyebabkan keterlambatan masa tanam khususnya tanaman pangan.

Data triwulan I Tahun 2003 BPS menunjukkan PDB nasional meningkat 2,04% dibandingkan dengan triwulan ke IV Tahun 2002 atau meningkat 3,43%

dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2002 (*year on year*). Pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun 2003 dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2002 dihasilkan oleh sektor pertanian sebesar 15,56%. Bila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2002 sektor pertanian tumbuh 3,17%. Dengan indikasi data triwulan I tahun 2003 tersebut dan dengan dukungan Komisi III DPR – RI saya optimis bahwa pertumbuhan sektor pertanian tahun ini akan lebih baik dari pertumbuhan tahun 2002.

Produksi padi tahun 2002 sebesar 51,38 juta ton GKG meningkat sebesar 1,82% dibanding tahun 2001 sebesar 50,46 juta ton GKG. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan produktivitas sebesar 1,60% dan perluasan areal panen sebesar 0,30%. Produksi jagung pada tahun 2002 sebesar 9,53 juta ton meningkat 1,92% dari tahun 2001 sebesar 9,35 juta ton. Sedangkan produksi kedelai pada periode yang sama menurun 21,06% disebabkan oleh menurunnya luas panen kedelai sebesar 19,54%.

Berdasarkan ARAM I tahun 2003 produksi padi sebesar 51,40 juta ton GKG atau meningkat 0,04% dibandingkan ASEM 2002 sebesar 51,38 juta ton GKG. Produksi jagung ARAM I tahun 2003 sebesar 9,66 juta ton atau meningkat sebesar 1,42% dibandingkan ASEM 2002 sebesar 9,53 juta ton. Produksi kedelai ARAM I tahun 2003 sebesar 740 ribu ton atau meningkat sebesar 13,36% dibandingkan ASEM 2002 sebesar 652 ribu ton. Produksi ubi kayu ARAM I tahun 2003 sebesar 17,28 juta ton atau meningkat sebesar 9,72% dibandingkan ASEM 2002 sebesar 15,75 juta ton. Kita berharap kiranya tren pertumbuhan ini dapat bertahan dan bahkan lebih baik lagi melalui kerja keras kita semua.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Produksi hortikultura tahun 2002 dibanding tahun 2001 umumnya meningkat. Buah-buahan dari 9,96 juta ton menjadi 10,90 juta ton atau naik 9,0%, sayuran dari 6,92 juta ton menjadi 7,63 juta ton atau naik 10,28%, tanaman hias dari 113,94 juta tangkai menjadi 157,89 juta tangkai atau naik 38,57% dan tanaman obat-obatan meningkat dari 0,21 juta ton menjadi 0,22 juta ton atau naik 4,76%.

Produksi perkebunan secara umum juga meningkat. Produksi gula tebu meningkat dari 1,73 juta ton menjadi 1,89 juta ton atau naik 9,46%, kopi dari 621,98 ribu ton menjadi 622,83 ribu ton atau naik 0,14%, kakao dari 428,24 ribu ton menjadi

433,36 ribu ton atau naik 1,20%, kelapa sawit (CPO) dari 7,97 juta ton menjadi 8,16 juta ton atau naik 2,34% dan tembakau dari 143,15 ribu ton menjadi 143,70 ribu ton atau naik 0,40%.

Populasi ternak juga menunjukkan peningkatan. Populasi sapi potong dari 10,22 juta ekor menjadi 10,44 juta ekor atau naik 2,16%, sapi perah dari 347 ribu ekor menjadi 354 ribu ekor atau naik 2,02%, kambing dari 12,32 juta ekor menjadi 13,05 juta ekor atau naik 5,86%, domba dari 7,39 juta ekor menjadi 7,66 juta ekor atau naik 3,61% dan babi dari 5,29 juta ekor menjadi 6,12 juta ekor atau naik 15,79%. Populasi unggas pada tahun 2002 dibanding tahun 2001 meningkat. Populasi ayam ras pedaging 15,16%, ayam ras petelur 8,27%, ayam buras 4,78% dan itik 5,07%. Produksi hasil peternakan yaitu daging, telur dan susu mengalami kenaikan masing masing sebesar 1,44%, telur 6,89%, dan susu 8,56%.

Hadirin yang berbahagia,

Secara umum kesejahteraan petani mengalami perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2002 sebesar 109,75 meningkat sebesar 1,32 % dibanding tahun 2001 sebesar 108,32. NTP di seluruh Jawa naik kecuali di Jawa Timur minus 3,76%, Jawa Barat NTP naik 13,58%, Jawa Tengah naik 9,03%, DI Yogyakarta naik 2,54%. Di luar Jawa, peningkatan NTP tertinggi adalah Bali, naik 10,31%, diikuti oleh Sumatera Utara naik 5,91%, Sulawesi Selatan naik 5,32%. NTP di luar Jawa yang mengalami penurunan tertinggi adalah Sumatera Selatan minus 7,08, Sulawesi Utara minus 6,82, dan NTB minus 4,82. NTP di propinsi lainnya naik berkisar 1,1 sampai 2,89%.

Ekspor nasional periode tahun 2002 sebesar 57,00 miliar dolar AS, mengalami kenaikan sebesar 1,21% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai ekspor komoditas non-migas dalam tahun 2002 sebesar 44,90 miliar dolar AS, naik 2,77% periode yang sama tahun sebelumnya. Yang sangat menggembirakan adalah peningkatan nilai ekspor terbesar terjadi pada ekspor komoditas pertanian, naik 30,41% yaitu dari 3,98 miliar dolar AS tahun 2001 menjadi 5,72 miliar dolar AS pada tahun 2002. Dalam pada itu, nilai ekspor komoditas perkebunan naik 33,89%, komoditi tanaman pangan turun 3,19%, hortikultura naik 17,42%, sedangkan peternakan (termasuk obat-obatan hewan, vaksin dan pakan) naik

20,20%. Nilai ekspor ini belum seluruhnya mencakup produk-produk olahan, yang jika disatukan tentunya akan lebih besar lagi.

Impor produk pertanian tahun 2002 juga menunjukkan kenaikan sebesar 3,73 % dari 4,20 miliar dolar AS di tahun 2001 menjadi 4,37 miliar dolar AS tahun 2002. Impor produk tanaman pangan naik 24,12 %, hortikultura naik 24,15, peternakan naik 30,38% sedangkan produk perkebunan turun 29,43 %. Nilai impor tersebut termasuk produk-produk olahan.

Tahun 2001 terjadi defisit perdagangan produk pertanian sebesar 0,22 milyar dolar AS namun dalam tahun 2002 terjadi surplus sebesar 1,28 miliar dolar AS utamanya karena kontribusi produk perkebunan sebesar 3,57 miliar dolar AS.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Secara keseluruhan prospek agribisnis tahun 2003 cukup menjanjikan. Kondisi iklim diramalkan relatif bersahabat dan iklim investasi dalam negeri semakin membaik. Namun demikian kondisi tahun 2003 setidaknya masih dipengaruhi oleh tragedi Bali 12 Oktober 2002, penerapan *Bioterrorism Act* oleh Amerika Serikat dan kebijakan *Food Safety* oleh Eropa. Selama ini pasar tradisional utama kita adalah Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang dan Singapura. Ke depan kita harus berupaya mencari peluang pasar baru seperti: Timur Tengah, Eropa Timur dan Asia Selatan.

Upaya-upaya yang ditempuh pada tahun 2003 adalah: (1) meningkatkan produksi pangan dan non pangan melalui peningkatan produktivitas dengan cara perbaikan sistem perbenihan/perbibitan, penggunaan pupuk berimbang/pupuk majemuk dan perluasan areal;(2) revitalisasi penyuluhan melalui pendampingan dan pematapan keterkaitan penelitian dan penyuluhan (*research-extension linkage*) di lapangan; (3) pengembangan agroindustri pedesaan; (4) kebijakan harga gabah melalui Inpres 9 Tahun 2001, dana talangan dan tariff; (5) kebijakan pengembangan gula/tebu melalui paket peningkatan produktivitas dengan bibit unggul, tarif dan tataniaga; (6) subsidi pupuk; dan (7) peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan yang ada termasuk pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan.

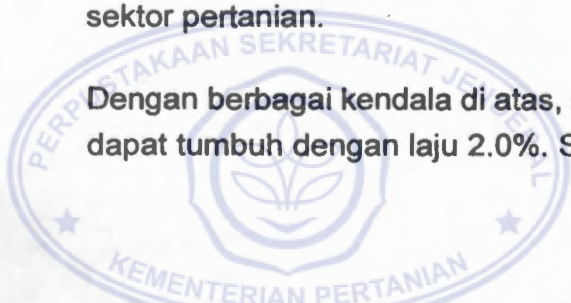
Untuk mengantisipasi masalah yang muncul akibat pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 dan PP 25 tahun 2000, Departemen Pertanian terus memberikan perhatian yang besar dalam pembangunan pertanian di daerah dengan mengalokasikan anggaran dekonsentrasi sekitar 80%. Ini merupakan wujud implementasi dari visi berkerakyatan dan terdesentralisasi. Secara bertahap kita akan membangun kemandirian daerah, sehingga pada saatnya tidak terlalu tergantung kepada pemerintah pusat.

Departemen Pertanian, bersama instansi terkait lainnya juga proaktif dalam perundingan-perundingan bidang pertanian di WTO. Dapat saya laporkan bahwa dalam sidang *Committee on Agriculture* terakhir Maret lalu, Indonesia dipercaya sebagai *leader* bagi negara-negara berkembang untuk merumuskan konsep *strategic products* yang merupakan bagian dari *special and differential treatment* (S&D). Konsep ini berguna bagi negara berkembang untuk melindungi produk-produk yang dianggap strategis guna membangun ketahanan pangan, pedesaan, serta pengentasan kemiskinan. Selain itu kita juga memperjuangkan konsep SSM (*special safeguard mechanism*) yang merupakan alat negara berkembang untuk dapat memberlakukan *Special Safeguard* terhadap produk-produk yang mendapat tekanan dari produk impor murah akibat subsidi ekspor maupun domestik yang dipraktekkan oleh negara-negara maju. Perjuangan kita di forum WTO telah dimasukkan dalam draft modalitas perundingan yang akan difinalkan di Cancun September ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Dengan asumsi kondisi perekonomian dunia masih melemah serta adanya penerapan *Bioterrorism* dan *Food Safety Acts*, maka situasi perdagangan dan iklim investasi di sektor pertanian tahun 2004 diperkirakan masih menghadapi banyak kendala. Disamping itu tahun 2004 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu juga membawa konsekuensi terhadap situasi politik dalam negeri, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian.

Dengan berbagai kendala di atas, sektor pertanian dalam tahun 2004 ditargetkan dapat tumbuh dengan laju 2.0%. Sumber pertumbuhan sektor pertanian tersebut



terutama di sub sektor peternakan, perkebunan, hortikultura dan tanaman pangan.

Dalam tahun 2004, pemenuhan kebutuhan pangan akan tetap menjadi prioritas utama pembangunan pertanian. Permintaan pangan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang masih tergantung kepada beras. Peningkatan produksi pangan dihadapkan kepada tantangan mempertahankan laju pertumbuhan produksi, daya saing, penurunan harga komoditas pangan pada saat panen, terutama harga gabah seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Upaya meningkatkan produksi pangan dan daya saing juga dihadapkan kepada kendala sumberdaya lahan dan air (konversi lahan, ketersediaan air dan kondisi jaringan irigasi, dan kepemilikan lahan), modal, teknologi dan gangguan alam.

Kegiatan peningkatan produksi pangan dilakukan melalui: (a) peningkatan mutu intensifikasi pada lahan andalan produksi pangan, (b) optimalisasi lahan kering, tadah hujan, lebak dan pasang surut, dan (c) pengembangan sumber pangan alternatif. Upaya-upaya tersebut perlu didukung dengan pengembangan kelembagaan layanan yaitu: (a) lembaga layanan saprodi, (b) permodalan, (c) penyuluhan, (d) perlindungan tanaman, dan (e) pemasaran dan pasca panen, (f) perlindungan berupa bea masuk, (g) subsidi, dan (h) dana talangan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Sektor pertanian juga dituntut berperan dalam pembentukan PDB, perolehan devisa melalui ekspor, dan penyediaan bahan baku industri. Untuk itu pengembangan komoditas komersial melalui pendekatan kawasan akan terus dimantapkan. Fokus perhatian dalam tahun 2004 akan ditekankan kepada: (a) peningkatan akses terhadap sumberdaya lahan dan air, permodalan, sarana dan prasarana, teknologi, pasar, pelayanan agribisnis; (b) peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal; (c) peningkatan daya saing agribisnis nasional; dan (d) penumbuhan agroindustri di pedesaan.

Sasaran produksi padi pada tahun 2004 sebesar 53,00 juta ton GKG, jagung 11,75 juta ton, kedelai 1,0 juta ton, kacang tanah 0,8 juta ton dan ubi kayu 18,0 juta ton, buah-buahan 11,5 juta ton, sayuran 8,4 juta ton, tanaman hias 174,4 juta tangkai dan tanaman obat 0,2 juta ton.

Sasaran populasi sapi potong tahun 2004 sebanyak 12,4 juta ekor, kambing 13,5 juta ekor, domba 8,9 juta ekor, ayam buras 330,2 juta ekor dan itik 36,4 juta ekor. Produksi kelapa sawit (CPO) 8,20 juta ton, kelapa 3,2 juta ton, kopi 0,63 juta ton, kakao 0,49 juta ton, karet 1,52 juta ton; tebu 2,13 juta ton, dan tembakau 0,15 juta ton.

Dalam penanggulangan kemiskinan, disamping melalui Program Pengembangan Agribisnis dan Program Ketahanan Pangan, beberapa program khusus penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan akan terus dikembangkan, melalui pengembangan kredit mikro bagi petani kecil dan program khusus bagi daerah rawan konflik, daerah bencana alam dan endemis rawan penyakit.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pembiayaan pembangunan pemerintah pada dasarnya adalah investasi dalam rangka fasilitasi tumbuhnya investasi masyarakat dengan jumlah yang lebih besar. Investasi pemerintah diselenggarakan melalui proyek-proyek pembangunan.

Untuk mencapai target pertumbuhan sektor pertanian sebesar 2,0% maka dibutuhkan penambahan investasi sebesar Rp. 45,00 triliun. Dengan asumsi bahwa investasi pemerintah mampu membangkitkan 10 kali lipat investasi masyarakat/swasta maka kebutuhan investasi pemerintah sebesar Rp. 4,50 triliun. Dana tersebut diusulkan dari anggaran rupiah murni sebesar Rp. 3,65 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,85 triliun. Dibandingkan dengan total anggaran TA. 2003 sebesar Rp.3,06 triliun, maka kebutuhan anggaran TA. 2004 meningkat sebesar 47,06%, dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Program Pengembangan Agribisnis sebesar Rp. 2,58 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 1,84 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,74 triliun.
- (2). Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 1,92 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 1,81 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,11 triliun.

Secara umum kebijakan Pinjaman Luar Negeri tahun 2004 merupakan kelanjutan program Pinjaman Luar Negeri tahun sebelumnya. Dalam pada itu Departemen Pertanian telah mengusulkan pemanfaatan program *debt swapt* (konversi hutang) dari negara-negara maju. Dengan fokus program pembangunan pedesaan, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan kita harapkan Indonesia memperoleh keringanan beban hutang luar negeri.

Sesuai dengan penetapan prioritas program yang akan dilaksanakan pada TA. 2004, secara rinci kenaikan anggaran ini adalah sebagai konsekuensi dari: (1) pengembangan dan pematapan pengembangan kawasan agribisnis di 363 Kabupaten/Kota, (2) perluasan areal tanaman melalui optimasi lahan kering, tadah hujan, lahan lebak, dan pasang surut, terutama di daerah KTI, dan kawasan barat potensial, (3) pengembangan padi terpadu, (4) revitalisasi industri gula tebu, (5) perbaikan mutu dan pengembangan agroindustri/pengolahan agribisnis di pedesaan, (6) pengembangan layanan agribisnis seperti perbenihan, pupuk dan agro-input lain, inovasi teknologi dan penyuluhan, (7) penguatan kelembagaan/organisasi agribisnis, peningkatan sarana/prasarana laboratorium penelitian dan pengembangan, karantina dan perbenihan/pembibitan, (8) jalan usahatani dan irigasi tingkat usahatani, (9) upaya khusus pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan di wilayah KTI dan daerah khusus, (10) upaya khusus penanggulangan kemiskinan, dan (11) diseminasi dan asistensi sistem dan usaha agribisnis ke daerah-daerah.

Dalam tahun 2004, pengembangan komoditas yang akan dibiayai oleh APBN akan difokuskan kepada komoditi strategis, yaitu untuk tanaman pangan adalah: padi, kedele, jagung, ubi kayu dan kacang tanah; hortikultura: kentang, cabe, bawang merah, mangga, manggis, pisang, anggrek, durian, rimpang dan jeruk; perkebunan: kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kapas, tebu, dan tembakau, sedangkan peternakan: sapi potong, kambing, domba, ayam buras dan itik. Sedangkan komoditas lainnya yang menjadi unggulan/andalan daerah diharapkan dibiayai oleh APBD. Dengan cara ini akan jelas tercermin *sharing* pemerintah pusat, propinsi, Kabupaten/kota dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis.



Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasional rutin Departemen Pertanian pada TA. 2004 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 621,73 milyar, mencakup 166 Satuan Unit Kerja Pusat dan UPT Pusat. Dibandingkan dengan Satuan-3 Anggaran Rutin TA. 2003 sebesar Rp 484,27 milyar, maka anggaran TA.2004 meningkat 26,12%. Kenaikan anggaran tersebut diperuntukkan bagi Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai terutama biaya langganan daya listrik yang dalam setiap tahun selalu minus dan pemeliharaan aset-aset negara.

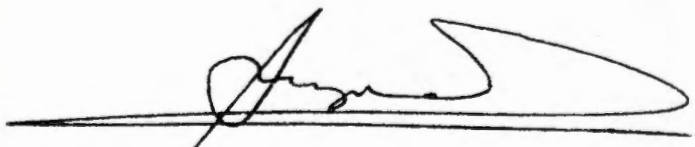
Di samping itu, untuk mempertahankan produksi pangan pada tahun 2004 masih tetap dibutuhkan subsidi pupuk, subsidi benih serta kredit agribisnis dan ketahanan pangan. Pada tahun 2003 subsidi pupuk sebesar Rp. 1,32 triliun, subsidi benih sebesar Rp 30 milyar untuk padi dan 10 milyar untuk kedelai, kredit agribisnis dengan plafon sebesar Rp. 12,4 triliun, dan kredit ketahanan pangan dengan plafon sebesar Rp 2,08 triliun. Saya berharap agar anggaran untuk irigasi dan jalan usaha tani (dana pendukung pertanian), dengan dukungan Komisi III dapat diperjuangkan walaupun alokasinya di Departemen lain.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh Departemen Pertanian pada tahun 2002 sebesar Rp. 14,2 milyar, pada tahun 2003 ditargetkan sebesar Rp. 46,2 milyar dan sasaran pada tahun 2004 sebesar Rp. 47,3 milyar.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

Demikianlah penjelasan saya secara umum, sedangkan yang bersifat teknis, akan disampaikan oleh para Eselon I. Semoga dalam rapat kerja ini kami mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari Anggota Dewan guna menyempurnakan program-program kita ke depan. Terima kasih.

Menteri Pertanian RI



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





MENTERI PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI**

TENTANG

**PEMBAHASAN RAPBN 2004 DAN
TEMUAN KOMISI III DPR-RI
SELAMA KUNJUNGAN KERJA KE PROPINSI
BALI, BANTEN DAN SULAWESI TENGGARA**

TANGGAL 9 S/D 17 JULI 2003

JAKARTA, 8 SEPTEMBER 2003





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

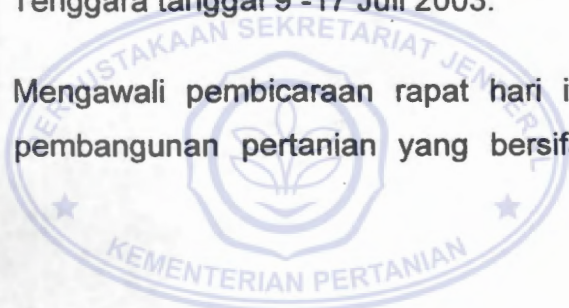
**PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI,
TENTANG
PEMBAHASAN RAPBN 2004 DAN TEMUAN KOMISI III DPR-RI
SELAMA KUNJUNGAN KERJA KE PROPINSI BALI, BANTEN DAN
SULAWESI TENGGARA TANGGAL 9 S/D 17 Juli 2003**

Jakarta, 8 September 2003

***Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua***

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNYA, sehingga pada hari ini kami jajaran Departemen Pertanian dapat bertemu kembali dengan yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi III DPR-RI dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan agenda rapat, Departemen Pertanian telah menyusun laporan tertulis tentang RAPBN 2004 dan tanggapan atas temuan para anggota Komisi III selama kunjungan ke propinsi Bali, Banten, dan Sulawesi Tenggara tanggal 9 -17 Juli 2003.

Mengawali pembicaraan rapat hari ini, saya akan mengemukakan permasalahan pembangunan pertanian yang bersifat umum, RAPBN 2004, dan kemudian bila



diperlukan dilanjutkan dengan penjelasan yang lebih spesifik dari para pejabat Eselon I sekaligus menanggapi temuan dan pertanyaan para anggota Komisi III yang terhormat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Pelaksanaan program tahun 2004 sangat penting karena menjelang berakhirnya Propenas 2001-2004 sehingga berbagai program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dievaluasi secara utuh. Berkaitan dengan hal tersebut saya ingin melihat kembali jauh ke belakang tentang perkembangan sektor pertanian yang merupakan bagian dari perkembangan ekonomi nasional.

Perkembangan sektor pertanian selama 40 tahun sejak 1950-an dapat dilihat dari perubahan kontribusi sektor ini terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. PDB sektor pertanian menurun dari sekitar 70% menjadi 17% sedangkan tenaga kerja di sektor pertanian menurun dari sekitar 70% menjadi 45%. Secara nominal tenaga kerja di sektor pertanian malah meningkat. Ternyata dalam kurun waktu tersebut peran sektor pertanian terhadap PDB menurun jauh lebih cepat dibandingkan dengan perannya terhadap penyerapan tenaga kerja. Apa yang dapat disimpulkan dari data ini adalah perkembangan sektor non pertanian belum mampu menyerap tenaga kerja di sektor pertanian. Skala usaha di sektor pertanian bahkan semakin kecil, sehingga walaupun teknologi pertanian telah meningkatkan produktivitas lahan secara substansial tetapi peningkatan kesejahteraan petani sangat lambat. Oleh karena itu diperlukan kebijakan makro yang berani untuk mendukung sektor pertanian, karena akan berdampak besar pada sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2003 PDB Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 3,7% dan pada periode yang sama sektor pertanian tumbuh 1,70%. Sesuai dengan karakteristik alamiah dan usahanya, pertumbuhan sektor pertanian memang tidak mengalami gejala yang terlalu besar. Pertumbuhan sebesar 3,5% yang pernah dicapai adalah pada saat tingkat produktivitas masih sangat rendah sehingga secara persentasi pertumbuhannya relatif tinggi. Peluang yang terbuka lebar dalam pengembangan sektor pertanian adalah melalui pengembangan sektor industri pengolahan,

perdagangan dan jasa-jasa yang berbasis pertanian, yang dalam statistik kita masih tidak dimasukkan ke dalam kegiatan ekonomi pertanian. Inilah konsep yang kami pakai yang dirumuskan dalam pengembangan agribisnis.

Permasalahan pertanian saat ini sangat berkaitan erat dengan perubahan eksternal dalam perdagangan internasional, kebijakan nasional yang kurang menunjang, kurangnya investasi pada saat krisis ekonomi selain meningkatnya intensitas bencana alam akhir-akhir ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Komitmen kita dalam melaksanakan kesepakatan WTO ternyata ibarat *gayung tidak bersambut*. Sementara kita telah menurunkan tarif dan bea impor berbagai komoditas pertanian pada tingkat yang sangat rendah, negara-negara lain, terutama negara kaya beramai-ramai menciptakan aturan-aturan dan *technical barrier* yang dicoba dilegalkan melalui berbagai cara. Pada pertemuan pendahuluan sebelum sidang WTO di Cancun, upaya proteksi pertanian di negara-negara kaya telah semakin mencuat dan menciptakan tekanan yang berat terhadap negara-negara berkembang terutama yang berbasis pertanian. Oleh karena itu saya tetap dengan keyakinan bahwa kita memerlukan sikap yang tegas untuk tetap melindungi pertanian dan para petani kita. yaitu dengan menerapkan tingkat tarif impor yang cukup memberikan proteksi tetapi masih dalam koridor aturan perdagangan dunia yang legal.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dalam forum perundingan WTO Departemen Pertanian terus proaktif untuk melindungi produk-produk domestik kita. Konsep yang kita ajukan adalah *Strategic Product* yang diharapkan akan menjadi salah satu modalitas bidang pertanian dalam Konferensi Tingkat Menteri di Cancun Meksiko 10-14 September ini. Saya ingin mengajak hadirin memberikan dorongan moril bagi tim perunding kita di Cancun.



Saudara Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat

Perjalanan pembangunan pertanian dalam masa otonomi daerah telah memberikan banyak pelajaran berharga. Tidak diragukan lagi bahwa perencanaan pembangunan pertanian harus berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah, oleh karena itu perencanaan dan koordinasi di daerah perlu terus dikembangkan sekaligus dengan peningkatan kemampuan daerah dalam mengidentifikasi potensi, menganalisis dampak, menetapkan prioritas dan mengkoordinasikan manajemen pembangunan. Otonomi daerah terwujud melalui proses yang panjang dan pada saat ini masih diperlukan upaya kita semua untuk mempercepat proses tersebut serta membangun mekanisme koordinasi dan manajemen yang sinkron antara pusat dengan daerah.

Departemen Pertanian sedang melakukan kajian ringkas tentang proses otonomi tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian. Hal tersebut terutama berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek-proyek di daerah, penyuluhan, pemanfaatan dana APBD dan APBN, serta antisipasi organisasi daerah pada masa yang akan datang serta keseluruhan sistem manajemen pembangunan pertanian. Saya menilai upaya meningkatkan kinerja koordinasi pusat daerah dalam hal pemberdayaan, program, evaluasi dan pengawasan masih harus diteruskan.

Saudara Pimpinan dan Anggota dewan yang saya muliyakan

Berkaitan dengan penyempurnaan organisasi di daerah, seperti diatur dalam PP No 8 tahun 2003 mengenai organisasi pemerintahan daerah, apabila mengikuti kaidah *Organization Follows Strategy* akan jelas terlihat bahwa atas dasar penguasaan sumberdaya -baik sumberdaya alam, manusia, modal maupun teknologi-, potensi, maupun dampak terbesar yang diharapkan bagi masyarakat, maka sektor andalan di daerah adalah sektor pertanian. Dengan demikian keberadaan dinas dan badan yang terkait dengan sektor pertanian harus menempati urutan prioritas yang tinggi. Saya ingin mendapat dukungan Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat agar keberadaan instansi pemerintah lingkup pertanian tetap dijaga agar program pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat

Dalam menyusun rencana tahun 2004, Departemen Pertanian memperhatikan sejauh mungkin perubahan yang terjadi di daerah, terutama yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Rencana pembangunan pertanian tahun 2004 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saran-saran dari wakil rakyat yang disampaikan melalui rapat kerja dengan Komisi III, dan saran-saran daerah yang kami peroleh melalui serangkaian rapat regional yang diikuti oleh daerah/propinsi yang sebelumnya juga didahului oleh rapat-rapat koordinasi di tingkat kabupaten dan propinsi.

Untuk tahun 2004, pengembangan komoditas yang akan dibiayai oleh APBN akan difokuskan kepada 31 komoditas strategis, yaitu 5 komoditas Tanaman Pangan; 10 komoditas hortikultura; 10 komoditas perkebunan, dan 6 komoditas ternak.

Selanjutnya, sebagai dasar dalam mengajukan besarnya anggaran kami telah menetapkan target sasaran peningkatan produksi ke 31 komoditas strategis tersebut untuk tahun 2004. Tentu saja hal ini juga dengan asumsi *ceteris paribus*, kondisi lain tidak mengalami perubahan yang berarti. Sebagai contoh, target peningkatan produksi padi adalah 3,11%, jagung 21,6%, sapi potong 2,4%, kelapa sawit (CPO) 0,3%, karet 7,3%, buah-buahan (mangga, manggis, pisang, durian, dan jeruk) 6,9%. Sasaran peningkatan secara rinci kami sampaikan dalam laporan. Dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan kondisi seperti bencana, serangan hama yang hebat dan hal lain yang sifatnya tidak terduga, kami mengusulkan biaya penanggulangan bencana seperti yang juga diajukan pada tahun-tahun sebelumnya

Adapun pengembangan komoditas pertanian lainnya (diluar 31 komoditas tersebut diatas), yang menjadi unggulan/andalan daerah, diharapkan dibiayai oleh APBD. Dengan cara ini akan jelas *sharing* pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Hal ini telah dibahas dengan pemerintah daerah dalam pertemuan regional evaluasi dan perencanaan di Medan, Surabaya, dan Balikpapan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya Hormati,

Pada tahun 2004, program utama pembangunan pertanian masih tetap yaitu: (1) Program Pengembangan Agribisnis dan (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Kegiatan Program Pengembangan Agribisnis diarahkan kepada (1) pemantapan pengembangan kawasan agribisnis komoditas non-beras (2) peningkatan kapasitas produksi melalui ekstensifikasi lahan pertanian dan peningkatan intensitas tanam untuk meningkatkan produktivitas, dan (3) pengembangan diversifikasi produksi pertanian.

Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan diarahkan kepada: (1) peningkatan produktifitas pangan, (2) perbaikan penanganan pasca panen, (3) pengamanan harga dasar pembelian gabah, (4) pengentasan kemiskinan dan (5)antisipasi dini dan penanggulangan dampak bencana alam. Untuk mengoptimalkan hasil kedua program tersebut dukungan ketersediaan pupuk berimbang dan lembaga-lembaga keuangan mikro di pedesaan sangat diperlukan.

Memasuki akhir program dalam Propenas, kami merasa perlu menyampaikan kepada sidang yang terhormat bahwa kita memerlukan evaluasi pendekatan dan program sesudah sekitar 4 tahun kita melaksanakan program tersebut. Kita telah mencurahkan sebagian besar dana pembangunan pertanian untuk membantu petani terutama dalam penyediaan sarana produksi. Akan tetapi pembangunan fasilitas publik terutama di pedesaan seperti irigasi, jalan usahatani di daerah produksi, sarana komunikasi, energi, air bersih, fasilitas pengolahan dan pergudangan kami nilai porsinya masih sangat kecil dan masih belum atraktif bagi investor untuk menanamkan modalnya di pedesaan. Tanpa ketersediaan fasilitas tersebut, daya tarik pedesaan dan pertanian bagi investor tidak dapat diciptakan. Kegiatan-kegiatan ini memang tidak berada dalam kewenangan Departemen Pertanian sehingga diperlukan suatu koordinasi tingkat tinggi agar tercipta kegiatan yang saling mendukung.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya Hormati,

Berdasarkan alokasi anggaran (Satuan-2) yang diterbitkan oleh Bappenas dan Departemen Keuangan tanggal 8 Agustus 2003, anggaran pembangunan pertanian

tahun 2004 adalah sebesar Rp. 2,84 trilyun yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 2,20 trilyun, dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 0,64 trilyun. Departemen Pertanian selalu kritis dalam menyeleksi pinjaman luar negeri sehingga pinjaman hanya dilakukan bagi upaya yang prioritas, mempunyai dampak besar bagi masyarakat khususnya petani dan mempunyai tingkat keberhasilan tinggi. Keputusan untuk memanfaatkan pinjaman luar negeri tidak didasarkan atas rendahnya tingkat bunga tetapi harus didasarkan atas manfaat yang akan diperoleh.

Dibandingkan Anggaran Pembangunan Pertanian tahun 2003 yang besarnya Rp. 3,06 trilyun (RM sebesar Rp. 2,30 trilyun dan PHLN 0,76 trilyun), anggaran tahun 2004 turun 7,2%. Apabila dibandingkan antara anggaran RM TA. 2004 dengan RM TA 2003, maka terjadi penurunan sebesar 4,4%. Kami sangat memahami kondisi keuangan negara yang memprihatinkan. Adalah kewajiban kita semua termasuk Departemen Pertanian untuk mengatur pemanfaatan dana ini dengan sebaik-baiknya. Kami meyakini bahwa turunnya anggaran di Departemen Pertanian tahun 2004 dibanding tahun 2003 tidak akan mengurangi optimisme kami untuk bekerja lebih efisien dan lebih efektif di masa mendatang. Walaupun begitu, dengan pemikiran bahwa anggaran yang terbatas harus dialokasikan pada sektor prioritas, kami masih memerlukan dukungan anggota Komisi III yang terhormat untuk memperjuangkan agar setidaknya anggaran sektor berkerakyatan ini tidak turun, karena sektor ini menyangkut kehidupan orang banyak.

Sumber anggaran lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2004 adalah (1) anggaran rutin Rp.537,0 milyar, (2) target perolehan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Rp.47,3 milyar, (3) subsidi pupuk Rp.0.95 triliun, (4) subsidi benih padi dan kedele Rp. ~~40,0~~ ^{50,0} milyar, dan (4) pagu kredit ketahanan pangan Rp.2,08 triliun. stg

Alokasi anggaran 2004 akan dimanfaatkan untuk: (1) gerakan penggunaan pupuk berimbang untuk mencapai swasembada beras, (2) pengembangan kawasan agribisnis di tingkat kabupaten/kota, (3) perluasan areal tanam melalui optimasi lahan kering, tadah hujan, lahan lebak, dan pasang surut serta dikaitkan dengan tata air mikro, (4) pengembangan padi terpadu, (5) revitalisasi industri gula tebu, (6) perbaikan

mutu dan pengembangan agroindustri/pengolahan agribisnis di pedesaan, (7) penguatan kelembagaan agribisnis, peningkatan sarana/prasarana laboratorium penelitian dan pengembangan, karantina dan perbenihan/pembibitan, (8) jalan usahatani dan irigasi tingkat usahatani, (9) upaya khusus pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan di wilayah KTI dan daerah khusus, (10) upaya khusus penanggulangan kemiskinan, dan (11) diseminasi dan asistensi sistem dan usaha agribisnis ke daerah serta dukungan PENAS 2004. Keseluruhan kegiatan pembangunan pertanian masih tetap dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, yaitu **menolong mereka agar dapat menolong dirinya sendiri**.

Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan pada anggota Komisi-III bahwa dari dana subsidi pupuk tahun 2003 terdapat sisa sebesar Rp. 417 miliar yang akan kami rencanakan untuk mendukung gerakan penggunaan pupuk berimbang yang pilot proyeknya akan kita mulai tahun 2003.

Saudara Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat

Dalam hal anggaran pembangunan pertanian, yang paling penting bagi kami adalah tersedia anggaran yang memadai bagi sektor pertanian, dan bukannya bagi Departemen Pertanian. Dengan pemikiran demikian, kami masih melihat peluang peningkatan kinerja yang sangat besar dengan jalan mensinergikan pemanfaatan anggaran APBN yang dialokasikan di beberapa departemen terkait. Yang kami maksud adalah (1) dana pengelolaan air dan pengembangan sumber-sumber air sebesar Rp.4,87 triliun yang dikelola oleh Departemen Kimpraswil, (2) pengembangan prasarana jalan sebesar Rp.5,11 triliun yang juga dikelola oleh Departemen Kimpraswill, (3) pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar Rp.0,83 triliun dan (4) pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.2,73 triliun yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dari Komisi III agar pelaksanaan pembangunan pertanian dengan pembangunan sektor lainnya terkoordinasi dengan baik dan sampai pada sasaran yang kita sepakati bersama.

Rancangan alokasi anggaran pembangunan 2004 tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan dan keseimbangan: (1) antara wilayah barat (KBI) dan wilayah timur (KTI), (2) antara pusat dan daerah, dan (3) antar unit Eselon I lingkup Departemen Pertanian.

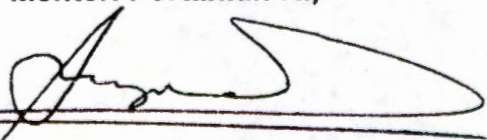
Selanjutnya sehubungan dengan temuan Komisi III selama kunjungan kerja ke Propinsi Bali, Banten dan Sulawesi tenggara, kami mencatat beberapa masukan penting, antara lain, (a) masalah yang dihadapi petani salak di Bali baik dari aspek hulu, on farm maupun hilirnya, masalah pemasaran, kurangnya sarana, (b) keterbatasan modal petani, kurangnya prasarana pertanian dan penurunan populasi ternak di Sulawesi Tenggara, dan (c) masalah alih fungsi lahan akibat rusaknya irigasi dan kordinasi pelaksanaan proyek dekonsentrasi di Banten. Permasalahan tersebut, tentunya kami perhatikan dan tangani dengan serius agar pembangunan pertanian di ketiga propinsi dimasa depan dapat lebih baik lagi. Sebahagian besar permasalahan yang ditemui merupakan tugas dan fungsi instansi diluar Deptan. Oleh karena itu kami menyarankan agar hal inipun dapat dibahas antar komisi di DPR sehingga kami dapat menindak lanjuti secara terintegrasi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang saya Hormati,

Demikian penjelasan saya secara umum, adapun temuan-temuan Anggota Dewan dalam kunjungan kerjanya ke Propinsi Bali, Banten dan Sulawesi tenggara, atas persetujuan Sdr Ketua akan ditanggapi oleh para pejabat Eselon I. Demikian pula uraian yang lebih detail apabila diperlukan, dengan senang hati akan disampaikan dalam diskusi nanti.

Terima kasih.

Menteri Pertanian RI,


Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





MENTERI PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI**

TENTANG

**TEMUAN KOMISI III DPR-RI
SELAMA KUNJUNGAN KERJA KE PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR, SULAWESI UTARA DAN
SUMATERA SELATAN
TANGGAL 29 SEPTEMBER S/D 9 OKTOBER 2003**



JAKARTA, 17 NOPEMBER 2003



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI
TENTANG TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP
HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR, SULAWESI UTARA DAN SUMATERA SELATAN
PADA MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2003 - 2004
Jakarta, 17 November 2003**

Yang terhormat,

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota komisi III DPR-RI

Saudara para pejabat Eselon I Departemen Pertanian, dan

Hadirin sekalian, yang saya hormati

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenankanlah saya untuk menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, kepada Bapak – bapak dan Ibu – ibu yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan ini. Saya juga mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat kerja dalam keadaan sehat dan sekaligus nanti siang mengadakan kunjungan lapang ke Rumah Potong Hewan Cakung dan Pasar Senen.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih, atas kunjungan kerja anggota Komisi III DPR-RI ke Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 29 September s/d 2 Oktober, Sulawesi Utara pada tanggal 2 s/d 5 Oktober dan Sumatera Selatan pada tanggal 6 s/d 9 Oktober 2003, untuk melihat secara

langsung pelaksanaan pembangunan pertanian. Saya telah membaca laporan hasil kunjungan kerja Komisi III DPR-RI di 3 (tiga) propinsi tersebut. Memang masih banyak permasalahan dan hambatan yang belum dapat kita selesaikan sebagaimana yang diharapkan, tetapi sudah banyak yang kita perbuat dan banyak kemajuan yang telah dicapai. Permasalahan yang ditemukan oleh Komisi III di ketiga propinsi tersebut seyogyanya banyak yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah misalnya, sarana transportasi yang belum memadai di Kalimantan Timur, kurangnya fasilitas pemasaran di Sumatera Selatan dan kurangnya lahan bagi pengembangan benih tanaman pangan dan hortikultura di Sulawesi Utara. Sehubungan dengan hal itu, Departemen Pertanian akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk berusaha membantu mengatasi permasalahan tersebut. Memang masih ada di beberapa daerah yang belum efektif dalam penggunaan sarana produksi, baik pestisida maupun benih unggul. Dana pemerintah memang tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan petani dengan memberikan mereka mesin dan input pertanian, kecuali yang sifatnya bantuan mendesak seperti bantuan terhadap petani yang tertimpa bencana. Masalah kekurangan alat mesin pertanian dilakukan melalui pengembangan usaha masyarakat seperti Usaha Pengolahan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) hampir disetiap kecamatan kita telah memiliki UPJA. Diharapkan UPJA ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa pelayanan pengolahan lahan bagi petani yang kekurangan tenaga kerja atau bagi petani yang memiliki lahan yang cukup luas. Sedangkan masalah pemasaran, inilah yang menjadi fokus kita dalam melaksanakan program agribisnis melalui sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis.

Tanggapan saya atas semua temuan Komisi III secara lengkap, telah saya sampaikan secara tertulis. Namun demikian, apabila diperlukan nanti para pejabat Eselon I yang bersangkutan akan menambahkan secara lebih rinci.

Saudara pimpinan dan anggota Komisi III, yang terhormat

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal penting yang telah dan sedang kami lakukan. Sebagaimana yang terjadi pada tahun – tahun yang lalu, menjelang Lebaran, peringatan Natal, Tahun Baru dan hari-hari besar keagamaan lainnya permintaan akan kebutuhan bahan pangan masyarakat cenderung meningkat, dibandingkan dengan hari-hari biasa. Meningkatnya permintaan terhadap beberapa jenis bahan pangan, menyebabkan terjadinya perubahan perilaku pasar. Kesempatan ini tentu akan dimanfaatkan oleh para pedagang untuk memperoleh keuntungan maksimal, akibatnya harga beberapa kebutuhan bahan pangan akan naik melebihi harga yang wajar. Menghadapi kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, Departemen Pertanian telah membentuk "Tim Pemantauan Ketersediaan, Distribusi Pangan dalam Menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional Tahun 2003/2004". Tim tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 486/Kpts.OT.160/10/2003, tanggal 14 Oktober 2003. Tim beranggotakan tidak hanya jajaran Departemen Pertanian tetapi juga instansi terkait, antara lain: Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan Asosiasi Perdagangan. Tujuan pemanataan yang dilaksanakan oleh Tim adalah untuk (1) mendapatkan informasi apakah bahan pangan cukup tersedia dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama hari-hari besar tersebut, (2) mendeteksi masalah-masalah yang terkait dengan distribusi bahan pangan dari sumber-sumber produksi ke pasar-pasar konsumen, (3) melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi serta konsultasi untuk memecahkan masalah-masalah ketersediaan, distribusi dan harga pangan, dan (4) memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi ketersediaan bahan pangan, agar masyarakat tidak melakukan "panic buying" yang dapat menyebabkan lonjakan harga.

Departemen Pertanian juga telah: (1) menghimbau Pemerintah Daerah agar melaksanakan pemantauan dan menganalisis kebutuhan dan ketersediaan pangan di daerah, (2) melakukan ekspose pedoman umum pemantauan ketersediaan, distribusi dan harga pangan, dan (3) melakukan kunjungan kelapangan dalam rangka pemantauan. Perlu kami sampaikan juga bahwa beberapa daerah telah membentuk Tim Pemantau serupa dan telah melakukan analisa prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan daerah.

Hasil prognosa nasional menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan bahan pangan beras, gula pasir, minyak goreng, cabe merah, daging ayam dan daging sapi dapat dinyatakan cukup aman untuk memenuhi kebutuhan hari-hari besar pada tahun 2003/2004. Bahan makanan tersebut dipenuhi baik dari produksi domestik maupun stok impor yang ada. Adapun bahan pangan yang ketersediaannya mengalami defisit, misalnya kacang tanah, perlu diadakan melalui impor.

Kondisi ketersediaan pangan satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Kebutuhan gula pasir, di Jatim, Jateng, Sumut, dan Jambi dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan Kalteng dan Sulut memerlukan pasokan dari luar. Minyak Goreng, di Jatim, Jateng, Sumut kebutuhan dapat dipenuhi dari produksi lokal, sedangkan di Jambi, Kalteng dan Sulut memerlukan pasokan dari perdagangan antar pulau. Cabe Merah, di Jatim, Jateng, Sumut, Kalteng dan Sulut, dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Bawang merah di Jatim, Jateng, Sumut, Jambi, Kalteng dan Sulut, kebutuhan akan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Daging ayam di Jambi, Jateng dan Sulut, dapat dipenuhi dari produksi lokal, sedangkan di Kalteng memerlukan pasokan dari luar. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah yang perlu kita lakukan dengan intansi terkait adalah pengaturan lalu lintas distribusi pangan dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit agar lancar.

Saudara pimpinan dan anggota Komisi III, yang terhormat

Pada kesempatan ini perkenankan pula saya menyampaikan beberapa kegiatan penanganan bencana alam yang dilakukan oleh Departemen Pertanian. Bencana alam yang terjadi pada akhir-akhir ini yaitu banjir, badai dan tanah longsor, telah mengakibatkan banyak lahan pertanian, sarana jalan, irigasi dan fasilitas lain yang diperlukan untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat tani. Beberapa bulan yang lalu juga telah terjadi bencana alam berupa kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Luas lahan sawah yang terkena kekeringan lebih dari 400.000 hektar dan hampir 100.000 hektar diantaranya mengalami puso. Dampak bencana alam tersebut tidak hanya berupa gagalnya panen, rusaknya sarana usahatani, dan meningkatnya angka pengangguran tetapi dikhawatirkan juga dapat mengganggu ketersediaan pangan.

Menyikapi kejadian-kejadian tersebut, Departemen Pertanian telah berupaya membantu memberikan jalan keluar bagi para petani yang proses produksinya terganggu oleh bencana. Berkat dukungan dari Komisi III, Departemen Pertanian telah dialokasikan dana tanggap darurat penanganan bencana alam lingkup pertanian tahun 2003 sebesar Rp. 92,3 milyar yang dialokasikan untuk 17 propinsi dan 53 kabupaten/kota secara langsung melalui Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

Perlu saya sampaikan bahwa dana tanggap darurat diarahkan untuk memenuhi: (a) penyaluran agro-input, seperti benih/bibit pertanian, ternak bibit/bakalan, pupuk, pestisida; (b) penyaluran alat dan mesin pertanian: meliputi alat/mesin untuk kegiatan pra-produksi, produksi, panen dan pasca panen, serta (c) pengembangan unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian, termasuk untuk perbaikan/perawatan sarana irigasi, embung, pompa air dan lainnya.

Penyaluran sarana produksi maupun alat dan mesin pertanian tersebut merupakan bentuk kompensasi dari pemerintah terhadap petani korban bencana dengan target minimal proses produksi pertanian dapat dipulihkan dan diharapkan petani yang bersangkutan mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat mengantisipasi dan meminimalisasi dampak bencana di masa mendatang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Selain kegiatan tanggap darurat, Departemen Pertanian juga melaksanakan kegiatan penanggulangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya Pertanian yang dikoordinir oleh Menko Kesra dengan total dana sebesar Rp.36,9 milyar. Padat karya pertanian merupakan kegiatan produktif yang mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja sebanyak 242.200 KK untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) seluas 90.223 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi desa seluas 31.000 hektar. Kegiatan padat karya ini telah dilaksanakan di 8 propinsi dan 46 kabupaten/kota.

Selanjutnya mengenai alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2003, perlu saya laporkan bahwa Departemen Pertanian mendapat alokasi ABT 2003 sebesar Rp.250 milyar dan sampai saat ini yang telah diterbitkan Daftar Isian Proyek (DIP)-nya baru sebesar Rp.150 milyar, sedangkan sisanya sebesar Rp.100 milyar yang rencana semula akan digunakan untuk subsidi pupuk sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.

Sesuai dengan hasil pembahasan dengan pihak Dewan pada bulan yang lalu, alokasi ABT 2003 sebesar Rp.150 milyar dimanfaatkan untuk kegiatan antara lain: (a) pengamanan produksi pangan, terutama kedelai dan pisang serta penyediaan

alat dan mesin pertanian; (b) penanggulangan hama dan penyakit ternak, panili, lada, kakao, jeruk, dan kentang termasuk penyediaan sarana brigade proteksi tanaman pangan dan hortikultura serta alat laboratorium Balai Proteksi Tanaman Perkebunan; (c) peningkatan kualitas bibit ternak terutama inseminasi buatan maupun embrio transfer; (d) penguatan agroindustri di pedesaan berupa penyediaan alat pengolahan jagung, ubi jalar, ubi kayu, lada, kakao, susu sapi perah, dryer, lumbung desa modern maupun rice milling unit; (e) memperkuat laboratorium litbang dan karantina; (f) memperkuat kelembagaan Mantri Tani maupun rehabilitasi Balai Subak; (g) peningkatan kualitas SDM pertanian; pemulihan pertanian di Propinsi NAD; dan (h) peningkatan produktivitas tebu. Namun demikian, mengingat waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut sangat terbatas, pelaksanaan memerlukan kehati-hatian dan diprioritaskan pada kabupaten-kabupaten yang secara administratif sangat dilaksanakan dalam waktu yang pendek.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

RAPBN Program pembangunan pertanian tahun anggaran 2004 berjumlah sebesar Rp 2, 99 triliun, terdiri dari : Rupiah murni sebesar Rp 2,4 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 590 milyar. Semula alokasi APBN 2004 (Rupiah Murni) untuk Departemen Pertanian dari rancangan satuan-3 hanya Rp. 2,2 trilyun atau menurun sebesar -4,34% dibandingkan tahun 2003, namun berkat kerjasama yang baik antara Departemen Pertanian dan pihak legislatif dalam memberikan perhatian yang besar terhadap masyarakat pertanian, saat ini alokasinya bertambah sebesar Rp. 200 milyar sehingga menjadi Rp. 2,4 trilyun atau meningkat sebesar 4,35% dibandingkan tahun 2003. Ini merupakan wujud nyata perhatian yang besar dari pihak Dewan, untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian.

Dengan adanya peningkatan alokasi rupiah murni APBN 2004 sebesar 4,35%, maka rancangan kegiatan yang semula belum tertampung atau sudah tertampung tetapi tidak memadai dapat diakomodir: Kegiatan tersebut antara lain: (1) revitalisasi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, (2) memperkuat litbang pertanian terutama pengembangan varietas padi tipe baru, benih sumber, peremajaan karet, pengelolaan jeruk maupun kapas secara terpadu, (3) perluasan areal tanam padi dengan pola Tata Air Mikro untuk lokasi yang sudah ada Tata Air Makro-nya; (4) gerakan pupuk berimbang, (5) pengembangan kelembagaan karantina, (6) agro-industri di pedesaan, (7) perbaikan infrastruktur jalan usahatani, irigasi dan penyediaan sarana terminal agribisnis dan sub-terminal agribisnis bagi lokasi yang sudah ada studi kelayakannya, (8) pemulihan pertanian di daerah konflik serta (9) program aksi yang bersifat khusus seperti Lembaga Mandiri yang Mengakar dari Masyarakat (LM3).

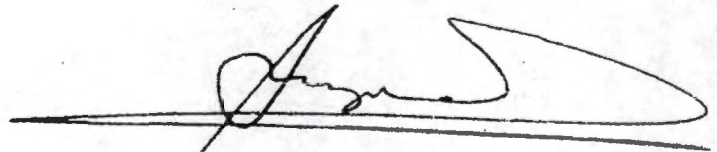
Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa rancangan kegiatan 2004 yang telah disusun, telah memperhatikan perubahan yang terjadi di daerah terutama mengenai organisasi pemerintahan daerah sesuai PP No.8 tahun 2003 serta antisipasi pemberlakuan anggaran kinerja yang akan diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2005. Untuk itu pada tahun 2004 akan dilakukan restrukturisasi proyek-proyek, bagpro-bagpro baik yang ada di pusat maupun di daerah sehingga menjadi lebih ramping, efektif dan efisien. Selain itu Deptan telah berupaya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah guna lebih mensenergiskan pelaksanaan program-program, pembangunan agribisnis di daerah. Perlu saya laporkan bahwa pada tanggal 21 Oktober yang lalu, jajaran Deptan telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah anggota DPRD dalam rangka mensosialisasikan program-program Departemen Pertanian di daerah. Saya berpendapat bahwa pertemuan dengan DPRD dan Dinas-dinas terkait di daerah

sangatlah diperlukan, untuk itu kedepan kita juga akan mengadakan pertemuan serupa.

Saudara pimpinan dan anggota Komisi III, yang terhormat

Demikianlah penjelasan saya secara umum, sedangkan yang bersifat teknis, akan disampaikan oleh para Eselon I. Semoga dalam rapat kerja ini kami mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari Anggota Dewan guna menyempurnakan program-program kita ke depan. Terima kasih.

Menteri Pertanian RI,



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR RI
TENTANG
WABAH FLU BURUNG**

Jakarta, 29 Januari 2004

*Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Komisi III DPR-RI
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.*

Pertama tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Departemen Pertanian telah menyusun laporan tertulis tentang perkembangan wabah Avian Influenza dan langkah-langkah penanggulangan atas permintaan para anggota Komisi III DPR-RI. Dengan demikian, pembicaraan kali ini berbeda dengan pembicaraan-pembicaraan yang pernah kita lakukan bersama, karena pembicaraan hari ini memiliki topik khusus dan sangat penting yaitu yang selama ini menjadi issue di kalangan masyarakat tentang berjangkitnya wabah Avian Influenza yang masyarakat umum menyebutnya sebagai Flu Burung.

Mengingat dampaknya yang sangat penting bagi sendi-sendi perekonomian masyarakat banyak, maka Departemen Pertanian memberikan curahan perhatian yang sangat besar untuk upaya-upaya penanggulangannya. Untuk ini dukungan dari seluruh elemen-elemen masyarakat dan pemerintah khususnya DPR-RI sangat kami perlukan sehingga upaya-upaya pengendaliannya dapat kami laksanakan dengan baik secara teknis dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable)

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Mengawali pembicaraan rapat hari ini, saya akan mengemukakan secara umum kronologis perkembangan wabah Avian Influenza tersebut dan kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan yang lebih spesifik oleh Sdr. Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan sekaligus menanggapi pertanyaan-pertanyaan serta masukan-masukan dari para anggota Komisi III yang terhormat.

Sebagaimana dimaklumi bahwa pada saat ini penyakit unggas khususnya Avian Influenza harus diakui telah menjadi "endemi" terutama di kawasan regional Asia. Tidak luput pula negara kita telah tertular penyakit ini.

Pertama-tama saya laporkan bahwa kira-kira akhir Agustus 2003 telah muncul penyakit yang mematikan di beberapa peternakan ayam ras di beberapa Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kami, Departemen Pertanian menginformasikan berdasarkan hasil pengujian beberapa lembaga dan laboratorium Diagnostik Kesehatan Hewan bahwa, wabah ini sebagai virus tetelo yaitu sejenis penyakit ayam yang mematikan. Namun demikian, pada bulan berikutnya, Oktober – November 2003 penyakit tersebut mengalami kenaikan jumlah kematian yang cukup tinggi dan menyebar ke lokasi lainnya. Kematian tersebut juga melanda beberapa peternakan pembibitan dan ayam petelur dan ayam pedaging, yaitu di Jawa Tengah 17 (tujuh belas) kabupaten, Jawa Timur 13 (tiga belas) kabupaten, Jawa Barat 6 (enam) kabupaten, Banten 1 (satu) kabupaten, DKI 1 (satu) kabupaten, DIY 3 (tiga) kabupaten, Lampung 3 (tiga) kabupaten, Bali 5 (lima) kabupaten, Kalimantan Selatan 1 (satu) kabupaten dan Kalimantan Tengah 1 (satu) kabupaten. Sehingga saat ini telah tertular 51 kabupaten pada 10 (sepuluh) propinsi dan menelan korban 4,7 juta ekor ayam, dengan kerugian material sebesar 77 triliun rupiah dan kehilangan lapangan pekerjaan 1,25 juta kepala keluarga.

Di samping itu dampak lebih lanjut penyakit ini apabila berpeluang untuk menular ke manusia terutama terhadap para pekerja yang langsung berhubungan dengan peternakan unggas. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah dalam rangka pengamanannya menugaskan suatu Kelompok Kerja Penyidik Penyakit Unggas Nasional (K2P2UN) yang terdiri atas unsur-unsur yang berkompeten yaitu Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner, Balai Penelitian Veteriner, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dan Tenaga ahli dari 3 Fakultas Kedokteran Hewan yaitu IPB, UGM dan UNAIR serta dukungan dari Dinas Peternakan Propinsi terkait. Kelompok ini bekerja sejak bulan Oktober 2003 dan bertugas untuk mencari dan menentukan penyebab kematian unggas.

Selain itu mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wabah tersebut serta memberikan saran dan tindak pengamanan yang perlu dilakukan kepada Departemen Pertanian. Kelompok kerja tersebut, dari beberapa hasil temuannya secara bertahap melaporkan bahwa, pada awal kejadian, sementara menyimpulkan bahwa penyakit yang menyerang ternak unggas tersebut tidak hanya 1 (satu) macam, dan dari hasil pemeriksaan klinis dan gambaran epidemiologis serta laboratorium diperoleh adanya virus yang menonjol yaitu **virus tetelo (Newcastle Disease/ND)** dan **adanya virus lain yang mengikuti kasus tersebut**. Tim menduga virus tersebut bersifat menekan daya kekebalan tubuh unggas (immunosupresive).

Pada tahapan selanjutnya dilakukan identifikasi dari type virus ND yang diketemukan agar lebih spesifik. Sehingga dilakukan pemeriksaan laboratorium secara lengkap sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Ternyata identifikasi virus lokal yang diperoleh **adalah virus ND strain Velogenik Viscetropik (tipe akut)** sedangkan virus lain yang mengikutinya memerlukan pemeriksaan lanjutan dan harus diperiksa dengan uji-uji khusus untuk memastikan dan mengidentifikasi apakah virus ikutan tersebut adalah virus Avian Influenza (AI). Ternyata setelah diidentifikasi maka virus ikutan tersebut adalah Virus Avian Influenza type A. Oleh karena itu dalam waktu dekat Lembaga Penyidikan dan Penelitian Penyakit Hewan akan terus memonitor dinamika perilaku virus di alam dan lingkungannya.

Saudara pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui asal virus Avian Influenza mengingat Indonesia sebenarnya bebas dari penyakit tersebut. Sampai saat ini dari berbagai kemungkinan yang kami peroleh penyebarannya dapat berasal antara lain dari migrasi/perpindahan burung dari luar negeri yang membawa virus. Walaupun wabah penyakit unggas tersebut menyebabkan kematian sampai 4,7 juta ekor, namun kematian ini karni pandang belum dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan populasi unggas, produksi dan konsumsi daging dan telur unggas secara nasional.

Saat ini populasi unggas di Indonesia berjumlah 1,3 milyar ekor yang meliputi ayam buras, 287,3 juta ekor, ayam ras petelur 85,1 juta ekor, ayam ras pedaging 917,7 juta ekor dan itik 48,1 juta ekor. Data kematian terbesar terbanyak pada ayam ras yang hanya berkisar 0,5% dari populasi ayam ras dan hanya 0,4% terhadap populasi unggas secara keseluruhan. Dengan demikian produksi nasional daging unggas sebesar 1,2 juta ton dan telur sebesar 1,1 juta ton tidak akan terpengaruh. Saya berharap kejadian ini tidak akan berdampak lanjutan kepada sektor industri dan jasa pendukungnya.

Hal lain yang cukup melegakan kita saat ini adalah gambaran dari perkembangan kasus. Pada awalnya terjadi wabah yaitu bulan Agustus 2003 kematian sebanyak 9.000 ekor, bulan September 2003 meningkat menjadi 325.000 ekor dan memuncak pada bulan Nopember 2003 dengan korban 2,3 juta ekor ayam. Pada bulan Desember 2003 kasus kematian mulai menunjukkan tendensi penurunan menjadi 0,5 juta ekor dan pada bulan Januari 2004 diharapkan semakin menurun lagi.

Sejak awal berjangkitnya wabah ini yaitu sejak Agustus 2003 Pemerintah telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedur, sampai diketemukannya secara pasti penyebab kematian unggas tersebut. Proses identifikasi penyebab atau agen penyakit tersebut memang memerlukan waktu untuk klarifikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten baik di dalam maupun luar negeri karena Indonesia sebenarnya tergolong negara yang masih bebas penyakit Avian Influenza. Seperti diketahui di Asia, bahwa penyakit ini merupakan penyakit baru di Indonesia, sehingga belum berpengalaman dalam menangani penyakit ini. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang terbaik di Asia dalam bidang kesehatan hewan karena bebas dari sebagian besar penyakit hewan menular daftar A OIE, sehingga kita ekstra hati-hati, karena kita tidak mau menimbulkan kerugian yang tidak perlu akibat keputusan yang tergesa-gesa. Sehingga Pemerintah tidak bisa begitu saja secara cepat mengumumkannya kepada publik, oleh karena itu terkesan lamban. Namun proses perkembangan penanganan wabah tersebut secara reguler telah kami sampaikan kepada dinas-dinas, Balai Penyidikan dan Balai Penelitian dan pada masyarakat melalui berbagai media massa. Bahkan peran Dinas-dinas yang membawahi fungsi Peternakan di daerah sangat penting dalam melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian secara cepat.

Saudara pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati,

Perkenankanlah saya menyampaikan langkah-langkah dan strategi Departemen Pertanian untuk menanggulangi dan mengendalikan wabah Avian Influenza tersebut. Sesuai dengan pertimbangan teknis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat maka langkah penting yang kami tempuh adalah kombinasi antara penerapan selectif stamping out dan tindak vaksinasi. Cara ini dipandang paling efektif sesuai kondisi Indonesia dan secara teknis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam melaksanakan tindakan dan langkah-langkah tersebut, kami selalu berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait antara lain Departemen Kesehatan, Badan POM, Deperindag, Pemda, dan para pelaku bisnis perunggasan.

Secara khusus langkah-langkah operasional tersebut adalah :

Pertama, penerapan biosecurity yang mencakup upaya untuk sanitasi dan hygiene di tingkat farm.

Kedua, melakukan vaksinasi secara khusus memakai strain lokal inaktif. Oleh karena dalam keadaan darurat apabila terjadi kekurangan produksi vaksin dalam negeri akan dilakukan import khusus yang sifatnya sementara dan terbatas.

Ketiga, pengawasan lalu lintas baik antar pulau atau antar negara. Untuk ini, akan dilakukan pengawasan lalu lintas dari daerah tertular ke daerah aman. Sedangkan untuk lalu lintas antar negara kami telah menutup import dari negara-negara Thailand, China, Vietnam, Korea Selatan, Jepang dan Kamboja.

Keempat, Public Campign dan awareness, berupa penyuluhan kepada masyarakat, bahwa agar tetap tenang selain pengamanan konsumsi pangan masyarakat khususnya daging ayam dan telur. Untuk memperoleh kemudahan bagi masyarakat yang menginginkan informasi Departemen Pertanian membuka Hot Line dan semacam *crisis centre*.

Kelima, melaksanakan depopulasi (pemusnahan) secara selektif terutama pada ternak yang mati sakit dan yang sekandang dengan yang sakit.

Keenam, monitoring dan evaluasi, melalui laboratorium-laboratorium Kesehatan Hewan dan penerjunan *Task Force* ke lapangan.

Saudara pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang saya hormati,

Akhirnya kami sekali lagi memintakan dukungan kepada Komisi III DPR-RI dalam rangka penanggulangan wabah Avian Influenza ini. Dalam rangka operasionalisasinya, kami juga memerlukan dukungan anggaran melalui anggaran belanja tambahan yang secepatnya sangat kami harapkan. Pada saat darurat seperti sekarang ini dukungan anggaran kami butuhkan untuk produksi dan pengadaan vaksin yang kami khususkan untuk peternakan rakyat, yaitu pada ayam-ayam buras dan itik. Selain itu, dana kami perlukan untuk melengkapi peralatan produksi vaksin milik pemerintah, serta untuk melaksanakan tindak operasionalnya khususnya stamping out selektif dan vaksinasi pada peternakan rakyat. Kami mengusulkan jumlah anggaran sebesar Rp. 212 milyar yang sebagian besar diperuntukkan bagi penyediaan vaksin, pelaksanaan biosekuriti peternakan, pelaksanaan stamping out dan kebutuhan peralatan laboratorium serta 'public awareness'. Diharapkan melalui kombinasi sistem stampingout di daerah yang belum tertular dan vaksinasi tersebut diperkirakan secara teknis wabah penyakit unggas ini dapat dikendalikan dalam waktu 6 bulan. Sekali lagi kami memerlukan dukungan DPR-RI untuk ini.

Perlu kami sampaikan pula dalam kesempatan ini bahwa dalam menghadapi wabah penyakit ini yang sudah menjadi masalah regional di Asia, kami telah meningkatkan kerjasama internasional dengan menugaskan Sekretaris jenderal Departemen Pertanian dan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk hadir di Bangkok dan berdiskusi dengan negara-negara lain di Asia dan organisasi internasional dalam rangka mencari solusi regional dalam menghadapi penyakit ini. Di samping itu beberapa organisasi dan negara sahabat telah menawarkan bantuan dalam turut serta menanggulangi wabah ini seperti FAO, Pemerintah Belanda dan Jepang.

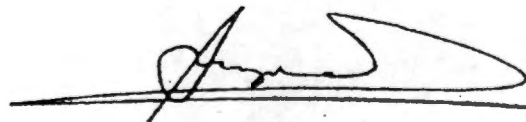
Demikian penjelasan saya secara umum, adapun penjelasan secara spesifik, atas persetujuan Saudara Ketua akan ditanggapi oleh Saudara Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan. Demikian pula uraian yang lebih detail apabila diperlukan, dengan senang hati akan disampaikan dalam diskusi ini.

Memang kita harus dimarahi karena masalah belum selesai. Semuanya itu kita terima dengan lapang dada dengan demikian harapan kita, supaya masalah ini cepat selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ilmuwan, para peneliti membantu kami dengan susah payah dengan perdebatan yang luar biasa, pro dan kontranya, bantuan saudara-saudara tidak sia-sia yang lebih penting lagi kami mengucapkan terima kasih kepada petugas lapangan yang ada di daerah khususnya dinas-dinas dalam lingkup peternakan, mereka adalah pejuang-pejuang terdepan untuk penanggulangan masalah wabah flu burung ini.

Semoga Tuhan memberkati upaya-upaya yang baik yang sedang kita usahakan dan harapan kami wabah flu burung ini atau musibah ini bukan menceraikan kita tapi justru mempersatukan kita, menunjukkan bahwa kita bisa bekerjasama untuk menanggulangi masalah yang kita hadapi, tanggung jawab ada pada kami tapi support dari Bapak sekalian dari DPR, media massa, peneliti pemerintah daerah, masyarakat peternakan sangat kami butuhkan pada saat ini, silahkan kritik, marah-marah tapi bantu kami untuk menyelesaikan ini demi bangsa dan negara kita.

Jakarta, 29 Januari 2004

Menteri Pertanian RI,



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





MENTERI PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI**

TENTANG

**EVALUASI KINERJA SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2001-2003,
TEMUAN KOMISI III DPR-RI SELAMA KUNJUNGAN KERJA
KE PROPINSI JAWA TENGAH, JAMBI DAN
KALIMANTAN SELATAN (TANGGAL 8 S/D 12 JANUARI 2004),
SERTA RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
NEGARA (RAPBN) TAHUN 2005**



JAKARTA, 18 FEBRUARI 2004



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR RI**

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Mengawali sambutan saya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam rapat kerja untuk membahas berbagai aspek pembangunan pertanian.

Sesuai dengan permintaan Komisi III DPR-RI rapat akan membahas: (1) Evaluasi Kinerja Departemen Pertanian 2001-2003, (2) Hasil temuan kunjungan kerja Komisi III ke Propinsi Jambi, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan, dan (3) Usulan pendahuluan RAPBN TA. 2005.

Rapat kerja kita pada tahun terakhir masa kerja Kabinet Gotong Royong ini saya pikir mempunyai arti khusus karena selain membahas evaluasi kinerja juga membahas arah pembangunan pertanian ke depan oleh pemerintahan yang akan datang. Saya sangat menghargai inisiatif Komisi III DPR RI yang terhormat untuk menjadwalkan pertemuan penting ini. Tidak lupa saya juga berterima kasih atas pengertian semua anggota Komisi III atas penjadwalan ulang rapat kerja kali ini berkenaan dengan undangan rapat mendadak dari Presiden untuk membahas masalah mendesak yang sekarang kita hadapi. Saya akan menyampaikan pemaparan yang sifatnya umum, sedangkan hal-hal yang lebih detail atas seijin Saudara Ketua akan disampaikan oleh Pejabat Eselon I lingkup Deptan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Evaluasi kinerja Departemen Pertanian merupakan hal yang harus dilakukan sebagai pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat. Evaluasi ini mencakup kebijakan, strategy, dan proses termasuk berbagai kendala-kendalanya, untuk memecahkan

masalah-masalah di sektor pertanian yang telah dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir.

Pembangunan pertanian dewasa ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan tuntutan perubahan ruang lingkupnya. Perubahan lingkungan yang dimaksud adalah: **pertama**, perubahan pengelolaan pembangunan dari *sentralistic-top-down* kepada *decentralistic-bottom-up*, sebagaimana maksud UU No. 22 Tahun 1999; **kedua**, kebebasan petani untuk memilih komoditas yang akan diusahakan sesuai UU No. 12 Tahun 1992; **ketiga**, tuntutan pentingnya kelestarian lingkungan hidup sesuai UU No. 23 Tahun 1997, dimana pelestarian lingkungan harus merupakan bagian dari pembangunan itu sendiri; dan **keempat**, keputusan Indonesia meratifikasi perjanjian WTO menuntut kita untuk mampu bersaing di dunia internasional.

Sementara itu, perubahan ruang lingkup pembangunan pertanian yang dimaksud adalah: **pertama**, perubahan orientasi pembangunan pertanian dari peningkatan produksi kepada peningkatan produktivitas dan nilai tambah; **kedua**, pergeseran pendekatan komoditas kepada pendekatan usaha; **ketiga**, implementasi dari butir pertama dan kedua diatas menuntut keterpaduan antara sub-sistem hulu, budidaya, hilir dan penunjangnya.

Perubahan lingkungan dan ruang lingkup tersebut diatas merupakan dasar dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan pertanian, sehingga akhirnya Departemen Pertanian menetapkan Strategi besar (*grand strategy*) yaitu: **membangun Sistem dan Usaha Agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralistis**. Implementasi dari Strategi besar tersebut antara lain, sebagai berikut.

Pertama, kebijakan dan strategi yang ditujukan untuk mempromosikan tumbuh-kembangnya sistem dan usaha agribisnis melalui penciptaan lingkungan usaha yang menunjang bagi perkembangan agribisnis. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas; pengembangan usaha perbenihan/perbibitan; deregulasi pupuk, pestisida, dan alsintan untuk mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru; promosi pasar, pengembangan kelembagaan, dan lainnya.

Kedua, mewujudkan sistem dan usaha agribisnis yang **berdaya saing**, dengan arah: (1) pelaku agribisnis mampu merespons perubahan permintaan pasar secara cepat dan efisien; dan (2) mampu menghasilkan produk yang diminta pasar secara kompetitif.

Ketiga, mewujudkan sistem dan usaha agribisnis **berkerakyatan**. Kebijakan yang telah dan sedang dilakukan antara lain adalah fasilitasi: (1) usaha-usaha agribisnis yang berbasis pada sumberdaya lokal, (2) penguatan kelembagaan/organisasi petani agar terjadi kegiatan kolektif pada usaha agribisnis, dan (3) terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan di bidang agribisnis.

Keempat, mewujudkan sistem dan usaha agribisnis yang **berkelanjutan** baik secara sosial, ekonomi maupun ekologis. Beberapa kebijakan yang telah dan sedang dilakukan antara lain adalah: (1) konservasi sumberdaya alam terutama keragaman hayati (plasma nutfah) yang terintegrasi dengan upaya pengembangan perbenihan / pembibitan; (2) mendorong tumbuhnya usaha-usaha dibidang pupuk organik; (3) pelarangan penggunaan pestisida yang membahayakan lingkungan; (4) memfasilitasi teknologi ramah lingkungan seperti Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), *Crop Livestock System (CLS)*; dan (5) pro-kehati-hatian pada teknologi transgenik.

Kelima, mewujudkan sistem dan usaha agribisnis yang **desentralistis**. Kebijakan yang telah dan sedang dilakukan adalah: (1) perencanaan yang *bottom-up* bagi program yang dibiayai APBN; (2) asistensi pembangunan agribisnis bagi Pemda Kab/Kota dan Propinsi, terutama untuk menggalang dana daerah/APBD dalam pembangunan agribisnis; (3) meningkatkan alokasi dana dekonsentrasi APBN ke Kab/Kota dan Propinsi. Selama tiga tahun terakhir ini sekitar 80 persen APBN Deptan dialokasi ke Kabupaten/Kota dan Propinsi; (4) penyerahan UPT-UPT (unit pelayanan teknis) Deptan secara bertahap kepada pemerintah daerah.

Keenam, kebijakan dan strategy **proteksi** untuk **melindungi** petani kita. Kebijakan ini ditempuh baik melalui forum internasional maupun dalam negeri. Di forum WTO, Indonesia memimpin 36 negara berkembang (G-36) untuk memperjuangkan konsep *strategic product (SP)* yang ditujukan untuk melindungi petani dari persaingan yang tidak adil. Sedangkan di dalam negeri dirumuskan berbagai kebijakan untuk melindungi petani antara lain: (1) kebijakan pangan nasional : membentuk Dewan Ketahanan Pangan; Inpres 9 tahun 2001 tentang kebijakan perberasan nasional; penerapan bea masuk beras; kebijakan impor beras; dan dana talangan untuk mengamankan harga dasar pembelian pemerintah (HDPP); dan (2) kebijakan pergulaan nasional yaitu pengaturan tata niaga gula termasuk bea masuk sehingga harganya terjangkau.



Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi III yang saya hormati,

Sistem dan usaha agribisnis yang menjadi dasar pijak kami dalam membangun pertanian bukanlah hal yang baru. Petani kita bukanlah petani subsisten yang memproduksi hanya untuk kebutuhan sendiri. Mereka berada dalam suatu sistem bisnis yang mempunyai ketergantungan tinggi kepada pihak lainnya, yaitu pelaku usaha di sektor hulu, hilir, penunjang dan bahkan permintaan konsumen akhir. Sejumlah kebijakan pokok diperlukan agar keseluruhan sistem ini dapat berjalan secara optimal. Walaupun demikian, sesuai dengan kewenangannya, Departemen Pertanian hanya bergerak dalam lingkup pertanian, yaitu petani dengan usahataniannya. Dengan latar belakang serta proses-proses yang saya paparkan di atas, selanjutnya disampaikan beberapa indikator pencapaian kinerja pembangunan pertanian tahun 2001 - 2003 sebagai berikut.

Data PDB yang diterbitkan oleh BPS menunjukkan bahwa setelah mengalami krisis sejak tahun 1997, pada periode tahun 2000-2003 sektor pertanian telah mengalami pemulihan dan saat ini sedang menuju fase pertumbuhan berkelanjutan.

Selama periode 2000-2003 laju pertumbuhan sektor Pertanian mencapai 1,44 persen lebih tinggi dibanding periode 1998-1999, namun masih lebih rendah dibanding periode 1993-1997 (sebelum krisis ekonomi) yang mencapai 1,57 persen. Walaupun demikian, bila dilihat dari indeks PDB sektor Pertanian menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten sejak tahun 2000, dan mulai tahun 2003 sektor Pertanian sedang menuju pertumbuhan berkelanjutan seperti periode sebelum masa krisis ekonomi. Hal yang sangat mengesankan adalah pertumbuhan sub sektor Tanaman Bahan Makanan yang mencapai 1,00 persen jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan selama periode sebelum krisis ekonomi yang hanya mencapai 0,13 persen. Hal ini tidak lepas dari kebijakan Departemen Pertanian selama yang memfokuskan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan terutama beras.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi III yang saya hormati,

Situasi ketahanan pangan nasional pada tahun terakhir mengalami kenaikan, seperti ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan; kecenderungan kenaikan produksi beberapa komoditas pangan penting; meningkatnya kualitas konsumsi; lebih stabilnya pergerakan harga pangan, baik secara umum maupun saat menjelang hari-hari besar nasional; dan meningkatnya pendapatan nilai tukar petani. Kami menilai ini adalah suatu pencapaian penting yang mempunyai dampak sosial, ekonomi dan politis yang besar.

Selama periode 2000-2003 kinerja Sub Sektor Tanaman Pangan secara umum mengalami peningkatan. Produksi komoditas padi, jagung, kacang tanah, dan ubi kayu mengalami peningkatan masing-masing 0,59; 3,67; 1,05 dan 2,82 persen per tahun, sedangkan komoditas kedele dan ubi jalar mengalami penurunan masing-masing -14,03 dan -1,71 persen per tahun. Produktivitas padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar mengalami pertumbuhan positif masing-masing 1,45; 5,22; 1,40; 1,76; 5,16 dan 2,36 persen per tahun, sedangkan luas panen keenam komoditas pangan tersebut mengalami penurunan masing-masing -0,86; -1,54; -15,43; -0,71; -2,33 dan -4,07 persen per tahun. Penurunan luas panen disebabkan oleh konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian, serangan hama, banjir dan kekeringan. Peningkatan produktivitas merupakan hasil penerapan inovasi teknologi seperti penemuan bibit unggul baru dan teknologi budidaya, serta efisiensi usahatani.

Peningkatan produksi pangan memberikan kontribusi dalam pemantapan kemandirian pangan. Rasio impor terhadap total penyediaan pangan dari beberapa bahan pangan penting mengalami penurunan. Dalam tahun 2002 rasio impor beras sebesar 2,64% menurun menjadi 2,16% pada tahun 2003. Demikian juga impor jagung, turun dari 1,42% dari penyediaan total tahun 2001 menjadi 1,25% tahun 2003. Impor gula juga turun dari 1,77% dari penyediaan total tahun 2001 menjadi 1,69% tahun 2003.

Sejalan dengan kinerja diatas, kualitas konsumsi rumahtangga mengalami kenaikan. Tingkat konsumsi rumahtangga pada tahun 2003 telah lebih tinggi dari tingkat konsumsi pada tahun 1996 (sebelum krisis), namun secara agregat masih berada dibawah tingkat konsumsi yang direkomendasikan.

Dalam tahun terakhir, stabilitas harga gabah juga mengalami perbaikan. Kebijakan HDPP mempunyai pengaruh positif terhadap harga gabah yang ditunjukkan rata-rata harga nominal gabah tahun 2003 naik sebesar 10 persen dari tahun 2002. Namun implementasi kebijakan HDPP dinilai masih kurang efektif dalam menjaga stabilitas harga gabah petani pada setiap musim panen raya, antara lain karena masuknya beras impor baik legal maupun ilegal cukup besar dengan harga yang rendah.

Di Sub-Sektor Hortikultura juga menunjukkan kinerja yang membaik. Komoditas sayuran utama tumbuh positif : bawang merah (2,07%), kubis (1,13%), kentang (0,94%), cabai (6,11%) dan tomat (4,40%). Produksi buah utama seperti alpukat, jeruk, duku, durian, mangga, pepaya, salak, pisang dan rambutan tumbuh antara 5,72% sampai dengan 29,26%. Peningkatan produksi hortikultura lebih banyak disebabkan peningkatan produktivitas.

Dalam periode 2000-2002 produksi komoditas perkebunan pada umumnya meningkat kecuali tebu. Laju kenaikan produksi kelapa sawit, teh, kopi, dan karet masing masing adalah : 11,08 ; 2,18; 1,86 dan 18,31% persen/tahun. Produksi tebu tiga tahun terakhir menunjukkan tren menurun akibat harga yang rendah, serta produktivitas yang menurun. Oleh karena itu Deptan telah memprogramkan akselerasi peningkatan produktivitas tebu mulai tahun 2003.

Tahun 2000–2003, kinerja Sub Sektor Peternakan juga mengembirakan. Populasi semua ternak utama seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, babi, ayam broiler, dan ayam petelur meningkat antara 0,91% sampai dengan 22,19%. Produksi daging meningkat kecuali daging kerbau tumbuh minus 0.63%. Produksi daging tertinggi adalah domba sebesar 19,35%, dan terendah adalah sapi 0,78%.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi III yang saya hormati,

Peningkatan produksi komoditas pertanian berpengaruh positif pada neraca perdagangan. Nilai rata-rata ekspor tahun 2000-2002 mencapai US\$ 5 676 juta lebih tinggi dibanding periode 1998-1999 yang mencapai US\$ 5 596 juta dan juga lebih tinggi dibanding tahun 1993-1997 sebesar US\$ 5 166 juta. Sedangkan nilai rata-rata impor periode 2000-2002 sebesar US\$ 2 966 juta. Surplus neraca perdagangan tahun 2000-2002 adalah sebesar US \$ 2 710 lebih tinggi dibanding periode 1998-1999 yang mencapai US \$ 2 509 dan juga lebih tinggi dibanding periode 1993-1997 yang mencapai US \$ 2 243 juta. Naiknya trend nilai surplus ini menunjukkan bahwa daya saing komoditas pertanian Indonesia di pasar internasional sudah mulai mengalami perbaikan secara konsisten sejak periode 2000-2002.

Nilai Tukar Komoditas Pertanian (NTP) tahun 2003 umumnya lebih baik dibanding tahun 2002. NTP di Jawa selama 2001 – 2003 selalu diatas 100%, dan tahun 2003 NTP di seluruh Jawa naik antara 2,59% - 31,11%. Di luar Jawa kecuali Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Bali juga terjadi peningkatan NTP. Bila NTP tersebut digunakan untuk mengukur perkembangan kesejahteraan petani, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani membaik, upah riil pedesaan meningkat, dan penduduk miskin di pedesaan menurun. Ini menunjukkan suatu keberhasilan program sistem dan usaha agribisnis dalam meningkatkan pendapatan petani.

Data BKPM menunjukkan bahwa investasi, baik PMDN maupun PMA kurang mengembirakan. Tahun 2002 PMDN mencapai 9,35 triliun rupiah turun menjadi 5,2 triliun rupiah tahun 2003. PMA juga mengalami penurunan dari 1,28 triliun tahun 2003 menjadi hanya 0,51 triliun rupiah tahun 2003. Namun perlu dicatat bahwa data ini tidak melaporkan investasi yang dilakukan oleh usaha-usaha agribisnis skala kecil

serta investasi oleh petani yang justru jauh lebih besar lagi, apalagi dipicu oleh stimulasi BLM.

Dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan, bahwa pada tahun 2003 sektor Pertanian telah pulih dari cekaman krisis dan terlepas dari perangkap spiral pertumbuhan rendah. Sektor Pertanian telah melewati fase krisis (1997 – 1998) dan fase pertumbuhan rendah (1998 – 1999), kini (2003) tengah berada pada fase percepatan pertumbuhan (accelerating growth) sebagai masa transisi menuju pertumbuhan berkelanjutan (sustaining growth).

Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi III dan hadirin sekalian

Saya mengucapkan terima kasih atas segala pendapat dan saran dari Komisi III, sehubungan dengan temuan – temuan hasil kunjungan kerja Komisi III ke Propinsi Jambi, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan, tanggal 5 s/d 10 Januari 2004 lalu.

Setelah saya mencermati temuan-temuan tersebut, disadari bahwa memang pelaksanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis masih banyak mengalami kendala terutama keterkaitan antar sub-sistem. Masalah masalah tersebut sebagaimana disampaikan oleh Anggota Dewan mencakup hulu sampai hilir, seperti kurangnya permodalan, sarana dan prasarana, pemasaran, SDM dan sebagainya. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman konsep sistem dan usaha agribisnis terutama di daerah. Kita harapkan dimasa mendatang Pemda lebih pro-aktif dalam mensinkronkan kegiatan kegiatan tersebut di daerah masing-masing. Selain itu untuk mengharmoniskan berbagai sub-sistem agribisnis tersebut sangat diharapkan dukungan instansi terkait seperti lembaga keuangan, Kimpraswil, Koperasi dan UKM. Penjelasan secara detail akan disampaikan oleh Pejabat Eselon 1 terkait.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Prestasi yang dicapai tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Untuk itu, pembangunan sistem dan usaha agribisnis akan terus dilanjutkan pada tahun 2004. Langkah-langkah operasional beserta sasaran-sasaran produksi komoditas pertanian tahun 2004 telah kami sampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR-RI pada tanggal 26 Mei 2003 dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2004. Oleh karena itu tidak perlu lagi saya ulangi.

Pembangunan pertanian tahun 2005 merupakan kelanjutan tahun 2004 dan masih ditekankan kepada implementasi pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Dalam

tahun 2005, pemenuhan kebutuhan pangan akan tetap menjadi prioritas utama pembangunan pertanian, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dengan prioritaskan pada produksi domestik melalui: (a) peningkatan mutu intensifikasi pada lahan-lahan andalan, (b) optimalisasi lahan kering, tadah hujan, lebak dan pasang surut, (c) peningkatan produktivitas padi melalui introduksi varietas Fatmawati seluas 1 juta hektar, dan (d) pengembangan sumber pangan alternatif. Upaya-upaya tersebut perlu didukung dengan pengembangan: (a) lembaga layanan saprodi, (b) permodalan, (c) penyuluhan, (d) perlindungan tanaman, dan (e) pemasaran dan pasca panen, (f) perlindungan berupa bea masuk, (g) subsidi, dan (h) dana talangan.

Rincian sasaran kuantitatif tahun 2005 untuk beberapa komoditas utama adalah sebagai berikut:

- Sasaran produksi padi sebesar 53 juta ton GKG, jagung 11,6 juta ton, kedelai 1 juta ton, kacang tanah 0,8 juta ton, kacang hijau 0,3 juta ton, ubi jalar 1,85 juta ton, dan ubi kayu 18,5 juta ton. Disamping itu peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam akan diprioritaskan terutama di luar Jawa.
- Sasaran produksi buah-buahan sebesar 13,99 juta ton, sayuran 9,22 juta ton, tanaman hias 154,4 juta tangkai dan tanaman obat/bio-farmaka sebesar 0,25 juta ton.
- Sasaran populasi sapi potong sebanyak 12,6 juta ekor, kerbau 3,2 juta ekor, kambing 16,2 juta ekor, domba 8,5 juta ekor, ayam pedaging 1,2 miliar ekor, ayam ras petelur 92,7 juta ekor, ayam buras 311 juta ekor, itik 56 juta ekor, dan babi 9,2 juta ekor.
- Sasaran produksi kelapa sawit (CPO) 12,88 juta ton, kelapa 3,40 juta ton, kopi 620 ribu ton, kakao 490 ribu ton, karet 2,779 juta ton, tebu 2 juta ton, tembakau 161 ribu ton, lada 87 ribu ton, jambu mete 80 ribu ton, dan tanaman serat 20,5 ribu ton. Target pengembangan KIMBUN tahun 2005 adalah 416 unit.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pembiayaan pembangunan pemerintah pada dasarnya adalah investasi dalam rangka fasilitasi tumbuhnya investasi masyarakat dengan jumlah yang lebih besar. Investasi pemerintah diselenggarakan melalui proyek-proyek pembangunan.

Untuk mencapai target pertumbuhan sektor pertanian tahun 2005 sebesar 2,5% dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp. 46,6 triliun. Dengan asumsi bahwa investasi pemerintah mampu membangkitkan 10 kali lipat investasi masyarakat/swasta maka kebutuhan investasi pemerintah sebesar Rp 4,66. triliun. Dana tersebut diusulkan dari anggaran rupiah murni sebesar Rp 3,9 triliun dan

Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebesar Rp. 0,76 triliun. Dibandingkan dengan total anggaran TA. 2004 yang sudah disetujui sebesar Rp. 2,99 triliun, maka kebutuhan anggaran TA. 2005 meningkat sebesar 30,04%, dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Program Pengembangan Agribisnis sebesar Rp. 2.36 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 2,06 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,30 triliun.
- (2). Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 2,30 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 1,84 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,46 triliun.

Peningkatan kebutuhan anggaran merupakan konsekuensi dari: (1) pemantapan ketahanan pangan, (2) pengembangan dan pemantapan pengembangan kawasan agribisnis, (3) perluasan areal tanaman melalui optimasi lahan kering, tadah hujan, lahan lebak, dan pasang surut, terutama di daerah KTI, (4) pengembangan padi terpadu, (5) akselerasi dan revitalisasi industri gula tebu, (6) perbaikan mutu dan pengembangan agribisnis pedesaan, (7) pengembangan layanan agribisnis seperti agro-input lain, inovasi teknologi dan penyuluhan, (8) penguatan kelembagaan/ organisasi agribisnis, peningkatan sarana/prasarana laboratorium penelitian dan pengembangan, karantina, perbenihan/pembibitan, dan revitalisasi penyuluhan, (9) jalan usahatani dan irigasi tingkat usahatani, (10) upaya khusus pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan di wilayah KTI dan daerah khusus, (11) upaya khusus penanggulangan kemiskinan, dan (12) asistensi sistem dan usaha agribisnis ke daerah-daerah.

Dengan dukungan Komisi III DPR RI yang terhormat, saya optimis anggaran untuk membangun sistem dan usaha agribisnis yang berada diluar Departemen Pertanian seperti Kimpraswil, Depperindag, dan Meneg Koperasi/UKM dapat diperjuangkan untuk ditingkatkan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasional Departemen Pertanian, pada tahun. 2005 dibutuhkan anggaran rutin sebesar Rp. 679 milyar, mencakup 166 Satuan Unit Kerja Pusat dan UPT Pusat. Dibandingkan dengan Anggaran Rutin tahun 2004 sebesar Rp 537 milyar, maka anggaran rutin tahun 2005 meningkat 26%. Kenaikan anggaran tersebut diperuntukkan bagi Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai terutama biaya listrik dan pemeliharaan aset-aset negara.

Untuk meningkatkan produksi pangan tahun 2005 dibutuhkan subsidi pupuk, subsidi benih, kredit agribisnis, dan kredit ketahanan pangan. Pada tahun 2005 dibutuhkan subsidi pupuk sebesar Rp. 1,5 triliun. Subsidi benih padi dan kedelai tahun 2005 sekitar Rp 100 milyar, kredit agribisnis diharapkan sebesar Rp. 12,4 triliun, dan kredit ketahanan pangan dengan plafon sebesar Rp 2,08 triliun.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh Departemen Pertanian pada tahun 2003 sebesar Rp. 46,2 milyar, pada tahun 2004 ditargetkan sebesar Rp. 64,7 milyar dan sasaran pada tahun 2005 sebesar Rp. 71,2 milyar.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

Demikianlah penjelasan saya secara umum. Kami mengharapkan melalui rapat kerja ini kami mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari Anggota Dewan guna meningkatkan kinerja Departemen Pertanian. Terima kasih.

Jakarta, 18 Pebruari 2004

Menteri Pertanian RI,



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





MENTERI PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI**

TENTANG :

- 1. PEMBICARAAN PENDAHULUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA (RAPBN) DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN 2005 DAN RENCANA ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN (ABT)TAHUN 2004.**
- 2. TEMUAN KOMISI III DPR - RI DALAM MASA RESES PERSIDANGAN TAHUN SIDANG KE III TAHUN 2003-2004 KE PROPINSI SUMATERA UTARA, LAMPUNG DAN MALUKU UTARA, TANGGAL 11 S/D 16 APRIL 2004.**



JAKARTA, 10 MEI 2004



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR RI**

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan kasihNya, kita dapat berkumpul hari ini dalam rapat kerja membahas berbagai aspek pembangunan pertanian.

Sesuai dengan agenda Komisi III DPR-RI rapat akan membahas: (1) Hasil Temuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Propinsi Sumatera Utara, Lampung, dan Maluku Utara, (2) Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester II Tahun 2003, dan (3) Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2005 dan ABT Tahun 2004,

Saya sangat menghargai inisiatif Komisi III DPR RI untuk menjadwalkan pertemuan penting ini. Seperti pada pertemuan sebelumnya, saya akan menyampaikan pemaparan yang sifatnya umum, sedangkan hal-hal yang lebih detail atas seijin Saudara Ketua akan disampaikan oleh Pejabat Eselon I lingkup Deptan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi III dan hadirin sekalian

Mengenai hasil kunjungan kerja Komisi III, saya mengucapkan terima kasih atas segala pendapat dan saran sehubungan dengan temuan – temuan hasil kunjungan ke Propinsi Sumatera Utara, Lampung, dan Maluku Utara, tanggal 11 s/d 15 April 2004 yang lalu.

Setelah saya mencermati temuan-temuan tersebut, disadari bahwa memang pelaksanaan pembangunan sistem dan usaha agribisnis masih banyak mengalami kendala terutama keterkaitan antar sub-sistem. Masalah masalah tersebut sebagaimana disampaikan oleh Anggota Dewan mencakup hulu sampai hilir, seperti: fluktuasi harga yang cukup besar, kurangnya permodalan, transfer teknologi yang lambat, masalah kekurangan stok pupuk, dugaan beredarnya daging impor illegal, lemahnya jaminan keamanan (premanisme) dalam jalur pemasaran, retribusi yang tumpang tindih antar daerah otonom, bahan baku pakan ternak yang masih impor, rusaknya infrastruktur, penjarahan yang terjadi di kebun kebun tertentu, kurangnya kepastian hukum dalam usaha perkebunan, kegagalan beberapa usaha kemitraan diperkebunan, adanya 1 (satu) juta hektar lahan kering di Lampung yang belum dimanfaatkan secara optimal, banyaknya pemindahan bibit ternak dari Lampung untuk pengadaan proyek didaerah lain, masih adanya penyakit brucellosis/hog cholera/ND di Lampung, sarana inseminasi buatan yang kurang, rusaknya semua alsintan di Maluku Utara karena kerusakan, belum adanya Balai Penelitian Tanaman di Maluku Utara, rusaknya Balai Benih Induk di Halmahera karena kerusakan, dan harga pupuk urea yang mencapai Rp 2500 per kilogram di Maluku Utara adalah merupakan masalah kita bersama dan juga menjadi tanggung jawab kita untuk mengatasinya.

Khusus mengenai kelangkaan pupuk saat ini, kami sangat mengharapkan bantuan Komisi-III, masyarakat, dan kepolisian untuk turut mencegah larinya pupuk bersubsidi ke industri, perkebunan, dan ekspor. Subsidi untuk pupuk sebesar Rp. 1,3 triliun per tahun tetap kita berikan dan ini tidak bertentangan dengan perjanjian di WTO. Subsidi pupuk tetap diberikan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani. Melalui subsidi yang kita berikan, harga pupuk urea ditingkat petani bisa ditekan sehingga biaya produksi bisa lebih murah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi III dan hadirin sekalian

Mengenai hasil pemeriksaan BPK, dapat kami sampaikan bahwa pada Semester II Tahun 2003, BPK telah selesai memeriksa unit kerja dan proyek lingkup Departemen

Pertanian. Pemeriksaan yang dilakukan menyangkut Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN). Secara umum, pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kami sudah berjalan baik, sehingga tidak banyak penyimpangan/penyelewangan yang terjadi di Departemen Pertanian. Atas seijin Ketua, penjelasan secara rinci mengenai temuan BPK akan disampaikan oleh Saudara Inspektur Jenderal.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Program pembangunan pertanian tahun 2005 adalah merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya yang mana ditekankan pada dua program utama yaitu: (1) Program Pengembangan Agribisnis dan (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Kebijakan proteksi dan promosi juga telah kita lakukan. Banyak hasil-hasil yang telah kita capai selama ini seperti yang telah saya paparkan pada rapat kita pada bulan Pebruari yang lalu. Sesuai dengan Grand Strategy pembangunan pertanian tahun 2000-2004, pada saat ini kita telah berhasil menetapkan suatu pondasi pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang kokoh untuk ditindaklanjuti oleh Kabinet mendatang.

Tantangan dan masalah yang akan kita hadapi tahun 2005 antara lain: **Pertama:** Permintaan pangan terutama pangan pokok terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang masih tergantung kepada beras. Sementara itu, upaya meningkatkan produksi terkendala oleh konversi lahan pertanian yang tinggi, gangguan alam, sumber daya air semakin langka sebagai akibat dari kerusakan alam, dan lemahnya modal petani; **Kedua:** Marjinalisasi usahatani sebagai akibat pertumbuhan penduduk, konversi lahan, dan daya tampung lapangan kerja di sektor jasa dan industri yang belum berkembang; **Ketiga:** Dalam beberapa tahun terakhir produktivitas padi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan yang disebabkan antara lain oleh: (1) teknologi yang diterapkan cenderung mengalami saturasi; (2) menurunnya penerapan intensifikasi oleh petani sebagai akibat dari penurunan daya beli petani dan (3) usahatani semakin sensitif terhadap perubahan iklim dan serangan hama; **Keempat:** Daya

saing produk pertanian kita didunia internasional masih lemah terutama karena kualitas produk belum memenuhi standar perdagangan, dan masalah kontinuitas pasokan; **Kelima:** Diversifikasi usahatani dan pendapatan (vertikal dan horizontal) belum berjalan dengan baik, dan **Keenam:** Peran kelembagaan dan pelayanan terhadap Sektor Pertanian yang masih lemah.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka pembangunan pertanian tahun 2005 dilaksanakan dalam rangka memantapkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis, melalui: (1) Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal, (2) Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur khususnya jaringan irigasi, (3) Pencegahan konversi lahan melalui undang-undang agraria, (4) Penelitian terobosan untuk meningkatkan produktivitas padi, (5) Peningkatan mutu hasil melalui teknologi pengolahan, pasca panen, dan diversifikasi usaha, dan (6) Pemberdayaan dan fasilitasi kelembagaan pertanian.

Sasaran kuantitatif tahun 2005 untuk beberapa komoditas utama adalah sebagai berikut:

- Sasaran produksi padi sebesar 53 juta ton GKG, jagung 11,6 juta ton, kedelai 1 juta ton, kacang tanah 0,8 juta ton, kacang hijau 0,3 juta ton, ubi jalar 1,85 juta ton, dan ubi kayu 18,5 juta ton. Disamping itu peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam akan diprioritaskan terutama di luar Jawa.
- Sasaran produksi buah-buahan sebesar 13,99 juta ton, sayuran 9,22 juta ton, tanaman hias 154,4 juta tangkai dan tanaman obat/bio-farmaka sebesar 0,25 juta ton.
- Sasaran populasi sapi potong sebanyak 12,6 juta ekor, kerbau 3,2 juta ekor, kambing 16,2 juta ekor, domba 8,5 juta ekor, ayam pedaging 1,2 miliar ekor, ayam ras petelur 92,7 juta ekor, ayam buras 311 juta ekor, itik 56 juta ekor, dan babi 9,2 juta ekor.
- Sasaran produksi kelapa sawit (CPO) 12,88 juta ton, kelapa 3,40 juta ton, kopi 620 ribu ton, kakao 490 ribu ton, karet 2,779 juta ton, tebu 2 juta ton, tembakau

161 ribu ton, lada 87 ribu ton, jambu mete 80 ribu ton, dan tanaman serat 20,5 ribu ton. Target pengembangan KIMBUN tahun 2005 adalah 416 unit.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian, maka pembangunan pertanian pada TA.2005 akan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program terdiri dari dua program terdahulu yaitu (1) Pengembangan Agribisnis, (2) Peningkatan Ketahanan Pangan, ditambah lima program baru yaitu (3) Pemberdayaan Masyarakat Pertanian, (4), Pendidikan Kedinasan, (5) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara, (6) Penyelenggaraan Pimpinan Departemen, dan (7) Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara. Ke-tujuh program pembangunan tersebut telah disusun bersama Bappenas pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional bulan Maret lalu. Uraian singkat ketujuh program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Agribisnis. Program ini bertujuan untuk membuka peluang usaha dan memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on-farm, agribisnis hilir, dan usaha jasa pendukungnya. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas usaha agribisnis sehingga dapat mencapai pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) yang tinggi, meningkatnya pendapatan masyarakat pertanian, meningkatnya ekspor hasil pertanian primer dan agroindustri.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan: (1) penumbuhan, pemantapan dan pengembangan kawasan agribisnis komoditas unggulan dengan menitik beratkan pada aspek pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah; (2) perbaikan mutu dan pengembangan agroindustri/pengolahan di perdesaan; (3) pengembangan layanan agribisnis seperti sarana produksi pertanian, alat dan mesin pertanian, teknologi dan permodalan; (4) diversifikasi produk pertanian; (5) percepatan pengembangan agribisnis di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan daerah khusus; (6) pengembangan infrastruktur dan kebijakan untuk mendorong sistem dan usaha agribisnis; (7) pengembangan penelitian dan penerapan teknologi;

(8) perbaikan sistem perkarantinaan dan standar mutu komoditas pertanian, serta (9) pengembangan manajemen sistem dan usaha agribisnis.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian strategis dari ketahanan nasional. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah (1) terjaminnya ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terutama yang berasal dari peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, gula, daging, susu, dan telur dari dalam negeri; (2) diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; serta, (3) meningkatnya kemandirian pangan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan mencakup: (1) peningkatan produksi yang beragam sesuai pola konsumsi yang bergizi seimbang; (2) peningkatan dukungan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui bantuan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP); (3) pengembangan cadangan dan sumber pangan alternatif; (4) peningkatan mutu intensifikasi dan perluasan areal tanaman melalui optimasi lahan kering, tadah hujan, lahan lebak dan pasang surut, terutama didaerah KTI dan kawasan barat potensial; (5) pengembangan usahatani terpadu berbasis tanaman padi; (6) akselerasi dan revitalisasi industri berbasis tanaman tebu; (7) pengembangan ketahanan pangan di wilayah KTI dan daerah khusus serta penanggulangan masalah pangan terutama untuk masyarakat miskin dan kelompok khusus; (8) peningkatan mutu dan keamanan pangan; (9) pengembangan infrastruktur dan kebijakan ketahanan pangan untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan dalam negeri; (10) pengembangan partisipasi masyarakat dalam menangani kerawanan pangan, serta (11) penyelenggaraan manajemen peningkatan ketahanan pangan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pertanian, terutama bagi petani yang sulit terhadap akses sumber daya usaha pertanian. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemampuan petani untuk mengelola usaha dan memanfaatkan akses

terhadap sumberdaya lahan, air, alat dan mesin pertanian, permodalan, teknologi dan informasi usaha/pasar.

4. Program Pendidikan Kedinasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme pegawai dan calon pegawai negeri lingkup Departemen Pertanian.

5. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jenjang karir aparatur lingkup Departemen Pertanian.

6. Program Penyelenggaraan Pimpinan Departemen. Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan tugas tugas Departemen Pertanian.

7. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Program ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem pengawasan dan audit dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa dan bebas KKN. Sasaran program ini adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Sehubungan dengan akan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja mulai tahun 2005 (*unified budget*), usulan RAPBN Departemen Pertanian tahun 2005 tidak membedakan antara anggaran rutin dan pembangunan. Berdasarkan sasaran kuantitatif pembangunan pertanian yang ingin dicapai pada tahun 2005 dan hasil pembahasan pendahuluan dengan Bappenas, usulan RAPBN sektor pertanian Tahun 2005 Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.4,579 trilyun, dengan rincian: (1) Program Pengembangan Agribisnis sebesar Rp. 1,70 trilyun; (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 2,10 trilyun, (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian sebesar Rp. 500 milyar, (4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Rp. 12,5 milyar. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 266,5 miliar digunakan untuk Program Pendidikan

Kedinasan, Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara serta Program Penyelenggaraan Pimpinan Departemen.

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) pada tahun 2005 direncanakan sebesar Rp. 0,76 trilyun dengan rincian untuk: (1) Program Pengembangan Agribisnis sebesar Rp. 0,30 trilyun dan (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 0,46 triliun.

Untuk meningkatkan produksi pangan tahun 2005 masih dibutuhkan subsidi pupuk, subsidi benih, kredit agribisnis dan kredit ketahanan pangan. Pada tahun 2005 dibutuhkan subsidi pupuk sebesar Rp. 1,5 triliun. Subsidi benih padi dan kedelai tahun 2005 sekitar Rp 100 milyar, kredit agribisnis diharapkan sebesar Rp. 12,4 triliun dan kredit ketahanan pangan dengan plafon sebesar Rp 2,08 triliun.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh Departemen Pertanian pada tahun 2003 sebesar Rp. 46,2 milyar, pada tahun 2004 ditargetkan sebesar Rp. 64,7 milyar dan sasaran pada tahun 2005 sebesar Rp. 71,2 milyar.

Dibandingkan dengan kebutuhan investasi pembangunan pertanian, maka anggaran pembangunan dari pemerintah ini sangatlah kecil, namun diharapkan dapat memacu investasi masyarakat yang jauh lebih besar. Untuk itu guna menarik investor masuk ke sektor pertanian diperlukan dukungan dari instansi terkait. Saya yakin berkat kerjasama yang baik dengan Komisi III DPR RI yang terhormat, maka dukungan pembangunan sistem dan usaha agribisnis dari Kimpraswil, Depperindag, Meneg Koperasi/UKM, Depnakertrans dan instansi terkait lainnya dapat ditingkatkan.

Guna mengatasi berbagai permasalahan mendesak di sektor pertanian, maka saya mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2004 untuk sektor pertanian sebesar Rp. 200 milyar yang akan digunakan untuk antisipasi penanganan dampak kekeringan akibat El-Nino yang diperkirakan oleh BMG akan terjadi pada tahun 2004, penanggulangan hama penyakit tanaman/hewan, perbaikan/peningkatan mutu hasil pertanian, penguatan agroindustri perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat pertanian. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2004 diusulkan sebanyak Rp 454,7 milyar yang akan digunakan untuk memperkuat kemampuan

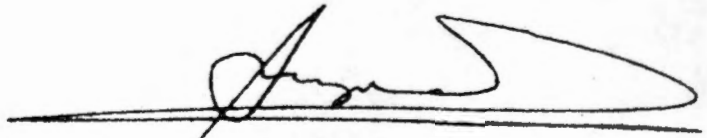
pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan di 232 kabupaten/kota.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

Demikianlah penjelasan saya secara umum mengenai agenda rapat kerja ini. Saya berharap rapat kerja ini dapat menghasilkan masukan-masukan yang berharga dari Anggota Dewan guna meningkatkan kinerja Departemen Pertanian.

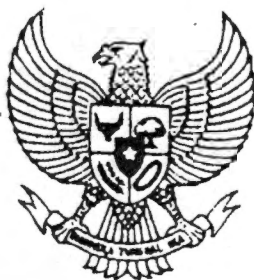
Terima kasih.

Menteri Pertanian RI,



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec





MENTERI PERTANIAN

**BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI**

TENTANG :

**PEMBICARAAN PAGU ANGGARAN (RAPBN)
TAHUN 2005**



JAKARTA, 6 JULI 2004



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI
TENTANG RAPBN 2005**

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Mengawali sambutan saya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam rapat kerja yang secara khusus membahas RAPBN tahun 2005 sektor pertanian. Usulan RAPBN tahun 2005 sebenarnya telah saya laporkan pada rapat dengan DPR-RI sebelumnya pada tanggal 18 Februari 2004 dan tanggal 10 Mei 2004.

Sebelum memasuki pokok pembicaraan, perkenankan saya terlebih dahulu memperkenalkan pejabat baru di lingkungan Departemen Pertanian, yaitu pertama, Sdr. Prof. Dr. drh. Wasito, sebagai Dirjen Bina Produksi Peternakan; Sdr. Dr. Ir. Kaman Nainggolan sebagai Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan yang baru dan Sdr. Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto, selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang baru.

Saudara-Saudara yang saya hormati,

Pelaksanaan pembangunan saat ini berada pada situasi proses politik yang begitu dinamis. Namun demikian kegiatan pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan sehingga tidak boleh terganggu oleh proses politik tersebut. Tahun 2004 merupakan tahun terakhir dari masa tugas kabinet gotong royong dan tahun 2005 merupakan tahun awal masa tugas kabinet periode 2005-2009 mendatang, namun dapat dipandang pula sebagai masa transisi dari pelaksanaan program pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional yang didasarkan kepada GBHN tahun

1999 dan Proenas tahun 2000 akan berakhir pada tahun 2004 ini, sementara rencana pembangunan nasional untuk 5 tahun mendatang belum tersusun menunggu terbentuknya kabinet baru.

Saudara-Saudara yang saya hormati,

Pada masa krisis sektor Pertanian terbukti lebih tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dibanding sektor-sektor lain. Sektor Pertanian telah mampu melepaskan diri dari ancaman keterpurukan yang berkepanjangan. Dalam Tahun 2000-2003, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor Pertanian tumbuh rata rata sebesar 1,92 persen, jauh lebih tinggi dibanding periode krisis yang hanya mencapai 0,88 persen, bahkan dibanding periode tahun 1993-1997 (sebelum krisis) yang mencapai 1,57 persen.

Dalam Tahun 2000-2003, subsektor Tanaman Bahan Makanan menunjukkan kinerja yang semakin membaik, terlihat dari laju pertumbuhannya sebesar 0,77 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan selama periode sebelum krisis ekonomi sebesar 0,13 persen. Hal yang sama juga terjadi pada subsektor Perkebunan yang tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dari periode sebelum krisis yang tumbuh sebesar 4,30 persen, sedangkan subsektor Peternakan walaupun telah tumbuh positif sebesar 3,17 persen, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum krisis yang mencapai 5,01 persen.

Ditengah banyaknya kendala dan gangguan seperti anomali iklim dan penyelundupan bahan pangan, kita berhasil meningkatkan ketahanan pangan. Dalam periode tahun 2000-2003, kita tidak pernah mengalami masalah kekurangan ketersediaan pangan. Kekhawatiran sebagian pihak bahwa Indonesia semakin terancam tererosok ke dalam perangkap ketergantungan impor pangan tidak didukung oleh data yang ada. Kita justru dihadapkan kepada gangguan impor ilegal yang akan merusak situasi dan keberhasilan yang sedang kita bangun. Pada tahun 2003 tercatat rekor produksi tertinggi sepanjang sejarah untuk empat komoditas utama tanaman pangan, yaitu padi, jagung, kacang tanah dan ubi kayu. Produksi padi mencapai 52,1 juta ton, jagung 10,9 juta ton, kacang tanah 785 ribu ton dan ubi kayu 18,5 juta ton. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan Departemen Pertanian selama periode 2000-2003 yang memfokuskan pada upaya mewujudkan kemandirian pangan, dan penerapan kebijakan promosi dan proteksi secara konsisten. Trend pertumbuhan tersebut diperkirakan berlanjut pada tahun 2004. Menurut ARAM-II BPS, produksi padi tahun 2004

diperkirakan mencapai 53,7 juta ton dan jagung mencapai 11,1 juta ton. Departemen Pertanian bersama stakeholders terus berupaya agar perkiraan tersebut pada saatnya mencapai kenyataan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pembangunan pertanian telah dan terus dituntut berperan dalam pembangunan nasional dalam aspek yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi seperti dalam pembentukan PDB, penghasil devisa /ekspor, penyediaan bahan baku industri; dan aspek yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan, seperti jaminan ketersediaan pangan, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja baru.

Tahun 2005 perekonomian Indonesia diperkirakan akan stabil seiring dengan keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan pemulihan ekonomi global. Apabila inflasi dapat dijaga pada tingkat delapan persen, perekonomian Indonesia masih dapat diharapkan mengalami pertumbuhan riil sebesar 5-6 persen. Dalam tahun 2005 sektor pertanian (subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) ditargetkan dapat tumbuh dengan laju 2,5 persen. Sumber pertumbuhan sektor pertanian tersebut terutama diharapkan dari laju pertumbuhan subsektor peternakan dan perkebunan masing masing sebesar 3,5 persen, sedangkan subsektor tanaman pangan ditargetkan tumbuh 1,7 persen dan hortikultura dapat tumbuh 2,5 persen.

Pembangunan pertanian terkait erat dengan pemantapan ketahanan pangan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagai negara kepulauan besar dan berpenduduk besar, maka pemenuhan kebutuhan pangan pokok harus dapat disediakan dari produksi dalam negeri dan tidak mengandalkan kepada pasar dunia. Ketergantungan pangan terhadap impor akan menciptakan kerentanan ketahanan pangan nasional yang secara langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan pada akhirnya keamanan atau ketahanan nasional.

Komoditi pangan dalam arti luas mencakup sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Upaya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri menempati prioritas utama dalam pembangunan pertanian tahun 2005. Kegiatan produksi pangan dalam negeri akan mempunyai dampak luas dalam

pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat serta pembangunan daerah.

Peningkatan produksi pangan pokok padi dilakukan melalui: (1) peningkatan mutu intensifikasi pada lahan sawah andalan yang tingkat penerapan intensifikasinya belum optimal, (2) perluasan areal panen melalui pendayagunaan lahan rawa lebak dan pasang surut serta pengembangan pangan pada lahan kering; dan (3) percepatan diversifikasi pangan melalui pengembangan berbagai sumber pangan. Peningkatan produksi bahan pangan selain padi dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan pendekatan kawasan agribisnis. Upaya-upaya tersebut perlu didukung dengan pengembangan kelembagaan layanan yaitu: (1) lembaga layanan saprodi, (2) permodalan, (3) penyuluhan, (4) perlindungan tanaman, (5) pemasaran dan pasca panen, (6) perlindungan harga dengan penerapan bea masuk, (7) subsidi, dan (8) dana talangan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Sektor pertanian juga dituntut berperan dalam menghasilkan devisa melalui pengembangan ekspor dan penyediaan bahan mentah yang memenuhi syarat untuk memungkinkan industri hilir dalam negeri dapat berkembang secara kompetitif. Dalam pengembangan ekspor dan penyediaan bahan baku bagi industri hilir (pengolahan) diperlukan pasokan bahan baku yang tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis adalah daya saing produk pertanian. Peningkatan daya saing dilakukan melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi (vertikal dan horizontal) produk, peningkatan mutu produk dan penguatan kelembagaan agribisnis. Sejak tahun 2001 pengembangan agribisnis dilakukan melalui pendekatan kawasan secara berkelanjutan. Dalam tahun 2005 kawasan tersebut lebih dimantapkan sehingga terjadi keterpaduan aspek hulu, usahatani, hilir dan dukungan kelembagaan penunjangnya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Sasaran kuantitatif tahun 2005 beberapa komoditas utama adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran produksi padi sebesar 54.25 juta ton GKG, jagung 12.0 juta ton, kedelai 0.75 juta ton, kacang tanah 0.9 juta ton, kacang hijau 0.35 juta ton, ubi jalar 2,0

juta ton, dan ubi kayu 20.0 juta ton. Disamping itu peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam akan diprioritaskan terutama di luar Jawa.

- b. Sasaran produksi buah-buahan sebesar 13,99 juta ton, sayuran 9,22 juta ton, tanaman hias 154,4 juta tangkai dan tanaman obat/bio-farmaka sebesar 0,25 juta ton.
- c. Sasaran populasi sapi potong sebanyak 12.5 juta ekor, sapi perah 0.5 juta ekor, kerbau 2.5 juta ekor, kambing 14,1 juta ekor, domba 12.3 juta ekor, ayam pedaging 1,2 miliar ekor, ayam ras petelur 112,6 juta ekor, ayam buras 366.8 juta ekor, itik 48.2 juta ekor, dan babi 6.5 juta ekor.
- d. Sasaran produksi kelapa sawit (CPO) 11.7 juta ton, kelapa 3,3 juta ton, kopi 0.8 juta ton, kakao 0.63 juta ton, karet 2,0 juta ton, tebu 1.7 juta ton, tembakau 0.21 juta ton, lada 0.1 juta ton, jambu mete 0.12 juta ton, dan tanaman serat 20,5 ribu ton. Selain itu, target pengembangan KIMBUN tahun 2005 adalah 416 unit.

Untuk berkembangnya usaha agribisnis masyarakat diperlukan dukungan fasilitasi pemerintah mencakup pengembangan layanan agribisnis dan fasilitasi penguatan kelembagaan agribisnis. Pelaku agribisnis menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan agribisnis antara lain modal. Ketidakmampuan masyarakat pedesaan mengaskes permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini tidak hanya karena keberadaan lembaga keuangan formal di pedesaan yang masih sangat terbatas, tetapi juga karena prosedur dan persyaratan yang berlaku masih dinilai sulit oleh masyarakat pedesaan. Adanya lembaga permodalan yang khusus bergerak di pedesaan khususnya di bidang agribisnis (bank pertanian) akan sangat membantu dalam pengembangan agribisnis.

Perdagangan bebas merupakan ancaman dan sekaligus tantangan. Pada kondisi usaha agribisnis dalam negeri yang umumnya didominasi oleh usaha skala mikro-kecil dan dalam upaya untuk membangkitkan usaha agribisnis tersebut yang terpuruk akibat krisis, diperlukan keberpihakan dan perlindungan bagi berkembangnya usaha domestik sambil terus ditingkatkan kemampuan daya saingnya (kebijakan proteksi dan promosi). Untuk itu pemberdayaan usaha mikro-kecil akan memperoleh perhatian khusus dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2005. Pembangunan pertanian juga dituntut berperan dalam pemerataan pembangunan, sehingga diperlukan perhatian

khusus kepada wilayah KTI pada umumnya terutama daerah terpencil, perbatasan dan daerah konflik.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Sehubungan dengan rencana pemerintah untuk memberlakukan anggaran berbasis kinerja mulai tahun 2005, maka rancangan anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi *unified budget*. Untuk itu usulan RAPBN Departemen Pertanian tahun 2005 tidak membedakan antara anggaran rutin dan pembangunan.

Guna mencapai target-target/sasaran pembangunan pertanian yang telah disampaikan terdahulu, maka pada TA.2005 akan dilaksanakan 3 program utama pembangunan dan 4 program penunjang. Ketiga program utama tersebut adalah: (1) program pengembangan agribisnis, (2) program peningkatan ketahanan pangan, (3) program pemberdayaan masyarakat pertanian, Program penunjang meliputi: (1) Program Pendidikan Kedinasan, (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara, (3) Program Penyelenggaraan Pimpinan Departemen, dan (4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

Program Pengembangan Agribisnis bertujuan untuk menciptakan peluang usaha dan memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on-farm, agribisnis hilir, dan usaha jasa pendukungnya. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas usaha agribisnis sehingga dapat mencapai pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) pertanian, meningkatnya pendapatan masyarakat pertanian, meningkatnya ekspor hasil pertanian primer dan agroindustri.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian strategis dari ketahanan nasional. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah (1) terjaminnya ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terutama yang berasal dari peningkatan produksi padi, jagung, kedele, gula, daging, susu dan telur dalam negeri; (2) diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; serta (3) meningkatnya kemandirian pangan masyarakat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pertanian, terutama bagi petani yang tidak dapat menjangkau akses

terhadap sumber daya usaha pertanian. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemampuan petani untuk mengelola usaha dan memanfaatkan akses terhadap sumberdaya lahan, air, alat dan mesin pertanian, permodalan, teknologi dan informasi usaha/pasar.

Program Pendidikan Kedinasan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme pegawai dan calon pegawai negeri lingkup Departemen Pertanian.

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara bertujuan untuk meningkatkan jenjang karir aparatur lingkup Departemen Pertanian.

Program Penyelenggaraan Pimpinan Departemen bertujuan untuk membantu kelancaran tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan tugas tugas Departemen Pertanian.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara bertujuan untuk menyempurnakan kembali sistem pengawasan dan audit dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa dan bebas KKN. Sasaran program ini adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan sasaran-sasaran kuantitatif pembangunan pertanian, sasaran produksi komoditas utama/strategis yang ingin dicapai pada tahun 2005 serta jenis-jenis kegiatan pokok yang akan dilakukan, serta berdasarkan hasil pembahasan dengan BAPPENAS, maka usulan RAPBN sektor pertanian Tahun 2005 sebesar Rp 5.339 trilyun, yang meliputi Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.4,579 trilyun dan PHLN sebesar Rp 0.760 trilyun. Alokasi rupiah murni sebesar Rp.4,579 trilyun menurut program adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Agribisnis sebesar Rp. 1.769,04 milyar.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 2.135,38 milyar.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian sebesar Rp.395,58 milyar.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Rp. 14,77 milyar.
5. Program Pendidikan Kedinasan sebesar Rp. 89,43 milyar,
6. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara Rp 114,17 milyar, serta
7. Program Penyelenggaraan Pimpinan Departemen Rp. 60,63 milyar.

Sumber pendanaan dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) pada tahun 2005 direncanakan sebesar Rp. 760,00 milyar dengan rincian untuk: (1) Program Pengembangan Agribisnis sebesar Rp. 388,21 milyar; (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 252,31 milyar; dan (3) Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian sebesar Rp. 119,48 milyar.

Rancangan APBN Departemen Pertanian tahun 2005 yang dirinci menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 700,16 milyar, belanja barang dan jasa (mencakup belanja barang, operasional dan pemeliharaan, dan perjalanan dinas) sebesar Rp. 1.795,96 milyar, belanja modal sebesar Rp. 1.768,63 milyar dan belanja lain-lain sebesar Rp.314,25 milyar.

Rancangan alokasi RAPBN 2005 memperhatikan keseimbangan antara pusat-daerah yaitu alokasi anggaran di Pusat sebesar 29,92% sedangkan alokasi untuk daerah (propinsi dan kabupaten/kota) sebesar 70,08%. Alokasi anggaran ke daerah disalurkan dalam bentuk Dana Dekonsentrasi, dimana sebagian besar dari alokasi dana di daerah tersebut akan disalurkan kepada kelompok sasaran melalui mekanisme Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) penguatan modal kelompok dengan pola bergulir/pinjaman. Keseimbangan alokasi anggaran untuk wilayah barat Indonesia (KBI) yaitu sebesar 54,87% sedangkan wilayah timur Indonesia (KTI) sebesar 45,13 %.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh Departemen Pertanian pada tahun 2002 sebesar Rp. 15,15 milyar, tahun 2003 sebesar 154,7 milyar (termasuk dana LUEP Rp.92,6 milyar) dan pada tahun 2004 ditargetkan sebesar Rp. 64,7 milyar dan sasaran pada tahun 2005 sebesar Rp. 71,2 milyar.

Pendapatan yang dominan untuk rencana PNBP tahun 2005 adalah pendapatan jasa karantina tumbuhan dan hewan sebesar 75%, penjualan hasil ternak, jasa pendaftaran pestisida dan pupuk serta jasa hasil penelitian. PNBP lingkup Departemen Pertanian didukung oleh pemberlakuan PP No. 49/2002 yang telah dirubah dengan PP No.7/2004 tentang tarif atas jenis PNBP lingkup Departemen Pertanian

Guna meningkatkan produksi pangan tahun 2005 masih dibutuhkan subsidi pupuk, subsidi benih, kredit agribisnis dan kredit ketahanan pangan. Pada tahun 2005 dibutuhkan subsidi pupuk sebesar Rp. 1,5 triliun. Subsidi benih padi dan kedelai tahun 2005 sekitar Rp 100 milyar, kredit agribisnis diharapkan sebesar Rp. 12,4 triliun dan kredit ketahanan pangan dengan plafon sebesar Rp 2,08 triliun.

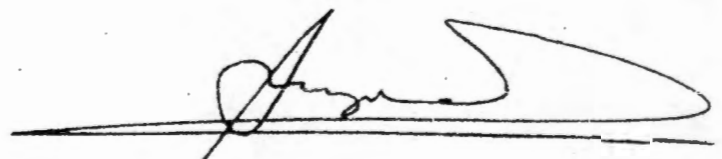
Dibandingkan dengan kebutuhan investasi pembangunan pertanian, maka anggaran pembangunan dari pemerintah ini sangat kecil, namun dengan anggaran tersebut diharapkan dapat memacu anggaran pemerintah daerah dan investasi masyarakat yang jauh lebih besar. Untuk menarik investor masuk ke sektor pertanian diperlukan dukungan dari instansi terkait.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi III yang saya hormati,

Demikianlah penjelasan saya secara umum mengenai agenda rapat kerja ini. Saya berharap rapat kerja ini dapat menghasilkan masukan-masukan yang berharga dari Anggota Dewan.

Terima kasih.

Menteri Pertanian RI,



Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.





MENTERI PERTANIAN

**PIDATO PENGANTAR MENTERI PERTANIAN PADA
RAPAT KERJA MENTERI PERTANIAN DENGAN KOMISI III DPR-RI**

TENTANG :

**EVALUASI HASIL KERJA
DEPARTEMEN PERTANIAN RI DAN PERPISAHAN**



JAKARTA, 15 SEPTEMBER 2004



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN
PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI III DPR-RI
TENTANG
EVALUASI HASIL KERJA DEPARTEMEN PERTANIAN
HARI : RABU, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2004**

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Para Anggota Komisi III DPR-RI.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama, saya sampaikan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi III DPR-RI yang telah menyediakan waktu ditengah-tengah kesibukan kita semua untuk saling bertukar informasi dan fikiran mengenai pembangunan nasional, khususnya pembangunan pertanian. Saya kira ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk memberikan informasi yang benar, baik dan berguna kepada publik, mengenai kinerja pembangunan pertanian 2000-2004.

Sebelum mengawali uraian singkat saya mengenai kinerja pembangunan pertanian, terlebih dahulu ijinakan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi III DPR-RI yang telah banyak memberikan komitmen, sumbangan pemikiran dan perhatian yang besar kepada sektor pertanian, sehingga sektor pertanian dapat tumbuh dan berkembang menjadi sektor penggerak perekonomian nasional. Tanpa dukungan sekaligus kontrol yang baik dan bijak dari para anggota Dewan, khususnya Komisi III barangkali masalah-masalah dan hambatan yang terjadi akan sulit diselesaikan. Dengan kata lain sektor pertanian telah mampu berkembang sebagaimana yang kita saksikan sekarang tidak terlepas dari komitmen dan sikap bijak (*wisdom*) dari para anggota Dewan yang terhormat.

Untuk mengawali penjelasan ini, akan saya uraikan secara singkat mengenai perekonomian makro. Agar obyektif, evaluasi kinerja pembangunan haruslah menggunakan situasi dan kondisi awal sebagai acuan pembandingan dan dasar analisis.

Kabinet Persatuan Pembangunan yang dilanjutkan dengan Kabinet Gotong Royong yang masa baktinya akan berakhir beberapa minggu lagi, mengawali tugasnya pada tahun 2001 dengan warisan masalah maha berat: kekacauan multidimensi. Situasi dan kondisi keamanan, sosial, politik dan ekonomi amat buruk dan tidak stabil. Rakyat berada dalam cekaman penjarahan dan ancaman teror. Perekonomian mengalami depresi berat: kontraksi PDB, hiper inflasi, hiper devaluasi dan hiper suku bunga. Rakyat terancam kelaparan dan terperosok dalam kemiskinan. Demikian beratnya sehingga kita terpaksa menyerah minta bantuan penyelamatan darurat kepada IMF, Bank Dunia dan WFP dengan segala konsekuensinya.

Malapetaka yang menimpa Indonesia adalah yang terparah, terdalam dan terluas diantara semua negara yang terkena krisis ekonomi di Asia, bahkan jauh lebih akut dari pada Thailand yang merupakan episentrum krisis tersebut. Dengan masa kerja yang hanya empat tahun maka agenda kebijakan ekonomi kabinet Gotong Royong dirancang pragmatis untuk menyelamatkan (*rescue*), memulihkan (*recovery*) dan memantapkan landasan akselerasi pertumbuhan (*take-off*). Melalui program jaring pengaman sosial kita berhasil menyelamatkan rakyat dan bencana kurang pangan akut dan epidemi kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dapat dikurangi drastis dari 48,4 juta orang atau 24 persen pada tahun 1999 menjadi 38,7 juta orang atau 19 persen pada tahun 2000, lalu menjadi 36,1 juta orang atau 17 persen pada tahun 2004. Pertumbuhan PDB mengalami *rebound* dari kontraksi -6,17 persen per tahun pada periode tahun 1998-1999 menjadi tumbuh positif 3,92 persen pada tahun 2000. Inflasi dan nilai rupiah berhasil distabilkan. Pada tahun 2003, perekonomian nasional telah pulih dari cekaman krisis. Nilai riil PDB tahun 2003 telah melampaui puncak tertinggi sebelum krisis (1997). Sejak tahun 2000, perekonomian kita telah dapat tumbuh konsisten, dan sejak tahun 2003 menunjukkan indikasi tumbuh akseleratif.

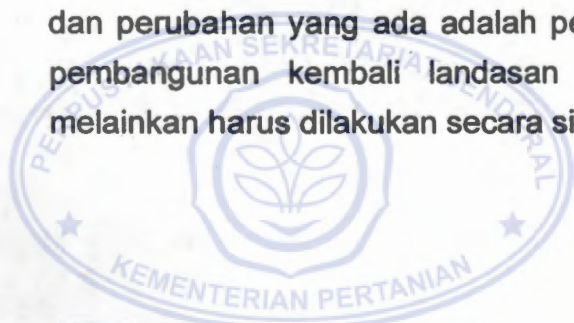
Walau dari segi kuantitas, laju pertumbuhan ekonomi dalam empat tahun terakhir hanya sekitar 4 persen per tahun, jauh lebih rendah dari pada sebelum krisis (sekitar 7 persen

per tahun), namun kualitasnya jauh lebih baik. Pertumbuhan yang 4 persen tersebut kita peroleh praktis dengan kekuatan kita sendiri, tanpa investasi asing atau pinjaman luar negeri. Kualitas tinggi tersebut terbukti dengan mantapnya fundamental ekonomi makro. Pada masa lalu, pertumbuhan memang amat tinggi, namun kualitasnya rendah, atau semu karena ditopang oleh dana utang dan investasi asing sehingga amat rapuh, dan hancur lebur pada tahun 1998-1999.

Walaupun tidak seperti sektor lainnya, sektor pertanian juga menderita berat pada tahun 1998-1999. Pada waktu itu telah terjadi perubahan besar, mendadak bahkan kacau balau dalam pertanian kita. Kredit program pertanian dicabut, suku bunga kredit membumbung tinggi sehingga tidak ada kredit yang tersedia ke pertanian. Karena desakan IMF waktu itu, subsidi pertanian (pupuk, benih, dan lain-lain) juga dicabut dan tarif impor komoditi khususnya pertanian dihapus. Infrastruktur pertanian pedesaan khususnya irigasi banyak yang rusak karena biaya pemeliharaan tidak ada. Penyuluh pertanian juga kacau balau, karena terlalu mendadak didaerahkan. Tidak hanya itu, akibat kerusakan, jaringan distribusi bahan pangan dan sarana produksi pertanian lumpuh, antrian beras dan minyak goreng terjadi di mana-mana.

Saudara-Saudara yang saya hormati,

Dengan memperhatikan kondisi dan perubahan yang terjadi pada waktu itu, Departemen Pertanian bersama *stake holders* pembangunan lainnya merumuskan dan mengimplementasikan paradigma baru pembangunan pertanian yakni "pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi". Paradigma baru tersebut, bahkan secara bersama-sama kita rumuskan dengan para anggota Dewan yang terhormat, hingga akhirnya menjadi produk bersama antara pemerintah dan DPR, khususnya Komisi III. Karena kondisi dan perubahan yang ada adalah persoalan sistem, maka strategi pemulihan maupun pembangunan kembali landasan pembangunan tidak boleh sepotong-sepotong, melainkan harus dilakukan secara sistem, yakni sistem agribisnis.



Paradigma baru pembangunan pertanian tersebut dalam 4 tahun terakhir ini kita implementasikan dengan kebijakan dasar yakni kebijakan “*proteksi dan promosi agribisnis*”. Prinsip kebijakan ini adalah seraya melindungi dari praktek *unfair-trade* dari negara lain, kita tumbuh-kembangkan dan tingkatkan daya saing agribisnis dalam negeri dengan fasilitasi dan dukungan pemerintah. Kita setuju dengan semangat *free trade* yang diprakarsai WTO tapi harus *fair* (perdagangan yang adil). Kalau negara lain masih melakukan perlindungan pada agribisnisnya, maka wajar jika kita juga melindungi agribisnis kita sesuai dengan prinsip-prinsip asas kesetaraan dan timbal balik WTO. Alasan kita menaikkan tarif impor dan mengelola pasar beberapa komoditi agribisnis penting seperti gula dan beras selama tiga tahun terakhir adalah bagian dari kebijakan tersebut.

Promosi pembangunan agribisnis kita laksanakan baik melalui instrumen *budgeter* maupun *non-budgeter*. Instrumen *budgeter* dilakukan antara lain melalui alokasi anggaran pembangunan dekonsentrasi. APBN Departemen Pertanian langsung disalurkan ke provinsi dan kabupaten/kota, bantuan langsung ke kelompok tani, rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pertanian-pedesaan, bantuan barang-barang modal, subsidi pupuk dan benih, bantuan pembinaan SDM dan penyuluhan dan lain-lain. Sedangkan instrumen *nonbudgeter* kita lakukan antara lain melalui instrumen tarif dan non tarif, deregulasi pestisida dan alat mesin pertanian, penghapusan PPN komoditas pertanian, suku bunga, pengaturan perdagangan komoditas, serta asistensi kepada pemerintah daerah dan pelaku agribisnis.

Setelah tiga tahun lebih kita mengimplementasikan paradigma baru dan kebijakan dasar tersebut, tanpa kita perkirakan semula, ternyata pertanian Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Semula target kita adalah ‘memadamkan kebakaran’, memulihkan dan meletakkan fondasi pembangunan agribisnis, ternyata kemajuan yang dicapai pertanian Indonesia melampaui apa yang pernah dicapai sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Keragaan sektor Pertanian dan Peternakan selama periode tahun 2000-2003 telah mengalami pemulihan menuju pertumbuhan berkelanjutan. Selama periode tersebut, rata-rata laju pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor Pertanian dan

Peternakan mencapai 1,83 persen, jauh lebih tinggi dibanding periode krisis (1998-1999) yang hanya mencapai 0,88 persen, bahkan dibanding periode tahun 1993-1997 (sebelum krisis ekonomi) yang mencapai 1,57 persen. Subsektor Tanaman Bahan Makanan menunjukkan kinerja yang semakin membaik, terlihat dari laju pertumbuhannya sebesar 0,58 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan selama periode sebelum krisis ekonomi yang hanya mencapai 0,13 persen. Hal yang sama juga terjadi pada subsektor Perkebunan yang tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dari periode sebelum krisis yang tumbuh sebesar 4,30 persen, sedangkan subsektor Peternakan walaupun telah tumbuh positif sebesar 3,13 persen, namun masih lebih rendah dibandingkan periode sebelum krisis yang mencapai 5,01 persen.

Setelah mengalami sedikit kontraksi (tumbuh negatif 0,74%) tahun 1998, PDB sektor Pertanian dan Peternakan telah pulih, melampaui level sebelum krisis, pada periode 2000-2003. Sebagai perbandingan, tahun 1998, perekonomian mengalami kontraksi luar biasa, tumbuh negatif 13,13 persen dan baru mulai pulih pada tahun 2003. Hal ini memperlihatkan bahwa selain jauh lebih mampu bertahan, sektor Pertanian dan Peternakan juga mampu pulih jauh lebih cepat dari perekonomian secara umum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sektor Pertanian dan Peternakan telah terlepas dari "*perangkap spiral pertumbuhan rendah*" yang berlangsung selama periode tahun 1998 - 1999. Sektor Pertanian dan Peternakan telah melewati fase pertumbuhan rendah (1998 - 1999), dan kini (2003) tengah berada pada fase percepatan pertumbuhan (*accelerating growth*) sebagai masa transisi menuju pertumbuhan berkelanjutan (*sustaining growth*). Berdasarkan perkembangan indeks PDB terbukti bahwa sektor Pertanian dan Peternakan mampu pulih lebih awal dibanding sektor ekonomi secara keseluruhan. Dengan kondisi iklim yang diperkirakan normal, maka pada tahun 2004 kinerja PDB sektor Pertanian diperkirakan akan lebih baik lagi. Optimisme ini antara lain didukung oleh ARAM II BPS bahwa pada tahun 2004 produksi padi diperkirakan meningkat 2,93 persen, jagung 1,59 persen, kedelai 2,41 persen, kacang tanah 5,52 persen dan ubikayu 3,92 persen, sehingga laju pertumbuhan subsektor Tanaman Bahan Makanan akan meningkat nyata. Sub sektor Tanaman Bahan Makanan masih merupakan komponen terbesar dari pembentukan PDB sektor pertanian.

Saudara-Saudara yang saya hormati,

Dibanding sebelum krisis, selama periode 2000-2003, hampir semua produksi komoditas pertanian mengalami peningkatan, insiden kemiskinan keluarga tani maupun penduduk pedesaan menurun signifikan, kesejahteraan petani meningkat, ketahanan pangan makin mantap, kesempatan kerja di sektor pertanian meningkat, dan sumbangan sektor Pertanian terhadap penerimaan devisa bertambah.

Penurunan nyata prevalensi kemiskinan di sektor pertanian dan wilayah pedesaan merupakan bukti tak terbantahkan keberhasilan kita dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Jumlah penduduk pertanian miskin menurun dari 26,0 juta orang pada tahun 1999 menjadi 20,6 juta orang pada tahun 2002. Jumlah penduduk pedesaan miskin menurun dari 33 juta orang atau 26 persen pada tahun 1999 menjadi 25 juta orang atau 21 persen pada tahun 2002.

Banyak pihak mengatakan bahwa ketahanan pangan kita semakin rawan. Namun fakta menunjukkan kita tidak pernah mengalami krisis pangan dalam empat tahun terakhir. Survei rumah tangga BPS menunjukkan bahwa asupan energi penduduk meningkat dari 1852 kalori/kapita/hari pada tahun 1999 menjadi 1986 kalori/kapita/hari tahun 2002, sementara asupan protein meningkat dari 48,67 gr/kapita/hari pada tahun 1999 menjadi 54,42 gr/kapita/hari pada tahun 2002. Kita telah berhasil meningkatkan kualitas gizi masyarakat, yang berarti juga kemantapan ketahanan pangan.

Memang benar kita masih mengimpor sejumlah bahan pangan. Namun secara keseluruhan Indonesia merupakan negara surplus pangan. Untuk produk pertanian secara keseluruhan, surplus neraca perdagangan meningkat dari US \$ 1,3 milyar pada tahun 1996 menjadi US \$ 3,4 milyar pada tahun 2002 dan US \$ 3,7 milyar pada tahun 2003. Khusus untuk beras, volume impor telah menurun tajam dari 4,8 juta ton pada tahun 1999 menjadi 1,0 juta ton pada tahun 2003. Bahkan, mungkin pada tahun 2004 ini kita akan mengalami surplus beras. Ini merupakan perubahan besar yang tentunya juga akan membutuhkan penyesuaian mendasar dalam kebijakan perberasan kita



Hadirin yang saya hormati,

Walaupun belum sepenuhnya baik, tapi perkembangan pembangunan pertanian kita sudah jauh lebih baik dibandingkan kondisi saat krisis ekonomi, bahkan sebelum krisis ekonomi. Tugas kita kedepan adalah melanjutkan dan terus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih dirasakan hingga saat ini. Oleh karena itu agenda jangka pendek - menengah (sekitar lima tahun ke depan) yang perlu segera kita rumuskan ialah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang cukup menggembirakan tersebut. Disadari, potensi pertumbuhan yang ada saat ini sudah hampir termanfaatkan secara optimal. Ada lima upaya yang harus dan segera dilakukan agar momentum akselerasi pertumbuhan sektor Pertanian dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan yaitu (a) merenovasi dan memperluas infrastruktur fisik (*hard infrastructure*), utamanya sistem irigasi, sistem transportasi, sistem telekomunikasi dan kelistrikan pedesaan; (b) revitalisasi sistem inovasi pertanian (penelitian dan pengembangan, serta diseminasi teknologi pertanian); (c) pengembangan kelembagaan agribisnis (tata pemerintahan, organisasi pengusaha dan jejaring usaha); (d) rekonstruksi sistem insentif berproduksi dan investasi serta; (e) pengeloraan pasar input dan output. Semua ini hendaklah dirancang secara komprehensif dan terpadu.

Ke depan, pengalaman krisis pahit multi-dimensi 1998-1999 memberikan pelajaran berharga betapa strategisnya sektor Pertanian sebagai jangkar, peredam gejolak, dan penyelamat bagi sistem perekonomian nasional. Sektor Pertanian merupakan kunci untuk pengentasan kemiskinan dan pemantapan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan sektor Pertanian haruslah tetap dijadikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Inilah konsensus politik yang masih perlu diperjuangkan bersama. Kinerja sektor Pertanian saat ini, yang sudah lebih baik dari masa krisis maupun masa orde baru, merupakan hasil sinergi dan seluruh *stake holder* pembangunan sistem agribisnis baik ditingkat makro, sektoral maupun mikro. Kemitraan dan sikap bijak DPR sangat membantu pencapaian yang lebih baik tersebut.

Prestasi pertanian kita yang menggembirakan tersebut dimungkinkan oleh terjadinya peningkatan kemampuan SDM, khususnya masyarakat petani. Dengan kata lain, pertumbuhan pertanian kita bukan hanya lebih tinggi tetapi juga makin berkualitas

karena lebih banyak dihela oleh kreatifitas SDM petani. Inilah sesungguhnya implementasi dari pembangunan agribisnis yang berkerakyatan, yang oleh sebagian pihak menyebutnya "people driven".

Pertumbuhan agribisnis yang dihela oleh kreatifitas masyarakat petani dan pelaku agribisnis lainnya merupakan pondasi yang kuat untuk berkembang lebih lanjut ke depan. Untuk itulah, saya melihat perlunya menjalin kerjasama yang lebih erat antara Departemen Pertanian dan Komisi III dalam membangun dan mensosialisaikan hasil-hasil pembangunan pertanian guna merangsang dan memperkuat rasa optimisme dan positivisme masyarakat serta pengendalian sosial menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Saya berharap Anggota Dewan lebih banyak lagi mengkritisi pelaksanaan kebijakan pertanian seperti penyelundupan dan manipulasi tataniaga. Dengan terbangunnya semangat optimisme dan positivisme masyarakat serta pemerintahan yang baik, saya yakin akan tercipta efek sinergi yang maksimal dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk agribisnis, sehingga basil pembangunan yang dicapai akan lebih berkualitas lagi.

Hadirin yang saya hormati,

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota Dewan, khususnya Komisi III DPR-RI yang telah banyak memberikan perhatian kepada sektor pertanian. Saya ucapkan selamat jalan kepada anggota Dewan, semoga kerjasama yang baik dan telah kita bangun selama ini terus dapat dipelihara dan ditingkatkan baik didalam maupun diluar kedinasan dalam membangun sektor pertanian. Demikian paparan saya, atas perhatian Saudara-Saudara dan kesempatan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih.



Menteri Pertanian,

Prof Dr Ir Bungaran Saragih, MEd.

**2. KESIMPULAN RAKER MENTERI PERTANIAN
DENGAN KOMISI III DPR-RI TAHUN 2000-2004**





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : 31 OKTOBER 2000**

1. Komisi III DPR RI sependapat dengan pemerintah bahwa kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan pada T.A 2001 akan diupayakan secara maksimal untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sumber daya hutan dan kebun antara lain :
 - a. Penyelesaian konflik lahan/ land tenure issue yang sekaligus dikaitkan dengan program reforestasi
 - b. Menegakkan supremasi hukum dengan menindak tegas terhadap para aktor penebang liar dan okupasi serta penjarahan kebun dengan menggalang kerjasama dengan pihak kepolisian, menghadapi secara tegas terhadap tindakan anarkis para perusak hutan dan kebun.
 - c. Merintis pembentukan hutan desa yaitu hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada atau dikelola bersama-sama dengan desa yang mempunyai wilayah administrasi atas areal hutan tersebut.
 - d. Penguatan institusi masyarakat dalam program reforestasi.
 - e. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah harus mempromosikan diri pada empat peran yaitu : fasilitasi, supervisi, regulasi dan pengawasan.

2. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian dan Kehutanan sependapat bahwa Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan ke depan melalui pendekatan meningkatnya mutu dan produktivitas sumber daya hutan dan kebun, menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan kebun, terselenggaranya sistem pengelolaan hutan dan kebun secara efisien, adil dan berkelanjutan serta meningkatnya kontribusi hutan dan kebun terhadap perekonomian nasional dan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Karena itu diharapkan kebijaksanaan ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai pelaksanaan hutan lestari dan untuk kesejahteraan masyarakat.



3. Dengan dilaksanakannya Desentralisasi Fiskal sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Komisi III DPR RI mendukung bahwa kegiatan prioritas pembangunan daerah adalah menjadi kewenangan daerah, namun hal-hal menyangkut kepentingan nasional diatur oleh Pemerintah Pusat (Departemen Pertanian dan Kehutanan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Komisi DPR-RI berpendapat bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, maka sektor kehutanan dapat menunjang masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat (khususnya masyarakat sekitar hutan), sehingga diharapkan akan terjadi iklim yang kondusif antara masyarakat dan pengelola hutan (Pemerintah).

4. Komisi III DPR RI Menteri Pertanian dan Kehutanan sepakat bahwa untuk mendukung kegiatan pertanian dan kehutanan (sektor kehutanan dan perkebunan) pada tahun 2001 perlu didukung anggaran yang cukup, dan karena itu Komisi DPR RI menyetujui APBN Tahun 2001 sebagai berikut :

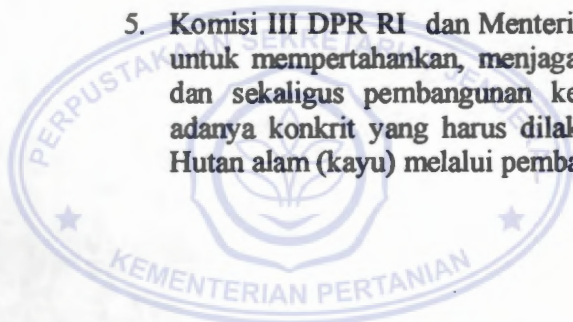
a. <u>Anggaran Rutin</u>	<u>Rp. 2.323.821.304.982,-</u>
* APBN Rutin	Rp. 499.141.573.000,-
* APBN PNBPN-PSDH	Rp. 128.191.628.960,-
* APBN PNBPN-DR	Rp. 1.696.488.103.022,-
b. <u>Anggaran Pembangunan</u>	<u>Rp. 391.583.880.500,-</u>
* APBN Sektoral	Rp. 210.642.332.000,-
* APBN PLN	Rp. 180.941.548.500,-

Jumlah	Rp. 2.715.405.185.482,-

Alokasi Anggaran Tahun 2001 melalui Anggaran Rutin dan Pembangunan dibandingkan dengan Tahun 2000 (sebesar Rp. 1.445.897.174.000,-), berarti mengalami kenaikan sebesar 87,80%.

Kenaikan anggaran tersebut di atas adalah upaya untuk menstimulir agar sektor hutan dan kebun sebagaimana harapan GBHN Tahun 1999 dimana hutan dan kebun sebagai salah satu sektor dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat, disamping untuk mendukung lahirnya kebijakan baru dalam pembangunan hutan dan kebun ke depan (Tahun 2001-2004).

5. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian dan Kehutanan sependapat bahwa untuk mempertahankan, menjaga hutan alam yang semakin memprihatinkan dan sekaligus pembangunan kehutanan berbasis masyarakat, maka perlu adanya konkrit yang harus dilakukan dalam rangka mengganti penggunaan Hutan alam (kayu) melalui pembangunan Hutan Tanaman antara lain :

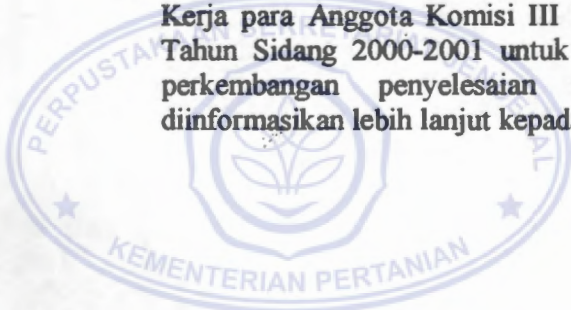


- a. Hutan Kemasyarakatan;
- b. Hutan Rakyat;
- c. Sutera Alam;
- d. Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS);
- e. Hutan Tanaman Industri (HTI).

Kebijakan ini perlu didukung oleh semua pihak mengingat pentingnya pengganti hutan alam untuk kepentingan kelestarian hutan dan ketersediaan bahan baku untuk pertukangan guna mendukung industri kertas (pulp) dan industri yang menggunakan bahan baku kayu lainnya.

6. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian dan Kehutanan sependapat bahwa penggunaan Dana Reboisasi (DR) yang dititipkan dalam APBN perlu diatur secara khusus, baik menyangkut mekanisme, kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai, maupun tata cara pertanggung jawabannya. Sesuai kesepakatan bersama bahwa penggunaan Dana Reboisasi pada prinsipnya kembali ke hutan, baik itu melalui APBN Murni (Dana Habis) maupun kegiatan yang berbentuk kredit yang dapat digunakan oleh masyarakat atau badan usaha, dan dalam penggunaan Dana Reboisasi senantiasa dikoordinasikan antara Komisi III DPR RI dengan Menteri Pertanian dan Kehutanan yang pelaksanaannya akan diatur sesuai keperluan.
7. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian dan Kehutanan sepakat bahwa sudah saatnya sekarang ini untuk memikirkan tentang posisi dan fungsi BUMN, khususnya PTPN-PTPN yang di akhir-akhir ini arealnya cenderung dipertanyakan keberadaannya oleh sebagian masyarakat, disisi lain harus diakui bahwa sektor ini juga memberikan kontribusi kepada negara sebagai sumber devisa. Karena itu perlu upaya-upaya baru untuk memposisikan dan memfungsikan PTPN dalam asas kebenaran dan keadilan yang berbasis masyarakat. Disamping itu BUMN-BUMN yang berada di dalam lingkup Departemen Pertanian dan Kehutanan, pembinaan teknis dan manajemennya berada di Departemen Pertanian dan Kehutanan.
8. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian dan Kehutanan sependapt bahwa kebakaran hutan dan illegal logging merupakan masalah utama dalam pembangunan kehutanan kita, baik hari ini maupun yang akan datang, karena itu perlu upaya-upaya konkrit untuk mencegah terjadinya kebakaran dan illegal logging di hutan dan kebun, sehingga di masa datang kebakaran dan illegal logging dapat diminimalkan.
9. Komisi III DPR RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2000-2001 untuk dapat ditindaklanjuti, dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu, agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR-RI.

Jakarta, 31 Oktober 2000

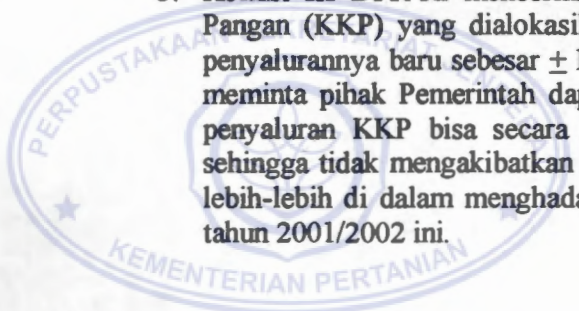




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : RABU, 14 FEBRUARI 2001

1. Komisi III DPR-RI memandang perlu untuk dilakukan restrukturisasi pendekatan pembangunan ekonomi pertanian dengan merubah pembangunan pertanian kepada pembangunan sistem agribisnis dimana pertanian, industri hulu dan industri hilir pertanian serta sektor yang menyediakan jasa yang diperlukan harus dikembangkan secara simultan. Dengan demikian Komisi III DPR-RI berharap pembangunan sistem agribisnis akan dapat ditempatkan sebagai pendekatan baru pembangunan pertanian, dan sekaligus dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional.
2. Komisi III DPR-RI mencermati bahwa dalam operasionalisasinya konsep agribisnis sangatlah ditentukan oleh terbentuknya komunikasi yang maksimal yang akan melibatkan banyak departemen dan lembaga terkait lainnya baik di pusat maupun di daerah. Komisi III DPR-RI dapat memahami untuk dibentuknya Forum Koordinasi Pangan dan Agribisnis Nasional (FKPAN) di tingkat pusat dan Forum Koordinasi Pangan dan Agribisnis Daerah (FKPAD) di daerah untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program secara lintas sektoral dan antar pusat daerah secara harmonis. Komisi III DPR-RI mengharapkan agar jaringan koordinasi tersebut dapat segera terbentuk, karena hal inilah yang menentukan keberhasilan konsep agribisnis tersebut, yang sangat dinantikan oleh masyarakat petani di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.
3. Komisi III DPR-RI mencermati terhadap penyaluran Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang dialokasikan sebesar Rp.1,98 triliun, namun dalam penyalurannya baru sebesar \pm Rp.23 miliar. Untuk itu Komisi III DPR-RI meminta pihak Pemerintah dapat mencari jalan pintas yang terbaik agar penyaluran KKP bisa secara optimal tersalurkan kepada pihak petani, sehingga tidak mengakibatkan terganggunya stok pangan nasional (beras) lebih-lebih di dalam menghadapi kemungkinan terjadinya El-Nino pada tahun 2001/2002 ini.



4. Menyikapi terhadap diberlakukannya PPN bagi komoditas pertanian perikanan dan kehutanan, Komisi III DPR-RI meminta agar Pemerintah mempertimbangkan untuk dicabut, baik produksi yang dihasilkan oleh para petani maupun produk yang dihasilkan oleh suatu badan hukum. Komisi III DPR-RI melihat apabila ini diberlakukan akan kembali menambah beban biaya produksi yang semakin tinggi, dan akhirnya membebani konsumen.
5. Komisi III DPR-RI bersama Departemen Pertanian sepatutnya untuk melakukan pembahasan lebih jauh tentang perkembangan perkebunan swasta, BUMN atau perkebunan rakyat pada masa yang akan datang.
6. Komisi III DPR-RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2000 – 2001 untuk dapat ditindaklanjuti, dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu, agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR-RI.

Jakarta, 14 Februari 2001





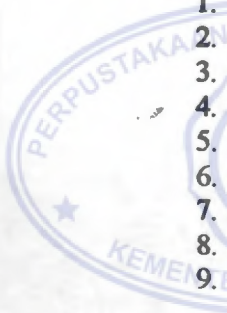
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : SENIN, 2 JULI 2001**

-
1. Komisi III DPR RI meyakini bahwa sektor pertanian berperan besar dalam pembangunan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa : pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, perolehan devisa karena ekspor, serta ketahanan pangan, karenanya Komisi III DPR RI menyadari bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional perlu dukungan dari segenap sektor di lingkungan Pemerintahan maupun kepedulian pihak swasta.
 2. Program Pembangunan Pertanian T.A 2002 sebagaimana yang terdapat di dalam PROPENAS Tahun 2001-2004 meliputi dua program utama yaitu :
 - a. Progaam Pengembangan Agribisnis;
 - b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Komisi III DPR RI dapat menyetujui agar pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian lebih efektif, terfokus dan sekaligus memecahkan isu-isu pokok yang menjadi tuntutan masyarakat, maka pada T.A 2002 program utama tersebut dijabarkan menjadi sub-sub program :

- a. Program Pengembangan Agribisnis diuraikan menjadi Sub Program sebagai berikut :
 1. Pengembangan Agribisnis Berbasis Tanaman Pangan;
 2. Pengembangan Agribisnis Berbasis Tanaman Hortikultura;;
 3. Pengembangan Agribisnis Berbasis Perkebunan;
 4. Pengembangan Agribisnis Berbasis Peternakan;
 5. Proteksi Sumberdaya Hayati;
 6. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Agribisnis
 7. Pengembangan Teknologi Strategi dan Wilayah.
 8. Pengembangan Sistem Informasi Dan Jaringan Kerja Agribisnis
 9. Pengembangan Usaha Agribisnis Berwawasan Lingkungan



- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan mencakup tiga Sub Program yaitu
 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan
 2. Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan
 3. Stabilisasi Produksi dan Penanggulangan Kerawanan Pangan dan Gizi

Selain kedua program utam tersebut, Komisi III DPR RI dapat menyepakati untuk diselenggarakannya program penunjang yang meliputi :

- a. Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum serta Pelestarian Lingkungan Hidup.
- b. Keunggulan Inovasi serta Teknologi
- c. Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik

Komisi III DPR RI mengharapkan agar baik program utama maupun program penunjang tersebut, dapat dilaksanakan secara maksimal bagi pencapaian sasaran yang ditetapkan.

3. Komisi III DPR RI dapat memahami dan menyetujui terhadap usulan RAPBN T.A. 2002 bagi sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 2,2 triliun bagi Anggaran Pembangunan Pertanian, atau memperoleh kenaikan sebesar 120 % dari pagu anggaran T.A. 2001. Untuk Anggaran Rutin diusulkan sebesar Rp. 381, 641 miliar, atau meningkat sebesar 43,5% dibanding pagu pada T.A. 2001, kenaikan ini terbesar akibat kenaikan gaji pegawai negeri. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp. 13, 829 miliar untuk T.A. 2002. Untuk itu Komisi III DPR RI memahami bahwa peningkatan perolehan PNBP jangan sampai membebankan dan mengganggu kegaifahan petani dan pelaku agribisnis dalam mengembangkan usahanya. Komisi III DPR RI memahami bahwa sektor pertanian merupakan sektor andalan di dalam memutar kembali roda perekonomian, untuk itu Komisi III DPR RI mengharapkan agar SDM dan kinerja di dalam Departemen Pertanian dapat dibangun secara optimal di dalam mendukung harapan bahwa sektor ini menjadi sektor andalan dalam recovery ekonomi secara nasional.
4. Komisi III DPR RI dan Departemen Pertanian sepakat agar impor gula tidak dilakukan pada saat petani sedang panen/ musim giling. Demikian juga untuk tender gula agar dilakukan secara terbuka untuk menghindari monopoli dan untuk menjamin petani tidak dirugikan.
5. Komisi III DPR RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2000-2001 dan sejumlah masukan lainnya yang disampaikan secara lisan oleh Anggota Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja hari ini untuk dapat ditindak lanjuti, dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu, agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR RI.

Jakarta, 2 Juli 2001





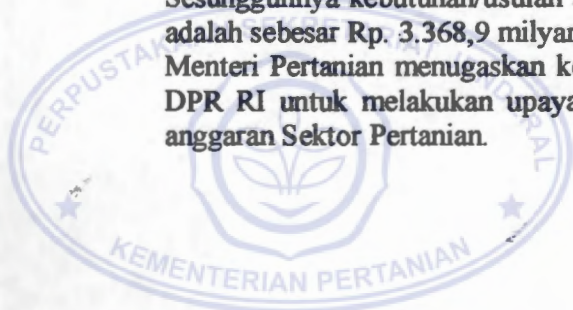
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : RABU, 19 SEPTEMBER 2001**

1. Komisi III DPR-RI telah melakukan penelaahan dan kajian secara analitis dan komprehensif bahwa sub sector pertanian telah teruji dalam situasi krisis ekonomi yang telah berlangsung selama empat tahun ini dan tetap mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional di dalam menggerakkan roda perekonomian. Untuk itu, Komisi III DPR-RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk tetap konsisten terhadap upaya yang terkait langsung dengan pembangunan pedesaan, pengembangan ekonomi rakyat skala kecil dan menengah, pengentasan kemiskinan, pemerataan dan penanggulangan kesenjangan sosial, Komisi III DPR-RI mengusulkan kepada Pemerintah agar sektor pertanian tetap menjadi prioritas pada tahun 2002 – 2004.
2. Setelah melakukan pembahasan yang mendalam tentang alokasi anggaran Departemen Pertanian Tahun 2002 dan memperhatikan Nota Keuangan/ Keterangan Pemerintah atas RUU RAPBN Tahun 2002, maka Komisi III DPR-RI dan Menteri Pertanian mengusulkan RAPBN Tahun 2002 Departemen Pertanian sebagai berikut :
 - a. Rupiah Murni : Rp. 1.060,5 milyar
 - b. Pinjaman Luar Negeri : Rp. 787,3 milyar
 - c. Rutin : Rp. 422,6 milyar

Jumlah Rp. 2.270,4 milyar

Sesungguhnya kebutuhan/usulan anggaran Departemen Pertanian Tahun 2002 adalah sebesar Rp. 3.368,9 milyar, dan oleh karena itu Komisi III DPR-RI dan Menteri Pertanian menugaskan kepada Anggota Panitia Anggaran Komisi III DPR RI untuk melakukan upaya maksimal dalam memperjuangkan alokasi anggaran Sektor Pertanian.



3. Komisi III DPR-RI dapat memahami dan mendorong agar setiap program pembangunan pertanian, hendaknya petani dapat menjadi subyek pembangunan dan terlibat secara langsung di dalam program-program tersebut. Untuk itu, Komisi III DPR-RI dapat memahami dan menyetujui agar program "*Decentralized Agricultural and Forestry Extension Project*" atau Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan dapat ditingkatkan serta ditindaklanjuti untuk memberdayakan petani agar mampu mengidentifikasi prioritas usaha tani dan meningkatkan peran serta petani dalam program penyuluhan terpadu di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
4. Komisi III DPR-RI dan Pemerintah sependapat bahwa koordinasi program antar departemen merupakan titik lemah dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi Pembangunan Nasional yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Komisi III DPR-RI sangat memahami bahwa keberhasilan Pembangunan Pertanian sangatlah ditentukan oleh berbagai peran departemen dan sector-sektor lainnya, untuk itu Komisi III DPR-RI mengharapkan agar koordinasi dapat dioptimalisasikan untuk menghindari timbulnya kebijakan yang antagonis, kontraproduktif maupun tumpang tindih yang mengakibatkan inefisiensi penggunaan Anggaran Pembangunan.
5. Komisi III DPR-RI di dalam mewujudkan komitmen di dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan telah dialokasikan anggaran Tahun 2000 sebesar Rp. 600 milyar dan Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 300 milyar melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP), Komisi III DPR-RI mengharapkan agar Departemen Pertanian secara sungguh-sungguh mengkaji dan menganalisis terhadap program tersebut, karena hal ini merupakan usul inisiatif dari Komisi III DPR-RI dan diharapkan dapat dikembangkan dan memberikan hasil yang signifikan di dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
6. Komisi III DPR-RI menyikapi terhadap perkembangan perdagangan global, maka institusi karantina harus menjadi suatu institusi yang strategis di dalam mengamankan setiap impor komoditi pertanian yang akan masuk ke Indonesia. Untuk itu, Komisi III DPR-RI menyarankan agar institusi itu perlu dilakukan pembenahan dan penataan secara menyeluruh sehingga dapat berperan dan berfungsi di dalam menyelamatkan produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh para petani dan nelayan kita, sekaligus berperan dalam meningkatkan kualitas ekspor komoditi pertanian Indonesia.
7. Komisi III DPR-RI menyikapi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para peternak rakyat. Untuk menghindari bangkrutnya para peternak rakyat, Komisi III DPR-RI menyarankan agar pihak Pemerintah mencari jalan keluar yang terbaik terhadap nasib para peternak kecil dengan tindakan yang efektif serta melahirkan suatu Peraturan Pemerintah (PP) mengenai perunggasan yang melindungi keberadaan para peternak rakyat.



8. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan khususnya daging (ayam), Komisi III DPR-RI dan Pemerintah sepakat untuk mengembangkan ayam Indonesia yang mana tidak tergantung pada bahan pakan impor, tetapi bahan baku sendiri.
9. Komisi III DPR-RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2000 – 2001 dan sejumlah masukan lainnya yang disampaikan secara lisan oleh Anggota Komisi III DPR-RI dalam Rapat Kerja hari ini untuk dapat ditindaklanjuti, dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu, agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR-RI.

Jakarta, 19 September 2001





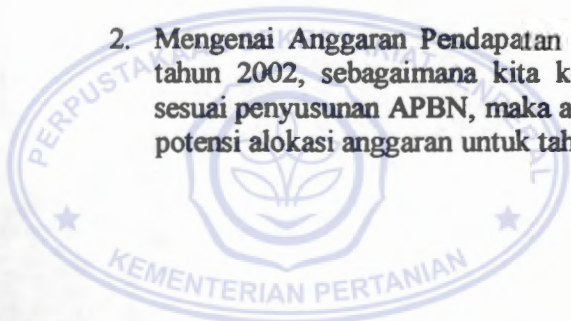
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : SELASA, 27 NOPEMBER 2001**

-
1. Komisi III DPR-RI dapat menyetujui terhadap tambahan alokasi anggaran Departemen Pertanian tahun 2002 untuk difokuskan kepada beberapa program strategis diantaranya adalah :
 - a. Konsolidasi penyuluhan pertanian yang pada tahun anggaran lalu didukung dengan dana INPRES, namun sekarang tidak tersedia lagi;
 - b. Pemulihan usaha agribisnis eks. Pengungsi dan pengembangan pertanian/agribisnis di daerah rawan konflik;
 - c. Penguatan kelembagaan Karantina Pertanian, laboratorium penelitian, dan sarana indtitusi pelayanan;
 - d. Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah/perundang-undangan serta kajian-kajian kebijakan pembangunan pertanian, dan
 - e. Peningkatan cakupan program/proyek pada wilayah-wilayah potensial yang belum terjangkau oleh pagu alokasi anggaran tersebut di atas.

Selain itu, Komisi III DPR-RI mengharapkan agar program strategis lainnya yang belum dialokasikan termasuk program promosi potensi hortikultura di luar negeri.

2. Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Pertanian tahun 2002, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah melalui pembahasan sesuai penyusunan APBN, maka akhirnya Departemen Pertanian mendapatkan potensi alokasi anggaran untuk tahun 2002 sebagai berikut :



a. Anggaran Rutin	: Rp. 418,250 milyar
b. Anggaran Pembangunan	: Rp. 1.300,000 milyar
c. Bantuan Luar Negeri	: Rp. 787,370 milyar

Jumlah Rp. 2.505,620 milyar

Selanjutnya Komisi III DPR-RI dan Menteri Pertanian sependapat agar pembahasan rincian anggaran (satuan 3) ditugaskan kepada Sekjen Departemen Pertanian dan Panitia Anggaran Komisi III DPR-RI yang didampingi oleh Sub Komisi, dan hasilnya masing-masing dilaporkan kepada Menteri Pertanian dan Komisi III DPR-RI.

3. Komisi III DPR-RI sependapat dengan Menteri Pertanian, bahwa pada prinsipnya para praktisi dan Eksportir/Importir Agribisnis tidak berkeberatan terhadap pelaksanaan PPN pada komoditas Agribisnis Ekspor dan Impor termasuk Sapi Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2001 sepanjang bukan untuk petani/peternak rakyat. Untuk itu, Komisi III DPR-RI mengharapkan agar Pemerintah menanggihkan pengenaan PPN terhadap komoditas tersebut termasuk impor sapi bakalan sampai dengan bulan Januari 2002, terutama untuk mencegah kenaikan harga komoditas Pertanian dan daging sapi menjelang hari-hari besar keagamaan.
4. Komisi III DPR-RI mencermati keberadaan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang merupakan salah satu Puslitbun dalam lingkup APPI (Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia) yang berfungsi meningkatkan produktivitas, efisiensi, mutu dan diversifikasi produk, berwawasan lingkungan. Untuk itu, Komisi III DPR-RI mengharapkan agar Departemen Pertanian untuk melakukan penelaahan terhadap keberadaan P3GI dan juga Puslitbun lainnya dalam lingkup APPI untuk dapat didayagunakan dalam rangka mendukung pembangunan perkebunan rakyat.
5. Komisi III DPR-RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2001-2002 dan sejumlah masukan lainnya yang disampaikan secara lisan oleh Anggota Komisi III DPR-RI dalam Rapat Kerja hari ini untuk dapat ditindaklanjuti, dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu, agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR-RI.

Jakarta, 27 Nopember 2001

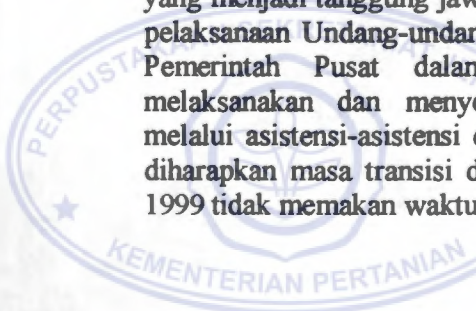




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : SENIN, 28 JANUARI 2002

1. Komisi III DPR-RI dan Departemen Pertanian sependapat bahwa pembangunan sistem dan usaha agribisnis melalui Program Pembangunan Agribisnis dan Program Ketahanan Pangan haruslah menjadi "strategi utama" yang didukung oleh sector-sektor lain secara komprehensif dan terpadu. Untuk itu, perlu adanya kesepahaman visi dari Tim Perekonomian Kabinet Gotong Royong di dalam membangun gerakan yang sinergi melalui kebijakan ekonomi yang mendukung terhadap langkah-langkah tersebut.
2. Komisi III DPR-RI dan Departemen Pertanian sependapat bahwa beras merupakan komoditas strategis yang memiliki sensitifitas yang tinggi menyangkut stabilitas sosial di masyarakat luas. Untuk itu, Komisi III DPR-RI menyikapi terhadap INPRES No. 9 Tahun 2001 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan dan KEPPRES No. 132 tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Komisi III DPR-RI meminta agar INPRES dan KEPPRES tersebut dilaksanakan dengan optimal dan konsisten sehingga ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan secara nyata. Komisi III DPR-RI juga menyarankan kepada Pemerintah agar kebijakan harga beras tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, namun melalui pasar yang terkendali.
3. Komisi III DPR-RI mendukung terhadap langkah-langkah Departemen Pertanian di dalam mempersiapkan secara matang pelaksanaan program untuk tahun anggaran 2002, dalam bentuk yang terpadu dengan melakukan asistensi ke daerah-daerah untuk membantu penyelesaian masalah-masalah agribisnis yang menjadi tanggung jawab daerah. Komisi III DPR-RI menyikapi terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1999, maka sudah menjadi tugas Pemerintah Pusat dalam menyiapkan daerah-daerah untuk mampu melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada melalui asistensi-asistensi dari Pemerintah Pusat ke daerah-daerah, sehingga diharapkan masa transisi dalam pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tidak memakan waktu yang terlalu lama.



4. Komisi III DPR-RI sangat mendukung agar langkah-langkah di dalam membangun kemitraan antara pabrik pupuk, perbankan, industri benih, dan petani dapat diwujudkan secara terintegrasi dan menyeluruh dan juga dapat dikembangkan pada komoditas yang lebih luas. Komisi III DPR-RI melihat bahwa langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, khususnya tanaman pangan, sehingga ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan dengan langkah-langkah yang terpadu dan terintegrasi khususnya terhadap komponen-komponen yang mendukung produksi.

5. Komisi III DPR-RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2001-2002 dan sejumlah masukan lainnya yang disampaikan secara lisan oleh Anggota Komisi III DPR-RI dalam Rapat Kerja hari ini dapat ditindaklanjuti, dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu, agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR-RI.

Jakarta, 28 Januari 2002

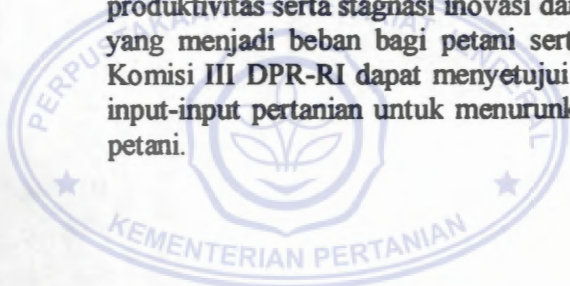




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : RABU, 29 MEI 2002**

1. Dalam pencermatan Komisi III DPR-RI terhadap PDB Triwulan I Tahun 2002 sebesar 2,47%, dimana pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pertanian sebesar 16,51%, sedangkan pertumbuhan sektor lainnya kurang dari 2%. Keadaan ini menambah keyakinan Komisi III DPR-RI bahwa sektor pertanian merupakan sektor andalan yang strategis di dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi. Untuk itu, Komisi III DPR-RI meminta agar Pemerintah konsisten untuk menempatkan sektor ini sebagai basis fundamental ekonomi yang didukung monitoring dan menyiapkan tindak lanjut agar arah dan besaran kontribusi pertanian terhadap perekonomian nasional dapat diketahui dengan pasti sesuai dengan karakter dan pola hubungannya dengan dimensi waktu.
2. Komisi III DPR-RI memahami bahwa permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian saat ini dan mendatang dirasakan semakin berat. Beberapa masalah kronis pembangunan yang terkait dengan erat dengan pembangunan pertanian seperti kemiskinan, kecukupan pangan dan pengangguran akan tetap mewarnai program dan kegiatan pembangunan pertanian dalam dekade mendatang. Komisi III DPR-RI mencermati juga terhadap pemberlakuan AFTA 2003 dan tendensi keterbukaan perekonomian global. Komisi III DPR-RI berpendapat bahwa instrumen yang perlu segera dibangun adalah instrumen pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan termasuk persyaratan-persyaratan yang diperlukan oleh konsumen domestik kita, untuk itu instrumen tersebut harus segera dibangun dan dikembangkan untuk menghadapi permasalahan tersebut.
3. Komisi III DPR-RI dapat memahami terhadap kendala yang dihadapi sektor pertanian di dalam mempertahankan laju produksi diantaranya adalah rendahnya produktivitas serta stagnasi inovasi dan adopsi teknologi, tingginya biaya produksi yang menjadi beban bagi petani serta perluasan areal pertanian sangat lambat. Komisi III DPR-RI dapat menyetujui untuk diusulkan dihapuskannya bea masuk input-input pertanian untuk menurunkan biaya produksi agar tidak memberatkan petani.



4. Berdasarkan PROPENAS 2000 – 2004, pada tahun 2003 sektor pertanian ditargetkan dapat tumbuh dengan laju 2,7%, dimana sumber pertumbuhan terutama di sub sektor tanaman pangan (khususnya padi dan palawija), perkebunan, peternakan dan hortikultura. Untuk itu Komisi III DPR-RI dapat memahami dan mendukung program-program yang dirumuskan dalam REPETA 2003 yang operasionalisasinya difokuskan pada :

a). Program Pengembangan Agribisnis, antara lain melalui :

- 1) Peningkatan koordinasi pusat, propinsi dan kabupaten.
- 2) Peningkatan akses, input, teknologi, informasi dan pasar.
- 3) Peningkatan produksi dan usaha.
- 4) Penumbuhan usaha agroindustri terutama di pedesaan.
- 5) Pengembangan system dan kelembagaan.

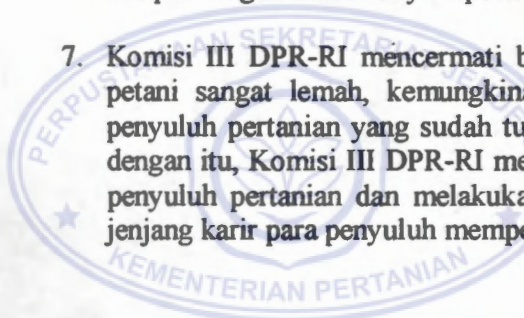
b). Program Peningkatan Ketahanan Pangan, antara lain :

- 1) Peningkatan koordinasi pusat, propinsi dan kabupaten; pada aspek produksi, distribusi dan pola konsumsi.
- 2) Peningkatan produksi pangan, padi, jagung dan kedelai.
- 3) Peningkatan Usaha Bisnis Pangan yang menguntungkan petani.
- 4) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan.
- 5) Peningkatan kemandirian pangan melalui pengembangan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat; Lumbung Pangan Desa dan lain-lain.
- 6) Konsolidasi penyuluhan pertanian.

5. Komisi III DPR-RI sependapat dengan Departemen Pertanian RI untuk dapat dilakukan restrukturisasi terhadap mekanisme pengawasan produksi dan distribusi pupuk serta pengembangan pupuk organik secara nasional guna mengatasi permasalahan klasik yang selalu dihadapi oleh petani pada setiap musim tanam. Komisi III DPR-RI menyarankan agar pupuk dijadikan komoditas strategis, produksi pupuk urea yang dihasilkan prioritas utamanya diperuntukan bagi kepentingan petani, dan ekspor pupuk berada dalam pengawasan dan kendali yang ketat. Selain itu, Komisi III DPR-RI juga menyarankan agar harga pupuk dapat ditekan serendah mungkin, sehingga dapat mengurangi biaya produksi petani.

6. Komisi III DPR-RI mencermati terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dan proyek-proyek dalam perspektif otonomi daerah, perlu dibangun suatu system monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek-proyek dan kegiatan di daerah dengan menerapkan reward dari penalty. Komisi III DPR-RI menyarankan bagi daerah yang tidak memberikan laporan dan monitoring proyek dengan baik, daerah tersebut tidak dialokasikan dana dekonsentrasi untuk sementara waktu sampai dengan diterimanya laporan dari daerah tersebut.

7. Komisi III DPR-RI mencermati bahwa kegiatan penyuluhan pertanian terhadap petani sangat lemah, kemungkinan disebabkan terbatasnya biaya operasional, penyuluh pertanian yang sudah tua dan organisasi yang tidak jelas. Sehubungan dengan itu, Komisi III DPR-RI mendesak untuk lebih memperhatikan keberadaan penyuluh pertanian dan melakukan restrukturisasi terhadap organisasi sehingga jenjang karir para penyuluh memperoleh penghargaan yang sewajarnya.



8. Komisi III DPR-RI di dalam menyikapi keberpihakan kepada petani dapat mendukung sepenuhnya usulan Departemen Pertanian untuk memberikan dana talangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk membeli gabah/beras petani pada saat panen raya. Sebagai instrument control di dalam pengembalian dana talangan tersebut dapat digunakan Dana Alokasi Umum (DAU) apabila kabupaten yang bersangkutan tidak mengembalikan dana talangan tersebut.
9. Komisi III DPR-RI dan Menteri Pertanian sepakat bahwa pembahasan mendalam tentang REPETA 2003, RAPBN 2003, kegiatan semester II tahun 2001 dan informasi/laporan tentang hasil temuan BPK RI akan dibicarakan lebih lanjut melalui Eselon I atas nama Menteri Pertanian dengan Pimpinan Komisi, Pimpinan Sub Komisi Pertanian dan Panitia Anggaran Komisi III DPR-RI, yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.

Jakarta, 29 Mei 2002





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : SELASA, 25 JUNI 2002**

1. Komisi III DPR-RI mencermati pertumbuhan pertanian yang secara resmi disampaikan oleh BPS didasarkan Angka Ramalan II (ARAM II) Tahun 2002 adanya kenaikan produksi padi nasional sebesar 50,84 juta ton (naik 0,75%), kedelai sebesar 930,078 ton (naik 12,47%), jagung 9,55 ton (naik 2,17%). Untuk itu Komisi III DPR-RI mengharapkan agar langkah-langkah yang telah dilaksanakan dapat terus ditingkatkan dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional.
2. Komisi III DPR-RI berpendapat bahwa kebijakan perdagangan yang kita miliki saat ini ditandai oleh kecilnya perlindungan terhadap komoditas pertanian kita, terutama komoditas pangan, di lain pihak beberapa Negara menerapkan bea masuk yang cukup tinggi untuk melindungi petaninya. Oleh karena itu, Komisi III DPR-RI sependapat dengan Menteri Pertanian untuk mengusulkan penyesuaian bea masuk komoditas pertanian yang lebih adil, dengan tetap mengacu pada ketentuan WTO dan juga institusi karantina harus diperkuat untuk digunakannya instrument kualitas bagi komoditas yang masuk ke Indonesia.
3. Komisi III DPR-RI berpendapat bahwa pembangunan pertanian haruslah diarahkan kepada peningkatan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dan Pemerintah berperan dalam memfasilitasi dan merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat. Dalam pencermatan Komisi III DPR-RI bahwa penerapan pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diinisiasi oleh Komisi III DPR-RI telah menunjukkan perkembangan yang positif di dalam membangun kreativitas dan partisipasi masyarakat, dan didasarkan penilaian Departemen Pertanian model ini merupakan model yang paling baik pada saat ini bahkan di beberapa daerah telah diimplementasikan dengan menerapkan bunga terhadap BLM. Untuk itu, Komisi III DPR-RI berpendapat bahwa model BLM perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan baik kuantitas maupun komoditas.



4. Komisi III DPR-RI menghargai keberhasilan pengembangan peternakan yang terlihat dengan peningkatan produksi daging 4,7%, telur 7,7%, dan susu 2,7%, akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi peternakan perlu ditingkatkan melalui penyediaan bibit ternak besar, sedang dan kecil, serta penyiapan pakan dan perbaikan kesehatan ternak. Untuk itu Komisi III DPR-RI mengusulkan agar daerah yang memang secara cultural masyarakatnya hidup di bidang peternakan untuk dikembangkannya usaha tersebut misalnya daerah Kawasan Timur Indonesia seperti Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo.
5. Komisi III DPR-RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2001 – 2002 dan sejumlah maskan lainnya yang disampaikan secara lisan oleh Anggota Komisi III DPR-RI dalam Rapat Kerja hari ini dapat ditindaklanjuti, dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR-RI.

Jakarta, 25 Juni 2002





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

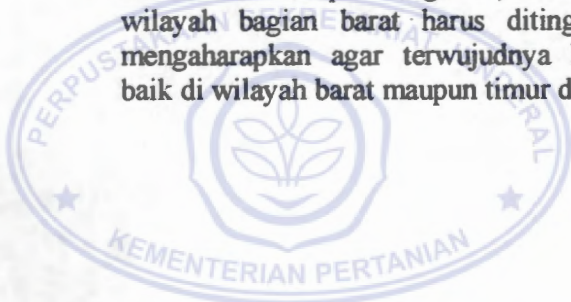
KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : KAMIS, 12 SEPTEMBER 2002

1. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian sependapat bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pertanian dalam kaitannya dengan Ketahanan Pangan Nasional, maka perlu didukung oleh alokasi anggaran yang cukup. Oleh karena itu diharapkan agar APBN Departemen Pertanian tahun 2003, diusulkan sebagai berikut :

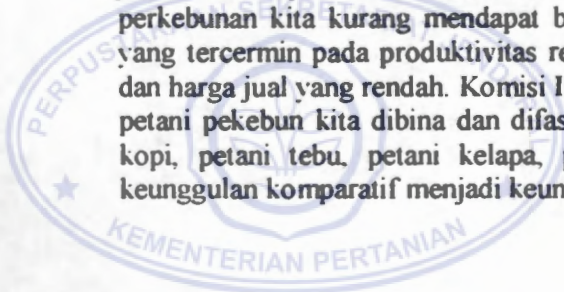
a. Penerimaan	Rp 46.211.976.000,-
b. Subsidi Pupuk	Rp 2.100.000.000.000,-
c. Skim Kredit	Rp 2.080.000.000.000,-
d. Pengeluaran	Rp 3.855.780.400.000,-
1) Rutin	Rp 484.271.000.000,-
2) Pembangunan	Rp 2.754.000.000.000,-
3) Bantuan Luar Negeri	Rp 617.509.400.000,-

Sehubungan dengan itu Komisi III DPR RI menugaskan kepada Panitia Anggaran Komisi III DPR RI untuk memperjuangkan alokasi anggaran tersebut pada Panitia Anggaran DPR RI, dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Komisi III DPR RI.

2. Komisi III DPR RI dapat memahami dan menyetujui terhadap proporsi alokasi anggaran pembangunan pertanian di Indonesia bagian timur dan barat, berubah dari \pm 44% menjadi 56%, di dalam mengejar ketertinggalan wilayah timur Indonesia dalam pembangunan, demikian pula halnya daerah tertinggal lainnya di wilayah bagian barat harus ditingkatkan. Untuk itu, Komisi III DPR RI mengaharapkan agar terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan, baik di wilayah barat maupun timur dan di seluruh pelosok tanah air.



3. Tahun 2003 Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah memperoleh anggaran sebesar Rp 4,1 triliun yang dapat digunakan untuk pengelolaan irigasi, rawa, jaringan lainnya, dan pengembangan agropolitan. Dari total anggaran tersebut alokasi yang langsung diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi padi berjumlah Rp 1,5 triliun. Untuk itu Komisi III DPR RI menugaskan Sub Komisi Pertanian dan Panitia Anggaran Komisi III DPR RI bersama Departemen Pertanian untuk dilakukan koordinasi secara maksimal untuk mensinkronkan program tersebut dengan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, sehingga optimalisasi anggaran pembangunan untuk irigasi dapat dicapai.
4. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian sependapat untuk mengusulkan kepada Pemerintah agar diberikan subsidi terhadap pupuk sebesar Rp 1,2 s.d Rp 1,5 triliun. Dengan adanya subsidi tersebut, Komisi III DPR RI meminta agar harga pupuk urea bisa menjadi Rp 1000/kg, SP 36 menjadi Rp 1.500/kg dan NPK menjadi Rp 1.750/kg dan pupuk ZA di tingkat petani.
5. Komisi III DPR RI sependapat dengan Menteri Pertanian bahwa dalam jangka pendek Program Peningkatan Ketahanan Pangan tetap difokuskan kepada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai melalui peningkatan produktivitas di sentra-sentra produksi. Di samping itu, Komisi III DPR RI mendorong agar industri pengolahan di sentra-sentra produksi harus terus ditingkatkan dan juga dalam APBN TA. 2003.
6. Komisi III DPR RI sependapat dengan Menteri Pertanian untuk segera menaikkan harga dasar pembelian oleh Pemerintah yang diusulkan naik, untuk Gabah Kering Panen (GKP) dari Rp 1.095/kg menjadi Rp 1.260/kg dan Gabah Kering Giling (GKG) dari Rp 1.500/kg menjadi Rp 1.744/kg, atau setara beras dari Rp 2.470/kg menjadi Rp 2.480/kg. Komisi III DPR RI menyetujui dan mendukung agar Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang akan berakhir Desember 2003 untuk dapat diperpanjang dalam kerangka membangun Kemandirian dan Ketahanan Pangan Nasional dan berdampak signifikan di dalam membantu permodalan petani.
7. Komisi III DPR RI berpendapat bahwa pembangunan Sub Sektor Peternakan merupakan bagian integral di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani yang sebagian besar memiliki lahan pertanian yang sempit. Untuk itu pembangunan Sub Sektor Peternakan haruslah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha dan upaya kita di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.
8. Komisi III DPR RI berpendapat bahwa bidang perkebunan merupakan bidang yang penting sebagai pencipta lapangan kerja, penghasil devisa, serta merupakan *prime mover* pada saat krisis moneter dan ekonomi. Sangat disayangkan petani perkebunan kita kurang mendapat bimbingan yang intensif dan bantuan modal, yang tercermin pada produktivitas rendah, kualitas rendah, biaya produksi tinggi dan harga jual yang rendah. Komisi III DPR RI mendesak kepada Pemerintah agar petani pekebun kita dibina dan difasilitasi dengan baik, baik petani karet, petani kopi, petani tebu, petani kelapa, petani lada dan petani-petani lainnya dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.



9. Komisi III DPR RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2001-2002 dan sejumlah masukan lainnya yang disampaikan secara lisan oleh Anggota Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja hari ini dapat ditindaklanjuti, dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu, agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR RI.

Jakarta, 12 September 2002

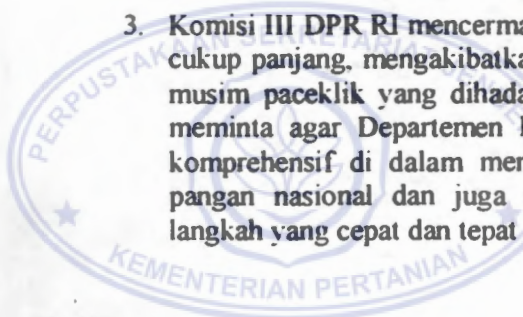




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : KAMIS, 27 FEBRUARI 2003

1. Komisi III DPR RI mencermati data dari Biro Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sektor pertanian (pertanian, kehutanan, dan perikanan) yang tumbuh sebesar 3,77%, dimana pertumbuhan ini di atas *Product Domestic Bruto (PDB)* nasional yang hanya sebesar 3,66%. Komisi III DPR RI juga mencermati terhadap kesejahteraan petani melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada tahun 2002 umumnya lebih baik dibandingkan tahun 2001, dimana terjadi peningkatan secara signifikan NTP di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian sependapat bahwa sektor pertanian telah pulih dari krisis lebih cepat dibanding sektor ekonomi lainnya, untuk itu perlu ditingkatkan terus agar sektor pertanian dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional.
2. Komisi DPR RI menghargai terhadap langkah cepat yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian dalam melakukan penyesuaian dalam hal pembagian peta kewenangan antara pusat, propinsi, dan kabupaten dalam pelaksanaan otonomi daerah. Begitu juga dalam penyusunan rancangan pembangunan, kegiatan pembangunan pertanian disusun dari daerah secara berjenjang dari kabupaten ke propinsi dan dibahas dalam tingkat regional. Komisi III DPR RI berpendapat bahwa kecepatan di dalam mengantisipasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan juga mekanisme penyusunan rencana pembangunan yang dimulai dari bawah, memberikan hasil yang positif dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian.
3. Komisi III DPR RI mencermati terhadap musim kering dan musim hujan yang cukup panjang, mengakibatkan mundurnya waktu tanam dan juga panjangnya musim paceklik yang dihadapi para petani. Untuk itu, Komisi III DPR RI meminta agar Departemen Pertanian melakukan kajian secara cermat dan komprehensif di dalam menghadapi keadaan tersebut, terhadap ketahanan pangan nasional dan juga dampak terhadap petani, agar segera diambil langkah yang cepat dan tepat di dalam menolong petani kita.



4. Ketersediaan pembiayaan (modal) bagi petani dan pelaku agribisnis lainnya merupakan salah satu akselerator dari keberhasilan pengembangan sistem dan usaha agribisnis di Indonesia. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI mendukung usulan pemerintah untuk mengembangkan Skim Kredit Agribisnis dengan suku bunga disubsidi sebesar 5%. Komisi III DPR RI juga mendukung usulan pemerintah agar dana untuk Skim Kredit Agribisnis sebesar Rp. 12.4 trilyun dapat diambil dari dana UKM yang telah disediakan oleh perbankan sebesar Rp. 40 trilyun.
5. Komisi III DPR RI menghargai terhadap upaya yang dilakukan oleh Departemen Pertanian dalam menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Departemen Pertanian, dimana telah dicapai adanya peningkatan dalam pengelolaan keuangan secara baik. Komisi III DPR RI berpendapat bahwa perlu dilanjutkan mekanisme pembahasan temuan BPK antara Departemen Pertanian dengan Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR untuk melakukan klarifikasi terhadap temuan BPK tersebut, sehingga diharapkan sistem pengelolaan keuangan di Departemen Pertanian akan terus bertambah baik.
6. Komisi III DPR RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR RI dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2002-2003 dan sejumlah masukan lainnya yang disampaikan secara lisan oleh Anggota Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja hari ini dapat ditindaklanjuti, dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu, agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR RI.

Jakarta, 27 Pebruari 2003

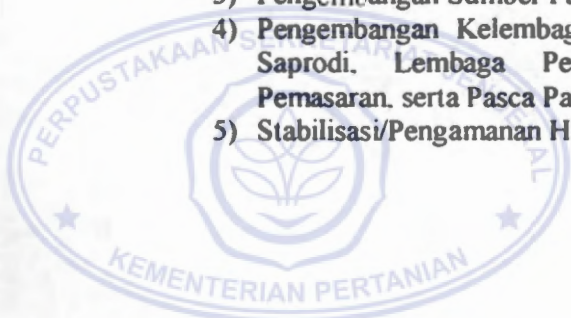




**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : SENIN, 26 MEI 2003**

- I. Komisi III DPR RI dapat menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai target laju pertumbuhan Sektor Pertanian tahun 2004 sebesar 2,0 persen di mana sumber pertumbuhan diharapkan berasal dari Sub Sektor Peternakan, Perkebunan, Hortikultura, dan Tanaman Pangan dengan fokus kegiatan pembangunan pertanian tahun 2004 adalah :
 - a. Program Pengembangan Agribisnis, dengan fokus kegiatan :
 - 1) Pemanjapan Pengembangan Kawasan Agribisnis Komoditas Komersial Non Beras (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan).
 - 2) Peningkatan Akses terhadap Sumberdaya Lahan dan Air, Permodalan, Sarana dan Prasarana, Teknologi, Pasar, serta Pelayanan Agribisnis.
 - 3) Peningkatan Produksi melalui Peningkatan Produktivitas dan Perluasan Areal.
 - 4) Peningkatan Daya Saing Agribisnis Nasional.
 - 5) Pertumbuhan Agroindustri Pedesaan.
 - b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan fokus kegiatan :
 - 1) Peningkatan Mutu Intensifikasi pada Lahan-lahan Andalan Produksi Pangan.
 - 2) Optimalisasi Pendayagunaan Lahan Kering, Tadah Hujan, Lebak, dan Pasang Surut.
 - 3) Pengembangan Sumber Pangan Alternatif.
 - 4) Pengembangan Kelembagaan Layanan Produksi, Lembaga Layanan Saprodi, Lembaga Permodalan, Perlindungan Tanaman dan Pemasaran, serta Pasca Panen.
 - 5) Stabilisasi/Pengamanan Harga Pangan.



- c. Program Khusus Penanggulangan Kemiskinan, dengan fokus kegiatan :
- 1) Perluasan dan Pengembangan Kredit Mikro bagi Petani Kecil.
 - 2) Program Khusus Daerah Rawan Konflik, daerah Bencana Alam, dan Endemis Rawan Penyakit.

Untuk itu, Komisi III DPR RI siap melakukan pembahasan terhadap rencana usulan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin Departemen Pertanian tahun 2004 sebesar Rp. 5.12 trilyun, yang terdiri dari :

- a. Anggaran Pembangunan Pertanian sebesar Rp. 4.50 triliun, meliputi :
- 1) Program Pembangunan Agribisnis sebesar Rp. 2,58 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 1,84 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,74 triliun.
 - 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 1,92 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 1,81 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,11 triliun.
- b. Anggaran Rutin Pertanian sebesar Rp. 621,72 miliar, meliputi :
- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 367,06 miliar.
 - 2) Belanja Barang sebesar Rp. 166,69 miliar.
 - 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 52,06 miliar.
 - 4) Belanja Perjalanan sebesar Rp. 35,90 miliar.

Begitu juga terhadap rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Departemen Pertanian tahun 2004 sebesar Rp. 47,3 miliar.

2. Komisi III DPR RI menyampaikan penghargaan atas perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian pada tahun 2002. Namun demikian, Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian sependapat bahwa perkembangan tersebut belum maksimal sebagaimana yang diharapkan bersama. Untuk itu, Komisi III DPR RI menyarankan agar dilakukan kajian yang tajam dan mendalam menyangkut postur, struktur anggaran, dan bentuk koordinasi yang berjalan di lingkup Departemen Pertanian yang diharapkan dapat saling menunjang, mendukung, dan bukan saling mengeliminasi.
3. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian sependapat bahwa untuk mempertahankan produksi pangan pada tahun 2004 masih tetap dibutuhkan subsidi pupuk, subsidi benih, serta subsidi bunga untuk kredit agribisnis dan ketahanan pangan. Khusus untuk subsidi pupuk, Komisi III DPR RI meminta untuk dilakukan evaluasi kembali. Selain itu, Komisi III DPR RI mendukung dan akan memperjuangkan untuk terwujudnya anggaran bagi irigasi dan jalan usaha tani serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.



4. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian sependapat dalam menyikapi terhadap daerah-daerah konflik seperti NAD, Maluku, Papua, Poso, Sampit, dan lain-lain. Untuk itu, dapat dirancang program-program khusus pembangunan pertanian untuk merehabilitasi dan memulihkan keadaan ekonomi dan sosial sebagai dampak dari konflik tersebut. Komisi III DPR RI mengusulkan untuk dibentuk tim antara Komisi III DPR RI dengan Departemen Pertanian dalam merancang kegiatan khusus tersebut.
5. Komisi III DPR RI menghargai terhadap upaya yang dilakukan oleh Departemen Pertanian dalam menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Departemen Pertanian, dimana telah dicapai adanya peningkatan dalam pengelolaan keuangan secara baik. Komisi III DPR RI berpendapat bahwa perlu dilanjutkan mekanisme pembahasan temuan BPK antara Departemen Pertanian dengan Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR untuk melakukan klarifikasi terhadap temuan BPK tersebut, sehingga diharapkan sistem pengelolaan keuangan di Departemen Pertanian akan terus bertambah baik.
6. Komisi III DPR RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2002-2003 baik secara kelompok maupun perorangan yang merupakan aspirasi dari daerah, baik dalam alokasi anggaran pembangunan maupun anggaran rutin dan sejumlah masukan lainnya yang disampaikan secara lisan oleh Anggota Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja hari ini dapat ditindaklanjuti secara proporsional, dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu, agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR RI.

Jakarta, 26 Mei 2003

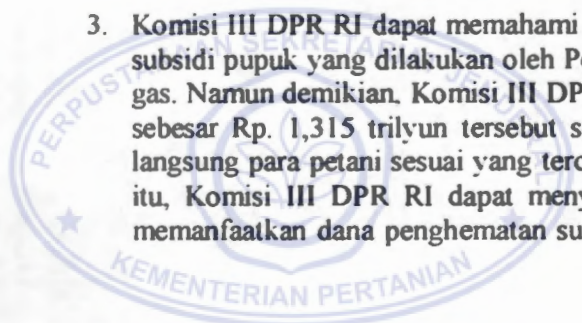




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : SENIN, 8 SEPTEMBER 2003

1. Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk sektor pertanian pada APBN Tahun 2004 sebesar Rp. 2,84 trilyun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 2,20 trilyun serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), untuk itu Komisi III DPR-RI siap melakukan pembahasan. Mencermati terhadap penurunan anggaran tahun 2004 untuk sektor pertanian $\pm 7,2$ % dari anggaran tahun 2003, Komisi III DPR RI memahami terhadap kondisi keuangan negara yang memprihatinkan. Namun demikian, Komisi III DPR RI berpendapat bahwa sektor pertanian adalah sektor andalan yang pada saat ini mampu menyerap tenaga kerja yang begitu banyak, khususnya pada masa krisis ekonomi yang belum dapat kita lalui. Untuk itu perlu dipertimbangkan agar anggaran APBN Tahun 2004 tidak menurun, minimal sama dengan anggaran tahun 2003. Komisi III DPR RI menugaskan kepada Panitia Anggaran Komisi III DPR RI agar dapat memperjuangkannya.
2. Komisi III DPR RI berpendapat bahwa Sektor Pertanian masih mempunyai peluang yang besar dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian yaitu dengan jalan menyinergikan pemanfaatan anggaran APBN yang dialokasikan di beberapa departemen terkait yaitu :
 - a. Dana Pengelolaan Air dan Pengembangan Sumber-sumber Air sebesar Rp. 4,87 trilyun oleh Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
 - b. Pengembangan Prasarana Jalan Rp. 5,11 trilyun oleh Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Untuk itu, Panitia Anggaran Komisi III DPR-RI akan melakukan koordinasi di dalam kerangka membangun sinergitas tersebut.
3. Komisi III DPR RI dapat memahami terhadap perubahan mekanisme pelaksanaan subsidi pupuk yang dilakukan oleh Pemerintah dari subsidi harga menjadi subsidi gas. Namun demikian, Komisi III DPR RI berpendapat bahwa dana subsidi pupuk sebesar Rp. 1,315 trilyun tersebut seluruhnya telah dirancang untuk membantu langsung para petani sesuai yang tercantun dalam Undang-Undang APBN. Untuk itu, Komisi III DPR RI dapat menyetujui usulan Departemen Pertanian untuk memanfaatkan dana penghematan subsidi pupuk sebesar Rp. 417 milyar melalui



Pola Kemitraan Penggunaan Pupuk Majemuk pada usaha tani padi dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional.

4. Mencermati kondisi pada proyek-proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang menyangkut sarana dan prasarana yang ada di lingkungan proyek tersebut dalam keadaan yang sangat memprihatinkan yang mengakibatkan keterlambatan angkutan produksi petani plasma ke pabrik yang menyebabkan penurunan kualitas produksi, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan petani plasma. Pada saat ini terdapat ± 878.000 Ha yang melibatkan ± 440.000 Kepala Keluarga (KK) pada proyek plasma sub sektor perkebunan. Untuk itu, Komisi III DPR RI meminta agar masalah sarana dan prasarana ini dapat menjadi prioritas untuk mendapat perhatian serius.
5. Komisi III DPR RI mendukung disediakannya dana talangan untuk membeli gabah petani, agar harga gabah tidak jatuh. Dana pengembalian dari petani agar dapat digunakan kembali oleh Departemen Pertanian, sehingga secara kumulatif program ini bertambah besar/tidak disetorkan ke Kas Negara dan dapat menyerap lebih besar produksi padi petani.
6. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian sependapat untuk menyiapkan langkah-langkah strategis baik dalam menghadapi masuknya komoditas-komoditas strategis dari luar ke dalam negeri dan juga langkah-langkah strategis di dalam menyiapkan komoditas-komoditas unggulan yang dapat diekspor. Untuk itu, berbagai instrumen yang dimiliki oleh Pemerintah perlu dikoordinasikan secara maksimal untuk memproteksi petani kita sekaligus mempromosikan komoditas unggulan yang dimiliki oleh petani kita.
7. Komisi III DPR RI mengharakan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2002-2003 baik secara berkelompok maupun perseorangan yang merupakan aspirasi dari daerah, baik dalam alokasi anggaran pembangunan maupun anggaran rutin dan sejumlah masukan lainnya yang disampaikan secara lisan oleh Anggota Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja hari ini dapat ditindaklanjuti secara proporsional, dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu, agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR RI.

Jakarta 8 September 2003





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 NOPEMBER 2003**

Komisi III DPR RI dalam kunjungan lapangan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung dan Pasar Senen Jakarta, menilai bahwa ketersediaan daging sapi dan daging ayam untuk menghadapi hari-hari besar keagamaan (Hari Raya Idul Fitri 1424 H, Natal, serta sampai dengan Hari Raya Idul Adha 1424 H) cukup, dengan harga yang relatif stabil. Begitu pula dengan kebutuhan bahan pangan pokok lainnya.

Jakarta, 17 Nopember 2003





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : KAMIS, 29 JANUARI 2004**

1. Komisi III DPR-RI dapat menerima penjelasan Menteri Pertanian RI yang disampaikan secara terbuka dan apa adanya. Untuk itu, Komisi III DPR-RI meminta agar gambaran mikro terhadap wabah Avian Influenza (AI) dapat dilakukan secara mendetail dan terinci, sehingga tidak terjadi diagnosis yang keliru terhadap situasi sebenarnya dan dapat dilakukan terapi/ langkah yang tepat. Untuk itu, Komisi III DPR-RI menyarankan agar pemberantasan wabah AI perlu mendapatkan penanganan yang serius dan bahu membahu antar berbagai Departemen serta pihak pengusaha dan peternak. Disamping itu, Komisi III DPR-RI dan Menteri Pertanian RI sependapat bahwa wabah AI merupakan bencana yang berada pada status darurat.
2. Komisi III DPR-RI dapat menyetujui untuk dapat dialokasikan anggaran untuk penanggulangan wabah AI yang dapat digunakan dari mata anggaran Dana Tanggap Darurat sebesar Rp. 212 milyar yang masih akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut antara Panitia Anggaran Komisi III DPR-RI dan Sub Komisi Pertanian Komisi III DPR-RI dengan Departemen Pertanian RI.
3. Komisi III DPR-RI meminta kepada pemerintah agar terhadap peternak rakyat yang ternaknya terkena wabah AI sehingga mengakibatkan kehancuran usahanya, agar diupayakan memperoleh bantuan untuk melanjutkan usahanya kembali.

Jakarta, 29 Januari 2004





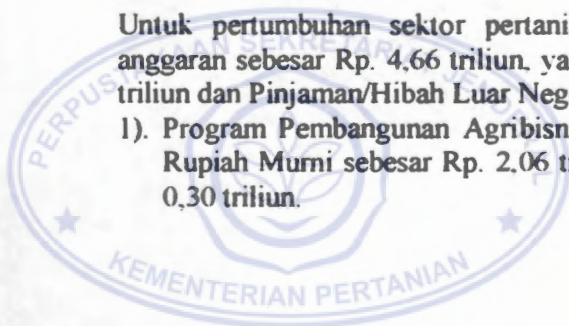
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : RABU, 18 FEBRUARI 2004**

1. Komisi III DPR-RI menghargai atas penyampaian evaluasi kinerja oleh Menteri Pertanian RI secara terbuka dan transparan baik terhadap keberhasilan pelaksanaan program maupun kekurangan dan kegagalan yang ada, sehingga dengan demikian dapat diketahui secara faktual faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan juga faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Komisi III DPR-RI sependapat dengan Menteri Pertanian RI bahwa proses pencapaian output menjadi sangat penting dalam evaluasi kinerja ini karena merupakan suatu sistem kerja yang membutuhkan keberhasilan dan menjadi proses belajar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berikutnya. Secara umum, Komisi III DPR-RI dapat memahami terhadap evaluasi kinerja Departemen Pertanian RI selama tiga tahun dan menyampaikan penghargaan terhadap keberhasilan yang telah dicapai. Namun demikian, Komisi III DPR-RI meminta agar koordinasi dan manajemen di dalam maupun dengan daerah perlu terus dioptimalkan.
2. Pembangunan pertanian tahun 2005 masih menjadi prioritas utama terhadap pemenuhan kebutuhan pangan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dengan prioritas pada produksi domestik melalui :
 - a. Peningkatan mutu intensifikasi pada lahan andalan.
 - b. Optimalisasi lahan kering, tadah hujan, lebak, dan pasang surut.
 - c. Peningkatan produktivitas padi melalui introduksi varietas unggul type Fatmawati dan varietas unggul lainnya seluas 1 juta ha.
 - d. Pengembangan sumber pangan alternatif.

Untuk pertumbuhan sektor pertanian tahun 2005 sebesar 2,5%, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 4,66 triliun, yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 3,9 triliun dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebesar Rp. 0,76 triliun dengan rincian,

- 1). Program Pembangunan Agribisnis sebesar Rp. 2,36 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 2,06 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,30 triliun.



- 2). Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 2,30 triliun yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 1,84 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,46 triliun.
- 3). Anggaran Rutin sebesar Rp. 679 triliun.
- 4). Subsidi pupuk sebesar Rp.1,5 triliun, subsidi benih padi dan kedelai sebesar Rp.100 miliar, kredit agribisnis sebesar Rp.12,4 triliun dan Kredit Pangan dengan plafon sebesar Rp.2,08 triliun.

Untuk itu, Komisi III DPR-RI akan mencermati, mendalami dan menganalisis secara komprehensif terhadap usulan RAPBN tahun 2005.

3. Komisi III DPR-RI mencermati terhadap institusi penyuluh dan organisasi petani perlu kiranya mendapat perhatian serius. Dari pengamatan dilapangan terlihat bahwa para penyuluh saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Untuk itu, perlu dicari jalan keluar untuk kembali memperkuat penyuluh baik kelembagaan juga sumber daya yang dimiliki. Demikian juga kelembagaan petani perlu kita lakukan pembenahan dalam rangka memperkuat kelembagaan petani. Untuk itu, Komisi III DPR RI meminta agar program latihan Penyuluh Swakarsa dan swasta yang pada saat ini mulai dilaksanakan, perlu diperluas dan diperbesar dalam rangka membentuk Penyuluh Pertanian yang kuat dan tangguh dengan melibatkan kelompok tani andalan. Juga perlu dipikirkan sebuah kelembagaan yang diperlukan bagi Penyuluh Pertanian kedepan.
4. Komisi III DPR RI dan Menteri Pertanian RI sepakat untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan peraturan pemerintah sebagai implementasi dari Undang-undang tentang Sumber Daya Air (UU SDA) khususnya pasal 41 ayat (3) tentang irigasi tersier.
5. Komisi III DPR RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil Kunjungan Kerja para Anggota Komisi III DPR RI dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2003-2004 baik secara berkelompok maupun perseorangan yang merupakan aspirasi dari daerah, baik dalam alokasi anggaran pembangunan maupun anggaran rutin dan sejumlah masukan lainnya yang disampaikan secara lisan oleh anggota Komisi III DPR RI dalam rapat Kerja hari ini dapat ditindaklanjuti secara proposional dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah-masalah tertentu, agar dapat diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR RI.

Jakarta, 18 Februari 2004





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : SENIN, 10 MEI 2004

-
1. Dalam usaha pencapaian sasaran pembangunan pertanian pada tahun 2005 akan dilaksanakan melalui tujuh program dari tiga program pokok, yaitu,
 - a. Pengembangan agribisnis;
 - b. Peningkatan ketahanan pangan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat pertanian;dan empat program penunjang yaitu :
 - a. Pendidikan kedinasan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
 - c. Penyelenggaraan pimpinan departemen;
 - d. Peningkatan pengawasan aparatur negara.

Tujuh program pembangunan tersebut telah disusun bersama Bappenas dengan telah ditetapkannya usulan RAPBN sektor pertanian tahun 2005 untuk Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 4,579 trilyun dengan rincian :

- a. Program pengembangan agribisnis 1,70 trilyun
- b. Program peningkatan ketahanan pangan 2,50 trilyun
- c. Program pemberdayaan masyarakat pertanian 500 milyar
- d. Program pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara 12,5 milyar
- e. Program pendidikan kedinasan, program pendidikan dan pelatihan aparatur negara dan penyelenggaraan pimpinan departemen 266,5 milyar.

Untuk itu Komisi III DPR-RI akan mencermati, mendalami dan menganalisa secara menyeluruh berdasarkan azas pembangunan yang berkelanjutan terhadap RAPBN tahun 2005 dan siap untuk melakukan pembahasan.

2. Dari pengamatan yang dilakukan Komisi III DPR-RI terhadap pelaksanaan program pupuk bersubsidi bagi petani, terdapat permasalahan yang harus dicermati secara mendasar. Untuk itu Komisi III DPR RI sependapat dengan Menteri Pertanian untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi bersama Tim Kelompok Kerja

Pengkajian Subsidi Pupuk untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sampai saat ini.

3. Komisi III DPR-RI berkeyakinan bahwa pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh masyarakat tani. Oleh karena itu upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan petani yang dilaksanakan oleh para penyuluh pertanian perlu ditingkatkan. Untuk itu, sarana dan prasarana penyuluh pertanian, biaya operasional, penyuluh pertanian dan insentif kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) harus ditingkatkan.
4. Untuk pembangunan pertanian berkelanjutan memerlukan reformasi di bidang pertanian terutama yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Untuk itu, diperlukan pembahasan mengenai visi pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis dan agroindustri dengan instansi terkait.
5. Komisi III DPR RI menghargai terhadap upaya yang dilakukan Departemen Pertanian dalam menyingkapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Departemen Pertanian dimana telah tercapai adanya peningkatan dalam pengelolaan keuangan secara baik. Komisi III DPR RI berpendapat bahwa perlu dilanjutkan mekanisme pembahasan temuan BPK antara Departemen Pertanian dengan Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR untuk melakukan klarifikasi pada temuan BPK tersebut, sehingga diharapkan sistem pengelolaan keuangan di Departemen Pertanian bertambah baik.
6. Komisi III DPR RI mengharapkan agar berbagai temuan hasil kunjungan kerja para anggota Komisi III DPR RI pada Reses Masa Persidangan III tahun sidang 2003 - 2004 baik secara berkelompok maupun perseorangan yang merupakan aspirasi dari daerah baik dalam alokasi anggaran pembangunan dan anggaran rutin dan sejumlah masukan lainnya yang disampaikan secara lisan oleh anggota Komisi III DPR-RI dalam rapat kerja hari ini, dapat ditindak lanjuti secara proporsional dan apabila terdapat perkembangan penyelesaian masalah tertentu agar secepatnya diinformasikan lebih lanjut kepada Komisi III DPR-RI.

Jakarta, 10 Mei 2004



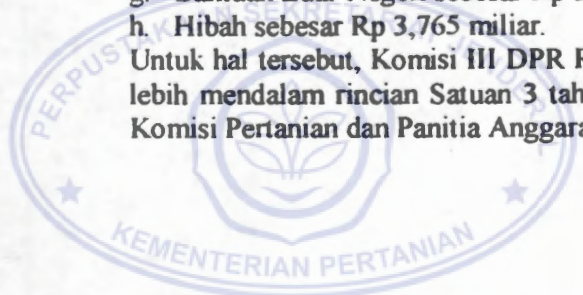


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI
HARI/TANGGAL : SENIN, 12 JULI 2004

1. Komisi III DPR RI memahami sepenuhnya terhadap rencana program pembangunan di sektor pertanian yang terdiri dari tiga program utama pembangunan yaitu Program Pengembangan Agribisnis, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian serta empat program penunjang yaitu Program Pendidikan Kedinasan, Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara, Program Penyelenggaraan Pimpinan Departemen, serta Program Peningkatan dan Akuntabilitas Negara. Namun, berdasarkan format baru RAPBN 2005 kaitannya dengan rencana kerja pemerintah yang telah disepakati antara DPR dan Pemerintah melalui pembahasan APBN 2004 di mana sektor pertanian hanya ditetapkan dua program pembangunan yaitu Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Untuk hal tersebut, Komisi III DPR RI menyarankan agar dilakukan penyesuaian program pembangunan pertanian terhadap kedua program tersebut.

2. Komisi III DPR RI menyetujui bahwa pagu anggaran sektor pertanian yang ditetapkan oleh Panitia Anggaran DPR RI adalah :
 - a. Anggaran Dekonsentrasi sebesar Rp 2,515 triliun;
 - b. Anggaran Alokasi Khusus sebesar Rp 150 miliar;
 - c. Anggaran Subsidi Bunga KKP sebesar Rp 127 miliar;
 - d. Anggaran Belanja Pegawai dan Non Pegawai sebesar Rp 568,5 miliar;
 - e. Anggaran Subsidi Pupuk dan Transportasi sebesar Rp 1,75 triliun;
 - f. Subsidi Benih sebesar Rp 120 miliar;
 - g. Bantuan Luar Negeri sebesar Rp 592 miliar; dan
 - h. Hibah sebesar Rp 3,765 miliar.Untuk hal tersebut, Komisi III DPR RI mengharapkan agar dapat segera dibahas lebih mendalam rincian Satuan 3 tahun 2005 Departemen Pertanian dengan Sub Komisi Pertanian dan Panitia Anggaran Komisi III DPR RI.



3. Komisi III DPR RI mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan terjadinya kegiatan penyelundupan di bidang komoditas pertanian seperti gula, beras, dan daging yang merugikan upaya Indonesia dalam meningkatkan produksi di bidang komoditas pertanian unggulan domestik. Untuk itu, semua instrumen yang bertugas mencegah terjadinya penyelundupan seperti Badan Karantina dapat diberikan dukungan anggaran yang memadai.

Jakarta, 12 Juli 2004

